GEMAH RIPAH LOH JINAWI

LPPD

KOTA CIREBON

2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/209/IJ tanggal 20 Januari 2022 tentang Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Ini.

Cirebon, 27 Maret 2024

INSPEKTUR

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
INSPEKTORAT DAERAH

Drs. ASEP GINA MUHARAM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 199006 1 001

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk Tahun 2022, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta muatan akuntabilitas kinerja yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NOmor 53 Tahun 2014 Tentang . Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam penyusunan laporan ini meliputi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta akuntabilias kinerja, laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi mandiri

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi Pemerintah

Daerah dalam melakukan evaluasi mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu pula, LPPD sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari kendala, hambatan maupun tantangan, namun demikian dengan semangat dan tekad untuk bersinergi dalam menggerakkan segala kemampuan dan potensi daerah serta inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dari segi kualitas dan kuantitas semakin baik dan meningkat setiap tahunnya serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Cirebon, 21 Maret 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON

Drs. AGUS MULYADI, MSi

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Bab I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.1.1 Penjelasan Umum 1
a. Undang – Undang Pembentukan Daerah 1
b.. Data Geografis Wilayah 4
c.. Jumlah Penduduk 12
d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan 13
e. Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah 15
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 19
1.1.2 Perencanaan Pembanguanan Daerah 21
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah 21
b. Visi dan Misi Kepala Daerah 34
c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah 37
d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaa tahunan 44
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 62
Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 95
2.1 Capaian Kinerja Makro 95
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 95
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 96
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil 108
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 152
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 158
2.3.1. Rencana Aksi Tindak Lanjut Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 160

2.3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian
Kinerja Tahun 2023 ……...165

2.3.3. Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi Pencapaian Kinerja
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target, Perbandingan realisasi kinerja dengan target beberapa tahun lalu, Perbandingan dengan target realisasi tahun ini dengan target jangka menengah RPJMD, Perbandingan target tahun ini dengan standar nasional (jika ada), Analisis penyebab keberhasila/kegagalan (kendala) serta alternative solusi , Analisis Program/Kegiatan yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, Analisis atas efektifitas dan efesiensi penggunaan sumber daya) ……173

2.3.4. Akuntabilitas Keuangan
(Analisis atas efektifitas dan efesiensi penggunaan sumber daya)…….361

2.3.5. Inovasi dan Prestasi Kinerja 367

Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan..... 368

1. Dasar Hukum Tugas Pembantuan 379
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan 380
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 380

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah 381
3.1.1 Target Kinerja..... 381
3.1.2 Realisasi..... 382
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah..... 381
3.2.1 Target Kinerja..... 381
3.2.2 Realisasi..... 382
3.3 Permasalahan dan kendala..... 382
3.4 Saran dan tindak lanjut..... 382

Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 383

4.1 Urusan Pendidikan..... 383
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar..... 383
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 288
4.1.3 Realisasi 289
4.1.4 Alokasi Anggaran..... 289
4.1.5 Dukungan Personil. 304
4.1.6 Permaslahan dan Solusi..... 305
4.2 Urusan Kesehatan 400
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar..... 305

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 401
4.2.3 Realisasi 401
4.2.4 Alokasi Anggaran..... 403
4.2.5 Dukungan Personil 405
4.2.6 Permaslahan dan Solusi..... 405
4.3 Urusan Pekerjaan Umum 406
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar..... 406
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 406
4.3.3 Realisasi 406
4.3.4 Alokasi Anggaran..... 407
4.3.5 Dukungan Personil 407
4.3.6 Permasalahan dan Solusi..... 407
4.4 Urusan Perumahan Rakyat 408
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar..... 409
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 409
4.4.3 Realisasi 410
4.4.4 Alokasi Anggaran..... 410
4.4.5 Dukungan Personil. 411
4.4.6 Permaslahan dan Solusi..... 411
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... 411
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar..... 411
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 412
4.5.3 Realisasi 414
4.5.4 Alokasi Anggaran..... 414
4.5.5 Dukungan Personil 424
4.5.6 Permaslahan dan Solusi..... 426
4.6 Urusan Sosial..... 426
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar..... 426
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 426
4.6.3 Realisasi 427

4.6.4 Alokasi Anggaran 427
4.6.5 Dukungan Personil 430
4.6.6 Permaslahan dan Solusi 430
4.7 Program dan Kegiatan 430
Bab V Penutup 440

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang - Undang Pembentukan Daerah

Kota Cirebon disahkan menjadi Gemeente Cheirebon berdasarkan Stlb 1906 No. 122 dan Stlb. 1926 No. 370. Tahun 1942 Kota Cirebon diperluas menjadi 2.450 hektar dan pada tahun 1957 status pemerintahannya ditingkatkan menjadi Kota Praja. Kota Cirebon sendiri ditetapkan menjadi daerah Kotamadya berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 551). Selanjutnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Cirebon berpedoman pada dasar hukum dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5042);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan danpengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evalausi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8638 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Cirebon tanggal 03 Desember 2018;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8649 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Cirebon tanggal 03 Desember 2018;
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 53);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023.

b. Data Geografis Wilayah

Kota Cirebon terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada jalur utama lintas pantura. Secara astronomis Kota Cirebon berada pada posisi 6,41o Lintang Selatan dan 108,33o Bujur Timur pada Pantai Utara Pulau Jawa Bagian Barat. Bentuk wilayah Kota Cirebon memanjang dari Barat ke

Timur sekitar 8 kilometer dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5 meter.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Cirebon adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan salah satu pengembangan kawasan metropolitan, serta merupakan bagian dari kawasan andalan yaitu Ciayumajakuning (Cirebon – Indramayu – Majalengka – Kuningan) dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, struktur ruang Kota Cirebon dibagi menjadi 4 (empat) sub wilayah kota sebagai berikut:

1) Sub Wilayah Kota (SWK) I merupakan kawasan dengan fungsi utama pelayanan pelabuhan dan perikanan dengan struktur ruang yang ditetapkan sebagai beikut:
   a) Sub Pusat Pelayanan Kota (S-PPK) yaitu Kawasan Pelabuhan Cirebon yang berada di Kelurahan Panjunan;
   b) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melayani skala lingkungan wilayah kota sebagai fungsi perdagangan dan jasa meliputi Kelurahan Pegambiran, Panjunan, Kebon Baru, Kesenden, dan Lemahwungkuk, sedangkan sebagai fungsi pariwisata dan budaya meliputi Kelurahan Lemahwungkuk dan Kesepuhan.

Gambar I.1

Peta Rencana Pola Ruang SWK I Kota Cirebon

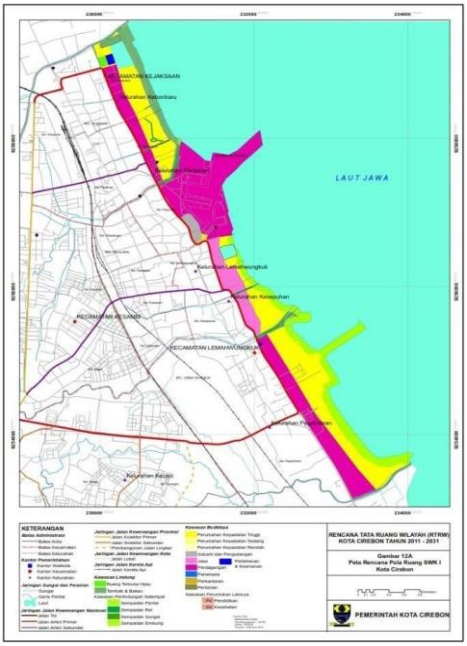

Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031

2) Sub Wilayah Kota (SWK) II dengan prioritas penanganan meliputi:
   a) Kawasan Prioritas Pertumbuhan Ekonomi yaitu Gunung Sari – Cipto Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, Kawasan *Grage Mall* 2 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk;
   b) Kawasan Prioritas Sosial Budaya adalah kawasan Keraton Cirebon yang terletak di Kelurahan Kesepuhan, Lemahwungkuk, dan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk;
   c) Kawasan Prioritas Sarana Umum adalah kawasan sekitar Goa Sunyaragi dengan fungsi pusat pendidikan, olahraga, dan wisata, kawasan sekitar Rumah Sakit Ciremai sebagai fungsi kesehatan dan mitigasi bencana.

Gambar I.2
Peta Rencana Pola Ruang SWK II Kota Cirebon

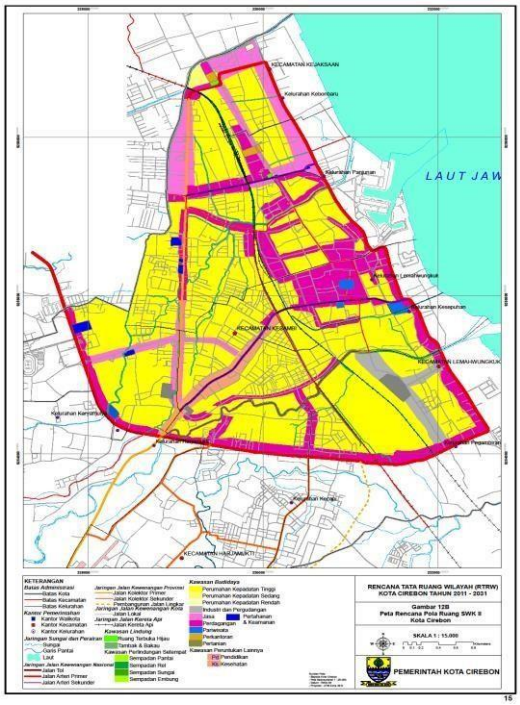

Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon Tahun 2011 - 2031

3) Sub Wilayah Kota (SWK) III merupakan kawasan yang diprioritaskan penanganannya meliputi kawasan strategis Ciremai Raya sebagai fungsi perumahan, kawasan strategis Majasem, Kalijaga, dan Argasunya sebagai fungsi pendidikan.
4) Sub Wilayah Kota (SWK) IV sebagai pelayanan pertanian campuran, pendukung wisata, area pemakaman, agrobisnis, wilayah Kelurahan Argasunya dengan fungsi utama pelayanan pertanian campuran dan fungsi pendukung wisata, pemakaman, agrobisnis, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau dan hankam.

Secara administrasi Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 22 (dua puluh dua) kelurahan, 249 Rukun Warga, dan 1.371 Rukun Tetangga dengan luas wilayah administratif sekitar 39.47 km2 atau sekitar 3.947 hektar dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal/Kabupaten Cirebon

Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga

Sebelah Timur : Laut Jawa

Dilihat dari wilayah administratif pemerintahan, Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan, yaitu:

1) Kecamatan Kejaksan terdiri dari Kelurahan Kejaksan, Kelurahan Kesenden, Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Kebon Baru;
2) Kecamatan Kesambi terdiri dari Kelurahan Kesambi, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Karyamulya dan Kelurahan Drajat;
3) Kecamatan Pekalipan terdiri dari Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Pekalipan, dan Kelurahan Pekalangan;
4) Kecamatan Lemahwungkuk terdiri dari Kelurahan Kesepuhan, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Panjunan, dan Kelurahan Lemawungkuk;
5) Kecamatan Harjamukti terdiri dari Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Kecapi, Kelurahan Larangan, Kelurahan Argasunya, dan Kelurahan Kalijaga.

Gambar I.3
Peta Wilayah Administratif Kota Cirebon

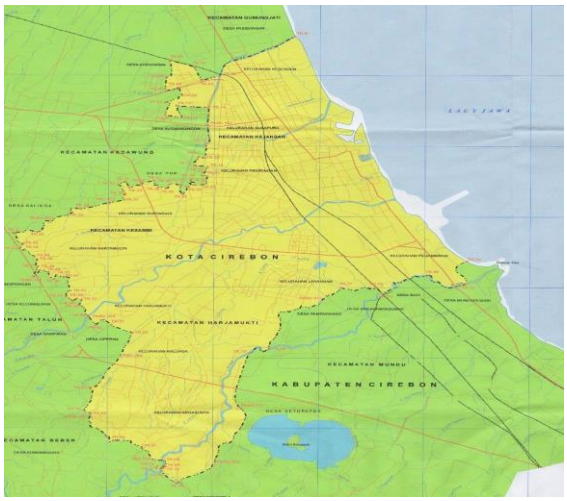

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2018

Tabel I.1
Jumlah RT/RW di Kota Cirebon

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT

1	Harjamukti	1.760,17	5	Argasunya, Kalijaga, Harjamukti, Kecapi, Larangan	77	469
2	Lemahwungkuk	719,09	4	Pegambiran, Kesepuhan, Lemahwungkuk, Panjunan	42	232
3	Pekalipan	158,82	4	Pekalipan, Pulasaren, Jagasatru, Pekalangan	39	186
4	Kesambi	865,29	5	Karyamulya, Sunyaragi, Drajat, Kesambi, Pekiringan	56	313
5	Kejaksan	444,12	4	Kejaksan, Sukapura, Kebonbaru, Kesenden	35	183
JUMLAH		**3.947**		**22**	**249**	**1.385**

Sumber : SK Kemendagri No.100.1.1-6117 Tahun 2022

Dilihat pada tabel diatas, dari 5 kecamatan, 22 kelurahan, 249 RW dan 1.383 RT, Kecamatan Harjamukti merupakan wilayah kecamatan yang paling luas dan kecamatan Pekalipan merupakan wilayah dengan luas paling kecil.

Gambar I.4

Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Cirebon

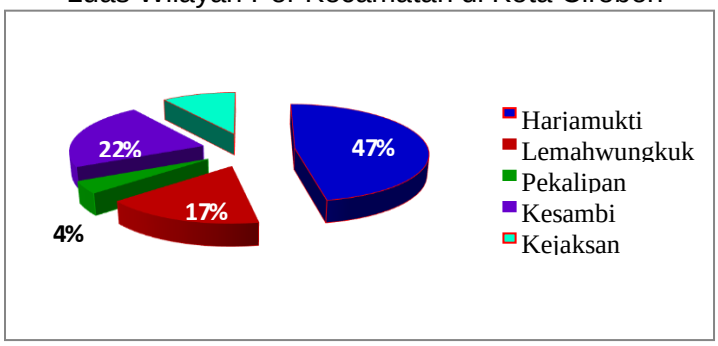

Sumber: BP4D Kota Cirebon

1. **Kondisi Topografi**

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dan sebagian kecil merupakan dataran tinggi yang berada di wilayah selatan kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi kendala tersendiri, karena kecepatan aliran air hujan yang terbuang ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan banjir di beberapa lokasi. Karenanya di beberapa titik dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut. Secara umum kondisi lingkungan di Kota Cirebon dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan yang masih baik yaitu memiliki indikator lingkungan di bawah ambang batas, dan kawasan yang kondisi lingkungannya telah berada di atas ambang batas kualitas lingkungan yang diperkenankan. Kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan di bawah ambang batas tersebar di seluruh wilayah kota, ditandai dengan masih adanya kawasan ruang terbuka hijau seperti di wilayah Argasunya, Harjamukti, wilayah Perumnas, dan lain sebagainya. Namun yang harus menjadi perhatian adalah kawasan-kawasan yang kondisi lingkungannya telah terjadi penurunan kualitas. Kawasan-kawasan tersebut diantaranya adalah kawasan bekas galian C Argasunya, kawasan- kawasan persimpangan jalan yang padat lalulintas yaitu di sekitar area Jl. Siliwangi, Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Jl. Karanggetas, Jl. Pekiringan, Jl. Rajawali, Terminal Bus, dan Jl. Pemuda-By Pass. Selain itu ada beberapa aliran sungai yang memiliki indikator lingkungan yang telah melampaui ambang batas (*Amoniak, Deterjen, dan Pecal Coli*) yaitu diantaranya di sungai Sipadu, Sukalila, Suradinaya, Sigujeg, dan Gang Sontong. Wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0-200 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian mulai dari daerah pantai menuju ke arah Selatan dengan ketinggian maksimal 200 meter, yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Kemiringan lahan di wilayah Kota Cirebon dapat diklasifikasikan berdasarkan persentase kemiringan sebagai berikut:

a. Kemiringan 0-3 % terdapat di sebagian besar wilayah Kota Cirebon, kecuali sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti;

b. Kemiringan 3-8 % terdapat di sebagian besar wilayah Kelurahan Kalijaga, sebagian kecil di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
c. Kemiringan 8-15 % terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti; dan
d. Kemiringan 15-18 % terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.

2. Kondisi Geologi

Kondisi tanah di Kota Cirebon berdasarkan data spasial dikelompokan menjadi dua kelompok besar jenis tanah yang didominasi oleh jenis berupa material *alluvial* endapan *quarter* (Qa) dengan luas wilayah 2.877,76 Ha dan jenis batuan berupa endapan batuan sedimen *pliosen-plistosen* dengan luas total 1.061,24 Ha. Jenis tanah yang terbentuk di Kota Cirebon dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu jenis tanah *alluvial* dengan luas lahan 2.509,27 Ha, tanah *latosol* dengan luas 322,84 Ha dan jenis tanah *grumosol* dengan luas lahan 1.106,91 Ha.

Jenis tanah di Kota Cirebon adalah *tipe argosol* yang berasal dari endapan lava dan *piroklastik* (pasir, lempung, tanah liat, tupa, breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara rinci jenis tanah di Kota Cirebon terdiri atas :

a. Regosol cokelat kelabu, asosiasi regosol kelabu
b. Asosiasi regosol kelabu, regosol cokelat kelabu
c. Asosiasi glei humus rendah/aluvial kelabu
d. Asosiasi regosol kelabu, regosol cokelat kelabu, dan latosol
e. Asosiasi mediteran cokelat dan litosol
f. Latosol cokelat kemerahan

Sementara itu kedalaman efektif tanah di Kota Cirebon terdiri atas 3 macam, yaitu:

a. Kedalaman 0-30 meter : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti;
b. Kedalaman 30-60 meter : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi; dan

c. Kedalaman lebih dari 60 meter : terdapat di seluruh wilayah Kota Cirebon, kecuali di wilayah-wilayah yang telah disebutkan di atas

c. Jumlah Penduduk

Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Semester 2 Tahun 2023 Jumlah Penduduk Kota Cirebon adalah 352.347 Jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 176.706 (seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam) penduduk laki-laki dan 175.641 (seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu) penduduk perempuan yang menempati wilayah Kota Cirebon seluas 39,478 km2, sehingga tingkat kepadatan penduduk di Kota Cirebon adalah sebanyak 8.775 jiwa/km2.

Tabel I.2
Penduduk Kota Cirebon Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2023

NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	KOTA CIREBON	**176.706**	**175.641**	**352.347**
1	**KEJAKSAN**	**25.346**	**25.922**	**51.268**
	KEJAKSAN	4.985	5.178	10.163
	SUKAPURA	8.576	8.608	17.184
	KESENDEN	7.102	7.257	14.359
	KEBONBARU	4.683	4.879	9.562
2	**LEMAHWUNGKUK**	**30.760**	**30.313**	**61.073**
	PEGAMBIRAN	12.357	11.949	24.306
	LEMAHWUNGKUK	4.435	4.466	8.901
	KESEPUHAN	8.754	8.527	17.281
	PANJUNAN	5.214	5.371	10.585
3	**HARJAMUKTI**	**64.809**	**63.778**	**128.587**

	KALIJAGA	19.290	18.745	38.035
	HARJAMUKTI	11.553	11.254	22.807
	KECAPI	12.016	12.314	24.330
	LARANGAN	8.134	8.618	16.752
	ARGASUNYA	13.816	12.847	26.663
4	**PEKALIPAN**	**15.793**	**15.630**	**31.423**
	JAGASATRU	5.435	5.306	10.741
	PEKALIPAN	3.246	3.305	6.551
	PULASAREN	4.052	3.939	7.991
	PEKALANGAN	3.060	3.080	6.140
5	**KESAMBI**	**39.998**	**39.998**	**79.996**
	PEKIRINGAN	6.354	6.618	12.972
	SUNYARAGI	6.528	6.506	13.034
	KESAMBI	4.578	4.677	9.255
	DRAJAT	7.982	7.909	15.891
	KARYAMULYA	14.556	14.288	28.844

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, Kota Cirebon memiliki 5 (lima) Kecamatan dengan 22 (dua puluh dua) kelurahan. Struktur ruang Kota Cirebon dibagi menjadi 4 Sub Wilayah Kota, yaitu :

1) Sub Wilayah Kota (SWK) I meliputi sebagian dari Kelurahan Kesenden, Kebonbaru, Lemahwungkuk dan Pegambiran, dengan fungsi utama pelayanan pelabuhan dan perikanan dan fungsi pendukung, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pendidikan, wisata, perdagangan dan jasa, industri kecil rumah tangga, Ruang Terbuka Hijau dan perumahan;
2) Sub Wilayah Kota (SWK) II meliputi sebagian dari Kelurahan Kesenden, Kebonbaru, Pekiringan, Kesambi, Kesenden, Panjunan, Pekalangan, Jagasatru, Pulasaren, Kesambi, Drajat, Sunyaragi, Pekiringan, Pekalipan,

Lemahwungkuk, Kasepuhan, Pegambiran dan Kecapi, dengan fungsi utama pelayanan perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan, wisata, pendidikan, perkantoran dan ruang terbuka hijau;

3) Sub Wilayah Kota (SWK) III meliputi sebagian dari Kelurahan Sunyaragi, Karyamulya, Harjamukti, Larangan, Kecapi, dan Pegambiran dengan fungsi utama pelayanan perumahan dan fungsi pendukung pemerintahan, perdagangan dan jasa, wisata, pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, fasilitas olah raga dan fasilitas Pendidikan; dan
4) Sub Wilayah Kota (SWK) IV meliputi wilayah Kelurahan Argasunya dengan fungsi utama pelayanan pertanian campuran dan fungsi pendukung wisata, pemakaman, agrobisnis, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau dan hankam.

Secara administrastif Kota Cirebon terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan, yang terbagi menjadi 249 RW dan 1.385 RT.

Tabel I.3

Wilayah Administrasi Kota Cirebon

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Harjamukti	1760,17	5	Argasunya, Kalijaga, Harjamukti, Kecapi, Larangan	77	461
2	Lemahwungkuk	719,09	4	Pegambiran, Kesepuhan, Lemahwungkuk, Panjunan	42	232
3	Pekalipan	158,82	4	Pekalipan, Pulasaren, Jagasatru, Pekalangan	39	186
4	Kesambi	865,29	5	Karyamulya, Sunyaragi, Drajat, Kesambi, Pekiringan	56	309

5	Kejaksan	444,12	4	Kejaksan, Sukapura, Kebonbaru, Kesenden	35	183
JUMLAH		**3.947,49**	**22**		**249**	**1.385**

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon terbagi menjadi :

1. Sekretariat Daerah Tipe B;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B;
3. Inspektorat tipe B;
4. Dinas – Dinas;
   a. Dinas Pendidikan Tipe B;
   b. Dinas Kesehatan Tipe B;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe C;
   d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe C
   e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B:
   f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C;
   g. Dinas Sosial Tipe C;
   h. Dinas Tenaga Kerja Tipe C;
   i. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian,dan Perikanan Tipe A;
   j. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
   k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B;
   l. Dinas Pemberdayaann Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A;
   m. Dinas Perhubungan Tipe B;
   n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A;
   o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A;
   p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;

q. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C;
r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A.

5. Badan Badan :
   a. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A;
   b. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A;
   c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C;
   d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B.
6. Kecamatan – Kecamatan :
   a. Kecamatan Kejaksan Tipe B;
   b. Kecamatan Kesambi Tipe B;
   c. Kecamatan Harjamukti Tipe B;
   d. Kecamatan Lemahwungkuk Tipe B;
   e. Kecamatan Pekalipan Tipe B.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon memiliki PNS sebanyak 4.627 Pegawai terdiri laki – laki berjumlah 1949 pegawai dan perempuan berjumlah 2678 pegawai.

Tabel 1.4

Rincian PNS per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS		
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23	22	45
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18	5	23
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	10	2	12
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50	19	69

5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	22	27	49
6	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	14	13	27
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9	14	23
8	DINAS KESEHATAN	357	926	1283
9	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	24	36	60
10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	34	16	50
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	29	14	43
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	131	28	159
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	54	10	64
14	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	10	5	15
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10	24	34
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	17	10	27
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13	10	23

18	DINAS PENDIDIKAN	651	1288	1939
19	DINAS PERHUBUNGAN	88	12	100
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	16	19	35
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29	13	42
22	DINAS SOSIAL	14	18	32
23	DINAS TENAGA KERJA	16	9	25
24	INSPEKTORAT DAERAH	26	18	44
25	KECAMATAN HARJAMUKTI	41	12	53
26	KECAMATAN KEJAKSAN	19	14	33
27	KECAMATAN KESAMBI	31	21	52
28	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	23	13	36
29	KECAMATAN PEKALIPAN	21	13	34
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	55	6	61
31	SEKRETARIAT DPRD	79	31	110
32	SEKRETARIAT DAERAH	15	10	25
Jumlah Keseluruhan PNS		**1949**	**2678**	**4627**

PEMERINTAH KOTA CIREBON

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN	1.497.346.698.859,00	1.457.191.138.810,00	97,32	1.477.506.731.354,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	544.536.692.936,00	532.649.747.319,00	97,82	540.343.015.082,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	211.337.861.000,00	217.861.895.888,00	103,09	191.999.856.661,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	15.909.860.000,00	11.408.967.314,00	71,71	11.335.203.103,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.055.501.000,00	6.850.064.199,00	85,04	4.860.296.914,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	309.233.470.936,00	296.528.819.918,00	95,89	332.147.658.404,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	950.545.005.923,00	922.411.391.491,00	97,04	935.824.150.272,00
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	805.247.205.812,00	794.770.094.338,00	98,70	789.571.543.248,00
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil	72.153.468.812,00	70.099.657.226,00	97,15	89.561.544.764,00
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	559.232.958.000,00	559.232.958.000,00	100,00	531.584.976.683,00
4.2.01.03	Dana Alokasi Khusus	173.860.779.000,00	165.437.479.112,00	95,16	168.425.021.801,00
4.2.02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	12.674.059.000,00	12.674.059.000,00	100,00	27.043.861.000,00
4.2.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	12.674.059.000,00	12.674.059.000,00	100,00	27.043.861.000,00
4.2.03	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	132.623.741.111,00	114.967.238.153,00	86,69	119.208.746.024,00
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	109.603.966.449,00	102.377.882.941,00	93,41	99.749.759.624,00
4.2.03.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	23.019.774.662,00	12.589.355.212,00	54,69	19.458.986.400,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.265.000.000,00	2.130.000.000,00	94,04	1.339.566.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.265.000.000,00	2.130.000.000,00	94,04	1.339.566.000,00
5	BELANJA	1.583.114.687.564,00	1.444.788.286.021,00	91,26	1.433.814.101.322,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.423.166.807.635,00	1.345.400.892.731,00	94,54	1.279.606.281.288,00
5.1.01	Belanja Pegawai	699.882.757.373,00	666.258.493.164,00	95,20	656.158.815.756,00
5.1.02	Belanja Barang	659.480.704.994,00	617.284.018.127,00	93,60	573.126.767.194,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.469.878.472,00	809.375.001,00	55,06	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.802.799.859,00	1.350.000.000,00	74,88	1.500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	60.173.166.937,00	59.341.506.439,00	98,62	48.820.698.338,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	357.500.000,00	357.500.000,00	100,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	118.096.420.638,00	92.790.771.193,00	78,57	150.426.743.343,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	64.439.248.106,00	53.836.058.442,00	83,55	83.180.133.918,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	34.324.731.744,00	22.024.728.830,00	64,17	48.257.931.967,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.404.606.751,00	12.096.608.000,00	83,98	16.273.304.000,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.906.080.037,00	4.811.753.121,00	98,08	2.715.373.458,00
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	21.754.000,00	21.622.800,00	99,40	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	41.851.459.291,00	6.596.622.097,00	15,76	3.781.076.691,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	41.851.459.291,00	6.596.622.097,00	15,76	3.781.076.691,00

f. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2023

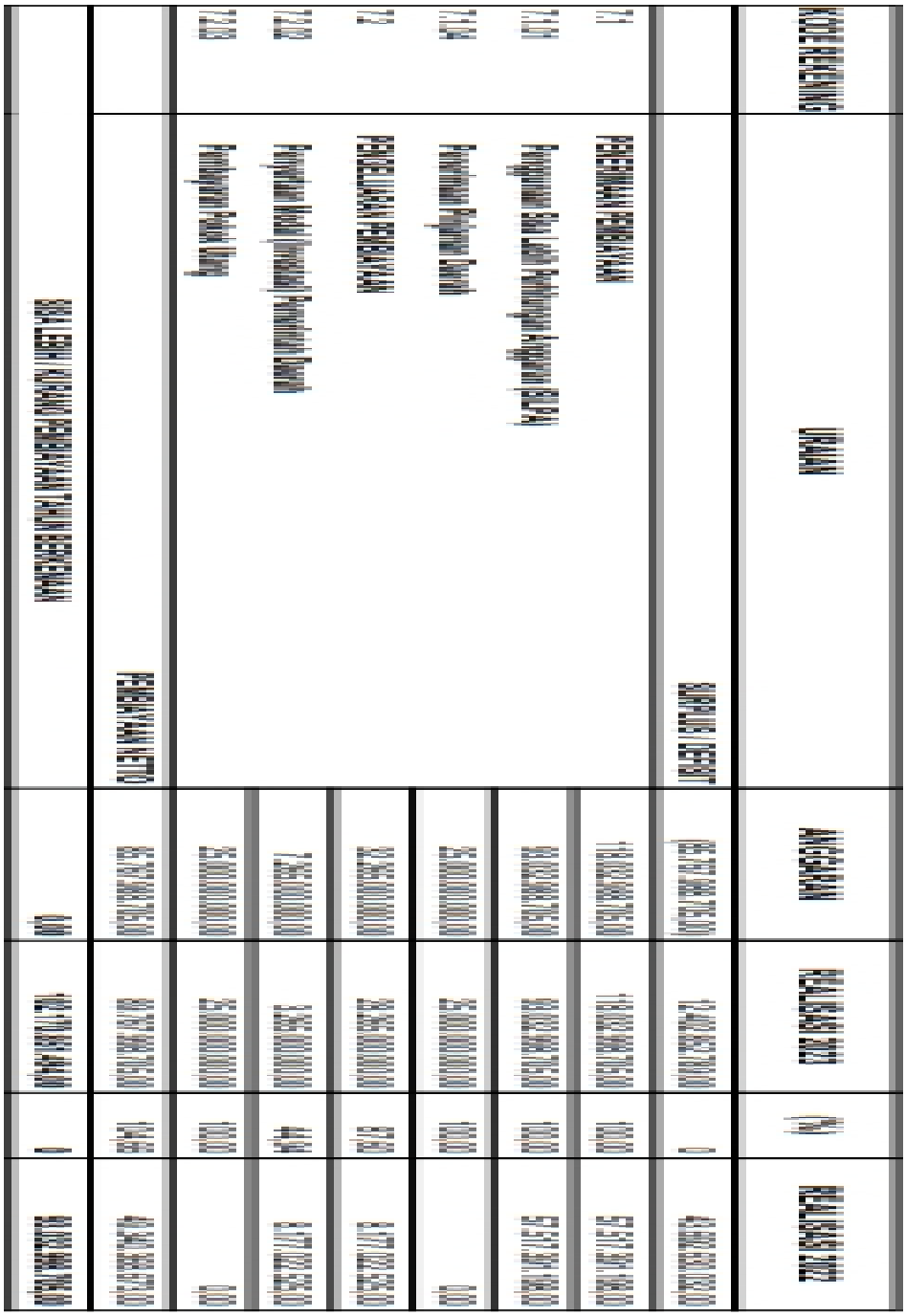

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Startegis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Kota Cirebon 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan pada Bab II, maka permasalahan pokok pembangunan yang dihadapi Kota Cirebon adalah:

1. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia dan daya saing daerah;
2. Meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
3. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur perkotaan;
4. Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon mengalami pelambatan dan berkontraksi akibat wabah pandemi COVID-19;
5. Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis budaya dan sejarah;
6. Reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik;
7. Munculnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua sektor pembangunan.

Permasalahan tersebut dipicu oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang dapat dikelompokkan kedalam urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh Karena itu Pemerintah Kota Cirebon dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran

dengan kerangka logis. Pada permasalahan tertentu satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran saja. Pada kondisi/permasalahan lain beberapa sasaran dapat bersifat inherent dengan satu tema, sehingga satu strategi dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Hal ini dilakukan agar pilihan-pilihan strategis dapat selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dirumuskan harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran

pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan tema/fokus pembangunan selama lima tahun periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Arah kebijakan dapat dirumuskan dalam 1 (satu) tahun periode atau dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang terpadu serta mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu perlu dirumuskan tema/fokus pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran dalam Perubahan RPJMD secara bertahap dalam penyusunan dokumen Perubahan RPJMD.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya sinergitas antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi, sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Cirebon 2018-2023 dirumuskan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dalam memenuhi atau mencapai target indikator sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankannya. Rumusan arah kebijakan pembangunan Kota Cirebon 2018-2023 mencerminkan upaya pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan visi

dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan sekaligus mengatasi isu strategis yang dihadapi Kota Cirebon pada periode 2018-2023.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan tahap ke-empat pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Sehubungan dengan hal tersebut, visi dan misi RPJMD harus memiliki konsistensi dan sinkronisasi dengan visi Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan ruh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang akan memberikan gambaran bagaimana pembangunan akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Cirebon yang telah ditetapkan pada RPJPD, yakni “Dengan Nuansa Religius Kota Cirebon Menjadi Kota Perdagangan dan Jasa Yang Maju dan Sejahtera”,yang dilaksanakan melalui 6 (enam) misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang religius;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi;
4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, merata dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kelestarian lingkungan; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum diikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Prioritas pembangunan daerah adalah program prioritas yang merupakan janji-janji politik yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada saat kampanye. untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Penjabaran prioritas pembangunan ke dalam program pembangunan daerah dibuat berdasarkan kebijakan umum, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Prioritas pembangunan jangka menengah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pemulihan ekonomi, penanganan dan rehabilitasi dampak pandemi COVID-19;
2. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan.
4. Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi pariwisata.
5. Peningkatan produktifitas dan daya saing daerah.
6. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.

Pemulihan ekonomi, penanganan dan rehabilitasi dampak pandemi Covid-19, dilakukan antara lain melalui :

1. percepatan pemberian vaksin kepada masyarakat;
2. penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net);
3. pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat terdampak Covid-19;
4. pemberian bantuan non tunai sembako dan tunai bagi masyarakat miskin dan rentan miskin terdampak Covid-19;
5. bantuan stimulan bagi warga yang terkena PHK dan pekerja yang dirumahkan;
6. bantuan stimulus modal usaha bagi UMKM.

Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia, yang dilaksanakan melalui: (

1. pembangunan gedung sekolah/Unit Sekolah Baru SD dan SMP di Argasunya;
2. relokasi bangunan sekolah SD/SMP;
3. peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap;
4. relokasi Puskesmas Jalan Kembang;
5. relokasi Puskesmas Pekalangan;
6. relokasi Puskesmas Astanagarib;
7. Puskesmas DTP Pamitran; (
8. Kartu Cirebon Sehat bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI);
9. Kartu Cirebon Cerdas bagi siswa keluarga miskin;

10. Pengembangan literasi
11. Penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari;
12. Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan, dilaksanakan melalui:

1. peningkatan upaya realisasi pembangunan CORR;
2. pembangunan jalan dan jembatan;
3. penataan trotoar jalan;
4. penataan saluran drainase;
5. penataan Kawasan kumuh;
6. pembangunan/penyediaan rumah susun;
7. pemugaran rumah tidak layak huni;
8. kotinuitas layanan air bersih;
9. pembangunan sumur artesis;
10. penyediaan rumah singgah bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. pengembangan infrastruktur transportasi;
12. penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan dan peningkatan upaya pengurangan sampah di sumbernya;
13. pemenuhan kebutuhan dan penataan lahan untuk RTH publik;
14. pembangunan dan penataan sarana dan prasarana air limbah domestik;
15. pembangunan jalur kereta api elevated railway, dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat;
16. pembangunan dan penataan PJU;
17. pembangunan dan penataan taman;
18. penataan Kawasan jalan Karanggetas, jalan Pekiringan dan jalan Pasuketan.

Peningkatan produktivitas daya saing daerah dilaksanakan melalui:

1. pembentukan wirausaha baru;
2. peningkatan daya saing ekonomi kreatif;
3. pembangunan/penataan Gedung kreatif;
4. pentaan alunalun Kejaksan;

5. pemberdayaan ekonomi kaum perempuan;
6. pembangunan/penyiapan sentra/cluster pengembangan industri kreatif.

Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi serta kelembagaan pariwisata, dilaksanakan melalui :

1. revitalisasi dan penataan Kawasan Kota Tua;
2. pemanfaatan Kawasan ex galian C menjadi lokasi wisata;
3. penataan trotoar (pembangunan main street dan shoping street;
4. penataan Kawasan Bima;
5. pembangunan sky walk Kawasan Sukalila;
6. penataan Pantai Kesenden;
7. penataan Keraton dan bangunan cagar budaya;
8. penataan Kampung Benda menjadi lokasi wisata religi; dan (
9. pengembangan wisata halal.

Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dilaksanakan melalui:

1. pembangunan command center;
2. penerapapan smart city dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. pembentukan warung konsultasi bagi aparatur;
4. pembangunan/rehabilitasi Gedung DPRD;
5. integrasi perencanaan, penganggaran serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum, dilaksanakan melalui:

1. peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2. pengurangan titik rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di atas, menjadi program strategis yang harus diprioritaskan dalam implementasinya. Selain program unggulan tersebut, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk mengimplementasikan janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih periode tahun 2018-

2023 dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kota.

Janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah serentak, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan bantuan operasional/insentif RT/RW dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Ibu Dapur Ngebul, dengan menciptakan kemandirian ekonomi kaum perempuan.
3. Cirebon “Cerdas”, dengan menghadirkan Kartu “SEHATI” untuk Pendidikan
4. The Great of Cirebon (Peningkatan destinasi wisata dan pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah).
5. Penyediaan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon, khususnya keluarga miskin.
6. Penyediaan dokter spesialis di Puskesmas.
7. Peningkatan jumlah akreditasi Puskesmas.
8. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan.
9. Peningkatan jumlah PONED (pelayanan obstetri neonatus essensial dasar).
10. Peningkatan layanan konseling remaja, kasus KDRT, atau penyakit khusus lainnya.
11. Penyediaan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon, termasuk KK miskin baik di Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta di Kota Cirebon.
12. Peningkatan kapasitas pelayanan Rumah Sakit Pemerintah.
13. Peningkatan status Rumah Sakit.
14. Akselerasi daftar tunggu/antrian pasien di Rumah Sakit.
15. Kerjasama antar Rumah Sakit.
16. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kesehatan lingkungan, meliputi: Warga Siaga, Kampung Siaga, Posyandu, Posbindu, Warga Peduli AIDs, Wadul Bae, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Pendamping pengobatan.

17. Peningkatan kebersihan lingkungan di tempat-tempat umum.
18. RW Sehat yang mempunyai Pos Obat RW sebagai peningkatan Peran Serta Masyarakat (PSM) mewujudkan RW Sehat dalam melakukan pendampingan pengobatan penyakit endemik/penyakit rakyat.
19. Penyediaan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kota Cirebon, termasuk KK miskin.
20. Peningkatan cakupan guru yang bersertifikat.
21. Menciptakan sekolah SD dan SMP “Layak Belajar Mengajar dan Merata”.
22. Peningkatan cakupan status Sekolah Sehat dan Sekolah Berwawasan Lingkungan.
23. Peningkatan dan Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
24. Pendataan, pendaftaran, penataan dan pembinaan PKL Kota Cirebon.
25. Penyediaan shelter bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).
26. Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penataan PKL.
27. Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat terutama warga yang belum memperoleh pekerjaan, khususnya KK miskin.
28. Penyaluran tenaga magang atau bekerja.
29. Bekerjasama dengan perusahaan/investor yang berinvestasi di Kota Cirebon untuk mempekerjakan warga kota 25 persen jumlah kebutuhan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan.
30. Bursa tenaga kerja.
31. Menciptakan even-even dan kalender tahunan wisata Kota Cirebon.
32. Branding Kota.
33. Kampung wisata Kota Cirebon.
34. Kerjasama kepariwisataan.
35. Mengoptimalkan wisata religi, Keraton (wisata sejarah) dan wisata kuliner sebagai destinasi wisata.
36. Melakukan penataan wilayah pesisir Kota Cirebon untuk dijadikan “Sentra Wisata Bahari”.
37. Melakukan penataan terhadap Keraton-keraton sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di Kota Cirebon

38. Melakukan penataan terhadap pasar tradisional sebagai pusat belanja yang sehat dan bersih, sehingga menjadi pusat belanja masyarakat.
39. Memberikan penguatan manajemen pada pengelola pasar tradisional.
40. Mengembangkan basis budaya local dalam rangka menumbuhkan industri kreatif local
41. Pembentukan dan pemberdayaan KUKM yang diakselerasikan dengan penetapan dan pembangunan sertapemeliharaannya, sehingga terbentuk “Central Bisnis Distrik”.
42. Pengembangan nilai-nilai budaya khas Cirebon.
43. Inventarisasi kekayaan dan keragaman budaya.
44. Peningkatan hubungan pemerintah dengan keraton.
45. Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan kekayaan budaya.
46. Memfasilitasi kreator, budayawan dalam mengeksplorasi karya seni tradisi.
47. Menciptakan ruang pertunjukan seni yang sesuai dengan standar kelayakan pertunjukan
48. Pendataan dan identifikasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
49. Penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan social
50. Penyediaan shelter/rumah aman.
51. Memfasilitasi proses rehabilitasi masyarakat Cirebon yang berkasus sosial (anak difabel, anak terlantar, jompo, dan lain-lain).
52. Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
53. Pelatihan ketrampilan kerja untuk perempuan.
54. Pelibatan perempuan dalam segala bidang.
55. Pelibatan anak-anak dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak.
56. Mengoptimalkan Forum Anak Cirebon.
57. Kepemilikan akte lahir sebagai hak dasar anak termasuk anak yang lahir dari seorang Perempuan Kepala Rumah Tangga dan anak korban perkosaan.
58. Penguatan ekonomi untuk Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).
59. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
60. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/LKK).

61. RW Ramah Anak
62. RW melek informasi.
63. RW tertib, aman, dan sadar hukum.
64. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat umum.
65. MTQ Tingkat Kota untuk penyaringan ke MTQ Tingkat Provinsi.
66. RW Melek Qur'an.
67. Menjaga kerukunan antar umat beragama dengan megoptimalkan peran FKUB, pemuda lintas iman, dan lain-lain
68. Penyederhanaan perijinan.
69. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
70. Penerapan reward and punishment.
71. Kerjasama dalam pencegahan korupsi (Inspektorat, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian).
72. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
73. Pendataan pajak dan retribusi.
74. Penyediaan mesin EPOS dan Tapping Box.
75. Penegakan hukum pajak dan retribusi.
76. Menjadikan PARKIR sebagai Perusahaan Daerah yang menghasilkan tambahan pendapatan.
77. Penyediaan sarana Kota yang ramah kepada pengguna, pejalan kaki, kaum difabel, ramah lingkungan anak sekolah, dan lain-lain.
78. Kemudahan aksesibilitas dalam dan luar kota.
79. Pencegahan terhadap genangan/banjir.
80. Ketersediaan air minum.
81. Penyediaan sarana angkutan umum massal yang murah dan ramah lingkungan
82. Revitalisasi tembok rumah-rumah di kawasan kumuh jalan protokol.
83. Pengurangan kawasan kumuh kota.
84. Peningkatan cakupan pelayanan persampahan.
85. Pelibatan komunitas masyarakat dalam kebersihan kota.
86. Tersedianya bank sampah dari tingkat RW sampai tingkat Kota.

87. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi volume sampah, sampah terpilah TPS 3R
88. Penyediaan/pembangunan atau pemanfaatan lahan kosong untuk Ruang Terbuka Hijau atau Ruang Terbuka Publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul dan bersosialisasi.
89. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas taman kota, sempadan jalan, sungai dan pantai.
90. Penambahan jumlah pohon/vegetasi kota.
91. Peningkatan operasional penertiban umum.
92. Peningkatan kualitas penegakan ketertiban umum
93. Peningkatan kualitas penegakan Peraturan Daerah
94. Penindakan polisional dalam penegakan Peraturan Daerah
95. Penyediaan layanan pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang berkasus hukum.
96. Pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan
97. kenyamanan lingkungan, Siskamling.

Sembilan puluh enam butir janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih tersebut di atas, dijabarkan dan direalisasikan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

Keterkaitan visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon dengan tema pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu dapat digambarkan sebagai berikut :

Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat,
RPJMD Kota Cirebon dan RPJMD Kabupaten Cirebon

Tema Pembangunan Nasional 2020-2024:
“Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”

Visi Pembangunan Jawa Barat 2018-2023:
“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Visi Kota Cirebon Kota Cirebon 2018-2023:
"SEHATI (Sehat, Hijau, Agamis, Tentram, dan Inovatif) Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah"

Visi Kabupaten Cirebon 2018-2023: "Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman".	Visi Kabupaten Kuningan 2018-2023: "Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023	Visi Kabupaten Indramayu 2018-2023: "Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Serta

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025. Pada tahap ini fokus pembangunan diarahkan pada upaya pemantapan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mewujudkan Kota Cirebon yang maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan berbasis budaya dan kearifan lokal. Visi pembangunan Kota Cirebon jangka menengah daerah pada tahun 2018-2023 mengacu pada fokus pembangunan tersebut, agar perencanaan pembangunan sinkron, konsisten dan berkelanjutan.

Adapun visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 adalah:

"SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah"

Pernyataan visi Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023 memiliki makna sebagai berikut:

SEHATI, berarti satu hati atau seia sekata, menunjukkan bahwa seluruh komponen (masyarakat dan stakeholders pembangunan) harus bahu membahu mewujudkan kemajuan Kota Cirebon. Mewujudkan masyarakat yang

sehat bukan hanya pada kata sehat secara harfiah fisik semata, tetapi bermakna pula pada masyarakat yang sehat rohani, jasmani dan sosial. Secara rinci makna kata SEHATI dapat diuraikan sebagai berikut:

Sehat, adalah suatu kondisi yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni masyarakat dengan mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat yang saling mendukung. Kesehatan dapat dicapai dan berkelanjutan apabila semua aspek yang meliputi sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya diperhatikan, dengan penekanan tidak cukup hanya pada pelayanan kesehatan, tetapi kepada seluruh aspek yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik jasmani maupun rohani.

Hijau, berarti Kota Cirebon menjadi kota hijau, yaitu kota yang rimbun, sejuk, bersih, dan asri. Dengan visi ini, maka pembangunan Kota Cirebon senantiasa berorientasi dan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Panorama pemandangan lingkungan yang segar dan hijau akan menciptakan suasana segar, sejuk menawan, menenteramkan hati, mendorong gairah kerja, dan menarik para wisatawan dan usahawan untuk berlibur dan berinvestasi di Kota Cirebon, dan seluruh warga masyarakatnya merasa betah tinggal di Kota Cirebon.

Agamis, adalah suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Cirebon yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Tertib, adalah suatu keadaan yang menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis dan teratur sebagai akibat dari hasil interaksi sosial yang sesuai dengan tindakan, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat.

Inovatif, yaitu pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kota Kreatif, merupakan salah satu strategi dalam perencanaan kota dimana orang-orang dapat berpikir, merencanakan dan bertindak secara kreatif. Kreatifitas diartikan pola pikir (mental model), sikap (character) dan aksi (action) yang merangsang inovasi, komitmen, originalitas dan transformasi untuk membangun diri (self actualization dan living organization) secara berkesinambungan dalam berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin bermutu, yang bercirikan:

1. Membangun citra dan identitas lokal;
2. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan;
3. Menciptakan iklim bisnis yang positif;
4. Berbasis pada sumber daya yang terbarukan;
5. Menciptakan inovasi dan kreatifitas yang merupakan keunggulan yang kompetitif; dan
6. Memberikan dampak yang positif pada masyarakat.

Berbasis Budaya dan Sejarah, diartikan bahwa kreatifitas melekat dengan pengetahuan (knowledge) dan kebudayaan (culture), sehingga merupakan integrasi antara tradisi dan modernitas yang meliputi 8 (delapan) aspek kehidupan kota yaitu seni dan budaya, sumber daya manusia, lingkungan, industri dan niaga, pariwisata, teknologi, kebijakan pemerintah, serta program pemerintah (public service).

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun 2018-2023, maka ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah tahun 2018 – 2023 yaitu:

Misi 1, Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul dalam Segala Bidang Misi ini merupakan arahan untuk meningkatkan daya saing pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Misi 2, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif Misi ini merupakan arahan untuk meningkatkan daya saing pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menurunkan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Misi 3, Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan Misi ini merupakan arahan dalam melaksanakan pembangunan harus memperhatian kelestarian lingkungan atau pembangunan berwawasan lingkungan

Misi 4, Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif.

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Pemerintah Kota Cirebon dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Pada permasalahan tertentu satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran saja. Pada kondisi/permasalahan lain beberapa sasaran dapat bersifat inherent dengan satu tema, sehingga satu strategi dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman

untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Hal ini dilakukan agar pilihan-pilihan strategis dapat selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dirumuskan harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman

untuk menentukan tahapan dan tema/fokus pembangunan selama lima tahun periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Arah kebijakan dapat dirumuskan dalam 1 (satu) tahun periode atau dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang terpadu serta mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu perlu dirumuskan tema/fokus pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran dalam Perubahan RPJMD secara bertahap dalam penyusunan dokumen Perubahan RPJMD. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya sinergitas antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih

dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi, sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Cirebon 2018-2023 dirumuskan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dalam memenuhi atau mencapai target indikator sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankannya. Rumusan arah kebijakan pembangunan Kota Cirebon 2018-2023 mencerminkan upaya pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan sekaligus mengatasi isu strategis yang dihadapi Kota Cirebon pada periode 2018-2023.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan tahap ke-empat pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Sehubungan dengan hal tersebut, visi dan misi RPJMD harus memiliki konsistensi dan sinkronisasi dengan visi Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan ruh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang akan memberikan gambaran bagaimana pembangunan akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Cirebon yang telah ditetapkan

pada RPJPD, yakni “Dengan Nuansa Religius Kota Cirebon Menjadi Kota Perdagangan dan Jasa Yang Maju dan Sejahtera”,yang dilaksanakan melalui 6 (enam) misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

7. Mewujudkan masyarakat yang religius;
8. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
9. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi;
10. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, merata dan berkelanjutan;
11. Meningkatkan kelestarian lingkungan; dan
12. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum diikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Prioritas pembangunan daerah adalah program prioritas yang merupakan janji-janji politik yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada saat kampanye. untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Penjabaran prioritas pembangunan ke dalam program pembangunan daerah dibuat berdasarkan kebijakan umum, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Prioritas pembangunan jangka menengah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

8. Pemulihan ekonomi, penanganan dan rehabilitasi dampak pandemi COVID-19;
9. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia.
10. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan.
11. Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi pariwisata.
12. Peningkatan produktifitas dan daya saing daerah.
13. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
14. Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.
15. Pemulihan ekonomi, penanganan dan rehabilitasi dampak pandemi Covid-19, dilakukan antara lain melalui percepatan pemberian vaksin kepada masyarakat;

16. penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net);
17. pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat terdampak Covid-19;
18. pemberian bantuan non tunai sembako dan tunai bagi masyarakat miskin dan rentan miskin terdampak Covid-19;
19. bantuan stimulan bagi warga yang terkena PHK dan pekerja yang dirumahkan;
20. bantuan stimulus modal usaha bagi UMKM.
21. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia, yang dilaksanakan melalui: (

13. pembangunan gedung sekolah/Unit Sekolah Baru SD dan SMP di Argasunya;
14. relokasi bangunan sekolah SD/SMP;
15. peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap;
16. relokasi Puskesmas Jalan Kembang;
17. relokasi Puskesmas Pekalangan;
18. relokasi Puskesmas Astanagarib;
19. Puskesmas DTP Pamitran; (
20. Kartu Cirebon Sehat bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI);
21. Kartu Cirebon Cerdas bagi siswa keluarga miskin;
22. Pengembangan literasi
23. Penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari;
24. Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan, dilaksanakan melalui:

19. peningkatan upaya realisasi pembangunan CORR;
20. pembangunan jalan dan jembatan;
21. penataan trotoar jalan;
22. penataan saluran drainase;
23. penataan Kawasan kumuh;
24. pembangunan/penyediaan rumah susun;
25. pemugaran rumah tidak layak huni;
26. kotinuitas layanan air bersih;

27. pembangunan sumur artesis;
28. penyediaan rumah singgah bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
29. pengembangan infrastruktur transportasi;
30. penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan dan peningkatan upaya pengurangan sampah di sumbernya;
31. pemenuhan kebutuhan dan penataan lahan untuk RTH publik;
32. pembangunan dan penataan sarana dan prasarana air limbah domestik;
33. pembangunan jalur kereta api elevated railway, dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat;
34. pembangunan dan penataan PJU;
35. pembangunan dan penataan taman;
36. penataan Kawasan jalan Karanggetas, jalan Pekiringan dan jalan Pasuketan.

Peningkatan produktivitas daya saing daerah dilaksanakan melalui:

7. pembentukan wirausaha baru;
8. peningkatan daya saing ekonomi kreatif;
9. pembangunan/penataan Gedung kreatif;
10. pentaan alunalun Kejaksan;
11. pemberdayaan ekonomi kaum perempuan;
12. pembangunan/penyiapan sentra/cluster pengembangan industri kreatif.

Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi serta kelembagaan pariwisata, dilaksanakan melalui :

10. revitalisasi dan penataan Kawasan Kota Tua;
11. pemanfaatan Kawasan ex galian C menjadi lokasi wisata;
12. penataan trotoar (pembangunan main street dan shoping street;
13. penataan Kawasan Bima;
14. pembangunan sky walk Kawasan Sukalila;
15. penataan Pantai Kesenden;
16. penataan Keraton dan bangunan cagar budaya;
17. penataan Kampung Benda menjadi lokasi wisata religi; dan (
18. pengembangan wisata halal.

Misi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun 2018-2023, telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 yang mensyaratkan fokus RPJMD periode 2018-2023 adalah akselerasipeningkatan sumber daya manusia dan akselerasi peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Perdagangan dan Jasa yang dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun 2018 – 2023, maka ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah tahun 2018 – 2023 yaitu :

a. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang.
b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif.
c. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan.
d. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif.

d. Kegiatan Pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2023 mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Kota Cirebon 2018-2023 yaitu "SEHATI KITA WUJUDKAN CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN SEJARAH"

Prioritas pembangunan tahun 2023 terdiri dari sasaran pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya, program pembangunan daerah dijabarkan kedalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Cirebon pada tahun 2023.

Program Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 telah menggunakan Program dan Kegiatan berdasarkan Hasil Pemetaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
    a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
        1) Program Pengelolaan Pendidikan
        2) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
    b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
        1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
        2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
        3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
        4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
    c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
        1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
        2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
        3) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
        4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
        5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
        6) Program Pengembangan Permukiman
        7) Program Penataan Bangunan Gedung
        8) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
        9) Program Penyelenggaraan Jalan
        10) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
        11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
    d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
        1) Program Pengembangan Perumahan
        2) Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh

3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
4) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2) Program Penanggulangan Bencana
3) Program Penanggulangan Kebakaran

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1) Program Pemberdayaan Sosial
2) Program Rehabilitasi Sosial
3) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
4) Program Penanganan Bencana
5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
1) Program Perencanaan Tenaga Kerja
2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
3) Program Penempatan Tenaga Kerja
4) Program Hubungan Industrial

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2) Program Perlindungan Perempuan
3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
5) Program Perlindungan Khusus Anak

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2) Program Penanganan Kerawanan Pangan
3) Program Pengawasan Keamanan Pangan

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
7) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
8) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
10) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
11) Program Pengelolaan Persampahan

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1) Program Pendaftaran Penduduk
2) Program Pencatatan Sipil
3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1) Program Administrasi Pemerintahan Desa

2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
   1) Program Pengendalian Penduduk
   2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
   3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
   1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
   1) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
   2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
   1) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
   2) Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
   3) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
   4) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
   5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
   6) Program Pengembangan Umkm

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
   1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   2) Program Promosi Penanaman Modal
   3) Program Pelayanan Penanaman Modal
   4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   5) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
   1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   2) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
   3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
   1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
   1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
   1) Program Pengembangan Kebudayaan
   2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
   3) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
   1) Program Pembinaan Perpustakaan
   2) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
   3) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
   4) Program Pengelolaan Arsip
   5) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

3. Urusan Pemerintahan Pilihan
   a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
      1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
      2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
      3) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
   b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
      1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
      2) Program Pemasaran Pariwisata
      3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
   c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
      1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
      2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
      3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
      4) Program Penyuluhan Pertanian
   d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
3) Program Pengembangan Ekspor
4) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
5) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
   1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
   a. Sekretariat Daerah
      1) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
      2) Program Perekonomian Dan Pembangunan
      3) Program Penataan Administrasi Umum
   b. Sekretariat Dprd
      1) Program Layanan Dan Administrasi Keuangan
      2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
   a. Perencanaan
      1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
      2) Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
      3) Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
      4) Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan
   b. Keuangan
      1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
      2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
      3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
   c. Kepegawaian
      1) Program Kepegawaian Daerah
   d. Pendidikan Dan Pelatihan

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

e. Penelitian Dan Pengembangan

1) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat Daerah

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa Dan Politik

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018 – 2023.

Berikut ini adalah Prioritas Pembangunan Daerah yang dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD khusus Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.6
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2023

No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4
1.	Prioritas 1 Pemulihan Ekonomi, Penanganan, Dan Rehabilitasi Dampak Pandemi Covid-19		
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Cirebon	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
		1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
	Berkurangnya Penduduk Miskin	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	
		1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
		1.06.06 Program Penanganan Bencana	
	Menurunnya Tingkat Pengangguran	2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	

No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dan Perlindungan Anak	2.08.03 Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	
	Meningkatnya Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
		2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	
	Meningkatnya Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Daerah	5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
2	Prioritas 2 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia		
	Meningkatnya Akses Dan Mutu Pendidikan	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Cirebon	1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Kesehatan
		1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	

No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4
		1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
	Berkurangnya Penduduk Miskin	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	
		1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
	Menurunnya Tingkat Pengangguran	2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dan Perlindungan Anak	2.08.03 Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	
		2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
	Terkendalinya Jumlah Penduduk	2.14.02 Program Pengendalian Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	

No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4
		2.14.04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	
	Meningkatnya Prestasi Olahraga Dan Pemuda	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda Dan Olah Raga
		2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
		2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		2.24.02 Program Pengelolaan Arsip	
		2.24.03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
	Meningkatnya Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan	3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
		3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
		8.01.04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	8.01.05 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri
3.	Prioritas 3 Akselerasi Pertumbuhan Dan Pemerataan Pembangunan Secara Berkelanjutan		

No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4
	Meningkatnya Akses Dan Mutu Pendidikan	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Lingkungan Hidup
		1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Drainase	1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		1.03.07 program pengembangan permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Lingkungan Hidup
		1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4
		1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		1.04.03 Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		1.04.06 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
		2.10.02 Program Pengelolaan Izin Lokasi	
		2.10.10 Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4
		2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
		3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
4	Prioritas 4 Peningkatan Produktivitas Daya Saing Daerah		
	Meningkatnya Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
		3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	Meningkatnya Peran Industri, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm Dalam Stabilitas Perekonomian Kota Cirebon	3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
		3.30.02 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2.17.05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	

No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
		2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	
		2.17.08 Program Pengembangan Umkm	
	Meningkatnya Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
		3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	

No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4
	Meningkatnya Peran Industri, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm Dalam Stabilitas Perekonomian Kota Cirebon	3.30.02 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
		3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
		3.30.06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
		3.30.07 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
		3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
		3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
		5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
		5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5	Prioritas 5 Pemajuan Kebudayaan Dan Pengembangan Destinasi Serta Kelembagaan Pariwisata		

No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4
	Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Profesional, Handal Dan Terintegrasi Dalam Mewujudkan Cirebon Smart City	2.16.02 Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik
	Meningkatnya Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Ndan Pariwisata
		2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
		2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
	Meningkatnya Peran Pariwisata Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan Ndan Pariwisata
		3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata	
		3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik
6	Prioritas 6 Reformasi Birokrasi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Cirebon	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Lingkungan Hidup
	Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Kondusif	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dan Perlindungan Anak	2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	2.11.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	
		2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
	Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Profesional, Handal Dan Terintegrasi Dalam Mewujudkan Cirebon Smart City	2.16.02 Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik
		2.16.03 Program Aplikasi Informatika	
		2.17.02 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
		2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	

No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4
		2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	
		2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	
		2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
		2.18.06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
	Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Profesional, Handal Dan Terintegrasi Dalam Mewujudkan Cirebon Smart City	2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik
		2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi	4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	

No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4
		5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Daerah	5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	Meningkatnya Maturitas Spip	6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan	7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
	Meningkatnya Rasa Nasionalisme Dan Kawaspadaan Nasional	8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri
	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Masyarakat	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
	Meningkatnya Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	
		1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		1.06.06 Program Penanganan Bencana	

No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4
		7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
	Meningkatnya Rasa Nasionalisme Dan Kawaspadaan Nasional	7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
		8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		8.01.04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		8.01.05 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
		8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	

Sumber :Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2023

Tabel :I.7

Kesesuaian Prioritas Nasional dengan Program RKPD 2023

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM RKPD
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1	Program Pembinaan Perpustakaan
		2	Program Stabilisasi Harga Barang dan Barang Penting

			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
			Program Pengembangan Ekspor
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Massyarakat
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Program Penyuluhan Pertanian

			Program Peniaian Kesehatan KSP/USP
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
2	Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Program Pembinaan Perpustakaan
			Program Pengelolaan Arsip
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Perlindungan Perempuan
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			Program Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Kawasan Pemukiman
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan
			Program Pengelolaan Pendidikan

			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdaganan
			Program Pengembangan Ekspor
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			Program Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno
			Program Pengelolaan Arsip
			Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisonal
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Program Pengembangan Kebudayaan
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1	Program Pembinaan Perpustakaan
		2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

			Program Kawasan Pemukiman
			Program Pengembangan Perumahan
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Pengembangan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	Program Pengelolaan Persampahan
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Penanggulangan Bencana
			Program Pengembangan Perumahan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Arsip
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Hubungan Industrial
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Progam Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Kepegawaian Daerah
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Program Pengelolaan Arsip
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian Pembangunan Daerah, 2023.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan amanat pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan, bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah wajib memenuhi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang memuat jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan dasar, dan Penerima Pelayanan Dasar, Kewenangan ini di dukung dengan adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di tegaskan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Di dalam Peraturan tersebut dijelaskan tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Pemerintah Provinsi atau Kab/Kota.

Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip- prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- **Dasar Hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :**
  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
10. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Cirebon.

- **Sasaran**

  Monitoring dan Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditujukan kepada 8 (Delapan) Perangkat Daerah yang memiliki urusan wajib Pelayanan Dasar :

Tabel: I.8

Perangkat Daerah yang memiliki Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	PERANGKAT DAERAH	SPM
1	Dinas Pendidikan	Bidang Pendidikan
2	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Bidang Ketenteraman dan Ketertiba Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6	Dinas Pemadam Kebakaran	Bidang Ketenteraman dan Ketertiba Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Kebakaran
7	Dinas Sosisal	Bidang Sosial
8	Badan Penangulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketenteraman dan Ketertiba Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana

c. Penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah disajikan pada Tabel 3.22. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan Prirotas Anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga termasuk hal tersebut. Alokasi belanja pada prioritas II diarahkan untuk:
   a. Pelaksanaan 6 (enam) prioritas pembangunan Kota Cirebon tahun 2018-2023, meliputi:
      1) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia;
      2) Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan;
      3) Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi; 4) Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi serta kelembagaan pariwisata;
      4) Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
      5) Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon tahun 2018-2023.
   b. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.
   c. Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs);
   d. Pemenuhan anggaran fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah.
   e. Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD.
   f. Pemenuhan anggaran fungsi infrastruktur, yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

d. Capaian Standar Pelayanan Minimal

1. Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			89.00 %	
01.00	**Pendidikan Dasar Usia Dini**					79.30 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**64.46 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		11897	9586	**2311**	**80.57 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**14.84 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	74.20 %	
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	11897	9586	**2311**	**80.57 %**	
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	214	153	**61**	**71.50 %**	
	3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	669	411	**258**	**61.43 %**	
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	14	12	**2**	**85.71 %**	
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	84	84	**0**	**100.00 %**	
	6 . Indeks distribusi guru	%	100	100	**0**	**100.00 %**	
	7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	599	246	**353**	**41.07 %**	
	8 . Proporsi PTK penggerak	%	40	11	**29**	**27.50 %**	
	9 . Pengalaman pelatihan guru	%	599	599	**0**	**100.00 %**	
	JUMLAH	**14,216**	**11,202**	**3,014**	**667.79 %**		
02.00	**Pendidikan Dasar**					94.48 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN		**Jumlah Total**	**Jumlah Total**	**Yang Belum**	**80.00 %**	

	PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Yang Harus Dilayani**	**Yang Terlayani**	**Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		53757	66173	**-12416**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**14.48 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	72.42 %	
	SD						
	1 . Angka partisipasi kasar	%	35641	37644	**-2003**	**100.00 %**	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	35641	37644	**-2003**	**100.00 %**	
	3 . Angka partisipasi murni	%	35641	32844	**2797**	**92.15 %**	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	75	**25**	**75.00 %**	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	59	**41**	**59.00 %**	
	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	100	75	**25**	**75.00 %**	
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	100	59	**41**	**59.00 %**	
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	72	**28**	**72.00 %**	
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100	70	**30**	**70.00 %**	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	1540	1149	**391**	**74.61 %**	
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100	**0**	**100.00 %**	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	2717	904	**1813**	**33.27 %**	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	2717	31	**2686**	**1.14 %**	
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	2717	2717	**0**	**100.00 %**	
	SMP						
	1 . Angka partisipasi kasar	%	18116	21145	**-3029**	**100.00 %**	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	18116	21145	**-3029**	**100.00 %**	
	3 . Angka partisipasi murni	%	18116	16413	**1703**	**90.60 %**	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	77	**23**	**77.00 %**	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	56	**44**	**56.00 %**	
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	77	**23**	**77.00 %**	
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	56	**44**	**56.00 %**	
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	69	**31**	**69.00 %**	

	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	%	100	68	**32**	**68.00 %**	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	743	610	**133**	**82.10 %**	
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100	**0**	**100.00 %**	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	1478	591	**887**	**39.99 %**	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	1478	15	**1463**	**1.01 %**	
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	1478	1478	**0**	**100.00 %**	
	JUMLAH	**177,54**	**175,343**	**2,196**	**2,027.88 %**		
03.00	**Pendidikan Kesetaraan**					93.23 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		4961	4961	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**13.23 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	66.14 %	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	7384	7384	**0**	**100.00 %**	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	7384	7384	**0**	**100.00 %**	
	3 . Angka partisipasi murni	%	7384	7384	**0**	**100.00 %**	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	75	**25**	**75.00 %**	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	59	**41**	**59.00 %**	
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	75	**25**	**75.00 %**	
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	59	**41**	**59.00 %**	
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	69	**31**	**69.00 %**	
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	100	64	**36**	**64.00 %**	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	241	60	**181**	**24.90 %**	
	11 . Indeks distribusi guru	%	21	241	**-220**	**100.00 %**	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	241	0	**241**	**0.00 %**	

	13 . Proporsi PTK penggerak	%	241	0	**241**	**0.00 %**	
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	241	241	**0**	**100.00 %**	
	JUMLAH	**23,737**	**23,095**	**642**	**925.90 %**		

Sumber data: Pelaporan Perangkat Daerah melalui https;//spm.kemedagri.go.id

2. Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
-1	-2		-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			98.52 %
01.00	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**					96.52 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**77.07 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*4920*	*4740*	**180**	**96.34 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19.45 %**
			Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang Terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	97.26 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	4920	4740	**180**	**96.34 %**
	2 . Tablet tambah darah	Tablet	4920	4740	**180**	**96.34 %**
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	4920	4740	**180**	**96.34 %**
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	4920	4740	**180**	**96.34 %**
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	4920	4740	**180**	**96.34 %**
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	4920	4740	**180**	**96.34 %**
	7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	4920	4740	**180**	**96.34 %**
	8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4920	4740	**180**	**96.34 %**
	9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	10 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	44	44	**0**	**100.00 %**
	11 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**

	12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga) **JUMLAH**	Orang **44,368**	4920 **42,748**	4740 **1,62**	**180** **1,167.06 %**	**96.34 %**
02.00	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**					99.31 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**79.38 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*4681*	*4645*	**36**	**99.23 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19.92 %**
			Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang Terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	99.62 %
	1 . Formulir Partograf	Formulir	4681	4645	**36**	**99.23 %**
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	Paket	4681	4645	**36**	**99.23 %**
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4681	4645	**36**	**99.23 %**
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	57	57	**0**	**100.00 %**
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**14,144**	**14,036**	**108**	**597.69 %**	
03.00	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*4471*	*4471*	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
			Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang Terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	100.00 %
	1 . Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	4471	4471	**0**	**100.00 %**
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	4471	4471	**0**	**100.00 %**
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	4471	4471	**0**	**100.00 %**

	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	4471	4471	**0**	**100.00 %**
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	4471	4471	**0**	**100.00 %**
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4471	4471	**0**	**100.00 %**
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	32	32	**0**	**100.00 %**
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**26,902**	**26,902**	**0**	**900.00 %**	
04.00	**Pelayanan Kesehatan Balita**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*20159*	*20159*	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
			Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang Terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	100.00 %
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	20159	20159	**0**	**100.00 %**
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	20159	20159	**0**	**100.00 %**
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	20159	20159	**0**	**100.00 %**
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	20159	20159	**0**	**100.00 %**
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	20159	20159	**0**	**100.00 %**
	6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	20159	20159	**0**	**100.00 %**
	7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	20159	20159	**0**	**100.00 %**
	8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	20159	20159	**0**	**100.00 %**
	9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	20159	20159	**0**	**100.00 %**
	10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	20159	20159	**0**	**100.00 %**
	11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	20159	20159	**0**	**100.00 %**
	12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	20159	20159	**0**	**100.00 %**

	13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	20159	20159	**0**	**100.00 %**
	14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	20159	20159	**0**	**100.00 %**
	15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	20159	20159	**0**	**100.00 %**
	16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	20159	20159	**0**	**100.00 %**
	17 . Peralatan Anafilaktik	Paket	22	22	**0**	**100.00 %**
	18 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	19 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	20 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	21 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	224	224	**0**	**100.00 %**
	23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**322,9**	**322,9**	**0**	**2,300.00 %**	
05.00	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**					99.17 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**79.25 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*13742*	*13613*	**129**	**99.06 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19.92 %**
			Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	99.61 %
	1 . Buku raport kesehatanku	Buku	13742	13613	**129**	**99.06 %**
	2 . Buku pemantauan kesehatan	Buku	13742	13613	**129**	**99.06 %**
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	13742	13613	**129**	**99.06 %**
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	13742	13613	**129**	**99.06 %**
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	13742	13613	**129**	**99.06 %**

	6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	44	44	**0**	**100.00 %**
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	44	44	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**68,908**	**68,263**	**645**	**1,195.30 %**	
06.00	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**					91.06 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**72.30 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*225008*	*203356*	**21,652**	**90.38 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18.75 %**
			Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	93.77 %
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	225008	203356	**21652**	**90.38 %**
	2 . Alat ukur berat badan	Unit	225008	203356	**21652**	**90.38 %**
	3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	225008	203356	**21652**	**90.38 %**
	4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	225008	203356	**21652**	**90.38 %**
	5 . Alat : Tensimeter	Unit	225008	203356	**21652**	**90.38 %**
	6 . Alat : Glukometer	Unit	225008	203356	**21652**	**90.38 %**
	7 . Alat : Tes strip gula darah	Unit	225008	203356	**21652**	**90.38 %**
	8 . Alat : Lancet	Unit	225008	203356	**21652**	**90.38 %**
	9 . Alat : Kapas alkohol	Unit	225008	203356	**21652**	**90.38 %**
	10 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	225008	203356	**21652**	**90.38 %**
	11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	225008	203356	**21652**	**90.38 %**
	12 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**

	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
07.00	**JUMLAH** **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**	**2,475,220**	**2,237,048**	**238,172**	**1,594.18 %**	96.24 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**76.53 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*20570*	*19677*	**893**	**95.66 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19.71 %**
			Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	98.55 %
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	20570	19677	**893**	**95.66 %**
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	20570	19677	**893**	**95.66 %**
	3 . Buku kesehatan lansia	Buku	20570	19677	**893**	**95.66 %**
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**61,842**	**59,163**	**2,679**	**886.98 %**	
08.00	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**					99.94 %

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**79.94 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*90868*	*90805*	**63**	**99.93 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
			Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	99.98 %
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	90868	90805	**63**	**99.93 %**
	2 . Tensimeter	Unit	44	44	**0**	**100.00 %**
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	90868	90805	**63**	**99.93 %**
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	8 . Obat Hipertensi	Paket	22	22	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**181,89**	**181,764**	**126**	**799.86 %**	
09.00	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**					99.98 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**79.98 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*21231*	*21225*	**6**	**99.97 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
			Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	99.99 %
	1 . Alat : Glukometer	Unit	21231	21225	**6**	**99.97 %**
	2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	21231	21225	**6**	**99.97 %**
	3 . Alat : Kapas Alkohol	Unit	21231	21225	**6**	**99.97 %**
	4 . Alat : Lancet	Unit	21231	21225	**6**	**99.97 %**

	5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	21231	21225	**6**	**99.97 %**
	6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	22	22	**0**	**100.00 %**
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	12 . Obat Diabetes Melitus	Paket	22	22	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**106,309**	**106,279**	**30**	**1,199.85 %**	
10.00	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*451*	*451*	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
			Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	100.00 %
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	451	451	**0**	**100.00 %**
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	451	451	**0**	**100.00 %**
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	451	451	**0**	**100.00 %**
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	451	451	**0**	**100.00 %**
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	66	66	**0**	**100.00 %**
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**1,914**	**1,914**	**0**	**700.00 %**	

11.00	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis** **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)**		**Jumlah Total** **Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total** **Yang Terlayani**	**Yang Belum** **Terlayani**	100.00 % **80.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*13527*	*13527*	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
			Jumlah yang harus dilayani **-1**	**Jumlah yang terlayani** **-2**	**Jumlah yang belum terlayani** **-3**	100.00 %
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	13527	13527	**0**	**100.00 %**
	2 . Reagen Zn TB	Paket	13527	13527	**0**	**100.00 %**
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	13527	13527	**0**	**100.00 %**
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	13527	13527	**0**	**100.00 %**
	5 . Catridge tes cepat molekuler	Paket	13527	13527	**0**	**100.00 %**
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	13527	13527	**0**	**100.00 %**
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	13527	13527	**0**	**100.00 %**
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	155	155	**0**	**100.00 %**
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	155	155	**0**	**100.00 %**
	10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	155	155	**0**	**100.00 %**
	11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	10	10	**0**	**100.00 %**
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	155	155	**0**	**100.00 %**
	13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	155	155	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**95,474**	**95,474**	**0**	**1,300.00 %**	

12.00	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*12134*	*12134*	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
			Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	100.00 %
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	12134	12134	**0**	**100.00 %**
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	12134	12134	**0**	**100.00 %**
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	12134	12134	**0**	**100.00 %**
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	12134	12134	**0**	**100.00 %**
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	34	34	**0**	**100.00 %**
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	34	34	**0**	**100.00 %**
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	34	34	**0**	**100.00 %**
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	34	34	**0**	**100.00 %**
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	34	34	**0**	**100.00 %**
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	25	25	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**48,731**	**48,731**	**0**	**100.00 %**	

Sumber data: Pelaporan Perangkat Daerah melalui https;//spm.kemedagri.go.id

3. Pekerjaan Umum

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
-1	-2		-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			94.01 %
01.00	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**					98.15 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*79439*	*79439*	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18.15 %**
			Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	90.75 %
	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/ SR	239	239	**0**	**100.00 %**
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/ SR	100	63	**37**	**63.00 %**
	3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	54242	54242	**0**	**100.00 %**
	4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	25197	25197	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**79,778**	**79,741**	**37**	**363.00 %**	

02.00	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**					89.86 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**76.06 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*79439*	*75525*	3,914	**95.07 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**13.80 %**
			Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	69.01 %
	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	79439	75525	**3914**	**95.07 %**
	2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga	8	4	**4**	**50.00 %**
	3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	67.717	67.717	**0**	**100.00 %**
	4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	1	0	**1**	**0%**

	5 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	1	1	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**79,517**	**75,598**	**3,919**	**345.07 %**	

Sumber data: Pelaporan Perangkat Daerah melalui https;//spm.kemedagri.go.id

4. Perumahan Rakyat

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
01.00	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					100.00 %
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		3	3	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %
	1 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	3	3	**0**	**100%**
	UPLOAD FILE PENDUKUNG					

	PENDATAAN	
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	100%
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	100%
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	100%
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH	100%
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA	100%
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)	100%
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	100%
	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	100%
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :	100%
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :	100%
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	100%
	PERENCANAAN	
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :	100%
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :	100%

02.00	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1	1	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**

	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0	0	**0**	**0.00 % 0**
	2 . Subsidi uang sewa	Rumah	0	0	**0**	**0.00 % 0**
	3 . Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0	0	**0**	**0.00 % 0**
	JUMLAH	**0**	**0**	**0**	**0.00 %**	

5. Trantibumlinmas

NO	**INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM**	**SATUAN**	**INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT**			**TOTAL PENCAPAIAN**
-1	-2		-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			94.36 %
01.00	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**					94.36 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		120	120	**0**	**100.00 %**
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**14.36 %**
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	71.80 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	50	50	**0**	**100.00 %**

	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	8	8	**0**	**100.00 %**
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	250	218	**32**	**87.20 %**
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	0	0	**0**	**0%**
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	**0**	**0%**
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	**0**	**0%**
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
01.00	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5	5	**0**	**100.00 %**
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	**0**	**100.00 %**
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	5	5	**0**	**100.00 %**
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) **4** . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	orang unit	5 403	5 403	**0** **0**	**100.00 %** **100.00 %**
02.00	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		900	900	**0**	**100.00 %**
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, …. dll)	unit	45	45	**0**	**100.00 %**
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	80	80	**0**	**100.00 %**
03.00	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**					100.00 %
	ya	Tidak Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) **A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :**		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani** 29,791	**Jumlah Total Yang Terlayani** 29,791	**Yang Belum Terlayani** **0**	**80.00 %** **100.00 %**
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	100.00 %

	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	0	0	**0**	**0%**
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	29,791	29,791	**0**	**100.00 %**
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	0	0	**0**	**0%**
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	**0**	**0%**
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	2	2	**0**	**100.00 %**
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS UTAMA			99.82 %
01.00	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**					99.82 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		28	28	**0**	**100.00 %**
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19.82 %**

			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	99.11 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	28	27	**1**	**96.43 %**
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.)	dokumen	14	14	**0**	**100.00 %**
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.)	Uinit	10	10	**0**	**100.00 %**
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	164	164	**0**	**100.00 %**
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga	layanan	0	0	**0**	**0%**

	negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)					
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	0	0	**0**	**0%**

Sumber data: Pelaporan Perangkat Daerah melalui https;//spm.kemedagri.go.id

6. Sosial

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			97.74 %
01.00	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		266	266	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	6	6	**0**	**100.00 %**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	**0**	**100.00 %**
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	67	67	**0**	**100.00 %**
	4 . Penyediaan sandang	Orang	6	6	**0**	**100.00 %**

	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	88	88	**0**	**100.00 %**
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	**0**	**100.00 %**
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	15	15	**0**	**100.00 %**
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	15	15	**0**	**100.00 %**
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	37	37	**0**	**100.00 %**
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	2	2	**0**	**100.00 %**
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	10	10	**0**	**100.00 %**
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	15	15	**0**	**100.00 %**
	13 . Layanan rujukan	Orang	2	2	**0**	**100.00 %**
02.00	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**					98.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		328	328	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18.33 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	91.67 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	2	2	**0**	**100.00 %**
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	50	50	**0**	**100.00 %**

	4 . Penyediaan sandang	Orang	2	2	**0**	**100.00 %**
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	240	240	**0**	**100.00 %**
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	22	22	**0**	**100.00 %**
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	5	5	**0**	**100.00 %**
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	2	2	**0**	**100.00 %**
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	**0**	**100.00 %**
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	**0**	**100.00 %**
	12 . Layanan rujukan	Orang	6	6	**0**	**100.00 %**
03.00	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**					95.38 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		380	380	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**15.38 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	76.92 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	**0**	**100.00 %**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**

	3 . Penyediaan permakanan	Orang	160	160	**0**	**100.00 %**
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	**0**	**100.00 %**
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	7	7	**0**	**100.00 %**
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	125	125	**0**	**100.00 %**
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	1	1	**0**	**100.00 %**
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	70	70	**0**	**100.00 %**
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	7	7	**0**	**100.00 %**
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	**0**	**100.00 %**
	13 . Layanan rujukan	Orang	3	3	**0**	**100.00 %**
04.00	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**					95.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		21	21	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**15.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	75.00 %

	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	**0**	**100.00 %**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	2	2	**0**	**100.00 %**
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**
	4 . Penyediaan sandang	Orang	1	1	**0**	**100.00 %**
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	**0**	**100.00 %**
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	15	15	**0**	**100.00 %**
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan **9** . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang Orang	1 0	1 0	**0** **0**	**100.00 %** **0.00 %**
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	3	3	**0**	**100.00 %**
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	**0**	**100.00 %**
	12 . Layanan rujukan	Orang	1	1	**0**	**100.00 %**
05.00	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					100.00 %
	Ya Terjadi Bencana					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		100	100	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**

	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	102	102	**0**	**100.00 %**
	2 . Penyediaan sandang	Orang	10	10	**0**	**100.00 %**
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	5	5	**0**	**100.00 %**
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	78	78	**0**	**100.00 %**

Sumber data: Pelaporan Perangkat Daerah melalui https;//spm.kemedagri.go.id

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan Pihak Terkait Lainnya dalam pembangunan Nasional. Capaian Kinerja Makro menggunakan indikator sebagai berikut::

Tabel II.1
Indikator Kinerja Makro

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Laju Kinerja 2023 (%)	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	76.89	77.45	0.728
2	Angka Kemiskinan	9.82	9.16	-6.72
3	Angka Pengangguran	8.42	7.86	-1.76
4	Pertumbuhan Ekonomi	5.1	5.01	-1.765
5	Pendapatan Per Kapita	78532	84135	7135
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.48	0.48	0

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja Urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap Urusan Pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing Urusan Pemerintah dan Urusan Penunjang. Data / Informasi setiap indikator wajib diisi oleh Pemerintah Daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel II.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran
Tahun 2023

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Sumber Data	Capaian (%)	Ket
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Disdik	61.60	
2.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Disdik	191.88	
3.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Disdik	100.26	
4.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Disdik	99.71	
5.	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Dinkes	3.74	
6.	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Dinkes	100	
7.	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Dinkes	96.34	
8.	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Dinkes	99.23	
9.	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dinkes	100	
10	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dinkes	100	

11	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	99.06	
12	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinkes	88,38	
13	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinkes	54.73	
14	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	99.93	
15	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	99.97	
16	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinkes	100	
17	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Dinkes	100	
18	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Dinkes	100	
19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	DPUTR	85.32	

20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	DPUTR	63.86	
21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	DPUTR	13.13	
22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	DPUTR	89.76	
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	DPUTR	92.33	
24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	DPUTR	100%	
25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	DPUTR	93.81	
26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	DPUTR	18.03	
27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	DPUTR	100	
28	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	DPRKP	0	

29	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	DPRKP	0	
30	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	DPRKP	30.46	
31	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni	DPRKP	5.58	
32	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	DPRKP	24.81	
33	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satpol PP	71.42	
34	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Satpol PP	100	
35	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	BPBD	100	
36	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD	100	
37	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BPBD	100	

38	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DPKP	84.7	
39	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	DPKP	10.37	
40	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Dinsos	38.09	
41	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Dinsos	33.06	
42	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Disnaker	100	
43	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Disnaker	15.96	
44	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker	4.999.446.100.282,2	
45	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Disnaker	29.23	
46	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Disnaker	59.39	

47	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	DP3APPKB	9.54	
48	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	DP3APPKB	0.03	
49	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	DP3APPKB	147.15	
50	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan	DKP3	31.62	
51	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	DPUTR	100	
52	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	DPUTR	0	
53	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	DPUTR	100	
54	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	DPUTR	0	
55	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	DPUTR	0	
56	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	DPUTR	0	

57	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	DLH	50.04	
58	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	DLH	84.91	
59	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	DLH	30	
60	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Disdukcapil	97.29	
61	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Disdukcapil	94.55	
62	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Disdukcapil	90.02	
63	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Disdukcapil	56.25	
64	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Setda	0	
65	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Setda	0	
66	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	DP3APPKB	2,065	
67	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern ContraceptivCe Prevalence Rate/mCPR)	DP3APPKB	62.44	

68	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	DP3APPKB	17.11	
69	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Dishub	0.9	
70	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Dishub	0.56	
71	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	DKIS	100	
72	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	DKIS	100	
73	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	DKIS	92.41	
74	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	DKUKMPP	42.96	
75	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	DKUKMPP	15.21	
76	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	DPMPTSP	64.53	
77	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	DPOR	0.046	

78	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	DPOR	0.046	
79	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	DPOR	10	
80	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	DKIS	100	
81	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	DKIS	100	
82	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	DKIS	65.27	
83	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Disbudpar	77.58	
84	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dispusip	100	
85	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dispusip	43.22	
86	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Dispusip	59.94	
87	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dispusip	47.92	

88	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP	DKP3	172.27	
89	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Disbudpar	-59.37	
90	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Disbudpar	9.67	
91	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Disbudpar	44.92	
92	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Disbudpar	8.22	
93	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Disbudpar	43.33	
94	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	DKP3	5.13	
95	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	DKP3	-100	
96	Kehutanan	Bukan Urusan Pilihan (BUP)	DKP3	BUP	
97	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	BUP	BUP	
98	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	DKUMKMPP	100	

99	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	DKUMKMPP	47.38	
10	Perdagangan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	DKUMKMPP	82.97	
10	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	DKUMKMPP	12.06	
10	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	DKUMKMPP	0	
10	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	DKUMKMPP	100	
10	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	DKUMKMPP	0	
10	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	DKUMKMPP	0	
10	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	DKUMKMPP	95	
10	Transmigrasi	Bukan Urusan Pilihan (BUP)	BUP	100	

10	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	BPKPD	17.67	
10	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	BPKPD	36.55	
11	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	BPKPD	3	
11	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	BPKPD	3	
11	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures	BPKPD	88.89	
11	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		7	
11	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Setda	0	
11	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Setda	0	
11	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Setda	24.60	
11	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Setda	32.80	
11	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	BKPSDM	77.65	

11	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	BKPSDM	20.50	
12	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	BKPSDM	48.18	
12	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	BPKPD	2.64	
12	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	BPKPD	10228	
12	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	BPKPD	4	
12	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	BPKPD	7,12	
12	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	BPKPD		
12	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	BPKPD	100	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel II.3
Indikator Kinerja Hasil
Tahun 2023

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket

1.	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	185	Dinas Pendidikan	
2.	Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	99	Dinas Pendidikan	
3.	Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	6579	Dinas Pendidikan	
4.	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	0	Dinas Pendidikan	
	Pendidikan	Jumlah pendidik pada PAUD	669	Dinas Pendidikan	
5.	Pendidikan	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	411	Dinas Pendidikan	
6.	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	130	Dinas Pendidikan	
7.	Pendidikan	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	175	Dinas Pendidikan	
8.	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	25607	Dinas Pendidikan	
9.	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima	33165	Dinas Pendidikan	

		perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
10.	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	31705	Dinas Pendidikan	
11.	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	17297	Dinas Pendidikan	
12.	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1249	Dinas Pendidikan	
13.	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	753	Dinas Pendidikan	
14.	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1884	Dinas Pendidikan	
15.	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1063	Dinas Pendidikan	
16.	Pendidikan	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	625	Dinas Pendidikan	
17.	Pendidikan	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	205	Dinas Pendidikan	
18.	Pendidikan	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	369	Dinas Pendidikan	
19.	Pendidikan	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	288	Dinas Pendidikan	
20.	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1757	Dinas Pendidikan	
21.	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-	1018	Dinas Pendidikan	

		IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
22.	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	130	Dinas Pendidikan	
23.	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	28	Dinas Pendidikan	
24.	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	91	Dinas Pendidikan	
25.	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	32	Dinas Pendidikan	
26.	Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	21	Dinas Pendidikan	
27.	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	100	Dinas Pendidikan	
28.	Pendidikan	Jumlah peserta didik ppendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2420	Dinas Pendidikan	
29.	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	268	Dinas Pendidikan	
30.	Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	252	Dinas Pendidikan	

31.	Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	171	Dinas Pendidikan	
32.	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	125	Dinas Pendidikan	
33.	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	21	Dinas Pendidikan	
34.	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	7	Dinas Kesehatan	
35.	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	10	Dinas Kesehatan	
36.	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan	
37.	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	22	Dinas Kesehatan	
38.	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	160	Dinas Kesehatan	
39.	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	22	Dinas Kesehatan	
40.	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan	
41.	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	22	Dinas Kesehatan	
42.	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan	
43.	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	22	Dinas Kesehatan	
44.	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10	Dinas Kesehatan	

45.	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	22	Dinas Kesehatan	
46.	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	188	Dinas Kesehatan	
47.	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	23	Dinas Kesehatan	
48.	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	22	Dinas Kesehatan	
49.	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	22	Dinas Kesehatan	
50.	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan	
51.	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	28	Dinas Kesehatan	
52.	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan	
53.	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	28	Dinas Kesehatan	
54.	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan	
55.	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	40	Dinas Kesehatan	
56.	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinas Kesehatan	
57.	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	504	Dinas Kesehatan	
58.	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2659	Dinas Kesehatan	
59.	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	22	Dinas Kesehatan	
60.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	9.61	DPUTR	
61.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	13932.07	DPUTR	

62.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	28.34	DPUTR	
63.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	21.16	DPUTR	
64.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	100	DPUTR	
65.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	100	DPUTR	
66.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	100	DPUTR	
67.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	100	DPUTR	
68.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	79.28	DPUTR	
69.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	1	DPUTR	
70.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	0	DPUTR	
71.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0	DPUTR	
72.	Pekerjaan Umum dan	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota	0	DPUTR	

	Penataan Ruang	Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)			
73.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1	DPUTR	
74.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	7	DPUTR	
75.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	62132	DPUTR	
76.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	11217	DPUTR	
77.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	73349	DPUTR	
78.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	1045	DPUTR	
79.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	1045	DPUTR	
80.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	8964	DPUTR	
81.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	4.1	DPUTR	

82.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	1.65	DPUTR	
83.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	15.44	DPUTR	
84.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	78.21	DPUTR	
85.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	2	DPUTR	
86.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	1	DPUTR	
87.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	11217	DPUTR	
88.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	80.21	DPUTR	
89.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	DPUTR	
90.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	290	DPUTR	
91.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	DPUTR	
92.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	DPUTR	

93.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	42	DPUTR	
94.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	8	DPUTR	
95.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	53	DPUTR	
96.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	11	DPUTR	
97.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	159.172	DPUTR	
98.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dibangun	0	DPUTR	
99.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dibangun	0	DPUTR	
100.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0	DPUTR	
101.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	DPUTR	
102.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	1.8595	DPUTR	
103.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	DPUTR	
104.	Pekerjaan Umum dan	Panjang jalan yang dipelihara	3013.86	DPUTR	

	Penataan Ruang				
105.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dipelihara	3302.8	DPUTR	
106.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	42	DPUTR	
107.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	68	DPUTR	
108.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	42	DPUTR	
109.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	DPUTR	
110.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	DPUTR	
111.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	DPUTR	
112.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	DPUTR	
113.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang	0	DPUTR	

		sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala			
114.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	DPUTR	
115.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	0	DPUTR	
116.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	0	DPUTR	
117.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	0	DPUTR	
118.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	DPUTR	
119.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPUTR	
120.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan	0	DPUTR	

		usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
121.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUTR	
122.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUTR	
123.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	DPUTR	
124.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	DPUTR	
125.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	DPUTR	
126.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	DPUTR	
127.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPUTR	
128.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan	0	DPUTR	

		kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
129.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUTR	
130.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUTR	
131.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	3034	DPRKP	
132.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	DPRKP	
133.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	DPRKP	
134.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	DPRKP	
135.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DPRKP	
136.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	DPRKP	
137.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	DPRKP	

138.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	DPRKP	
139.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	DPRKP	
140.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKP	
141.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKP	
142.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKP	
143.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKP	
144.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKP	
145.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DPRKP	
146.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	0	DPRKP	

147.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	DPRKP	
148.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0	DPRKP	
149.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah di kab/kota	0	DPRKP	
150.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit PK RTLH	0	DPRKP	
151.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tidak layak huni	0	DPRKP	
152.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	DPRKP	
153.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rasio rumah dan KK	0	DPRKP	
154.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah pembangunan baru	0	DPRKP	
155.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	0	DPRKP	
156.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0	DPRKP	
157.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	0	DPRKP	
158.	Perumahan Rakyat dan	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	0	DPRKP	

	Kawasan Pemukiman				
159.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	DPRKP	
160.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	DPRKP	
161.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	DPRKP	
162.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang terregistrasi	0	DPRKP	
163.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	DPRKP	
164.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	10	Satpol PP	
165.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	358	Satpol PP	
166.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	6	Satpol PP	
167.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	Satpol PP	
168.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	100	Satpol PP	

	Perlindungan Masyarakat				
169.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya sarana prasarana minimal	100	BPBD	
170.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	BPBD	
171.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	BPBD	
172.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	BPBD	
173.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	
174.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100	BPBD	
175.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100	BPBD	
176.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100	BPBD	
177.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	BPBD	

	Perlindungan Masyarakat				
178.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	BPBD	
179.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	BPBD	
180.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	78	BPBD	
181.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	BPBD	
182.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	282	DPKP	
183.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	DPKP	
184.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0	DPKP	
185.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan	0	DPKP	

		evakuasi di setiap keluarahan/desa			
186.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	78	DPKP	
187.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	0	DPKP	
188.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	DPKP	
189.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0	DPKP	
190.	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	21	Dinas Sosial	
191.	Sosial	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	995	Dinas Sosial	
192.	Sosial	JumlahTimReaksi Cepat yang dibentuk	1	Dinas Sosial	
193.	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	379	Dinas Sosial	
194.	Sosial	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus	2	Dinas Sosial	

		layanan kedaruratan yang dimiliki			
195.	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	379	Dinas Sosial	
196.	Sosial	Jumlahrumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinas Sosial	
197.	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	14	Dinas Sosial	
198.	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	95	Dinas Sosial	
199.	Sosial	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	2	Dinas Sosial	
200.	Sosial	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	72	Dinas Sosial	
201.	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	72	Dinas Sosial	
202.	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	8	Dinas Sosial	
203.	Sosial	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	5	Dinas Sosial	
204.	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial	396	Dinas Sosial	

		sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia			
205.	Sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	38	Dinas Sosial	
206.	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	43	Dinas Sosial	
207.	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	74	Dinas Sosial	
208.	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	21	Dinas Sosial	
209.	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	19	Dinas Sosial	
210.	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	12	Dinas Sosial	
211.	Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	102	Dinas Sosial	
212.	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	2	Dinas Sosial	
213.	Sosial	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	4	Dinas Sosial	

214.	Sosial	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	2	Dinas Sosial	
215.	Sosial	Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial	78	Dinas Sosial	
216.	Sosial	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	404	Dinas Sosial	
217.	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	Dinas Tenaga Kerja	
218.	Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	100	Dinas Tenaga Kerja	
219.	Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	27	Dinas Tenaga Kerja	
220.	Tenaga Kerja	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100	Dinas Tenaga Kerja	
221.	Tenaga Kerja	Persentase instruktur bersertifikatkompetensi	38	Dinas Tenaga Kerja	
222.	Tenaga Kerja	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	24	Dinas Tenaga Kerja	
223.	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi	44.68	Dinas Tenaga Kerja	
224.	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	96	Dinas Tenaga Kerja	
225.	Tenaga Kerja	Jumlah penganggur yang dilatih	1708	Dinas Tenaga Kerja	
226.	Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	79.07	Dinas Tenaga Kerja	
227.	Tenaga Kerja	Persentase penyerapan lulusan	43.08	Dinas Tenaga Kerja	
228.	Tenaga Kerja	Lulusan bersertifikat kompetensi	1160	Dinas Tenaga Kerja	
229.	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	235	Dinas Tenaga Kerja	

230.	Tenaga Kerja	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Dinas Tenaga Kerja	
231.	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Dinas Tenaga Kerja	
232.	Tenaga Kerja	Data tingkat produktivitas total	0	Dinas Tenaga Kerja	
233.	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	64.13	Dinas Tenaga Kerja	
234.	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	283.82	Dinas Tenaga Kerja	
235.	Tenaga Kerja	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	68	Dinas Tenaga Kerja	
236.	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	100	Dinas Tenaga Kerja	
237.	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	46.15	Dinas Tenaga Kerja	
238.	Tenaga Kerja	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0.48	Dinas Tenaga Kerja	
239.	Tenaga Kerja	Jumlah mogok kerja	0	Dinas Tenaga Kerja	
240.	Tenaga Kerja	Jumlah penutupan perusahaan	2	Dinas Tenaga Kerja	
241.	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Tenaga Kerja	
242.	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	
243.	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan PHK	17	Dinas Tenaga Kerja	

244.	Tenaga Kerja	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	53	Dinas Tenaga Kerja	
245.	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	Dinas Tenaga Kerja	
246.	Tenaga Kerja	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Dinas Tenaga Kerja	
247.	Tenaga Kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	94.12	Dinas Tenaga Kerja	
248.	Tenaga Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1980	Dinas Tenaga Kerja	
249.	Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1692	Dinas Tenaga Kerja	
250.	Tenaga Kerja	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	24	Dinas Tenaga Kerja	
251.	Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	5	Dinas Tenaga Kerja	
252.	Tenaga Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	7	Dinas Tenaga Kerja	
253.	Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	Dinas Tenaga Kerja	
254.	Tenaga Kerja	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	235	Dinas Tenaga Kerja	
255.	Tenaga Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	235	Dinas Tenaga Kerja	
256.	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang mendapatkan sosialisasi	0	Dinas Tenaga Kerja	

257.	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang terdata	235	Dinas Tenaga Kerja	
258.	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	Dinas Tenaga Kerja	
259.	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	235	Dinas Tenaga Kerja	
260.	Tenaga Kerja	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	30	Dinas Tenaga Kerja	
261.	Tenaga Kerja	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	0	Dinas Tenaga Kerja	
262.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	22	DP3APPKB	
263.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	32	DP3APPKB	
264.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5	DP3APPKB	
265.	Pemberdayaan Perempuan dan	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	49	DP3APPKB	

	Perlindungan Anak				
266.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	DP3APPKB	
267.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	11	DP3APPKB	
268.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	DP3APPKB	
269.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1	DP3APPKB	
270.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	9	DP3APPKB	
271.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	22	DP3APPKB	
272.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	15	DP3APPKB	
273.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	DP3APPKB	
274.	Pemberdayaan Perempuan dan	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak	3	DP3APPKB	

	Perlindungan Anak	perempuan yg telah terstandardisasi			
275.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	DP3APPKB	
276.	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	100	DKP3	
277.	Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	50	DKP3	
278.	Pangan	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	1	DKP3	
279.	Pangan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	2	DKP3	
280.	Pangan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	DKP3	
281.	Pangan	Tertanganinya kerawanan pangan	1	DKP3	
282.	Pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	1	DKP3	
283.	Pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1	DKP3	
284.	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	DPUTR	
285.	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	DPUTR	
286.	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan	0	DPUTR	

		Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.			
287.	Pertanahan	Dokumen Izin membuka tanah	0	DPUTR	
288.	Pertanahan	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	DPUTR	
289.	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	33.08	DLH	
290.	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	78.81	DLH	
291.	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	25.28	DLH	
292.	Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	84.92	DLH	
293.	Lingkungan Hidup	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	63	DLH	
294.	Lingkungan Hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	2	DLH	
295.	Lingkungan Hidup	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kotaPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	DLH	
296.	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	DLH	

297.	Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	14	DLH	
298.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	100	Disdukcapil	
299.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perceraian	29	Disdukcapil	
300.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta kematian	2797	Disdukcapil	
301.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan	2	Disdukcapil	
302.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Setda	
303.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	Setda	
304.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam	0	Setda	

		peningkatan kapasitas dan diberdayakan			
305.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	Setda	
306.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	DP3APPKB	
307.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	29.37	DP3APPKB	
308.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	21.66	DP3APPKB	
309.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100	DP3APPKB	
310.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	53	DP3APPKB	
311.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	DP3APPKB	
312.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25.92	DP3APPKB	
313.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	213	DP3APPKB	

314.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	63.91	DP3APPKB	
315.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	7	DP3APPKB	
316.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	68.71	DP3APPKB	
317.	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	100	Dishub	
318.	Perhubungan	Terlaksananya pelayanan uji berkala	0	Dishub	
319.	Perhubungan	Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	Dishub	
320.	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	0	Dishub	
321.	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	DKIS	
322.	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	DKIS	
323.	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan	1	DKIS	

		memanfaatkan jaringan intra pemerintah			
324.	Komunikasi dan Informatika	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	0	DKIS	
325.	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	DKIS	
326.	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0	DKIS	
327.	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	0	DKIS	
328.	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0	DKIS	
329.	Komunikasi dan Informatika	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	DKIS	

330.	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0	DKIS	
331.	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	0	DKIS	
332.	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	0	DKIS	
333.	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	0	DKIS	
334.	Komunikasi dan Informatika	Persentase data yang dapat berbagi pakai	0	DKIS	
335.	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	0	DKIS	
336.	Komunikasi dan Informatika	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0	DKIS	
337.	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	0	DKIS	
338.	Komunikasi dan Informatika	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	0	DKIS	
339.	Komunikasi dan Informatika	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah	0	DKIS	

		dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)			
340.	Komunikasi dan Informatika	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	0	DKIS	
341.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	25.53	DKUKMPP	
342.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DKUKMPP	
343.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11	DKUKMPP	
344.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11	DKUKMPP	
345.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	33.33	DKUKMPP	

346.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.24	DKUKMPP	
347.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.74	DKUKMPP	
348.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	DKUKMPP	
349.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	21.48	DKUKMPP	
350.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DKUKMPP	
351.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaranuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DKUKMPP	
352.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	DKUKMPP	

353.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7.4	DKUKMPP	
354.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	41.67	DKUKMPP	
355.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0	DKUKMPP	
356.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	7.42	DKUKMPP	
357.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	5.43	DKUKMPP	
358.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	11.95	DKUKMPP	
359.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	4.12	DKUKMPP	
360.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0	DKUKMPP	
361.	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	DPMPTSP	
362.	Penanaman Modal	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0	DPMPTSP	
363.	Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian	0	DPMPTSP	

		fasilitas/insentif penanaman modal			
364.	Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	5	DPMPTSP	
365.	Penanaman Modal	Kegiatan pameran penanaman modal	1	DPMPTSP	
366.	Penanaman Modal	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1	DPMPTSP	
367.	Penanaman Modal	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	1	DPMPTSP	
368.	Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1	DPMPTSP	
369.	Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	1	DPMPTSP	
370.	Penanaman Modal	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	1	DPMPTSP	
371.	Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	1	DPMPTSP	
372.	Penanaman Modal	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	1	DPMPTSP	
373.	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	40	DPOR	
374.	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	DPOR	
375.	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	40	DPOR	
376.	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	43	DPOR	
377.	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	62	DPOR	

378.	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	8	DPOR	
379.	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	0	DKIS	
380.	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	DKIS	
381.	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0	DKIS	
382.	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	DKIS	
383.	Statistik	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	DKIS	
384.	Statistik	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	0	DKIS	
385.	Statistik	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	0	DKIS	
386.	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	DKIS	
387.	Persandian	Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	0	DKIS	
388.	Persandian	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	DKIS	
389.	Persandian	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah	0	DKIS	

		daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan			
390.	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	190	Disbudpar	
391.	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	152	Disbudpar	
392.	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	169	Disbudpar	
393.	Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	25	Disbudpar	
394.	Kebudayaan	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	58	Disbudpar	
395.	Kebudayaan	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	9	Disbudpar	
396.	Kebudayaan	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Disbudpar	
397.	Kebudayaan	Pengembangan cagar budaya provinsi	0	Disbudpar	

		(penelitian, revitalisasi, adaptasi)			
398.	Kebudayaan	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	43	Disbudpar	
399.	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Disbudpar	
400.	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	Disbudpar	
401.	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	Disbudpar	
402.	Kebudayaan	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	Disbudpar	
403.	Kebudayaan	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	1	Disbudpar	
404.	Kebudayaan	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	1	Disbudpar	
405.	Kebudayaan	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	20	Disbudpar	
406.	Kebudayaan	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	30	Disbudpar	
407.	Kebudayaan	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Disbudpar	
408.	Kebudayaan	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Disbudpar	
409.	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	100	Dispusip	
410.	Perpustakaan	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0	Dispusip	

411.	Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0	Dispusip	
412.	Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	100	Dispusip	
413.	Perpustakaan	Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat	18902	Dispusip	
414.	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dispusip	
415.	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dispusip	
416.	Perpustakaan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	Dispusip	
417.	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	0	Dispusip	
418.	Kearsipan	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	0	Dispusip	
419.	Kearsipan	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0	Dispusip	
420.	Kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Dispusip	
421.	Kearsipan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Dispusip	
422.	Kearsipan	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dispusip	
423.	Kearsipan	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0	Dispusip	

424.	Kearsipan	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0	Dispusip	
425.	Kearsipan	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dispusip	
426.	Kearsipan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	Dispusip	
427.	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	180	DKP3	
428.	Kelautan dan Perikanan	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100	DKP3	
429.	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	153	DKP3	
430.	Kelautan dan Perikanan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	725	DKP3	
431.	Kelautan dan Perikanan	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	2815210	DKP3	
432.	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	0	Disbudpar	
433.	Pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar,	0	Disbudpar	

		fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			
434.	Pariwisata	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	0	Disbudpar	
435.	Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	Disbudpar	
436.	Pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	0	Disbudpar	
437.	Pariwisata	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Disbudpar	
438.	Pariwisata	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	Disbudpar	
439.	Pariwisata	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	0	Disbudpar	
440.	Pariwisata	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0	Disbudpar	
441.	Pariwisata	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0	Disbudpar	
442.	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	7	DKP3	
443.	Pertanian	Prasarana pertanian yang digunakan	6	DKP3	
444.	Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian	66	DKP3	
445.	Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan	100	DKP3	
446.	Pertanian	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	1	DKP3	
447.	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	1	DKP3	
448.	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	BUP	
449.	Kehutanan	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	BUP	

450.	Kehutanan	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	BUP	
451.	Kehutanan	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	BUP	
452.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	BUP	
453.	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0	DKUKMPP	
454.	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	61.9	DKUKMPP	
455.	Perdagangan	Persentase penerbitan TDG	91	DKUKMPP	
456.	Perdagangan	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0	DKUKMPP	
457.	Perdagangan	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	DKUKMPP	
458.	Perdagangan	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	DKUKMPP	
459.	Perdagangan	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	DKUKMPP	
460.	Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100	DKUKMPP	
461.	Perdagangan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0	DKUKMPP	
462.	Perdagangan	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	8.49	DKUKMPP	
463.	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	0	DKUKMPP	
464.	Perdagangan	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi	0	DKUKMPP	

		terhadap ketentuan yang berlaku			
465.	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	DKUKMPP	
466.	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	50	DKUKMPP	
467.	Perindustrian	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	53.57	DKUKMPP	
468.	Perindustrian	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	DKUKMPP	
469.	Perindustrian	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	1.6	DKUKMPP	
470.	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	BUP	
471.	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	BUP	
472.	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	BUP	

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II.4
Indikator Kinerja Hasil
Indikator Fingsi Penunjang Urusan

Tahun 2023

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Sumber Data	Capaian	Ket
1.	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	BPKPD	1763.327	
2.	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	BPKPD	2205.949	
3.	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	BPKPD	3	
4.	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	BPKPD	3	
5.	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures	BPKPD	85.76	
6.	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		1	
7.	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Setda	0	
8.	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Setda	4.23	
9.	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Setda	20.24	
10.	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Setda	8.29	

11.	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	BKPSDM	690.293	
12.	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	BKPSDM	9.17	
13.	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	BKPSDM	95.97	
14.	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	BPKPD	0.79	
15.	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	BPKPD	0.20	
16.	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	BPKPD	100	
17.	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	BPKPD	430.98	
18.	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	BPKPD	0	
19.	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	BPKPD	0	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif, yang dilakukan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Daerah Kota Cirebon melaksanakan kewajiban melaporkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahanya melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon yang dibuat dengan berpedoman pada ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, RKT Tahun 2023, RKPD Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya, kemudian realisasi dan target tersebut dilakukan penghitungan untuk menemukan selisih atau celah kinerja (performance gap).pada umumnya penghitungan capaian menggunakan rumus Realisasi/Target X100%, jika semakin tinggi realisasi semakin baik, namun jika semakin rendah realisasi semakin baik maka menggunakan rumus (Target-(Realisasi-Target))/Target X100% Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapat strategi yang tepat dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang (performance improvement). Predikat capaian kinerja dapat dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel II.5

Tabel Predikat Capaian Kinerja Berdasar Kode Warna

Persentase	Predikat	Kode Warna
<100%	Tidak tercapai	
=100%	Tercapai / Sesuai Target	
>100%	Melebihi Target	

Sementara predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dilakukan pendekatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

Tabel II.6

Tabel Predikat Capaian Kinerja

Predikat	Rata Rata Capaian
Sangat Tinggi	>90
Tinggi	75.00 – 89.99
Sedang	65.00 – 74.99
Rendah	50.00 – 64.99
Sangat Rendah	0 – 49.99

2.3.1. Rencana Aksi Tindak Lanjut Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan implementasi Akuntabiitas Kinerja, diantaranya dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2022. Rencana aksi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) difokuskan pada identifikasi permasalahan, kemudian disusun upaya melalui aktivitas yang dinilai dapat mengatasi permasalahan tersebut. Secara umum seluruh komponen pada rencana aksi tersebut dapat dilaksanakan, berikut adalah laporan penyelenggaraan aktivitas peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 sesuai rencana aksi yang disusun :

Tabel II.7

Matriks Laporan Progress Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE AKIP

Tahun 2023

No	REKOMENDASI LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres	Link Bukti Dukung
1	Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;	Mengevaluasi dokumen teknis pengukuran kinerja dan peraturan terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal	2 Dokumen	Triwulan II sampai dengan Triwulan III	SETDA	Selesai	s.id/sakipcrb2023
2	Menetapkan IKU PD yang dilengkapi formulasi perhitungan dan definisi operasional serta menjadikan IKU tersebut sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja;	Memperbaiki penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Perangkat Daerah	32 Dokumen	Triwulan II	SETDA, BAPPELIT BANGDA dan Seluruh Perangkat Daerah	Selesai	s.id/sakipcrb2023
3	Memastikan perencanaan kinerja sesuai dengan kinerja organisasi dan dapat menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kota Cirebon;	Mengevaluasi Sasaran Strategis maupun rencana kinerja dan menginternalisasi target-target kinerja pada seluruh *Stakeholder*	2 Kegiatan	Triwulan II sampai dengan Triwulan III	BAPPELIT BANGDA	Selesai	s.id/sakipcrb2023

No	REKOMENDASI LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres	Link Bukti Dukung
4	Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil;	Mereview kembali dokumen perencanaan kinerja, di setiap level	32 Dokumen	Triwulan IV	BAPPELIT BANGDA	Selesai	s.id/sakipcrb2023
5	Memastikan penjenjangan kinerja, terutama dari level kepala PD ke level di bawahnya, telah disusun dan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;	Melakukan review dan penyusunan proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon serta mengsinergiskannya dengan PK hingga unit kerja terendah	32 Bundel/ Dokumen	Triwulan I sampai dengan Triwulan II	SETDA	Selesai	s.id/sakipcrb2023
6	Memastikan laporan kinerja menyajikan realisasi kinerja yang termuat dalam PK;	Melaksanakan pembinaan penyusunan LKIP dan mereviu Laporan Kinerja Interim Triwulan secara komprehensif	2 Kegiatan	Triwulan I dan Triwulan IV	SETDA, BAPPELIT BANGDA dan Seluruh Perangkat Daerah	Selesai	s.id/sakipcrb2023
7	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan dokumen perencanaan selanjutnya;	Melaksanakan FGD dan menyusun surat edaran bagi perangkat daerah untuk mengkaji hasil laporan kinerja	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	Triwulan II	SETDA	Selesai	s.id/sakipcrb2023
8	Memastikan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.	Mengarahkan perangkat daerah menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut Implementasi SAKIP berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	1 Kegiatan dan 32 Dokumen	Triwulan II sampai dengan Triwulan IV	SETDA	Selesai	s.id/sakipcrb2023

Sejumlah upaya tersebut diatas diharapkan menjadi katalisator dalam peningkatan akuntabilitas kinerja. Hasil evaluasi pada tahun 2023 yang ditunjukan Laporan Hasil Evaluasi Nomor B/313/AA.05/2023 Tahun 2023 menunjukan adanya

peningkatan nilai akuntabilitas kinerja, sebelumnya pada tahun 2022 bernilai 68,08 menjadi 68, 56 pada tahun 2023 dengan komponen sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	23,89	23,98
2	Pengukuran Kinerja	30	17,74	17,88
3	Pelaporan Kinerja	15	10,20	10,27
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,25	16,43
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,08	68,56
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Namun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 masih ditemukan adanya permasalahan yang menghambat implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Sebagai respon terhadap hal tersebut pada tahun 2024 di susun rencana aksi dan tindak lanjut sebagai berikut :

Komponen	Catatan	REKOMENDASI LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Perencanaan	Terdapat rumusan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah yang belum berorientasi hasil pada level PD seperti pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu sasaran "Meningkatnya kapasitas personil satgas penanggulangan bencana" dengan indikator "Jumlah satgas penanggulangan bencana dan Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan, Pendidikan dan pelatihan" serta pada	Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan level Kota, dan memastikan hasil penyempurnaan tersebut tertuang dengan baik dalam penetapan RPJMD tahun berikutnya agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya berorientasi pada hasil	Melaksanakan FGD dengan melibatkan seluruh stake holder terkait dalam pelaksanaan perencanaan	1 Dokumen	Triwulan II sampai dengan Triwulan III	BAPPELIT BANGDA

Komponen	Catatan	REKOMENDASI LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan yaitu sasaran "Meningkatnya peran KUKM dalam mendukung perekonomian" dengan indikator "Jumlah UMKM yang dibina";					
Perencanaan	Penjabaran kinerja yang disusun belum menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja, sehingga terjadi ketidakselarasan penjabaran kinerja organisasi dengan kinerja individu;	Menggunakan hasil penyempurnaan tersebut untuk menjabarkan kinerja mulai dari level Wali Kota sampai level individu sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi dengan memastikan kesesuaian antara sasaran, indikator maupun target yang ditetapkan;	Melaksanakan FGD dengan melibatkan seluruh stake holder terkait dalam penyusunan dan penjenjangan kinerja untuk menjamin keselarasan IKU, Proses Bisnis, Cascading Kinerja hingga PK tingkat Individu	1 Dokumen (laporan)	Triwulan I	BAPPELITBANGDA-SETDA
			Penyusunan IKU, Proses BIsnis dan PK Individu sesuai ketentuan	32 Dokumen	Triwulan I-II	
Perencanaan	Terdapat beberapa ketidakselarasan PK dengan Indikator Kinerja Utama PD. Contoh pada BPBD, pada PK 2023 hanya menyajikan 2 Indikator Kinerja yaitu "Tingkat Kepuasan terhadap kinerja BPBD" dan "Jumlah satgas penanggulangan bencana dan Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan, Pendidikan dan pelatihan" , sedangkan pada dokumen IKU terdapat 4 Indikator Kinerja Utama;	Memastikan perencanaan kinerja sesuai dengan kinerja organisasi dan dapat menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kota Cirebon;	Memberikan pendampingan dan desk secara langsung terhadap Penyusunan Perjanjian Kinerja	1 Kegiatan	Triwulan I	SETDA

Komponen	Catatan	REKOMENDASI LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Perencanaan	Indikator kinerja pada dokumen perencanaan PD belum cukup untuk menjawab sasaran strategis yang ditetapkan. Contoh pada DPMPTSP pada sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Investasi", indikator kinerja yang ditetapkan "Meningkatnya Investasi di Kota Cirebon", dan belum menampilkan peningkatan nilai investasi;		Mereview kembali dokumen perencanaan Strategis pada Perangkat Daerah	1 Dokumen (laporan Hasil Review)	Triwulan II	BAPPELITBANGDA
Perencanaan	Penetapan program dan kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sepenuhnya relevan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah;	Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan agar seluruhnya mendukung tercapainya sasaran strategis dan prioritas pembangunan daerah;	Melaksanakan tahapan Rencana Kinerja dengan memperdalam substansi pada target dan indikator program sesuai arah prioritas pembangunan daerah	32 Dokumen (rencana Kerja)		BAPPELITBANGDA
	Terdapat beberapa target pada PK PD 2023 yang masih ditetapkan dibawah realisasi Tahun 2022. Contoh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Indikator "ASFR banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada usia tertentu antara 15-19 tahun".					
Perencanaan	Pada dokumen Indikator Kinerja Utama beberapa PD belum dilengkapi dengan definisi operasional, sumber data dan formulasi perhitungan untuk mengetahui bagaimana cara pengumpulan dan penghitungan indikator kinerja untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan untuk menggambarkan	Melengkapi manual IKU baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun PD dengan definisi operasional serta sumber data pada masing-masing indikatornya;	Melaksanakan Desk IKU di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	33 Dokumen (1 Dokumen laporan, 32 IKU)	Triwulan 1	BAPPELITBANGDA-SETDA

Komponen	Catatan	REKOMENDASI LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
	capaian kinerja seperti pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan DPMPTSP;					
Pengukuran	Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN	Melaksanakan Pembahasan Kinerja berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah disusun termasuk dalam mempertimbangkan Langkah strategis prioritas pengembangan kompetensi danpengadaan / mutasi ASN berdasarkan isu kinerja	1 Dokumen (Notulen/berita acara	Triwulan 1	SETDA
Pelaporan	Laporan kinerja PD sudah menyajikan analisa perbandingan antara target tahun ini dengan tahun sebelumnya, namun terdapat PD yang belum menyajikan sumber data perolehan perhitungan capaian kinerja. Contoh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;		Melaksanakan desk /Pedampingan penyusunan Laporan Kinerja dengan intensif	3 Kegiatan	Triwulan I	SETDA

Komponen	Catatan	REKOMENDASI LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Pelaporan	Laporan Kinerja belum menyajikan permasalahan atau kendala yang dihadapi dengan strategi yang harus dilakukan untuk perbaikan perencanaan kinerja;		Melaksanakan desk pendampingan penyusunan serta memperbaiki Laporan Kinerja sesuai ketentuan	32 Dokumen	Triwulan I	SETDA
Evaluasi Kinerja Internal	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih secara manual dan berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mempertimbangkan capaian kinerja outcome yang diperjanjikan sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya;	Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui teknologi informasi yang tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja;	Melakukan optimalisasi penggunaan sistem esakip.cirebonkota.go.id, khususnya dalam fitur pengukuran kinerja.	1 Sistem aplikasi	Triwulan I -IV	Sekretariat Daerah
			Melaksanakan FGD evaluasi berdasarkan Laporan interim triwulan yang memuat upaya serta faktor penghambat dalam pencapaian kinerja.	4 Kali kegiatan	Triwulan I - IV	Sekretariat Daerah - BAPPELITBANGDA
	Informasi kinerja yang dituangkan terutama pada Laporan Kinerja PD belum dimanfaatkan dengan baik untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya.	Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja baik level Pemkot maupun PD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya;	Mengoptimalkan proses evaluasi serta menjadikan hasil capaian Sebagai Bahan Pertimbangan bagi Perangkat Darah ataupun unit kerja pengampu perencanaan	1 Surat Edaran	Triwulan 1	SETDA
				2 Kegiatan FGD	Triwulan 1 dan Triwulan IV	SETDA
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja belum dilakukan secara berkala, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemkot dan PD;	Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan	Melaksanakan FGD Kinerja serta penyelenggaraan Pelayanan Publik Setiap Bulan dengan memantau perkembangan kinerja serta	12 Kegiatan	Triwulan I s.d. IV	SETDA – INSPEKTORAT

Komponen	Catatan	REKOMENDASI LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		peningkatan kinerja Pemda dan PD;	mantau tindak lanjut atas hasil LHE kinerja			
	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap PD belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan;	Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD	Melaksanakan BIMTEK terkait peningkatan Akuntabiliitas Kinerja	1 Kegiatan	Triwulan II	INPSPEKTORAT-SETDA
	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap PD belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan;	Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian reward and punishment kepada PD, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP.	Menyusun Keputusan Wali Kota terkait Reward dan Punishment Hasil SAKIP	1 Dokumen	Triwulan 1	SETDA-INSPEKTORAT

2.3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran utama keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis, dimana hal tersebut merupakan ejawantah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Melalui penetapan indikator kinerja utama diharapkan pencapaian kinerja dapat lebih fokus dan terukur. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 didasarkan pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023, sehingga seluruh sasaran dan indikator tersebut menjadi sasaran dan indikator yang diperjanjikan. Hasil pengukuran atas akuntabilitas kinerja melalui capaian Indikator Kinerja Utama sekaligus Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.8

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja	Ket.
	Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam segala Bidang							
1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	83,84	84.135	75,0	100,35 %	Sumber Data : BPS Melebihi Target dan Realisasi Nasional
		Pengeluaran Perkapita (ribu Rupiah)	Ribu Rupiah	12628	12.506	-	99,03%	Sumber Data : BPS
2	Meningkatan akses dan mutu Pendidikan	Rata – rata lama Sekolah	Tahun	10,61	10,37	8,77	97,74%	Sumber Data : BPS Melebihi Realisasi Nasional
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,99	13,16	13,15	94,07%	Sumber Data : BPS Melebihi Realisasi Nasional
3	Meningkatnya derajat	Angka Usia	Tahun	72,64	75,17	73,93	103,48 %	Sumber Data : BPS

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja	Ket.
	kesehatan masyarakat Kota Cirebon	Harapan Hidup						Melebihi Target dan Melebihi Realisasi Nasional
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99	101,94	-	102,97 %	Sumber Data : BPS Database Dinas Kesehatan Melebihi Target
4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender /IDG	Poin	94,46	94,91	91,63	**100,476%**	Sumber Data : BPS Melebihi Target Nasional
		Indeks Pemberdayaan Gender /IPG	Poin	78,47	78,07	76,59	**99,49%**	Data Baru dikeluarkan BPS pada TW IV Tahun 2024
5	Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon	Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan	Persen	34,37-34,58	28,77	-	83,44%	
6	Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	Meningkatnya PDRB dari Sektor Pariwisata	Persen	5,90-5,93	5,83%	-	98,81%	Sumber Data : BPS Tidak ada sandingan data/capaian di tingkat nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja	Ket.
7	Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan /PPH	Persen	95,15	92,26	-	97,32%	Sumber Data : BPS Tidak ada sandingan di tingkat nasional
8	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Persen	78,41	79,83	-	101,81 %	Sumber Data : Laporan Monitoring objek Kebudayaan Lokal Kota Cirebon Tidak ada sandingan data/capaian di tingkat nasional
9	Meningkatnya kerukunan umat Beragama	Konflik Antar Umat Beragama	Kasus	0	0	30	100%	Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon Melebihi realisasi Nasional
	Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif							

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja	Ket.
10	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80,00	73,91	59,32	92,39 %	Sumber Data : KEMENPAN RB Melebihi Rata Rata Nilai Kab/Kota secara Nasional
11	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	Nilai	WTP	WTP	-	100%	Sumber Data : BPK RI Tidak ada sandingan di tingkat nasional
	Misi 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan							
12	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH	Poin	56,82	50,04	72,54	88,07%	Sumber Data : Kementrian LHK Dibawah Realisasi Nasional
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	7,72	7,25	-	93,91%	Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jabar Tidak ada

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja	Ket.
								sandingan di tingkat nasional
	Misi ke 4 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban yang Kondusif							
13	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Poin	83,00	75,00	-	90,36%	Sumber Data : Laporan Evaluasi Mandiri ketentraman dan ketertiban umum oleh SATPOL PP Tidak ada sandingan di tingkat nasional

Dari tabel diatas dapat terlihat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja tersebut sebagai berikut :

A. Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam segala Bidang

1. PDRB per Kapita (Rp.) pencapaian 100,35% dengan predikat Melebihi Target.
2. Pengeluaran Perkapita (ribu Rupiah), pencapaian 99,03% dengan predikat Sangat Tinggi.
3. Rata –rata lama Sekolah, pencapaian 97,74% dengan predikat Sangat Tinggi.
4. Harapan lama sekolah, pencapaian 94,07% dengan predikat Sangat Tinggi.
5. Angka Usia Harapan Hidup, pencapaian 103,48% dengan predikat Melebihi Target

6. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, pencapaian 102,97% dengan predikat Melebihi Target
7. Indeks Pemberdayaan Gender /IPG, pencapaian 100,476% dengan predikat Melebihi Target
8. Indeks Pembangunan Gender /IDG, pencapaian 99,49% dengan predikat Sangat Tinggi
9. Peningkatan PDRB dari sektor Perdagangan, pencapaian 83,44% dengan predikat Tinggi
10. Meningkatnya PDRB dari Sektor Pariwisata, pencapaian 98,81% dengan predikat Sangat Tinggi
11. Skor Pola Pangan Harapan /PPH pencapaian 97,32% dengan predikat Sangat Tinggi
12. Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal, 101,81% dengan predikat Melebihi Target
13. Konflik Antar Umat Beragama mencapai 100% dengan predikat Sesuai Target

B. Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif

1. Indeks Reformasi Birokrasi, pencapaian 92,39% dengan predikat Sangat Tinggi
2. Opini BPK atas laporan keuangan daerah, pencapaian 100% dengan predikat Sesuai Target

C. Misi 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH, mencapai 88,07% dengan predikat Tinggi
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, mencapai 93,91% Sangat Tinggi

D. Misi 4 Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban yang Kondusif

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadan Ketentraman dan Ketertiban Umum, pencapaian 90,36% dengan predikat Sangat Tinggi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Indikator, didapati indikator dan pencapaian tidak sesuai target namun dengan predikat Sangat Tinggi atau >90% berjumlah 9, dan pencapaian predikat sesuai Target adalah 2, dan berpredikat Tinggi berjumlah 2, dan capaian kinerja melebihi target berjumlah 5

berikut disajikan persentase hasil pencapaian indikator kinerja utama dalam bentuk diagram

Gambar II.1
Diagram realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama

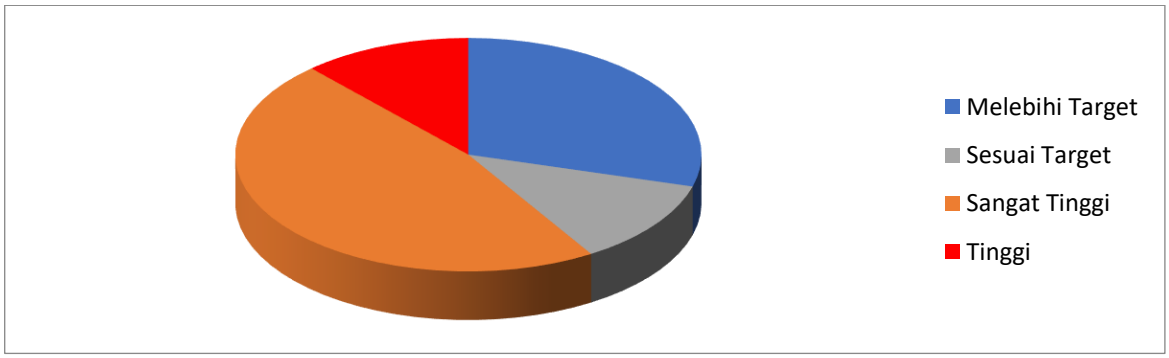

Pencapaian dari Indikator Kinerja Utama juga merupakan capaian dari Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Wali Kota Tahun 2023, hal ini karena seluruh Indikator Kinerja Utama diperjanjikan oleh Wali Kota Cirebon selaku pimpinanan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Sinkronisasi ini merupakan suatu upaya menjamin seluruh indikator kinerja utama sebagai tolak ukur utama dalam pencapaian kinerja dapat menjadi prioritas kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan seluruh tujuan serta sasaran dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023 akan diuraikan pada sub bab berikutnya, yaitu sub bab pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja.

2.3.3. Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan terkait pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan, khususnya memberikan gambaran pencapaian terhadap indikator kinerja utama dimana indikator tersebut juga diperjanjikan sebagai Perjanjian Kinerja Wali Kota Tahun 2023. Hasil pengukuran tersebut kemudian dianalisis guna mendapatkan informasi yang akurat terkait faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menjadi kendala. Hal ini menjadi informasi yang valid guna melakukan evaluasi terhadap keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu indikator yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya memberi gambaran pencapaian target atas kinerja yang dilakukan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon secara komprehensif menganalisa dan mengevaluasi seluruh sasaran strategis beserta indikatornya yang telah ditetapkan, laporan ini memuat juga pengukuran diluar indikator yang diperjanjikan di Tahun 2023 namun menjadi indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai mana dimuat dalam visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon periode 2018-2023 (data dukung setiap capaian sasaran/indikator kinerja dapat dilihat pada link s.id/datakinerja2024, sebagai berikut :

Tabel II.9

Capaian Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan Sasaran Strategis

Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023	Capaian Kinerja	Ket.
Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam segala Bidang								
Tujuan:								
1.	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	Poin	75,93	77,45	74,39	100,20%	Sumber Data : BPS Melebihi Realisasi Nasional

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023	Capaian Kinerja	Ket.
	Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	Indeks Gini	Poin	0,42	0,468	0,388	88,57%	Sumber Data : BPS Di bawah Realisasi Nasional Rumus capaian : $\frac{T-(R-T)}{T}$
		PDRB per Kapita (Rp.000.000)	Juta/rupiah	83,84	84.135	75,0	**100,35%**	*Indikator Kinerja Utama* Sumber Data : BPS Melebihi Target dan Realisasi Nasional
		Indeks Daya Beli	Poin					Indikator dirubah karena sudah tidak relevan
		Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	Ribu Rupiah	12.628	12.506	11.89 -	99,03%	*Indikator Kinerja Utama* Sumber Data : BPS
Sasaran:								
1.1.	Meningkatan akses dan mutu pendidikan	Rata –rata lama Sekolah	Tahun	10,61	10,37	8,77	97,74%	*Indikator Kinerja Utama* Sumber Data : BPS Melebihi Realisasi Nasional

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023	Capaian Kinerja	Ket.
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,99	13,16	13,15	94,07	*Indikator Kinerja Utama* Sumber Data : BPS Melebihi Realisasi Nasional
1.2	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Rasio Perpustakaan Per satuan Penduduk	Permil	1,958	1,587	-	81,05	Sumber Data : BPS
1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,64	75,17	73,93	103,48%	*Indikator Kinerja Utama* Sumber Data : BPS Melebihi Realisasi Nasional
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99	101,94	-	102,97%	*Indikator Kinerja Utama* Sumber Data : Data Base Dinas Kesehatan
1.4	Terkendalinya jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,47	0,71	1,13	48,94%	Sumber Data : BPS Melebihi atau lebih baik dari pada realisasi Nasional rumus $\frac{T-(R-T)}{T}$ $X1$
1.5	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,15	68,71	64,98	103,87%	Sumber Data : BPS

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023	Capaian Kinerja	Ket.
								Melebihi Realisasi Nasional
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,5	7,66	5,32	109,88%	Sumber Data : BPS Dibawah Realisasi Nasional rumus $\frac{T-(R-T)}{T}$ X1
		Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91,94	**92.34**		**100,43%**	
1.6	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda.	Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional	Atlet	9	23	-	255,56%	Sumber Data : BPS
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	70,00	75	-	107,14%	Sumber Data : BPS
1.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender /IDG	Poin	94,46	94,91	91,63	100,476%	*Indikator Kinerja Utama* Sumber Data : BPS Melebihi realisasi tingkat nasional
		Indeks Pemberdayaan Gender /IPG	Poin	78,47	78,07	76,59	99,49%	*Indikator Kinerja Utama* Sumber Data : BPS Melebihi realisasi

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023	Capaian Kinerja	Ket.
								tingkat nasional
1.8	Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon	Peningkatan PDRB dari sektor industry	Persen	11,80-11,87	10,37	-	87,58%	Sumber Data : BPS
		Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan	Persen	34,37-34,58	28,77	-	83,44%	*Indikator Kinerja Utama* Sumber Data : BPS
1.9	Berkurangnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin	Persen	8,35	9,16	9,36	90,29%	Sumber Data : BPS Melebihi (lebih baik) dari realisasi nasional rumus $\frac{T-(R-T)}{T}$ $X1$
1.10	Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan /PPH	Poin	95,15	88,1	94,1	92,6%	*SUmber Data : BPS Indikator Kinerja Utama*
		Peningkatan PDRB dari sektor Pertanian	Persen	0,32	0,34	1,46	100%	Sumber Data : BPS
1.11	Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	Peningkatan PDRB dari sektor pariwisata	Persen	5,90-5,93	5,59	3,8	100,00%	Sumber Data : BPS *Indikator Kinerja Utama*
1.12	Meningkatnya kerukunan umat Beragama	Konflik antar umat beragama	Jumlah	0	0	-	100%	Sumber Data : Badan Kesbang pol

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023	Capaian Kinerja	Ket.
								Indikator Kinerja Utama
1.13	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Persen	78,41	76,47	-	100,34%	*Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata* *Indikator Kinerja Utama*
1.14	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Cepat Berkembang	Persen	59,09	59,09		100%	Sumber Data : Sistem Prodeskel Kemendagri
		Meningkatnya kualifikasi status kelurahan (kelurahan):						
		Kecamatan Kesambi :						
		Persentase kelurahan berstatus swasembada	Persen	100,00	100,00		100,00%	
		Kecamatan Pekalipan:						
		Persentase kelurahan berstatus swasembada	Persen	50,00	25,00		50,00%	
		Kecamatan Kejaksan						
		Persentase kelurahan berstatus swasembada	Persen	25,00	50,00		200%	
		Kecamatan Harjamukti:						
		Persentase kelurahan berstatus swasembada	Persen	60,00	25		62,50%	
		Kecamatan Lemah Wungkuk						
		Persentase kelurahan berstatus swasembada	Persen	50,00	50,00		100,00%	

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023	Capaian Kinerja	Ket.
	Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif							
	Tujuan:							
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80,00	73,91	59,32	92,39%	*Sumber Data : KEMENPAN RB* *Melebihi Relaisasi Nasional* *Indikator Kinerja Utama*
	Sasaran:							
2.1	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan	Persentase penyelenggaraan layanan administrasi Pemerintahan	Persen	100,00	100	-	100%	Sasaran strategis Baru setelah RPJMD Perubahan, Indkator dan target Muncul di tahun 2022
2.2	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur	Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi	Persen	55,00	94,09	-	171%	Sumber Data : Badan Kepegawaian dan SUmber Daya Manusia
		Persentase Pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	Persen	82,50	85,00	-	103%	
		Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin	Persen	98,00	96,95	-	98,93%	
		Persentase Kepatuhan Pegawai untuk Memenuhi Penyampaian LHKPN	Persen	100	100	95,88	100%	

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023	Capaian Kinerja	Ket.
2..3	Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah	Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterapkan	Persen	100,00	81,25	-	81,25%	Sumber Data : Sekretariat Daerah
		Persentase peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	Persen	100,00	68,75	-	68,75%	
2.4	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai Aspek Pelaporan kinerja dalam Evaluasi atas AKIP	Nilai	10,00	10,27		102,7%	Sumber Data : LHE AKIP-KEMENPAN RB
2..5	Meningkatnya Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	Level	4,00	3	3	75%	Sumber Data :LHE SPIP-BPKP
2.6	Meningkatnya Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perizinan	Poin	84,00	91,25		108,63%	Sumber Data : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kependudukan	Poin	85,00	91,50		107,65%	
2.7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP		100%	*Sumber Data : BPK Indikator Kinerja Utama*
		Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah	Persen	33,67	33,81		100,42%	Sumber Data : Laporan Keuangan Pemda Kota Cirebon
2.8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota	Nilai	85,00	71,80	71,00	84,47%	Sumber Data : LHE Kearsipan dari ANRI

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023	Capaian Kinerja	Ket.
2.9	Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD	Rasio Jumlah Perda yang Ditetapkan terhadap Raperda	Persen	80,00	82,35		102,93%	Sumber Data : Sekretariat DPRD
		Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran	Persen	100,00	55		55%	
		Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan	Persen	78,33	100		127,66%	
2..10	Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan terintegrasi dalam menunjang *Cirebon Smart City*	Perangkat Daerah yang mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Pemerintahan	Perangkat Daerah					Indikator telah dirubah pada perubahan RPJMD ,sudah tidak digunakan
		Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	Komunitas					
		Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE (Poin)	Poin	3,2	3,55	2,79	110,9%	SUmber Data : LHE SPBE 2023 Melebihi realisasi Nasional Indikator Baru setelah RPJMD Perubahan, target muncul pada tahun 2022

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023	Capaian Kinerja	Ket.
2.11	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD	Persen	100,00	97,44		97,44%	Sumber Data :BAPPELITBANGDA
		Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD	Persen	100,00	94,84		94,84%	
2..12	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dijadikan Dasar Kebijakan Daerah	Persen	80,00	92,11		115,14%	
	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan							
	Tujuan:							
3.	Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,82	50,04		88,07%	*Indikator Kinerja Utama,* IKLH nasional 2020 70,27 (BPS)
		Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK	Persen					Berdasarkan RPJMD 2018-2023 Perubahan tidak diukur lagi sebagai indikator Tujuan, diperhitungkan pada indikator sasaran
	Sasaran:							

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023	Capaian Kinerja	Ket.
3..1	Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan						
		Persentase peningkatan *level of servce* ruas jalan (persen)	Persen	3,00	3,00		100%	Indikator yang muncul setelah RPJMD Perubahan, dimana target akan dimulai pada tahun 2022
3..2	Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat	Rasio Kendaraan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penduduk	Persen					Berdasarkan hasil evaluasi tidak relevan di jadikan indikator sehingga pada tahun 2022-2023 di hapuskan
3.3	Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase.	Persentase drainase kondisi baik.	Persen	80,00	89,81		115,88%	
3.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	7,72	5,73		75,52%	
	Misi 4 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif							
		Tujuan:						

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023	Capaian Kinerja	Ket.
4.	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Poin	83,00	78,19		98%	*Indikator Kinerja Utama*
	Sasaran:							
4.1	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	Jumlah Daerah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Lokasi/titik)	Jumlah	15	25		100%	Sumber Data : Survey Trantibum – SATPOL PP
		Indeks keamanan dan ketertiban umum masyarakat kecamatan (Nilai indeks keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan):						
		• Kecamatan Kejaksan	Poin	86,50	82,5		95,38%	
		• Kecamatan Lemahwungkuk	Poin	71,00	80,52		111,41%	
		• Kecamatan Harjamukti	Poin	84,50	82,50		98,21%	
		• Kecamatan Pekalipan	Poin	82,50	84,68		99,62%	
		• Kecamatan Kesamibi	Poin	85,00	85,00		92,00%	
4.2	Meningkatnya rasa nasionalisme dan kawaspadaan nasional	Konflik kasus kebangsaan dan nasionalism].; (Kasus)	Jumlah	0	0		100%	Sumber Data : Badan Kesbangpol

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023	Capaian Kinerja	Ket.
4.3	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* Daerah Layanan WMK (Persen)	Persen	85,00	85,71		100,8%	Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran
		Jumlah Kelurahan yang Memiliki Forum Siaga Bencana (Kelurahan)	Jumlah					Indikator sudah tidak relevan dan dirubah pada Perubahan RPJMD
		Persentase Forum Siaga Bencana Kelurahan Aktif (Persen)	Persen	27,00	45,00		166,7%	Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan data pencapaian kinerja yang disebutkan pada tabel diatas bahwa pencapaian indikator tertinggi adalah jumalah atlet yang berkompetisi di tingkat nasional yaitu 255,56%, sementara indikator dengan pencapaian terendah adalah indikator laju pertumbuhan penduduk yaitu 48,94%.

Pada tahun 2022 rata-rata pencapaian rata-rata indikator kinerja adalah 102,6% dan pada tahun 2023 dengan capaian rata-rata indikator kinerja 101,5%. Dalam 2 tahun terakhir menggambarkan pencapaian rata-rata indikator kinerja telah sangat baik karena menunjukan kinerja diatas 100%, komposisi ini dibangun oleh performa indikator kinerja yang Melebih target,Sesuai Target, pencapaian Sangat Tinggi, dan Pencapaian Tinggi. Dengan demikian perlu diperhatikan secara detail pada sasaran dan indikator kinerja yang masih belum mencapai target Pada tahun 2023. Masing-masing Tujuan/Sasaran serta indikatornya akan dijelaskan secara terperinci dengan memuat analisa dan evaluasi sebagai berikut :

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target
2. Perbandingan realisasi kinerja dengan target beberapa tahun lalu

3. Perbandingan dengan target realisasi tahun ini dengan target jangka menengah RPJMD
4. Perbandingan target tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasila/kegagalan (kendala) serta alternative solusi
6. Ananlisis Program/Kegiatan yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja
7. Analisis atas efektifitas dan efesiensi penggunaan sumber daya (akan dijelaskan secara lebih rinci pada sub bab tersendiri)

Pengukuran, analisa dan evaluasi tersebut dijelaskan per masing-masing Sasaran sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam segala Bidang

"Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang", sesuai dengan arahan Misi 1, Misi 2 dan Misi 3 RPJPD yaitu : (1) "Mewujudkan Masyarakat yang Religius"; (2) "Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat"; dan (3) "Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tinggi Misi 1 memiliki 1 Tujuan yang di dukung dengan 14 sasaran sebagai bagian dari kinerja yang tak terpisahkan dalam rangka mendorong terwujudnya Misi 1. Tujuan dan Sasaran masing-masing diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 1.1 : Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.

Tabel II.10
Capaian Kinerja Tujuan 1. "Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon".
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
1.	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	Poin	75,93	74,35	74,92,	74,89	75,25	75,89	77,45	100,20%

	Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon	Indeks Gini	Poin	0,42	0,43	0,408	0,421	0,489	0,47	0,468	88,57%
		PDRB per Kapita (Rp.000.000)	Juta/rupiah	83,84	68,40	73,46	68,34	71,27	72,75	84.135	**100,35%**
		Indeks Daya Beli	Poin		72,81	75,53	75,2	75,21			
		Pengeluaran per Kapita (Rp.000.000)	Ribu/rupiah	12.628	11.397	11.930	11.800	11.810	12.087	12.506	99,03%

Tujuan dalam dalam Misi 1 menjadi gambaran kondisi yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Misi ke-1. Pencapaian dari tujuan dimaksud diukur 5 indikator dimana semua indikator tersebut lazim digunakan dalam mengukur sejauh mana kualitas sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia
2. Indeks Gini
3. PDRB Per Kapita

Pengeluaran Perkapita

Pencapaian Indikator ke-1 Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan data yang di rilis BPS pada Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon tahun 2022, pembangunan manusia di Kota Cirebon terus mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir dimana IPM Kota Cirebon terus meningkat. IPM Kota Cirebon meningkat dari 70,74 pada tahun 2010 menjadi 77,45 pada tahun 2023, meningkat 0,56 poin (0,73 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (76,89). Selama periode tersebut, IPM Kota Cirebon rata-rata tumbuh sebesar 0,67 persen per tahun. IPM Kota Cirebon lebih tinggi daripada rata-rata IPM Nasional Tahun 2023 yaitu 74,39.

Gambar II.2
IPM Kota Cirebon

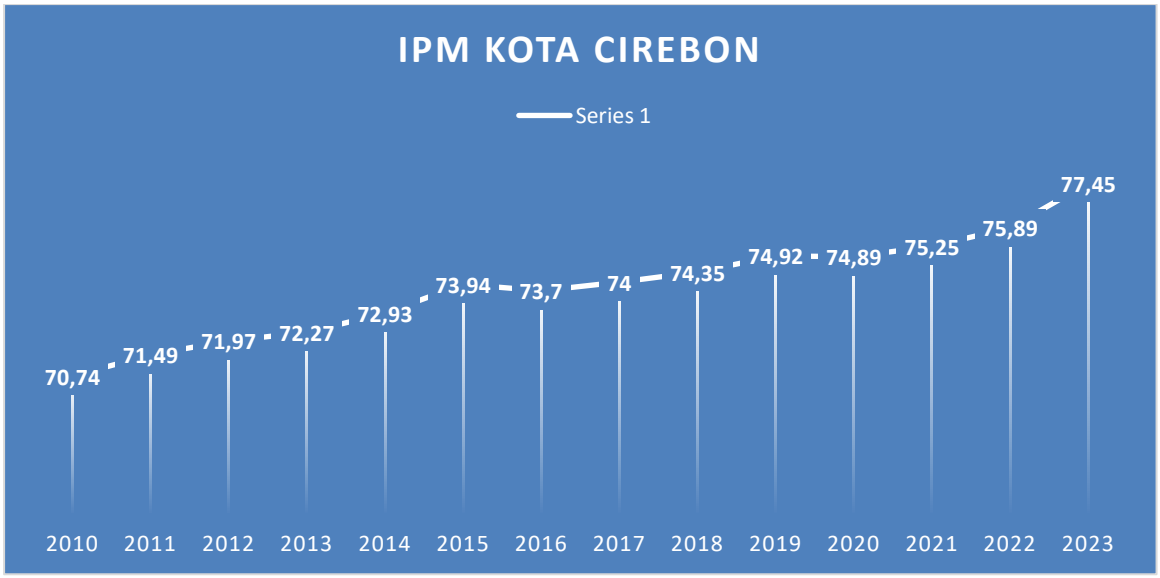

Sumber : BPS Kota Cirebon 2023, diolah

Pencapaian Indikator ke-2 "Indeks Gini"

Indeks Gini Ratio merupakan indikator yang lazim digunakan untuk mengukur sejauhmana tingkat kesenjangan yang terjadi di masyarakat, walau ekonomi tumbuh pesat dengan cukup tingginya PDRB dan indeks daya beli namun belum menunjukan apakah seluruh masyarakat menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut, maka seyogyanya Indeks Gini Ratio dijadikan sebuat indikator dalam upaya mengukur tinggi atau rendahnya ketimpangan dalam masyarakat.

Indeks ini biasanya berkisar dari angka 0 atau 0% hingga angka 1 atau 100%. Nilai 0 (nol) merepresentasikan sebuah persamaan sempurna sementara nilai 1 (satu) mewakili suatu pertidaksamaan yang sempurna. Semakin tinggi nilai indeks gini maka semakin menunjukan ketimpangan, artinya penduduk dengan *income* tinggi akan menerima angka persentase yang jauh lebih tinggi pula

dari total *income* seluruh penduduk. Dengan kondisi maysrakat perkotaan yang heterogen secara sosial dan profesi maka menjaga indeks gini pada rasio yang rendah atau normal merupakan suatu tantangan, Kota Cirebon memiliki indeks gini yang cenderung sama dari tahun ke tahun.

Gambar II.3
Indeks Gini Gini Ratio , 2015-2023

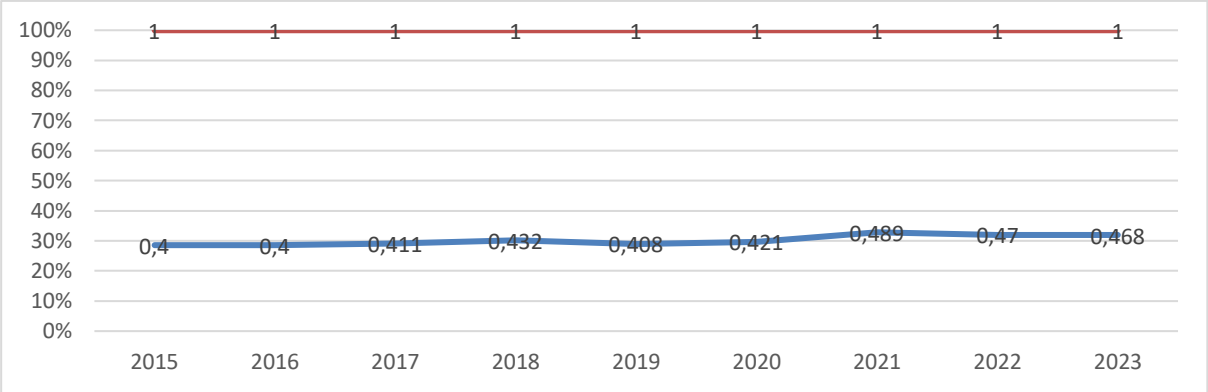

Sumber : BPS Jawa Barat, 2023

Data yang disajikan grafik diatas menunjukan bahwa Selama 5 Tahun belakangan, Gini Ratio penurunan dan kenaikan yang tidak signifikan indeks gini rasio sempat melebar pada tahun 2018 sebesar 0,432 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 0,408, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 dari 0,421 menjadi 0,489, pada tahun 2022 indeks gini mengalami penurunan pada posisi 0,47 kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 yaitu 0,468.

Dengan nilai indeks gini ratio 0,47 dan target 0,42 dimana pada faktor penghitungan indikator ini semakin rendah semakin baik maka pencapaian target tersebut digunakan rumus sebagai berikut : $\frac{T-(R-T)}{T} x100\%$= $\frac{0,42-(0,468-0,420)}{0,42} x100\%$ = pencapaianya adalah 88,57% atau dalam predikat **Tinggi,** menjadi catatan bahwa jika disandingkan dengan indeks gini nasional yaitu 0,388, maka indeks gini Kota Cirebon lebih tinggi.

Pencapaian Indikator Ke-3 PDRB Per-Kapita

PDRB per-kapita merupakan indikator yang menggantikan indikator Pendapatan Perkapita (sesuai RPJMD Perubahan 2018-2023), PDRB Perkapita sesungguhnya menunjukan gambaran pendapatan perkapita suatu wilayah. BPS Kota Cirebon merilis hasil pengukuran PDRB ADHB pada tahun 2022 oleh BPS Kota Cirebon dengan menggunakan rumus $\frac{PDRB}{Total\ Jumlah\ Penduduk}$= 84,315 Juta Pertahun, sehingga jika disandingkan dengan target pada tahun 2023 yaitu 83,84

maka $\frac{Realisasi}{Target} = \frac{84,135}{83,84}$= 100,35% atau **Melebihi Target.** Realisasi PDRB Per-Kapita tersebut melebihi rata-rata PDRB perkapita secara nasional yaitu 75,0 Juta per tahun, hal ini menunjukan Kota Cirebon memiliki pertumubuhan ekonomi yang positif di sepanjang tahun 2023.

Pencapaian Indikator ke-4" Indeks Daya Beli"

Indikator Indeks Daya Beli sudah tidak menjadi perhitungan dari indikator pada pencapaian kinerja dalam RPJMD, hal ini dirubah sesuai Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023.

Pencapaian Indikator ke-5 Pengeluaran Per Kapita (yang disesuaikan)

Pengeluaran Per-Kapita yang disesuaikan lazim disebut sebagai daya beli, memiliki kegunaan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. pada tahun 2022 Kota Cirebon melanjutkan trend positif pasca titik balik dari kondisi pandemi covid 19 yang dialami tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dirilis BPS Kota Cirebon, bahwa Tahun 2023 pengeluaran Perkapita Kota Cirebon adalah 12.506 (ribu/orang/tahun). lebih tinggi dibandung tahun 2022 12.087 (ribu/orang/tahun). Merujuk pada data terakhir yang dikeluarkan terkait pendapatan perkapita di daerah-daerah dalam skala nasional, yaitu tahun 2021 pengeluaran per-kapita tertinggi adalah Kota Jakarta Selatan yaitu 23.888 (ribu/torang/tahun). dan terendah adalah Kabupaten Nduga dengan nilai 3.976 (ribu/torang/tahun). Kota Cirebon masih berada diatas rata-rata Pengeluaran Per-Kapita Nasional pada tahun 2023 yaitu 11.890 (ribu/torang/tahun) dimana Kota Cirebon berada pada 12.506 (ribu/orang/tahun) . Jika disandingkan dengan target pada tahun 2023 yaitu 12.628, maka pencapaianya adalah $\frac{R}{T}$x100%= $\frac{12.506}{12.628}$x100%= 99,03%, atau dengan predikat **Sangat Tinggi.** Kendati pencapaian belum mencapai target namun Kota Cirebon memiliki capaian yang lebih baik daripada capaian realisasi Pengeluaran per-kapita pada rata-rata nasional.

Evaluasi Tujuan 1.1. "Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon"

Tujuan Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon" yang ditetapkan dengan pengukuran pada 4 indikator memilliki rata-rata pencapaian 97,47%. Atau dengan predikat Sangat Baik. Pencapaian Tujuan 1.1. "Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon", merupakan gambaran makro yang dipengaruhin berbagai capaian pada 14 sasaran yang menopang tujuan 1.1 ini, sehingga analisa faktor yang mendukung, permasalahan serta Strategi pemecahan masalah akan terurai secara komprehensif pada setiap sasaran pada Misi 1 Tujuan ""Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon", uraian penjelasan capaian serta evaluasinya akan di jelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1.1 Meningkatan akses dan mutu pendidikan

Tabel II.11

Capaian Sasaran 1.1 "Meningkatan akses dan mutu pendidikan" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023 (akhir RPJMD)	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
1.1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	Rata –rata lama Sekolah *(Indikator Kinerja Utama*	Poin	10,61	9,89	9,90	9,91	10,12	**10,33**	10,37	**97,74%**
		Harapan lama sekolah (*Indikator Kinerja Utama*	Poin	13,99	13,09	13,11	13,12	13,13	**13,14**	13,16	**94,07%**

Sasaran Strategis 1.1. “Meningkatkan akses dan mutu pendidikan” merupakan upaya mendukung Visi Misi Kota Cirebon dari bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran di tetapkan dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dimana keduanya juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon

Pencapaian Indikator ke-1 dan ke-2 “Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah”

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Rata rata lama sekolah yaitu 10,61 tahun dan harapan lama sekolah 13,99 tahun. Data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada dimensi pengetahuan, pada tahun 2023 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,16 tahun atau setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,14 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,04 tahun, dari 10,33 tahun pada tahun 2022 menjadi 10,37 tahun pada tahun 2023. Dengan menggunakan rumus pencapaian indikator kinerja adalah $\frac{R}{T}x100\%$ Pencapaian indikator pertama yaitu rata-rata lama sekolah adalah 97,74% sementara indikator ke dua yaitu harapan lama sekolah adalah 94,07%, keduanya memiliki kategori tingkat pencapaian **Sangat Tinggi**.

Evaluasi sasaran 1.1 “Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan”

Trend positif dalam pencapaian sasaran yang ditunjukan melalui 2 indikator yang meningkat capaianya dari tahun ke tahun, menjadi bukti bahwa setiap tahun akses dan mutu pendidikan di Kota Cirebon semakin baik.

Gambar II.4
RLS dan HLS Tahun 2011-2023

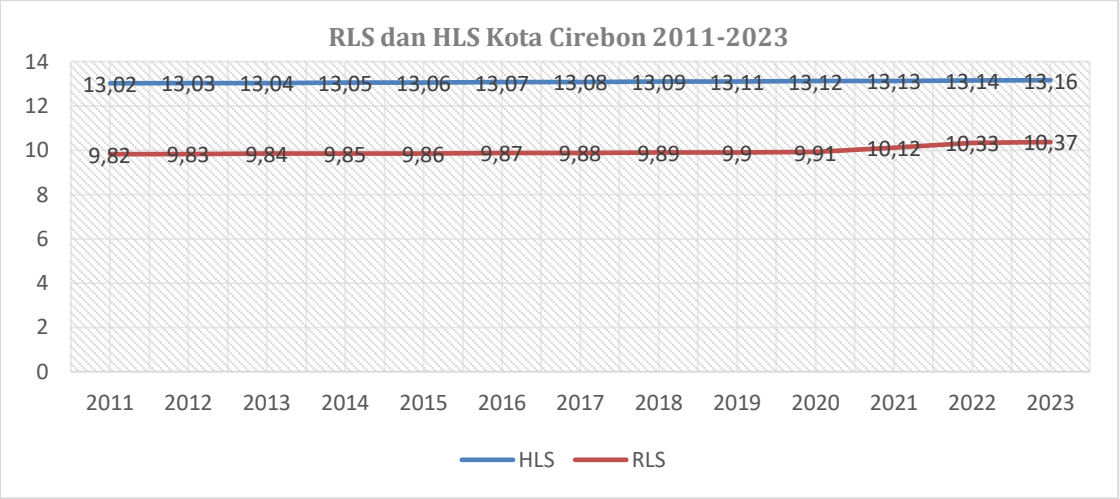

Hal ini ditunjang Program-program utama yang menpengaruhi secara langsung sasaran sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Pendidikan	103.913.411.319,00	102.127.648.058,00	98,281%
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.391.352.785,00	2.390.604.530,00	99,969%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**99,125%**

Pencapaian kinerja yang Sangat Baik ini menjadit tantangan di tahun berilutnya untuk terus meningkatkan kualitas pendididikan yang tercermin dalam dua indikator khususnya Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II.11

Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1. "Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan"

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Terlaksananya Program Program yang mendukung Sasaran dengan baik : • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Masih adanya anak usia putus sekolah di jenjang SMA, berdasarkan penelusuran umumnya diakibatkan karena kenakalan remaja dan faktor ekonomi. (mohon dapat berikan data berapa anak putus sekolah di usia SMA atau SMP, dan karena factor apa	Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Satuan Polisi Pamong Praja dan stake holder terkait urusan Sosial, serta Ketrentaman dan Ketertiban Umum untuk melakukan upaya bersama dalam menyelesaikan permasalahan ekomi-sosial di kalangan peserta didik dan juga kenakalan remaja.
		Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang pendidikan khususnya dalam manajamen pendidikan di tingka SMA

Sasaran 1.2 "Meningkatnya Minat Baca Masyarakat"

Tabel II.13
Capaian Sasaran 1.2 "Meningkatnya Minat baca Masyarakat" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan		Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
1.2	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Rasio Perpustakaan Per satuan Penduduk	Permil	1.958	1,385	1,566	1,602	1,609	1,928	1,587	81,05%

Meningkatnya minat baca masyarakat merupakan sasaran yang diukur pencapaiannya melalui sebuah indikator Rasio Perpustakaan Per satuan Penduduk, rasio jumlah perpustakaan menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kondisi tingkat literasi di suatu wilayah. Hal ini berkaitan erat dengan jumlah koleksi di Indonesia menurut standar IFLA/UNESCO terjadi kekurangan koleksi sebesar 434,826,292 koleksi pada perpustakaan umum di seluruh Indonesia, jumlah koleksi buku sangat berkaitan erat dengan jumlah perpustakaan. Maka relevan pada sasaran strategis meningkatnya minat baca masyarakat salah satu upaya utama adalah menyediakan infrastruktur dasar bagi warga untuk mengakses bahan bacaan yaitu melalui keberadaan perpustakaan, dalam hal ini perpustakaan diharapkan juga menjelma menjadi tempat tumbuhnya komunitas yang berkaitan erat dengan budaya literasi.

Pencapaian Indikator "Rasio Perpustakaan Per-Satuan Penduduk"

Pada tahun 2023 rasio perpustakaan per-satuan penduduk ditargetkan 1,958 per-mil. Dalam upaya mencapai target tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon melakukan berbagai upaya yang telah di inisiasi tahun-tahun sebelumnya dengan terus melaksanakan sosialisasi di tengah masyarakat serta mempertahankan komunitas perpustakaan yang telah berdiri. Melalui berbagai upaya tersebut, berdasarkan pendataan pada tahun 2023 rasio jumlah perpustakaan sesuai pendataan oeleh Dinas Perputakaan dan Kearsipan Kota Cirebon adalah 1,587 per mil, sehingga pencapaian target tersebut adalah adalah $\frac{R}{T} x100\% = \frac{1,587}{1,958} x100\% =$ **81,05%**,dengan predikat **Tinggi.**

Evaluasi Sasaran 1.2 "Meningkatnya Minat Baca Masyarakat"

Sasaran meningkatnya minat baca masyarakat pada tahun 2023 memiliki pencapaian 103,48 atau **Melampaui Target**, Program yang mendukung langsung terhadap sasaran adalah sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pembinaan Perpustakaan	905.455.025,00	854.433.977,00	94,365%
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	252.980.604,00	245.657.641	97,105%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**95,735%**

Mendororong tumbuhnya infrastruktur dasar terkait literasi yaitu perpusatakaan menjadi hal yang *urgent* untuk meningkatkan minat baca masyarakat, untuk itu Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu meningkatkan lagi kerjasama dengan masyarakat umum khususnya komunitas yang bergerak di bidang literasi atau G To S (*Government to Society*) dan juga pihak swasta G to B atau *Governement To Business.* Melalui kolaborasi tersebut tumbuhnya jumlah perpustakaan di Kota Cirebon akan meningkat dan ideal dengan jumlah penduduk. Selain kolaborasi tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon tetap harus mempertahankan upaya yang telah baik dilaksanakan melalui program yang sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II.13
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.2 "Meningkatnya Minat Baca Masyarakat" Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Munculnya Kesadaran masyarakat terhadap literasi dengan adanya beberapa komunitas yang aktif di dunia litrerasi • Dukungan pimpinan terhadap penguatan literasi, dibuktikan salah satunya dengan pelantikan terhadap Bunda Literasi	• Belum seluruh RW memiliki perpustakaan mandiri atau pojok baca yang representatif • Sarana dan prasarana yang belum memadai khususnya di tingkat kelurahan (sehingga kesulitan mendapatkan ruang publik yang bisa di jadikan perpustakaan) • Frekuensi kegiatan literasi di tingkat local yang masih minim	• Melaksanakan Kerjasama dengan sektor pemberdayaan masyarakat, ditingkat kelurahan maupun RW untuk penerapan perpustakaan mandiri atau pojok baca • Melaksanakan Pelatihan pada sumber daya yang ada di masyarakat untuk penguatan sumber daya pengelola perpustakaan • Meningkatkan sarana dan prasarana terkait ruang publik untuk literasi, hal ini di kordinasikan dengan pihak Kelurahan agar menjadikanya sebagai salah satu opsi dan prioritas pada Musrenbang

Sasaran 1.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon

Tabel II.14
Capaian Sasaran 1.3 "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
1.3	Meningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Cirebon	Angka Harapan Hidup (AHH) *(Indikator Kinerja Utama)*	Tahun	72,64	71,90	72,13	72,26	72,4	**72,74**	75,17	103,48%
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional *(Indikator Kinerja Utama)*	Persen	99	99,00	93,53	97,04	99,02	**98,10**	101,94	102,97%

Sasaran 1.3 "**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon**" dengan **Indikator** : **Angka Usia Harapan Hidup dan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional** menjadi salah satu tolok ukur dalam mewujudkan kinerja "**Misi 1 : "Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya Unggul dalam Segala Bidang"**.

Pencapaian indikator ke 1 yaitu Angka Harapan Hidup:

Angka Harapan Hidup saat lahir merepresentasikan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Semenjak tahun 2018 angka harapan hidup di Kota Cirebon terus mengalami kenaikan, pada saat 2018 berada pada angka 71,90 , sementara pada tahun 2023 Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 75,17 tahun dan pada tahun 2023.Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Angka Harapan Hidup di tahun 2023 adalah 72,64 tahun maka pencapaian kinerja pada indikator angka harapan hidup adalah $\frac{R}{T} x100\%$= $\frac{72,74}{72,51} x100\%$= 103,48 atau **Melebihi Target ,** serta angka Harapan Hidup di Kota Cirebon berada diatas rata-rata nasional yaitu 73,93

Gambar II.5

Angka Harapan Hidup Kota Cirebon tahun 2012-2023

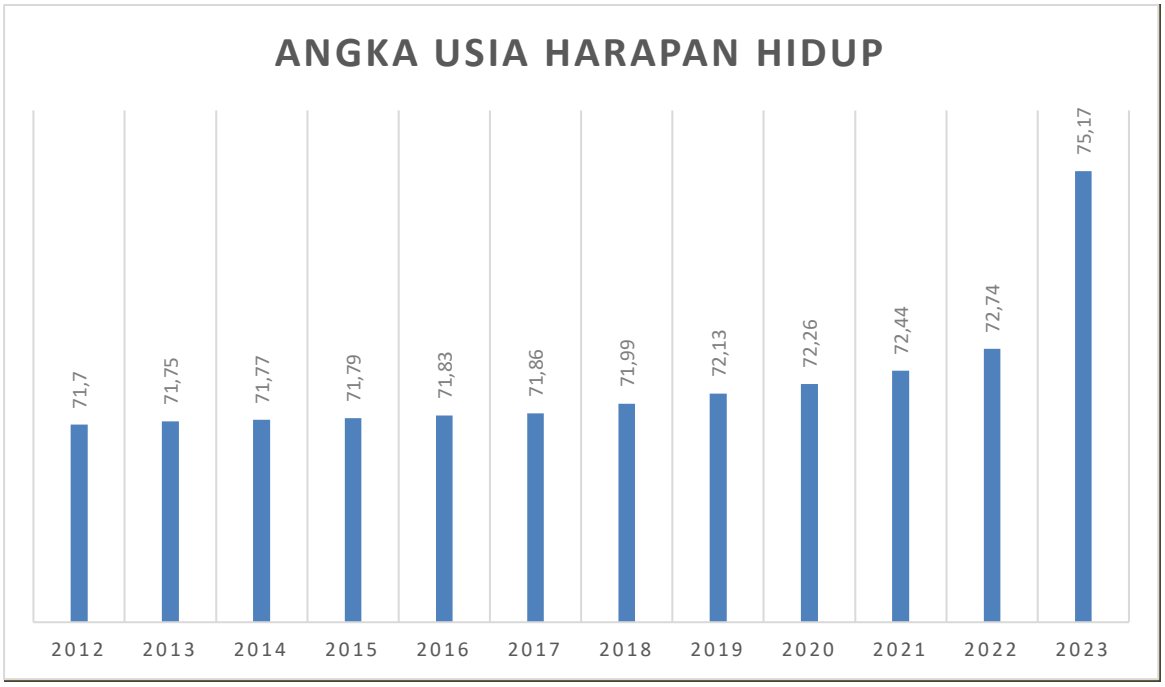

Sumber : BPS Kota Cirebon – Cirebon Satu data 2023, diolah

Pencapaian indikator ke 2 yaitu Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional :

Indikator ke-2 untuk sasaran meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon adalah cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Target JKN untuk tahun 2023 adalah 99,00%. Berdasarkan perhitungan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kota Cirebon pada tahun 2023 mencapai 101,94%. Capaian ini melebih target yang ditetapkan**.** Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon pun berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai **Peringkat dalam capaian *Universal Health Coverage*** di Jawa Barat.

Pemerintah Kota Cirebon telah berhasil melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBN melalui perluasaan cakupan kepesertaan JKN-KIS PBI APBD dengan sumber biaya dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Hal ini tidak terlepas dari peran serta seluruh stake holder terkait dalam pelaksanaan tugas

pokok, khususnya dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan, dan kesadaran masyarakat dalam mendukung program *Universal Health Coverage* melalui Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat. Pencapaian pada indikator ini jika disandingkan dengan target adalah $\frac{R}{T}x100\%$= $\frac{101,94}{99,00}x100\%$= 102,97% atau **Melebihi Target** dan melampaui capaian nasional dengan capaian jangkauan JKN sebesar 94,60%.

Evaluasi sasaran 1.3. "Meningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat"

Trend positif dalam pencapaian sasaran yang ditunjukan melalui 2 indikator yang meningkat capaiannya dari tahun ke tahun, menjadi bukti bahwa setiap tahun derajat kesehatan masyarakat di Kota Cirebon semakin baik. Sasaran 1.3 ini didukung oleh Program sebagai berikut Berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	404.163.544.596,00	384.917.504.268,00	95,238%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	235.592.370,00	233.992.370,00	99,231%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	442.237.150,00	441.800.950,00	99,901%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.245.553.775,00	1.244.692.725,00	99,941%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**98,598%**

Dalam pencapaian Sasaran terdapat kendala dan upaya yang dilakukan, berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II.15
Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Pemecahan Masalah

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Keberhasilan program kesehatan terutama dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi. • Keberhasilan pencapaian cakupan ASI Eksklusif (implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Inisiasi Menyusu Dini Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.) • Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang tinggi • Keberhasilan Sosialisasi dan Komitmen bersama untuk keikutsertaan Jaminan Kesehatan Nasional di seluruh Stake Holder terkait	Dalam Pencapaian Angka Harapan Hidup terkendala pada pencapaian Imunisasi Dasar Lengkap yang belum Optimal. Karena berbagai faktor antara lain : • Belum ditegakannya hukum dan regulasi kepada daerah yang tidak mencapai kinerja pencapaian program imunisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan Angka Harapan Hidup • Mobilitas penduduk yang tinggi sehingga menyulitkan pelaksanaan sweeping dan *Drop Out Follow Up (DOFU)*	• Meningkatkan komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam pencapaian program kesehatan terutama dalam pencapaian target IDL yang berpengaruh secara langsung terhadap indikator AHH. • Menyusun regulasi dalam pencapaian program sehingga menjadi dasar untuk melibatkan stakeholder Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan masyarakat secara luas. • Meningkatkan akselerasi DOFU *(Drop Out Follow Up)* melalui kegiatan Inovasi dengan melakukan sweeping dan mendatangi serta memobilisasi sasaran yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar. • Kampanye pencapaian IDL di setiap Kelurahan dengan memberikan *reward* dan *punishment* bagi kelurahan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 35A ayat 2 dimana penduduk yang semula telah didaftarkan kepesertaan oleh Pemerintah Daerah tetapi tidak memenuhi kriteria miskin / tidak mampu kepesertaannya menjadi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayananan di kelas III		yang mencapai atau tidak mencapai target IDL.
	Dalam pencapaian indikator cakupanJaminan Kesehatan Nasional mendapatkan beberapa kendala sebagai berikut • Penonaktifan kepesertaan JKN-KIS PBI APBN (Peserta JKN-KIS yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat). • Semenjak tahun 2020 Terjadi penurunan kepesertaan pada kategori non PBI bukan pekerja dari 13.673 jiwa (2019) menjadi 8.770 jiwa (2020) atau menurun sebesar 35,85% dari kepesertaan non PBI bukan pekerja	• Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 35A ayat 2 dimana penduduk yang semula telah didaftarkan kepesertaan oleh Pemerintah Daerah tetapi tidak memenuhi kriteria miskin / tidak mampu kepesertaannya menjadi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayananan di kelas III. • Merubah Keputusan Walikota Cirebon Nomor 440/Kep. 393 – Dinkes/ 2017 tentang Penetapan Penambahan Jumlah Penduduk Kota Cirebon yang didaftarkan ke Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disesuaikan dengan data terbaru dari instansi terkait • Memastikan anggaran Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan sehingga mampu

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
		mengcover Jaminan Kesehatan di Kota Cirebon

Sasaran 1.4 : Terkendalinya jumlah penduduk

Tabel II.16
Capaian Sasaran 1.4 "Terkendalinya jumlah penduduk" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
1.4	Terkendalinya jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,47	0,68	0,54	0,43	0,19	**0,47**	0,71	48,94%

Terkendalinya Jumlah penduduk menjadi salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Misi 3 Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia diyakini sangat dipengaruhi dengan faktor jumlah penduduk, jumlah penduduk yang tidak terkendali menjadi kendala dalam proses pembangunan sehingga diperlukanya pengendalian penduduk. Sasaran yang sangat strategis dalam pembangunan ini di ukur dengan sebuah indikator kinerja yaitu laju pertumbuhan penduduk

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada poin 0,47. Berdasarkan perhitungan LPP tahun 2023 yang dengan metode geometrik,
LPP Kota Cirebon pada tahun 2023 adalah 0,54, didapat dari rumus laju pertumbuhan penduduk metode geometrik $r=(\frac{Pt}{P0})^{1/t}-1$, dengan keterangan r=Laju pertumbuhan penduduk, Pt=Penduduk adalah 0,71%sehingga pencapaian kinerja indikator ini adalah $\frac{T-(R-T)}{T}\ X100\ \% = \frac{0{,}50-(0{,}47-0{,}50)}{0{,}50}\ X100\ \%$=48,94% atau **dengan predikat Pencapaian Rendah.**

Sesungguhnya kendati secara capaian kinerja terkesan rendah, laju pertumbuhan penduduk 0,71% sesungguhnya telah berada pada ***on the right track***

, karena trend perkembangan penduduk secara nasional berada pada titik yang sangat rendah beberapa tahun terakhir jika dibandingkan target pembangunan pada tahun 2045, sebagai contoh sesuai sasaran strategi BKKBN , pada tahun 2023 menargetkan laju pertumbuhan penduduk 0,95% pada tingkat nasional. Atas respon penetapan target tahun 2023 yang terlalu rendah dan tidak relevan dengan isu yang berkembang, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah memperbaiki target tersebut pada tahun 2024 dengan menargetkan laju pertumubuhan penduduk pada angka 0,95%. Saat ini dengan laju ertumubhan penduduk Kota Cirebon sebesar 0,71% dinilai lebih ideal dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk secara nasional sebesar 1,13%.

Evaluasi Sasaran 1.1.4 "Terkendalinya Jumlah Penduduk"

Pencapaian sasaran dengan satu indikator ini tak lepas dari suksesnya program yang telah dilaksanakan oleh Dinas pengampu urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, beberapa Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pengendalian Penduduk	237.095.531,00	187.889.881,00	79,246%
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.343.667.122,00	1.721.216.036,00	73,441%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**76,334%**

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutny kami telah melakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian sasaran, kendala serta strategi pepecahan masalah tersebut .Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II.17
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.4 "Terkendalinya Jumlah Penduduk" Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• DPPKB Kota Cirebon dalam memberikan pelayanan KB pada masyarakat fokus pada metode kontasepsi jangka panjang (MKJP) yaitu Kontrasepsi IUD dan IMPLANT yang masa efektifitas penggunaan kontasepsi 4 s.d 5 tahun. • Peningkatan jumlah kampung KB dari tahun ke tahun di Kota Cirebon berdampak positff pada peningkatan pelayanan KB. • Inovasi dalam pelayanan pengendalian penduduk dengan Penguatan dan integrasi kegiatan di kampung KB dengan melibatkan OPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan program	• Terdapat perubahan trend Laju Pertumbuhan Penduduk tingkat nasional yang cendenrung menurun sehingga secara isu strategis terdapat perubahan menyesuaikan skema pembangunan pada tahun 2045, implikasi hal tersebut penetapan target LPP Kota Cirebon tahun 2023 secara umum terlalu rendah. • Program unggulan dalam pengendalian penduduk yaitu Kampung KB belum diterapkan di seluruh Kelurahan di Kota Cirebon	• Terus berupaya meningkatkan jumlah Kampung KB meningkatkan jumlah kampung KB sebaga bagian dari strategi peningkatan partisisipasi dan kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana • Melaksanakan sosialisasi secara virtual serta melalui pamphlet-pamflet terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana, salah satunya saat ini melalui Instagram resmi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Kota Cirebon.		

Sasaran 1.5 Menurunnya Tingkat Pengangguran

Tabel II.18
Capaian Sasaran 1.5 "Menurunnya Tingkat Pengangguran" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
1.5	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,15	68,03	62,84	63.78	62,87	65,42	68,71	103,87%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,5	9,06	8,98	10.97	10,53	8,42	7,66	109,88%
		Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91,94	90,94	91,02	89.03	89,47	91,58	**92.34**	**100,43%**

Menurunnya Tingkat Pengangguran menjadi salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Misi 1 Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul salah satunya di tandai dengan rendah nya tingkat pengangguran, karena tingkat pengangguran mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang sangat strategis dalam pembangunan ini di ukur dengan tiga (3) indikator kinerja sebagai berikut :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Tingkat Kesempatan Kerja

Pencapaian Indikator ke-1 "Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja"

Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan 66,15% untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik per-Agustus 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Cirebon adalah 103,87%, berikut grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tersebut :

Gambar II.6

Grafik Tingkat Partisipas Angkatan Kerja Kota Cirebon tahun 2018-2023

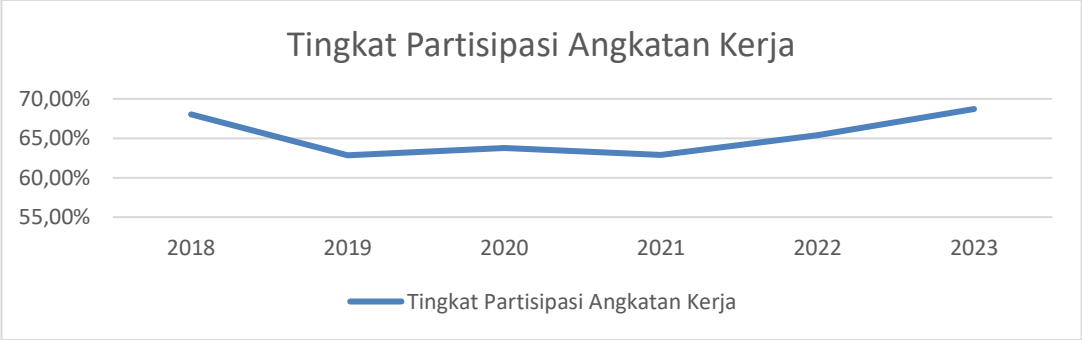

Hal ini didapat dari perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas, memiliki kegunaaan untuk mengindikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Dengan membandingka realisasi dengan target, maka pencapaian kinerja indikator ini pada tahun 2023 adalah $\frac{R}{T} x100\% = \frac{68,71}{66,15} x100\% =$ 103,87%, predikat pencapaian **Melebihi Target serta** realisasi lebih baik daripada rata rata tingkat nasional yaitu 64,98%.

Pencapaian Indikator ke-2 "Tingkat Pengangguran Terbuka"

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 8,5%, sementara data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik per-Agustus Tahun 2023 menyebutkan bahwa terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka yaitu 7,66% dibanding pada tahun 2022 sebesar 8,42%, hal ini mengindikasikan keberhasilan perbaikan kondisi ekonomi yang terus membaik pasca dampak pandemic *covid 19* dan upaya dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang telah menunjukan *impact* positif, jika disandingkan

dengan target dengan pencapaian kinerja menggunakan rumus perhitungan realisasi (R) dari Target (T) semakin kecil semakin baik, $\frac{T-(R-T)}{T} X100\%$ = $\frac{8,5-(7,66-8,5)}{8,5} X100\%$= 109,88% , predikat **Melebihi Target ,** Namun masih dibawah rata-rata nasional yang memiliki tingkat pengangguran terbuka 5,32%. Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran terbuka tahun 2019-2023

Gambar II.7

Tingkat Pengangguran Terbuka Kerja Kota Cirebon tahun 2018-2023

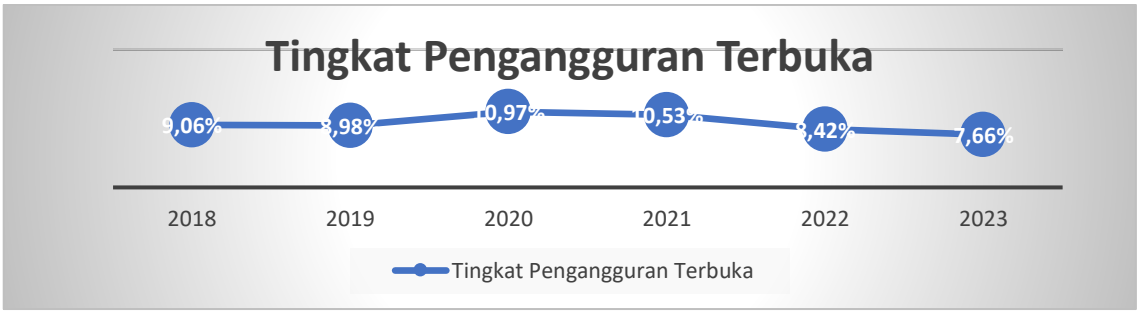

Pencapaian Indikator ke-3 "Tingkat Kesempatan Kerja"

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Tingkat Kesempatan Kerja adalah sebesar 91,94 % sedangkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon Tingkat Kesempatan Kerja pada tahun 2023 sejumlah 92,34%, jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 dimana tingkat kesempatan kerja adalah 91,58, realisasi indikator tingkat kesempatan kerja mengalami kenaikan, hal ini merupakan suatu sinyal positif upaya perbaikan kondisi ekonomi di tengah pandemi yang berlangsung. Capaian kinerja pada tahun 2023 dengan membandingkan antara realisasi dan target adalah 91,94% , berada pada predikat **Sangat Tinggi.**

Evaluasi Sasaran 1.1.5 "Menurunnya Tingkat Pengangguran"

Berdasarkan pencapaian sasaran yang ditunjukan melalui 3 (tiga) indikator menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kota Cirebon mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Semakin tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan menurunnya Tingkat Kesempatan Kerja (TKT) membuktikan ketidakseimbangan jumlah pekerja dan kesempatan kerja yang

tersedia di Kota Cirebon. Upaya untuk mencapai target pada Sasaran ini didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian(%)
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.988.008.623,00	256.018.841,00	12,878%
Program Penempatan Tenaga Kerja	303.479.087,00	296.191.693,00	97,559%
Program Perencanaan Tenaga Kerja	49.999.700,00	48.500.000,00	97,001%
Program Hubungan Industrial	203.460.012,00	192.371.544,00	94,550%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**75,507%**

Berdasarkan data capaian kinerja Sasaran, capaian kinerja memiliki rata-rata 104,76%, berikut adalah faktor pendorong hingga strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

Tabel II.19
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.5 “Menurunnya Tingkat Pengangguran”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Implementasi Program yang telah dilaksanakan dengan baik : • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	• Kondisi sosial Kota Cirebon yang merupaan daerah tujuan urbnisasi meningkatkan jumlah Angkatan kerja membludak dari luar Cirebon sehingga persaingan mendapat	• Merespon tingginya persaingan kerja karena faktor urbanisasi yang tinggi, Pemda Kota cIrebon perlu mentrigger tumbuhnya usaha-usaha di Kota Cirebon serta melakukan strategi Kawasan dengan kabupaten kota sekitar

• Program Perencanaan Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial Dilaksanakanya Kegiatan Bazaar tenaga kerja secara periodik yang meningkatkan informasi tenaga kerja di Kota Cirebon.	pekerjaan di Kota Cirebon sangat tinggi.	dalam meningkatkan kesempatan kerja. • Strategi dan arah kebijakan yang telah dilaksanakan cukup tepat dengan menerapkan strategi menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau. Strategi tersebut menjadi upaya yang mampu menurunkan tingkat pengangguran: ○ Melaksanakan pelatihan kerja kepada tenaga kerja, ○ Melakukan job canvasing ke perusahaan-perusahaan, ○ Mengadakan pemagangan kerja di perusahaan. ○ Mengadakan pembinaan ke perusahaan-perusahaan. • Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagai penanggung jawab urusan Ketenagakerjaan dan melakukan inovasi melalui dorongan motivasi dan perluasan kesempatan kerja untuk tenaga kerja di Kota Cirebon.

Sasaran 1.6 : Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda.

Tabel II.20
Capaian Sasaran 1.6 "Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
1.6	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda.	Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional	Persen	9	2	2	18	8	11	23	**255%**
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	70,00	50	46,30	81,48	94,64	67	75	**197%**

Sebagai sebuah tolok ukur manusia Cirebon yang unggul dalam segala bidang maka relevan meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda di jadikan sebagai sebuah sasaran. Sasaran meningkatnya prestasi ini di lihat dari dua aspek dengan indikator kinerja Jumlah atlet Olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional dan Persentase organisasi pemuda yang aktif. Mengutip kata prestasi ada kritik terhadap indikator jumlah atlet yang berkompetisi, dimana indikator ini tidak menyebutkan secara gamblang pencapaian prestasi, namun sesungguhnya Cirebon sebagai Pemerintah Daerah yang berada pada tingkat kota yang memiliki jenjang 2 level di bawah tingkat nasional, maka menargetkan atlet yang berkompetisi di tingkat nasional secara tidak langsung telah menargetkan juara pada tingkat provinsi, jika juara adalah sebuah acuan prestasi dalam bidang olahraga maka jumlah atlet yang berkompetisi di tingkat nasional cukup relevan karena dipastikan atlet yang berasal dari tingkat kota berkompetisi di tingkat nasional telah melampaui jenjang tingkat provinsi dan mendapat gelar juara atau memiliki prestasi pada tingkat provinsi (sebagai salah satu syarat maju ke tingkat nasional). Sedangkan indikator kedua jumlah persentase pemuda yang aktif menjadi sebuah tolak ukur prestasi di bidang kepemudaan. Pada ranah kepemudaan, kapabilitas individu seorang pemuda pada umumnya dinilai melalui prestasi di bidang akademik (pendidikan) dan prestasi non akademik yang sering

dikaitkan dengan keaktifan di dunia organisasi sosial kepemudaan. Berdasarkan hal itulah maka keaktifan organisasi pemuda (yang sangat ditentukan faktor individu pemuda dalam organisasi tersebut) menjadi sebuah tolak ukur sebagai salah satu wujud prestasi di bidang kepemudaan.

Pencapaian Indikator ke-1 "Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional"

Jumlah atlet lokal yang berkompetisi di tingkat nasional sebanyak 23 atlit diantaranya pada Kejuaraan POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional) yang berlangsung di Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 14 atlit dan kejuaraan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORNAS) yang diselenggarakan di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebanyak 9 Atlit. Meski sudah melebihi capaian target yang telah ditetapkan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon berusaha memaksimalkan event olahraga yang dilaksanakan di masyarakat**.** Berdasarkan data tersebut, maka capaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga adalah sebagai berikut $= \frac{Jumlah\ atlet\ yang\ berkompetisi\ tingkat\ nasional}{target\ jumlah\ atet\ yang\ berkompetisi\ tingkat\ nasional}\ X\ 100\% \quad = \frac{23}{6}\ X\ 100\%$ = **255%** atau dengan pencapaian **Melebihi Target**

a. sebanyak 23 atlit diantaranya pada Kejuaraan POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional) yang berlangsung di Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 14 atlit dan kejuaraan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORNAS) yang diselenggarakan di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebanyak 9 Atlit.

   Meski sudah melebihi capaian target yang telah ditetapkan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon berusaha memaksimalkan event olahraga yang dilaksanakan di masyarakat. Karena itu Dinas Pemuda dan Olahraga akan terus berusaha untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi lain yang berhubungan dengan olahraga diantaranya adalah KORMI, KONI, SP3OR Provinsi Jawa Barat, serta klub-klub olahraga yang ada di masyarakat.

   Disamping itu Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon melalui UPT PPOR dan Bidang Olahraga aktif melakukan penjaringan dan pembibitan atlet-atlet usia dini,

serta melakukan pemanduan bakat terhadap calon bibit atlet usia dini. Ditingkat sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dengan menyelenggarakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOTA) yang dapat menjadi ajang untuk para pelajar berkompetisi dan menunjukkan bakatnya. Selain POPKOTA, event olahraga yang rutin diikuti oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon pada tingkat Provinsi adalah PORPROV, dan PEPARDA, event tersebut untuk menjaring dan membina serta melahirkan atlet-atlet berbakat yang akan dikirimkan ke PON, POPNAS maupun ajang tingkat nasional lainnya.

Tabel II.21

Atlet Yang Berkompetisi di Tingkat Nasional

Pada Event Kejuaran POPNAS XVITahun 2023

NO	NAMA	L/P	CABOR	NOMOR LOMBA
1	NAYLA MISHA FARASSAKH	P	ATLETIK	1500 M Puteri
2	DJENAR MAESA AYU	P	ATLETIK	2000 M Steeplechase Puteri
3	FAIHAK SYAHRU RAHMAN	L	TAEKWONDO	Under 55 Kg 51,1-55,0 Kg
4	VINDY KURNAWANTY	P	BOLA BASKET	Beregu Puteri
5	MEISHA MARIE SURYADI	P	BOLA BASKET	Beregu Puteri
6	ANTOINETE LOISE RICH	P	BOLA BASKET	Beregu Puteri
7	IVAN MATTEW BALIPUTRA	L	BOLA BASKET	Beregu Putera
8	ALOYSIUS VALENTINO SUMANA	L	BOLA BASKET	Beregu Putera
9	JONATAN C.JORIS	L	BOLA BASKET	Beregu Putera
10	JIHAD FISABILILAH	L	BOLA BASKET	Beregu Putera
11	MARCELLSYAHLEVI PUTERA	L	BOLA BASKET	Beregu Putera
12	MALIQUE VAN GAARA	L	BOLA BASKET	Beregu Putera
13	MAYLAV AZHILIYA PUTRIAN	P	PANJAT TEBING	Perorangan
14	NAURAH CHALISA ADEPUTRI	P	RENANG	Perorangan

Naurah Chalisa Adeputri atlit asal Kota Cirebon yang meraih medali perak dan perunggu cabor renang pada event Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVI

Atlit Kota Cirebon yang mewakili Kontingen Jawa Barat pada event Pekan Olahraga Pelajar Nasional

Atlet Yang Berkompetisi di Tingkat Nasional dan Berprestasi

Pada Event Kejuaran FORNAS VII Tahun 2023

NO	NAMA	L/P	NOMOR LOMBA	PRESTASI
1	RAHMADANIL TESARDO P	L	Under 40 Th	Emas
2	RAHMADANIL TESARDO P	L	ACGroup	Emas
3	SEFI AMURULLAH	L	Sepeda CPT Fenny Part PA	Perak
4	M.AFRIZA RIFQIANO	L	Atraksi Ket.Bersepeda PA	Perak
5	HJ. CUCU ROHAETI	P	Atraksi Ket.Bersepeda PI	Perak
6	RANI AGUSTIANI	P	Atraksi Ket.Bersepeda PI	Perunggu
7	CANTIKA AURELIA	P	Novice PI.U-6	Perunggu
8	MEIZURA HANIN JATI	P	Novice PI.U-3	Perunggu
9	SHAFANA AISYAH ANWAR	P	Novice PI.U-6	Perunggu

Atlit FORNAS asal Kota Cirebon yang mewakili Kontingen Jawa Barat pada event/kejuaraan Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional (FORNAS) VII TA

Pencapaian Indikator Ke-2

Pada tahun 2023 target keaktifan organisasi pemuda sebesar 70,00%, Adapun realisasi capaian indikatornya 75,00%. Nilai tersebut didapat dari total organisasi pemuda yang ada di Kota Cirebon sebanyak 56 organisasi, dimana 42 (empat puluh dua) organisasi yang aktif dan 14 (empat belas) Organisasi yang tidak aktif, Pengertian aktif tersebut adalah dilihat dari pembaharuan SK Kepengurusan Organisasi yang di laporkan baik kepada Lembaga Induk Organisasi Kepemudaan yakni KNPI, maupun ke Dinas Kesbangpol Kota Cirebon, disamping itu pula keaktifan organisasi tersebut dalam merekrut dan kaderisasi anggota organisasi yang baru.

Pencapaian tersebut cukup maksimal dikarenakan pembinaan kegiatan kepemudaan yang rutin dilakukan setiap tahunnya bekerjasama dan berkolaborsi dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cirebon. Kedepannya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon akan berusaha untuk mendorong Pemerintah Daerah Kota Cirebon agar rutin mengadakan dan menyediakan pelatihan-pelatihan bagi kaum muda khusunya pelatihan kewirausahaan disamping pembinaan dan sosialisai bahaya NAPZA dan pergaulan bebas. Untuk itu anggaran kegiatan kepemudaan perlu ditingkatkan. Selain masalah anggaran, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon juga akan berusaha untuk lebih baik dalam membina dan

melakukan koordinasi dengan Organisasi pemuda. Berikut adalah daftar organisasi pemuda di Kota Cirebon:

Tabel II.19

Daftar Organisasi Pemuda Kota Cirebon Tahun 2023

NO	NAMA ORGANISASI	ALAMAT	NAMA KETUA	TGL SK	NO SK	PERIODE	SKP
1	Angkatan Muda Islam Indonesia (AMII)	Jl. Gn. Agung II D. 10 No. 109 Cirebon	Euis Sugiawaty, A.Md.	19-04-2021	434/SKEP/DPD-AMII/JB/4/2021	2021-2024	BLM ADA

2	Angkatan Muda Ka'bah (AM KA'BAH)	Jl. Evakuasi No. 13 Cirebon	Kusmayadi	02-11-2020	061/A/mandat/AMK/PP/II/2020	MANDAT	BLM ADA
3	Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)	Jl. Siliwangi No. 15 Cirebon	Andri Sulistio	15-12-2018	KEP-20/K/DPD/AMPI-JB/012/2018	2018-2023	BLM ADA
4	Angkatan Muda Satuan Karya Ulama Indonesia (AMSI)	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 42 Cirebon	Rony Iryadi, M.Kes				
5	Angkatan Muda Siliwangi (AMS)	Jl. Gn. Merapi I No. 02 Cirebon	Alimudin	06-02-2021	SKEP.78/PP.AMS/II/2021	2021-2026	BLM ADA
6	Badan Kordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	Jl. Kalijaga Komp. Masjid Al-Falah Lemahwungkuk Cirebon	Umar Stanis Clau	28-08-2019	05.A/BKPRMI.01/VIII/2019	2019-2023	BLM ADA
7	Baladhika Karya	Jl. Siliwangi No. 15 Cirebon	H.M. Suyono	13-01-2016	118/SK/BK-JBR/XI/2020	2020-2025	22-12-2020
8	Banteng Muda Indonesia (BMI)		Imam Yahya, S.Fil.I	20-03-2018	070/INC/SK/DPP-BMI/III/2018	2018-2022	29-04-2021
9	Barisan Muda Kosgoro 1957 (BM KOSGORO 1957)	Jl. Ciremai Raya Cirebon	Erry Yudhistira Ramadhan, SH				
10	Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN)	Jl. Slamet Riyadi No. 25 Cirebon	Syarif Maulana	19-02-2021	BM PAN/10/Kpts/K-S/II/2021	2017-2023	BLM ADA
11	Buah Batu Corps (BBC)	Griya Sunyaragi Permai Kec. Kesambi Cirebon	R. Jarum	05-05-2021	008/SK-DPP/V/2021	2021-2026	BLM ADA
12	Fatayat Nahdlatul Ulama (FATAYAT NU)	Jl. Garuda No. 1 Cirebon	Tuti Alawiyah, S.Sos.I,. M.Pd.I.	Nov-2019	202/A/PPFNU/SK/XI/2019	2019-2024	BLM ADA
13	Forum Silaturrahim Pemuda Remaja Masjid Indonesia (FSPRMI)		Khoirul Anwar, S.Pd.I				
14	Gema Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (GEMA MKGR)	Jl. Siliwangi No. 15 Cirebon	Mohamad Soleh	02-01-2021	07/DPD/GEMA ORMAS MKGR/Jabar/1/2021	2021-2023	BLM ADA

15	Generasi Muda Demokrat (GM DEMOKRAT)	Jl. Siliwangi Gg. Kramat I No. 10 Cirebon	R. M. Handarujati, S.Sos.				
16	Generasi Muda Forum Komunikasi Penerus Pejuang Kemerdekaan (GM FKPPK)		Agoes Darodjat				
17	Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI - Polri (GM FKPPI)	Jl. Raya Kesambi No. 124 Cirebon	M. Dany Jaelani, S.Sos	18-07-2018	Skep-109/PDX/GM-FKPPI/JB/III/2021	PERPANJANGAN	11-5-2015
18	Generasi Muda Kosgoro (GM KOSGORO)	Jl. Perjuangan No. 32 Cirebon	H. Khotibul Umam, M, Ud, MA	11-02-2021	KEP.016/A/DPD-GMK-JABAR/X/2019	2019-2023	11-02-2021
19	Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI)	Jl. Evakuasi No. 13 Cirebon	Abdul Qodir Jaelani	30-01-2021	073/SK/PP/XII/2020	2020-2025	BLM ADA
20	Generasi Muda Persatuan (GM PERSATUAN)	Jl. Evakuasi No. 13 Cirebon	Yayat Hadiyanto	10-01-2021	18/SK/PD-GMP/I/2020	2021-2024	BLM ADA
21	Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI)		Novian	12-09-2020			29-04-2021
22	Gerakan Pemuda Ansor (GP ANSOR)	Jl. Garuda No. 1 Cirebon	Abdul Sholeh, S.Pd., M.Pd.	11-03-2022	2462/PP/SK-01/III/2022	2022-2027	BLM ADA
23	Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK)	Jl. Evakuasi No. 13 Cirebon	Tunggal Dewananto	14-10-2019	073/SKEP.PP.GP.GPK/X-2019	2019-2024	BLM ADA
24	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	Jl. Swakelola (Sebelah SMAN 5) Majasem	Inggil Abdul Kafi	03-02-2023	361/KPTS/A/05/1444	2023-2024	BLM ADA
25	Hizbul Wathan (HW)	Jl. Syarif Abdurahman No. 49 Cirebon	Fatimah Ahmad, S.Ag.	18-11-2020	002/SK. Kwarwil-10/A/XI/2020	2020-2025	29-04-2021
26	Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM)	Jl. Pilang Raya Gg. Lamtoro No. 2 Sukapura Cirebon	Jehan Nur Yudha	04-04-2020	074/A-1/X/2020	2020-2021	09-10-2005
27	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)	Jl. Garuda No. 1 Cirebon	Salman Mubarok	05-03-2020	349/PP/SP/XIX/7354/III/20	2020-2022	BLM ADA
28	Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)	Jl. Pilang Raya Gg. Lamtoro	Anisa Atla Dewi Saputri	13-11-2020	03-SK/A.1-X/PW	2020-2022	29-04-2021

		No. 2 Sukapura Cirebon			IPM-040/2020		
29	Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)	Jl. Arya Kemuning	Lisnawati	09-05-2021	068/PW/SRP/7455/XVII/V/2021	2021-2023	BLM ADA
30	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)	Jl. Perjuangan Majasem Komp. Masjid Sabilul Huda Cirebon	Diki Wibowo	14-08-2021	229/SK/KU-i/KAMMI/VIII/2021	2021-2023	BLM ADA
31	Komando Inti (KOTI) Mahatidana Pemuda Pancasila	Jl. Saleh No. 3 Cirebon	Tommy Agoestha	10-01-2020	007/KPTS/MPC.PP/Ko.Cn/I/2020	2019-2021	BLM ADA
32	Korps Himpunan Mahasiswa Indonesia Wati (KORPS HMI WATI)	Jl. Swakelola (Sebelah SMAN 5) Majasem	Herawati				
33	Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KORPS PMII PUTRI)		Al Fina				
34	Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (MASIKA ICMI)		Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.Pd.				
35	Nasyiatul Aisyiyah (NASYIYAH)	Jl. Pilang Raya Gg. Lamtoro No. 2 Sukapura Cirebon	Ria Yulianti T, S.ST., M.Kes.	10-03-2021	26/PWNA/SK/III/2021	2016-2020	BLM ADA
36	Pemuda Demokrat Indonesia (PDI)		Lukman Nul Hakim, S.Pd.I., M.Si.	04-01-2021	22.12/KPTS/DPP-PD/II/2021	2020-2025	27-04-2021
37	Pemuda Katholik		Yohanes Bosco Sugianto				
38	Pemuda Kiara		Ade Nuryadi	08-01-2021	109/DPD.OKP PK-JBR/I/2021	2021-2023	BLM ADA
39	Pemuda Muhammadiyah	Jl. Pilang Raya Gg. Lamtoro No. 2 Sukapura Cirebon	Dien Yani Arief	25-11-2020	1.5 /48 / 1442 H	2020-2024	29-04-2021
40	Pemuda Muslimin Indonesia (PMI)		Drs. H. Syaeful Badar, MA.				
41	Pemuda Panca Dharma (PPD)		Ayip Syarif H., S.H.	26-05-2021	101/DPC.026.05/	2021-2026	BLM ADA

					DPP/PPD/V/2021		
42	Pemuda Panca Marga (PPM)	Jl. Dr. Cipto MK / Ged. HD Machmud Pasha Cirebon	Deden Karyana/ Ratwiyatno	09-11-2019/ 12-01-2021	SKEP-37/PD.PPM/JBR/XI/2019 - Skep-018.B/PD.PPM-JBR/I/2021	2019-2023/ PERPANJANGAN	DICABUT SEMENTARA
43	Pemuda Pancasila (PP)	Jl. Saleh No. 3 Cirebon	Heri Hermawan	30-07-2019	619.E2/KPTS/MPW-PP/JBR/IX/2019	2019-2023	16-11-2020
44	Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia (PPAPRI)		Ryan Andri Novandi	Apr-21	KEP/003/DPD PPAPRI/IV/2021	2021-2024	BLM ADA
45	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	Jl. Perjuangan Majasem Cirebon	Ikhwan Sayroti				
46	Purna Paskibraka Indonesia (PPI)		Alfas Muharomi	3-11-2018	SK.070/PPI-09/XI/2018	2016-2021	BLM ADA
47	Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM)	Jl. Samadikun	Jafarudin, SE	02-05-2021	007/KPTS/DPC/X/2019	2019-2024	BLM ADA
48	Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila	Jl. Raya Kesambi Kec. Kesambi Cirebon	Risya Marsha, S.IP.	27-02-2021	23/SK/PW-SAPMA/JBR/IV/2021	2020-2022	16-11-2020
49	Wira Karya Indonesia (WKI)	Jl. Siliwangi No. 15 Cirebon	R. Agung Mintardja	07-09-2020	011/SK/WKI - JBR/IX/2020	2020-2025	BLM ADA
50	Satria		Munadi, ST	08-03-2018	B1-0095/KPTS/PP-SATRIA/III/2018	2018-2023	BLM ADA
51	Sarinah		Dwi Zuvaniasari Solehati				
52	Garda Pemuda Nasdem	Jl. Merdeka Cirebon	Imam Reza Hakiki	28-07-2020	007/DPP/SK/A-1/VII/2020	2020-2024	BLM ADA
53	XTC Indonesia		Jaka Permana	05-08-2019	049/SK-DPC/DPP XTC INDONESIA/VIII/2019	2019-MUSCAB	BLM ADA
54	Srikandi PP	Jl. Saleh No. 3 Cirebon	Hj. Fifi Sopiah	08-11-2017	064/DPW-JBR/SRI		16-11-2020

56	Pagar Nusa NU	Jl. Garuda No. 1 Cirebon	A. Bakhrulluthfi				
WADAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT KOTA							
NO	NAMA ORGANISASI	ALAMAT	NAMA KETUA	TGL SK	NO SK	PERIODE	SKP
1	DPD KNPI Kota Cirebon	Gedung Pemuda Kota Cirebon	R. Jarum, SE	21-06-2021	80/KNPI-JB/VI/2021	2021-2024	
					KANDI-PP/XI/2017		
55	Tapak Suci Muhammadiyah	Jl. Pilang Raya Gg. Lamtoro No. 2 Sukapura Cirebon	Lilik A. Darmawan, M.Pd.	24-012021	A-015/SK-PIMDA/PTS/01/2021	2020-2025	BLM ADA

Tabel II.23
Presentasi Keaktifan Organisasi Pemuda Kota Cirebon Tahun 2023

NO	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Aktif	42	75,00%
2	Tidak Aktif	14	25,00%
Total		**56**	**100,00%**

Gambar II.8
Keaktifan Organisasi Pemuda Tahun 2023

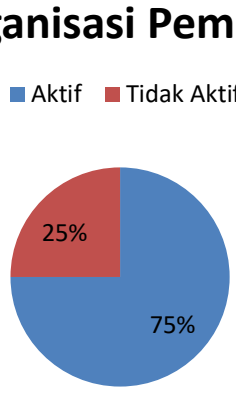

Evaluasi terhadap capaian sasaran 1.6 "Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga"

Pencapaian sasaran yang ditunjukan dengan dua indikator diatas sudah menunjukan pencapaian yang sangat baik yaitu rata rata pencapaian 181%, sasaran ini didukung oleh beberapa program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	561.161.662,00	560.665.662,00	99,912%
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	12.784.184.894,00	12.733.818.388,00	99,606%
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	343.504.525,00	342.394.525,00	99,677%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**99,731%**

Sebagai upaya mempertahankan kinerja yang sudah dicapai kami melakukan analisa terhadap kendala, serta upaya atau strategi pemecahan masalah terkait sasaran 1.6 ini. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II.24
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.6 “Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Keberhasilan pelatihan pada cabang olah raga unggulan Kota Cirebon sehingga menghasilkan atlet yang berprestasi di tingkat nasional. • Dilakukanya pelatihan keorganisasian pada mayoritas organisasi pemuda sehingga Meningkatnya kesadaran di organisasi Pemuda untuk lebih aktif dan melakukan proses berorganisasi serta beregenerasi	• Fasilitas sarana dan prasarana terkait pembinan atlet serta kepemudaan yang masih belum memadai kendati telah ada kemajuan dibanding tahun sebelumnya • Adanya atlet warga kota Cirebon yang menjadi atet profesional yang mewakili Kabupaten/Kota lain.	• Meningkatkan sarana dan prasarana untuk fasilitasi kegiatan pelatihan atlet serta kepemudaan, diantaranya dengan memaksimalkan kerjasama dengan pihak swasta atau G to B. • Melakukan pembinaan atlet secara levih intensif • Menyelenggarakan berbagai event kepemudaan yang positif dan mendukung kreatifitas pemuda

Sasaran 1.7 : Meningkatnya Pengarustamaan gender dan perlindungan anak

Tabel II.25
Capaian Sasaran 1.7 "Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender /IPG (IKU)	Poin	94,46	93,94	94,35	94,34	94,46	94,46	94,91	100,476%
		Indeks Pemberdayaan Gender /IDG (IKU)	Poin	78,47	74,23	75,53	77,86	77,64	77,64	78,07	99,49%

Meningkatnya pengarusutamaan Gender menjadi penunjang Misi 1 Pemerintah Daerah Kota Cirebon, hal ini sebagai upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia khususnya dari segi persoalan gender untuk lebih baik dan terus meningkat dari tahun-ketahunnya. Sudah lazim isu gender dikaitkan dengan kualitas sumber daya manusia sebuah masyarakat yang beradab, bahkan dalam skala nasional hingga internasional persoalan gender menjadi isu yang cukup strategis. Meningkatnya pengarusutamaan gender di ukur dalam dua indikator yaitu Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender. Indeks Pemberdayaan Gender menggambarkan kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi sedangkan Indeks Pembangunan Gender menggambarkan *gap* atau kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan wanita.

Pencapaian Indikator ke-1 "Indeks Pembangunan Gender"

Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2023 di ambil berdasarkan data terkini yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang melakukan rilis Berita Resmi Statistik. Data tersebut tetap dapat digunakan sebagai gambaran perkembangan pemberdayaan gender tahun 2023 dengan nilai indeks pembangunan gender adalah 94,91, meningkat 0,45 sebelum tahun sebelumnya yaitu

94,46. Jika disandingkan dengan target pada tahun 2023 yaitu 94,46 maka pencapaian kinerja adalah $(\frac{\text{realisasi}}{target} x\ 100\%)=(\frac{94,91}{94,46} x\ 100\%)$ = 100,476% atau **Melebihi Target**, Indeks Pembangunan Gender dengan point yang tinggi ini karena didukung kesetaraan pembangunan manusia laki-laki dan perempuan,peningkatan kesetaraan ini didorong oleh meningkatnya jumlah perempuan yang mengakses pendidikan dengan layak di Kota Cirebon serta kesetaraan ekonomi yang memberikan akses ekonomi dengan terbuka pada perempuan.

Pencapaian Indikator ke-2 "Indeks Pemberdayaan Gender"

Indeks Pemberdayaan Gender yang dirilis BPS pada tahun 2023 adalah 78,07 poin, jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 77,64 maka pencapaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Gender = $\left(\frac{realisasi}{target} x\ 100\%\right)=\left(\frac{78,07}{78,47} x\ 100\%\right)$=99,49% , atau **Sangat Tinggi**

Indeks Pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh akses dasar yaitu Pendidikan dan kesehatan. Terbukanya kesempatan pada pekerjaan yang dapat diakses perempuan juga mempengaruhi rendah atau tingginya Indeks Pemberdayaan Gender. Pencapaian Kota Cirebon dalam indeks pemberdayaan Gender cukup tinggi dan berada diatas nasional yang memiliki Indeks dengan nilai 76,59, meski demikian masih perlu upaya perbaikan serta perencanaan strategis dalam meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender sebagai bagian dari keberpihakan gender pada Perempuan.

Pencapaian sasaran yang ditunjukan dengan dua indikator diatas sudah menunjukan pencapaian yang Melebihi Target yaitu dengan rata-rata pencapaian 99,98%, pencapaian sasaran ini didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Perlindungan Perempuan	29.672.200,00	28.520.000,00	96,117%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	256.515.940,00	168.807.500,00	65,808%
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.207.892.898,00	1.728.919.042,00	
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	88.127.425,00	41.243.750,00	46,800%
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	74.952.398,00	66.284.750,00	88,436%
Program Perlindungan Khusus Anak	100.547.175,00	75.062.400,00	74,654%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran Sasaran 1.7			**81,05%**

Evaluasi terhadap capaian sasaran 1.7 “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender”

Sebagai upaya mempertahankan kinerja yang sudah dicapai kami melakukan analisa terhadap kendala, serta upaya atau strategi pemecahan masalah terkait sasaran 1.1.7 ini. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II.26
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.7 “Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak”
Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Akses pendidikan yang dapat diakses tanpa ada diskriminasi terhadap rasial ataupun gender • Peran Politik Perempuan di Wilayah Kota Cirebon yang cukup baik. • Program atau kegiatan Pemda yang memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan	• Permasalahan di lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang begitu dinamis dan melalui lintas sektoral • Membangun pengarusutamaan gender dengan ditunjukan melalui indikator indeks pemberdayaan dan pembangunan gender sangat fluktuatif dan dinamis • Fasilitas yang berkepihakan gender gender di wilayah Kota Cirebon masih belum optimal	• Memperkuat kordinasi dan kolaborasi lintas sektoral, khususnya dalam penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Menambah frekuensi dan terus meningkatkan kualitas pembinaan secara wawasan baik isu politik dan ekonomi pada perempuan di Kota Cirebon agar memiliki motivasi untuk ikut dalam pembangunan juga politik. • Meningkatkan fasilitasi terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. • Meningkatkan fokus pada agenda pembangunan yang memberikan perempuan ruang untuk berkarya.

Sasaran 1.8 : Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon

Tabel II.27
Capaian Sasaran 1.8 "Meningkatnya Peran Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
1.8	Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon	Peningkatan PDRB dari sektor industry	Persen	11,80-11,87	10,29	10,17	9,99	10,43	10,37	10,37	**87,58%**
		Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan	Persen	34,37-34,58	31,74	31,57	31,54	29,73	28,77	28,77	**83,44%**

Meningkatkan Peran Industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon menjadi faktor yang menunjang dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang ekonomi. Sasaran ini memiliki dua indikator kinerja dalam mengukur pencapaian yaitu : Peningkatan PDRB dari Sektor Industri dan Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan.

Pencapaian Indikator ke-1 " Peningkatan PDRB dari sektor industri"

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Peningkatan PDRB dari sektor industri 11,80-11,87%. Berdasarkan data BPS dalam rilis resmi PDRB Kota Cirebon tahun 2023, PDRB dari sektor industri berada pada komposisi 10,37%. Sehingga jika disandingkan dengan target pencapaian kinerja Peningkatan PDRB dari Sektor Industri adalah $\frac{R}{T}x100\%= \frac{10,37}{11,15}x100\% = 87,58\%$, atau **Tinggi.** Tahun 2023 masih merupakan tahun pemulihan dari kondisi pandemi upaya penanganan pandemi yang cukup baik serta stimulus ekonomi yang cukup signifikan membuat industri berangsur membaik khususnya sentra UMKM.

Pencapaian Indikator ke-2 " Peningkatan PDRB dari sektor Perdagangan"

Untuk indikator kedua Peningkatan PDRB dari Sektor Perdagangan berdasarkan data data BPS dalam rilis resmi PDRB Kota Cirebon tahun 2023 adalah 28,77% dari target 34,3%7-34,58% sehingga capaian kinerja indikator ini adalah $\frac{R}{T}x100\%=\frac{28,77}{32,48}x100\%=$ 83,44% , atau berpredikat Tinggi. Salah satu penybab tidak signifikanya PDRB dari sektor perdagangan secara persentase terhadap total PDRB, karena pada tahun 2023 Kota Cirebon telah mulai pulih dari pandemi dan hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan.Jika ditinjau secara pertumbuhan tahun sebelumnya sesungguhnya terjadi tren positif di tahun 2023 karena sektor perdagangan (PDRB Perdagangan, Reparasi Mobil & Motor) tumbuh sebesar 3,55% .

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1.8 :Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	220.001.730,00	135.831.862,00	61,741%
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	24.707.645,00	18.680.000,00	75,604%
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	40.956.270,00	20.983.000,00	51,233%
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	540.222.200,00	531.514.800,00	98,388%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	217.901.734,00	194.062.584,00	89,060%
Program Pengembangan Ekspor	121.498.750,00	120.989.200,00	99,581%
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	133.562.750,00	96.242.750,00	72,058%
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	33.978.575,00	21.407.000,00	63,001%

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	32.143.585,00	10.000.000,00	31,110%
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	420.370.000,00	418.108.200,00	99,462%
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	53.215.250,00	51.390.450,00	96,571%
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	273.120.475,00	180.284.720,00	66,009%
Rata-Rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**75,318%**

Pencapaian Sasaran 1.8 memiliki rata-rata pencapaian indikator 85,51%. Dalam mendukung pencapaian indikator Tujuan/Sasaran "Meningkatkan Peran Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM", tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon melaksanakan program-program sebagai berikut :

Pencapaian Sasaran "Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon" tergambarkan dari rata-rata pencapaian kedua indikator kinerja sebagai alat ukur yaitu sebesar 85,51%, sementara pencapaian realisasi program anggaran yang mengintervensi sasaran tersebut terealisasi sebesar 75,318%. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II.28
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.8 "Meningkatnya Peran Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon" Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Keberlanjutan Inovasi perdagangan dengan e-commerce E-Tuku (aplikasi perdagangan Kota	• Pasca pandemi, sentra industry dan perdagangan belum pulih sepenuhnya.	• Melakukan inovasi di sektor perdagangan serta mengoptimalkan inovasi yang telah ada yaitu E-Tuku • Membuka Mall UMKM dilingkungan Pemda Kota Cirebon

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Cirebon) mempermudah pemantauan harga pasaran dan juga memfasilitasi pembelian dan penjualan online • Dana stimulus bantuan bagi pelaku usaha kecil menengah membantu para pelaku usaha di tengah pandemi telah dilaksanakan sehingga UMKM telah tumbuh kembali • Berjalannya program-program pendukung sasaran		• Mensosialisasikan gerakan jual beli online di wilayah lokal sebagai alternatif jual beli di masa pandemi, khususnya bagi pelaku UMKM agar menyediakan jasa penjualan online
	• Banyak pelaku usaha kecil menengah yang belum menggali potensinya secara optimal, sehingga usaha sulit berkembang	• Melakukan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha industri maupun UMKM lebih intensif lagi • Melakukan atau meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan perkembangan dari sektor industri maupun sektor perdagangan

Sasaran 1.9 Berkurangnya Penduduk Miskin

Tabel II.29
Capaian Sasaran 1.9 "Berkurangnya Penduduk Miskin" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
1.9	Berkurangnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin	Persen	8,35	8,88	8,41	9,52	10,03	9,82	**9,16**	**90,29**

Pemberantasan kemiskinan menjadi salah satu agenda prioritas dalam kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, hal ini senada dengan isu pada skala nasional bahkan global dimana saat ini pemberantasan kemiskinan

menjadi salah satu isu utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai pengganti *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun 2015. Sebagai upaya pemberantasan kemiskinan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon menetapkan sasaran yaitu "Berkurangnya Penduduk Miskin" untuk mendukung pencapaian misi ke-1. Sasaran tersebut memiliki tolak ukur pencapaian sebuah indikator kinerja "Presentase Penduduk Miskin" dimana dari tahun ketahun ditargetkan semakin menurun.

Pencapaian Indikator "Persentase Penduduk Miskin"

Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan persentase penduduk miskin sebesar 8,35% dari total penduduk wilayah Kota Cirebon. Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah gencar menekan angka kemiskinan, dapat dilihat dari pencapaian beberapa tahun terakhir yakni pada tahun 2021 diangka 10,03% dan tahun 2022 diangka 9,82%. Beberapa upaya dilaksanakan dengan fokus memperbaiki kesejahteraan dan pada tahun 2023 berdasarkan rilis BPS Kota Cirebon penduduk miskin di Kota Cirebon mencapai 9,16%, mengalami penurunan sebesar 0,66%. Kendati penurunan ini menunjukan adanya kemajuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan namun belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 8,35%.

Berdasarkan realisasi tersebut maka pencapaian indikator dapat dihitung dengan menggunakan rumus $\frac{Target-(Realisai-Target)}{Target} X\ 100\%$ = $\frac{8{,}35-(9{,}16-8{,}35)}{8{,}35} X\ 100\%$ = 90,29%, atau berpredikat **Tinggi**

Gambar 3.9

Sumber : BPS Kota Cirebon

Evaluasi Sasaran 1.9 "Berkurangnya Penduduk Miskin"

Pencapaian pada tahun 2023 belum mencapai target dengan tingkat pencapaian **90,29%** atau predikat pencapaian **Tinggi**. Realisasi indikator persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 (per Desember) adalah 9,16%, sementara jika dibandingkan pada persentase penduduk miskin tingkat nasional pada maret 2023 yaitu 9,36% masih sedikit lebih tinggi dari tingkat nasional, namun dibanding tahun sebelumnya yaitu persentase penduduk miskin 9,82% maka mengalami penurunan, penurunan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah berada pada *on the right track* dalam penanggulangan kemiskinan dengan melaksanakan berbagai program lintas sektor serta bekerja sama dengan masyarakat maupun pihak swasta, beberapa program yang menunjang secara langsung sasaran ini adalah sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Pemberdayaan Sosial	492.102.700,00	465.802.400,00	94,656%
Program Rehabilitasi Sosial	1.256.925.507,00	918.861.577,00	73,104%
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	503.309.733,00	492.275.058,00	97,808%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Penanganan Bencana	354.592.049,00	352.607.649,00	99,440%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**91,252%**

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dalam sasaran berkurangnya penduduk miskin, berikut adalah hal-hal yang mendukung sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah :

Tabel II. 30
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.9 “Berkurangnya Penduduk Miskin” Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Program-program dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang cukup signifikan dan dapat direalisasikan • Data kemiskinan telah mengalami perbaikan dan kemajuan sehingga lebih valid • Kepedulian dan solidaritas dari masyarakat yang mulai tumbuh untuk memberikan bantuan pada masyarakat misikin	• Tahun 2023 merupakan pemulihan dari kondisi pandemi, sehingga masih terdapat komponen sektor ekonomi yang terdampak. • Rendahnya pendidikan di kalangan keluarga miskin yang menyebabkan menurun nya kesempatan mengakses sumber daya ekonomi	• Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kerjasama dengan masyarakat G to S *(Government to Society)* serta pihak swasta yaitu G to B *(Government to Business),* hal ini tidak lain karena kemiskinan merupakan masalah krusial yang dipengaruhi banyak faktor sehingga upaya dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat itu sendiri perlu terintegrasi dengan baik. • Melanjutkan Penguatan dalam data keluarga miskin melalui program satu data keluarga miskin sangat urgent dilakukan, hal ini guna memastikan setiap program pendukung

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
		pemberantas kemiskinan bisa tepat sasaran

Sasaran 1.10 Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan

Tabel II.31
Capaian Sasaran 1.10 "Meningkatnya pertanian, Kelautan dan Perikanan untuk mencapai Kedaulatan Pangan" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
1.10	Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan /PPH	Poin	95,15	77,80	84	90,2	86,5	88,1	**92,6**	**97,32**
		Kontribusi PDRB dari sektor pertanian	Persen	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	**0,34**	**106,25**

Salah satu sasaran RPJMD Kota Cirebon pada misi 1 Wali kota Cirebon adalah "Meningkatnya Pertanian, Kelautan dan Perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan dengan dua indikator yang menjadi target sasarannya yaitu "Skor PPH" dan " Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertanian". Sasaran ini diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon yang mengacu pada misi 1 Wali Kota Cirebon pada RPJMD Kota Cirebon periode 2018 – 2023 yaitu "**Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam segala Bidang".**

Pencapaian Indikator Ke-1

Pada indikator sasaran yang pertama yaitu "***Skor PPH"***, diperoleh data bahwa Skor PPH Kota Cirebon pada Tahun 2023 yang dirilis oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat pada pertengahan tahun 2024. Pencapaian skor PPH saat ini sebesar 92,6 mendekati target PPH yang telah

ditetapkan pada dokoumen RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 sebesar 95,15, namun pencapaian tersebut telah melebihi Skor PPH tingkat Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 92,3. Pencapaian ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Kota Cirebon untuk mengkonsumsi makanan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral sudah cukup bagus. Namun demikian konsumsi terhadap buah-buahan, sayur -sayuran, umbi-umbian dan kacang-kacangan masih perlu ditingkatkan. Capaian yang didapatkan oleh pemerintah Daerah Kota Cirebon, Skor PPH dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik, disandingkan antara target dan realisasi pada tahun 2023 maka pencapaian kinerja atas indikator ini adalah $\frac{Realisasi}{Target} X\ 100\%$ $=\frac{92,6}{95,15} X\ 100\% =$ 97,32% atau **Sangat Tinggi**

Pencapaian Indikator ke-2

Indikator sasaran yang kedua yaitu ***"Kontribusi PDRB dari sektor pertanian."*** Data PDRB sektor pertanian pada tahun 2023 didapatkan dari hasil koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon pada awal tahun 2024. Pencapaian sasaran Kontribusi PDRB sektor pertanian sebesar 0,34% dari target 0,32% dengan menggunakan data yang diukur dan dikeluarkan oleh BPS pada pertengahan tahun 2024. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar $\frac{Realisasi}{Target} X\ 100\%$ $=\frac{0,34}{0,32} X\ 100\%$ = 106,25%, berpredikat **Melebihi Target**. Dengan adanya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari sektor pertanian ini dapat memberikan informasi tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Cirebon, meskipun sektor pertanian bukan merupakan potensi utama Kota Cirebon dikarenakan potensi lahan pertanian yang semakin hari semakin mengalami penurunan, namun demikian dapat dimaksimalkan dari segi produktivitasnya.

Evaluasi Sasaran 1.10 "Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan"

Sebagai bentuk upaya dalam pencapaian target sasaran yang sudah diamanatkan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, ada

beberapa program prioritas dan program penunjang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian(%)
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan	437.504.579,00	310.044.330,00	70,867%
Program Penanganan Kerawanan Pangan	334.314.135,00	298.141.435,00	89,180%
Program Pengawasan Keamanan Pangan	16.218.175,00	13.413.500,00	82,707%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	467.425.802,00	358.935.392,00	76,790%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.211.901.174,00	1.126.343.550,00	92,940%
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan'	336.861.150,00	132.293.290,00	39,272%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	960.051.568,00	921.446.209,00	95,979%
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	698.661.678,00	604.201.313,00	86,480%
Program Penyuluhan Pertanian	81.732.900,00	70.107.000,00	85,776%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	44.424.250,00	33.914.500,00	76,342%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**79,633%**

Berdasarkan data capaian kinerja dari dua indikator sasaran di atas, dapat diidentifikasi capaian kinerja untuk sasaran RPJMD misi 1 “Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan” tahun 2023 sudah Melampaui target dengan rata-rata pencapaian indikator yaitu 101,79%, dengan perbandingan realisasi anggaran program yang mengintervensi secara langsung pada sasaran sebesar 79,63%. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan

perlu diupayakan langkah-langkah inovatif pada sasaran ini. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya.

Tabel II.32
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.10 “Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan" Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Keberhasilan program –program yang mendukung • Kesadaran masyarakat Kota Cirebon akan keseimbangan konsumsi pangan baik yang bersumber dari energi, protein hewani, sayur, umbi-umbian dan kacang-kacangan sudah cukup bagus • Optimalnya produktivitas lahan pertanian di Kota Cirebon	• Berdasarkan data Penduduk Kota Cirebon masih kurang dalam Konsumsi Buah, Sayur, Umbi-umbian dan kacang-kacangan	• Sosialisai yang lebih intensif terkait gerakan makan buah dan sayur dengan sasaran utama anak sekolah dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu agar mampu menciptakan menu inovasi penyajian makanan yang B2SA (Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman)
	• Lahan Pertanian yang terbatas	• Lebih intensif lagi dalam membina para petani dan masyarakat agar mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dengan cara melakukan bimbingan teknis, pelatihan yang efektif, efisien dan inovatif dalam pengembangan sektor pertanian, terutama dalam pemanfaatan lahan-lahan pekarangan keluarga

Sasaran 1.11 Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif

Tabel II.33
Capaian Sasaran 1.11 "Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan Ekonomi Inklusif" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
1.11	Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata	Persen	5,90-5,93	n/a	7,72	7,51	5,24	5,59	**6,07**	**102,36**

Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi sasaran yang mendukung Misi ke-1, sasaran ini memiliki 1 indikator sebagai tolak ukur pencapaian yaitu Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata. PDRB sektor pariwisata lazim dijadikan sebuah gambaran bagaimana peran pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomis inklusif, karena memuat data pengukuran kontribusi produksi dari sektor pariwisata.

Pencapaian Indikator "Meningkatnya PDRB dari Sektor Pariwisata"

Pada tahun 2024, berdasarkan rilis BPS Kota Cirebon "Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2023" dalam sub kategori PDRB pada laju pertumbuhan dan sumber PDRB berdasarkan lapangan usaha, laju pertumbuhan dan sumber PDRB dari sektor pariwisata yang dipersepsikan dari PDRB menurut lapangan usaha pada penyediaan akomodasi dan air minum adalah 5,83% kendati sesungguhnya terdapat sebagian kontribusi sektor pariwisata yang dapat diperhitungkan dari PDRB jasa lainya adalah sebesar 11,06%, namun karena PDRB jasa lainya juga memuat sektor diluar pariwisata sehingga saat ini dianggap tidak relevan untuk memperhitungkan PDRB jasa lainya sebagai kontribusi terhada sektor pariwisata. Sektor pariwisata yang di pengaruhi oleh 2 (dua) komponen lapangan usaha yaitu penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman, serta Jasa lainya dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Penyediaan akomodasi dan makan minum menyumbang nilai sebesar 5,83%. Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

- Penyediaan Akomodasi

Sub kategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

- Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan sub kategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran self service atau restoran take away, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

2. Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya menyumbang nilai sebesar 11,06%. Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan empat kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk

kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

- **Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi**

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R di dalam KBLI 2009. Kategori ini meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya. Jika disandingkan dengan target yaitu 5,57-5,61 persen pada tahun 2023 dan dengan menyimpulkan bahwa faktor utama yang membangun sektor pariwisata adalah PDRB dari Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum maka pencapaian kinerja indikator Meningkatnya PDRB dari sektor pariwisata adalah $\frac{Realisasi}{Target} X\ 100\%$ $=\frac{6,07}{5,57-5,61} X\ 100\%$ =102,36%, atau **Melebihi Target.** Sektor pariwisata tumbuh cukup signifikan pada tahun 2023 kendati pada kondisi tahun 2019-2021 sempat mengalami penurunan, sehingga stimulus kenaikan PDRB pada sektor ini mempengaruhi secara signifikan dalam persentase pertumbuhanya, selain itu sektor akomodasi mengalami kenaikan, selain kondisi pandemi yang semakin membaik dan berkurangnya Pembatasan Skala Besar, sektor akomodasi yang di dominasi oleh penginapan/hotel juga tumbuh pesat seiring pulihnya ekonomi di Kota Cirebon pada tahun 2023. Berikut adalah data nilai Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata:

Gambar 3.10
Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata menurut Lapangan Usaha atas dasar

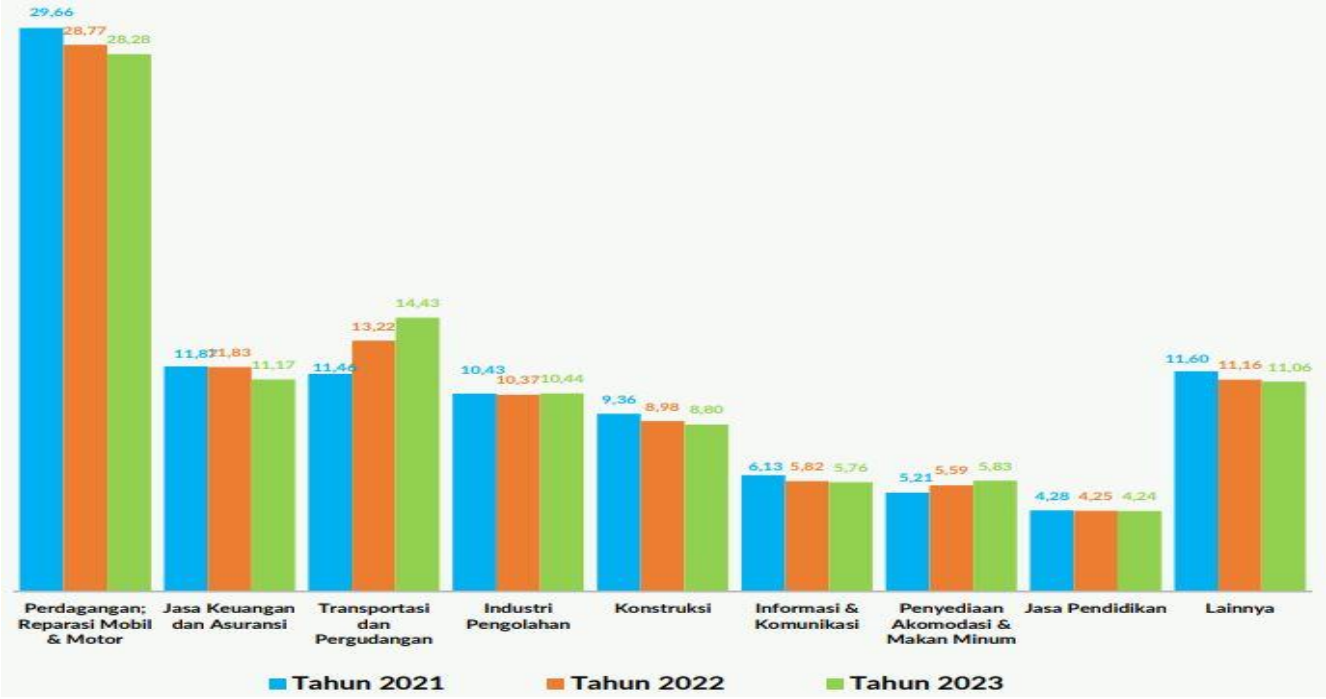

Sumber BPS Kota Cirebon, 2023

Evaluasi Sasaran 1.11: Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif.

Pencapaian sasaran Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif dengan nilai 102,36% atau dengan predikat **Melebihi Target**, Hal ini merupakan kabar baik sekaligus tantangan tersendiri untuk tetap mempertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Program-program yang mendukung Sasaran 1.11 ini adalah sebagai berikut:

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian(%)
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	148.367.600,00	148.211.000,00	99,894%
Program Pemasaran Pariwisata	578.072.024,00	572.345.624,00	99,009%
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	399.705.748,00	396.782.648,00	99,269%

Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran	**99,391%**

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dalam sasaran 1.11 tersebut, berikut adalah hal-hal yang mendukung sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah :

Tabel II.34
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.11 "Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan Ekonomi Inklusif." Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Keberhasilan program – program yang mendukung sasaran • Dilonggarkanya Pembatasan Skala Besar, sehingga terjadi kenaikan kunjungan wisatawan terhadap Kota Cirebon di tahun 2023 • Meningkatnya pertumbuhan jasa lainya yang menunjukan adanya pertumbuhan sarana ekonomi alternatif secara inklusif	• Sektor ekonomi alternatif yang ditunjukan sektor hiburan, rekreasi, dan Kesenian masih merupakan sektor baru yang pertumbuhanya • Sektor ekonomi alternatif yang ditunjukan sektor hiburan, rekreasi, dan Kesenian masih merupakan sektor baru yang pertumbuhanya • cukup signifikan di Kota Cirebon, pelaku usaha pada sektor ini masih belum stabil dan rawan terhadap dinamisnya	• Melakukan upaya evaluasi secara mendalam terkait kepuasan berwisata di Kota Cirebon • Meningkatkan event-event yang melibatkan sektor usaha jasa lainya sebagai sektor ekonomi alternative/kreatif • Memberikan pembinaan yang menciptakan iklim Baik bagi pelaku usaha di sektor rini

	minat pelanggan atau masyarakat.	
• Keberhasilan program – program yang mendukung sasaran • Dilonggarkanya Pembatasan Skala Besar, sehingga terjadi kenaikan kunjungan wisatawan terhadap Kota Cirebon di tahun 2023 • Menigkatnya pertumbuhan jasa lainya yang menunjukan adanya pertumbuhan sarana ekonomi alternatif secara inklusif		
• Keberhasilan program – program yang mendukung sasaran • Dilonggarkanya Pembatasan Skala Besar, sehingga terjadi kenaikan kunjungan wisatawan terhadap Kota Cirebon di tahun 2023 • Meningkatnya pertumbuhan jasa lainya yang menunjukan adanya pertumbuhan sarana ekonomi alternatif secara inklusif	• Sektor ekonomi alternatif yang ditunjukan sektor hiburan, rekreasi, dan Kesenian masih merupakan sektor baru yang pertumbuhanya • Sektor ekonomi alternatif yang ditunjukan sektor hiburan, rekreasi, dan Kesenian masih merupakan sektor baru yang pertumbuhanya • cukup signifikan di Kota Cirebon, pelaku usaha pada sektor ini masih belum stabil dan rawan terhadap dinamisnya	• Melakukan upaya evaluasi secara mendalam terkait kepuasan berwisata di Kota Cirebon • Meningkatkan event-event yang melibatkan sektor usaha jasa lainya sebagai sektor ekonomi alternative/kreatif • Memberikan pembinaan yang menciptakan iklim Baik bagi pelaku usaha di sektor rini

Sasaran 1.12 Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama

Tabel II.35
Capaian Sasaran 1.12 “Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama” Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
1.12	Meningkatnya kerukunan umat Beragama	Konflik antar umat beragama	Kasus	**0**	0	0	0	0	0	**0**	**100**

Sasaran Meningkatnya kerukunan umat Beragama dengan indikator kinerja Konflik antar umat beragama menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan Misi ke-1. Kualitas sumber daya manusia ditandai salah satunya adalah dengan terciptanya kondisi masyarakat beradab yang penuh toleransi dan dapat hidup berdampingan dengan damai serta minim konflik.

Pencapaian Indikator “Konflik antar Umat Beragama”

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan jumlah konflik antar umat beragama pada target maksimal yaitu 0 / nol kejadian. Target ini terbilang cukup tinggi karena potensi terjadinya konflik di Kota Cirebon tidaklah rendah mengingat heterogen nya komposisi demografi masyarakat di Kota Ini. Namun patut disyukuri berdasarkan data yang disampaikan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 tidak tercatat satupun kejadian terkait konflik antar umat beragama, maka pencapaian atas indikator ini adalah 100%. Dengan predikat **Mencapai Target.**

Evaluasi Sasaran 1.12 “Meningkatnya kerukunan umat Beragama”

Pencapaian Sasaran meningkatnya kerukunan umat beragama berada dalam kategori atau predikat Tercapai Target, dimana satu-satunya indikator

sebagai tolak ukur pencapaian sasaran dapat dilaksanakan sepenuhnya. Keberhasilan ini sekaligus menjadi tantangan kedepan nya untuk tetap dipertahankan dimana kondisi demografi Kota Cirebon yang heterogen dan atmosfer konflik khususnya SARA di tingkat nasional yang sangat fluktuatif menjadi celah kemungkinan yang cukup tinggi terjadinya konflik antar umat beragama yang dapat mencederai kerukunan umat beragama.

Dalam rangka mendukung capaian sasaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengimplementasikan Program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian(%)
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	250.000.609,00	130.014.004,00	52,005%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**52,005%**

Kendati pencapaian target berhasil 100% namun kendala dan tantangan di masa yang akan datang perlu menjadi perhatian. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah:

Tabel II.36
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.12. “Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama” Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Telah terjalinnya hubungan baik antar Umat Beragama di Kota Cirebon • Tokoh masyarakat dari kalangan Umat Beragama memiliki komunikasi yang baik	• Kondisi Demografi penduduk Kota Cirebon yang heterogen menjadi tantangan • Isu Nasional yang berpotensi mempengaruhi kondisi di daerah Kota Cirebon • Pemberitaan *Hoax* dari pihak –pihak yang	• Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan, meningkatkan peran tokoh agama dalam memperkuat implementasi nilai-nilai keagamaan. • Memfasilitsi kegiatan dialog antar umat beragama

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
	tidak bertanggung-jawab	• Memperkuat Koordinasi dengan saber Hoax Kota Cirebon • Memperkuat Koordinasi dalam Forum Kerukunan Umat Beragama • Melaksanakan giat kepemudaan yang di balut dengan konsep penguatan nasionalisme.

Sasaran 1.13 Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal

Tabel II.37
Capaian Sasaran 1.13 "Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
1.13	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Persen	78,41	n/a	53,69	60,8	74,37	76,47	**79,83**	**101,81**

Sasaran "Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal" dengan Indikator: Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan ditetapkan dalam rangka mendukung tujuan dan Misi ke-1. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal menjadi strategis mengingat pada perencanan jangka menengah 2019-2023 Visi Kota Cirebon adalah "SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah".

Pencapaian Indikator "Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan"

Pada Tahun 2023 target dari indikator target dari indikator "Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan" adalah 78,41%. Pada tahun 2023 Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata melakukan upaya pendataan sekaligus pelestarian dan menghasilkan kesimpulan atas objek pemajuan kebudayaan yang aktif (lestari) yaitu sebersar 78,41% dilestarikan sebagai berikut :

Tabel II.38
Capaian Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan

DATA PEMAJUAN KEBUDAYAAN	JUMLAH	PELESTARIAN	
		Dilestarikan	Persentase
a. Tradisi Lisan	35	25	71,4
b. Manuskrip	12	6	50
c. Adat istiadat	28	22	78,6
d. Ritus	34	29	85,3
e. Pengetahuan Tradisional	52	42	80,8
f. Teknologi Tradisional	9	9	100
g. Seni	28	24	85,7
h. Bahasa	10	10	100
i. Permainan Rakyat	21	15	71,4
j. Olahraga Tradisional	9	8	88,9
TOTAL	**238**	**190**	**79,83**

Sumber : Laporan Pemajuan Objek Kebudayaan DISBUDPAR 2023, di olah

Gambar 3.8
Persentase Keaktifan Objek Pemajuan Kebudayaan

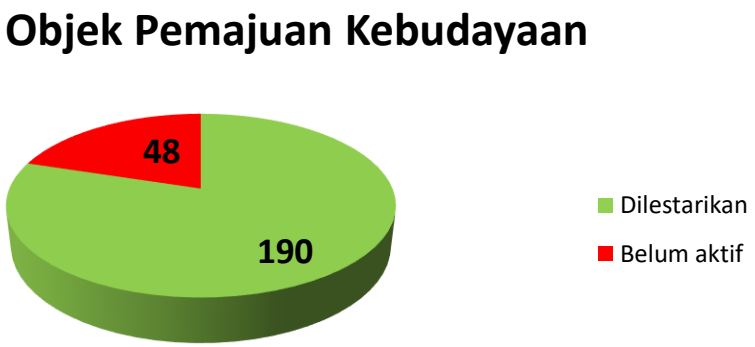

Dari data ini dapat dihitung bahwa realisasi pemajuan kebudayaan mencapai adalah 79,83% dari target 78,41%, berarti tingkat pencapaian indikator ini adalah $\frac{Realisasi}{Target} X\ 100\% = \frac{79,83}{78,41} X\ 100\%$ = 101,81% atau berpredikat **Melebihi Target**

Evaluasi Sasaran 1.13 : Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal

Tingkat pencapaian terhadap sasaran yang ditunjukan dengan tingkat capaian indikator pada tahun 2023 cukup signifikan dengan pencapaian predikat **Melebihi Target** (101,81%) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dalam rangka mendukung kinerja pada sasaran ini terdapat beberapa program yang mendukung langsung terhadap sasaran sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian(%)
Program Pengembangan Kebudayaan	707.291.998,00	701.409.825,00	99,168%
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	547.421.410,00	542.826.824,00	99.161%
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	757.236.000,00	752.056.000,00	99.316%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**99,215%**

Sebagai upaya melakukan perbaikan kinerja, maka berikut adalah analisa faktor yang mendorong, permasalahan, serta upaya atau strategi pemecahan masalah tersebut.

Tabel II.39
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.13. “Meningkatnya Pelestarian Pengembangan Budaya Lokal”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Implementasi Perwalkot No. 77 Tahun 2022 tentang Kamis Nyerbon	• Sangat banyak dan kompleksnya data objek pemajuan kebudayaan disatu	• Meningkatkan pelestarian dan legalitas seni dan budaya lokal

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Peningkatan efektifitas pelaksanaan program dibandingkan tahun sebelumnya. • Kolaborasi dan Sinergitas terhadap budaya dan pariwisata di Kota Cirebon bersama perangkat daerah, Masyarakat dan *stakeholder* yang dimulai dari tahun 2021 sampai dengan sekarang • Peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan dibandingkan tahun sebelumnya	sisi keterbatasan sumber daya dalam melakukan stimulus pelestarian terhadap objek kebudayaan lokal tersebut.	• Perlindungan, pengembangan dan penataan cagar budaya • Terus memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan lokal

Sasaran 1.14 Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan

Tabel II.40
Capaian Sasaran 1.14 “Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan” Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
1.14	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat perkembangan kelurahan di Kota Cirebon (kelurahan):	Jumlah	13	13	13	15	19			
		Persentase kelurahan cepat berkembang	Persen	59,09						**86,00**	**145,54**
		Meningkatnya Kualifikasi Status Kelurahan :									
		Kecamatan Kesambi	Persen	100,00					80	**100,00**	**100,00**

		Kecamatan Pekalipan	Persen	50,00					25	**25,00**	**50,00**
		Kecamatan Kejaksan	Persen	25,00					50	**50,00**	**200,00**
		Kecamatan Harjamukti	Persen	60,00					25	**20,00**	**33,33**
		Kecamatan Lemahwungkuk	Persen	50,00					50	**50,00**	**100,00**

"Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan" menjadi salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Misi 1 Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul salah satu gambaran kondisi yang ada adalah dengan tingkat kualitas pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan. Sasaran ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan sejumlah indikator yang beberapa diantaranya merupakan sub indikator yang membangun indikator utama lainya,sub indikator tersebut berada pada tingkat kelurahan, sehingga dalam uraian Laporan Kinerja ini akan diuraikan indikator pada tingkat Kota sebagai bentuk rekapitulasi dari indikator yang tercantum di 22 kelurahan, berikut adalah indikator tersebut :

1. Kualitas Pemberdayaan kelurahan Sangat Berkembang
2. Meningkatnya kualifikasi Status Kelurahan

Pencapaian Indikator ke 1 Persentase Kelurahan "Cepat Berkembang"

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Kualitas Pemberdayaan Kelurahan Sangat Berkembang yang ditunjukan dengan kondisi perkembangan kelurahan sangat berkembang adalah 59,09% dari seluruh jumlah kelurahan. Berdasarkan Berdasarkan hasil pada Sistem Aplikasi Prodeskel (Profil Desa/Kelurahan) dan Evdeskel (Evaluasi Desa/Keluarhan), bahwasanya jumlah kualitas pemberdayaan kelurahan dengan tingkat cepat berkembang adalah 13 kelurahan atau berjumlah 86,00%, jika disandingkan dengan target sebesar

59.09%, maka pencapaian kinerja indikator tersebut $=\frac{R}{T}x100\%=\frac{86{,}00\%}{59{,}09\%}x100\%=$ 145,54%, atau **Melebihi Target**.

Evaluasi Sasaran 1.14 "Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan"

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan tiga (3) indikator memiliki rata-rata pencapaian sebesar 104,81% pencapaian ini berada dalam predikat **Sangat Tinggi**. Pencapaian yang sangat baik ini didukung Program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian(%)
Program administrasi Pemerintahan Desa	29.788.350,00		0,000%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	833.128.650,00	598.693.425,00	71,861%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (Kecamatan)	17.920.474.024,00	16.400.655.255,00	91,519%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**87,99%**

Kendati pencapaian Sasaran ini sudah **Melabihi Target** diperlukan upaya untuk mempertahankan kinerja ataupun meningkatkanya di tahun yang akan datang. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II.40
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.14 "Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat"

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Keberhasilan Program pemberdayaan kelurahan secara efektif dan efesien • Koordinasi antar Perangkat Daerah pemangku kepentingan dalam pemberdayaan masyarakat berjalan cukup baik. • Kerjasama dengan pihak eksternal diantaranya dengan TNI,dan swasta dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat	• Struktur kelembagaan dengan berorientasi pada penyederhanaan birokrasi, menempatkan urusan pemberdayaan masyarakat di ampu pada Sekretariat Daerah (tanpa membentuk Dinas) namun pada praktiknya terjadi beban kerja berlebih pada satu unit di Sekretariat Daerah khususnya di Bagian yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat. • Urbanisasi yang cukup tinggi meningkatkan jumlah penduduk tidak tetap di kelurahan yang berada pada wilayah perkotaan. Kepadatan tinggi yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan lingkungan kumuh dan kontra produktif dengan keberdayaan. • Program pemberdayaan yang terbatas masih belum bisa menjangkau seluruh masyarakat di tingkat kelurahan. • Masih terdapat kelompok masyarakat yang enggan untuk memanfaatkan program terkait pemberdayaan masyarakat.	• Melaksanakan evaluasi kelembagaan untuk mendapatkan formulasi yang tepat dan ideal dalam penanggungjawab atau pengampu urusan pemberdayaan masyarakat. • Menjaga koordinasi antar pemangku kepentingan terjalin dengan baik sehingga program yang diselenggarakan dapat selaras dengan praktik di lapangan, • Menjaga koordinasi dan sinergitas dengan objek dari pemberdayaan yaitu masyarakat kelurahan itu sendiri, sehingga selain menjadi obyek, masyarakat pun terlibat sebagai subjek atau pelaku pemberdayaan. • Melakukan Inovasi di bidang pemberdayaan Masyarakat, serta fokus pada pemberdayaan masyarakat yang dapat menjadi solusi dalam isu sosial-ekonomi yang ada di masyarakat, khususnya permasalahan ekonomi. • Menyikapi perencanaan di lingkup pemberdayaan masyarakat sesuai dengan demografi kependudukan, khususnya dalam

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
		menyikapi bonud demografi di Kota Cirebon.

Misi 2 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif"

Sesuai dengan arahan Misi 2, RPJMD, yaitu **"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Sarana Prasarana Umum Diikuti Dengan Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa",** yang ditandai dengan :

a. Terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa, efektif dan efisien.
b. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang taat pada hukum dan mampu mengayomi masyarakat dengan optimal.
c. Organisasi pemerintahan yang tertata dengan baik dan berfungsi dengan optimal.
d. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki produktifitas yang tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui instansi masing-masing.

Misi ini merupakan arahan untuk meningkatkan daya saing pembangunan daerah melalui terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif.

Sebagai tolak ukur dalam mewujudkan Misi 2, ditetapkan 1 tujuan dan 11 sasaran yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan

Tabel II.41

Capaian Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi *(Indikator Kinerja Utama)*	Poin	80,00	57,29	60,86	62,84	63,53	66,57	**73,91**	**92,39**

Tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan” diukur dengan sebuah Indikator : “Indeks Reformasi Birokrasi (RB)”. Pada tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menerbitkan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Road Map* RB, yang mengamanatkan upaya pelaksanaan RB harus sepenuhnya memberikan manfaat yang nyata dan berdampak secara langsung kepada Masyarakat. Hal ini merupakan hasil dari evaluasi pengukuran Indeks RB sebelumnya yang memuat 8 dimensi proses yang dianggap belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan Masyarakat.

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) terbagi menjadi 2 (dua) yakni pelaksanaan RB General yang merupakan strategi pelaksanaan RB dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di Tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan RB

Tematik yang merupakan strategi pelaksanaan RB yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda Program Pembangunan Nasional dan Daerah.

Pencapaian Indikator Tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi"

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan indeks reformasi birokrasi pada poin 80, merupakan target yang cukup tinggi. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Kota Cirebon mendapatkan poin sebesar 73,91 Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.42
Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon 2023

Komponen Penilaian	Bobot	2023
RB General	**100,00**	**62,96**
RB Tematik	**20,00**	**10,95**
Indeks Reformasi Birokrasi (RB General+RB Tematik)	**120,00**	**73,91**

Dengan poin Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 73,91 maka pencapaian indkator kinerja pada tahun 2023 tersebut adalah 92,39%, dengan predikat pencapaian **Tinggi**.

Evaluasi Tujuan "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan"

Pencapaian Indikator dari tujuan "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi dalam Manajemen Pemerintahan" dengan predikat pencapaian Tinggi, merupakan hasil dari semangat melakukan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kota Cirebon, dapat dilihat dari pencapaian Indeks RB tahun 2023 sebesar 73,91 dengan predikat BB dari target 80 poin. Dibandingkan pencapaian Indeks RB tahun sebelumnya sebesar 66,57 dengan predikat B, hal ini menunjukan bahwa terdapat kenaikan poin yang cukup signifikan yakni sebesar 7,34 poin pada tahun 2023.

Untuk menunjang tujuan pada Misi 2, telah ditetapkan 11 sasaran yang sinergis, dimana setiap sasaran pengukuran, analisa dan evaluasinya akan diuraikan satu persatu secara rinci sebagai berikut :

Sasaran 2.1 : Meningkatnya dukungan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan

Tabel II.43
Capaian Sasaran 2.1 "Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan	Persentase penyelenggaraan layanan administrasi Pemerintahan	Persen	**100**					99,0	**93,96**	**93,96**

Pencapaian Indikator "Persentase penyelenggaraan layanan administrasi Pemerintahan"

Berdasarkan data pada akhir tahun 2023, diketahui bahwa capaian output realisasi program pendukung urusan pemerintahan sebagai program yang dipersepsikan mendukung layanan administrasi pemerintahan mencapai 93,96% dari target 100%, maka pencapaian kinerja pada indikator dimaksud adalah = $\frac{R}{T} x100\% = \frac{96{,}16}{100} x100\%$ = 93,96% atau **Sangat Tinggi.**

Program yang mendukung pencapaian sasaran Persentase penyelenggaraan layanan administrasi Pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut:

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	788.594.200.062	740.939.345.710	**93,96%**

Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran	**93,96%**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi program anggaran yang mendukung kinerja sasaran lebih kecil disbanding persentase capaian kinerja sasaran. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya

Tabel II.44
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.1 “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Perencanaan program pendukung urusan pemerintahan yang cukup baik. • Kinerja kesekretariatan di lingkungan Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang cukup optimal sehingga mempengaruhi jalannya pelaksanaan kegiatan dan program yang mendukung capaian sasaran	Dinamika peraturan yang berubah secara cepat khususnya dalam pengeluaran keuangan dan kesekretariatan Sistem Layanan Perencanaan SIPD masih belum optimal	Lebih intensif melakukan evaluasi pada program pendukung urusan pemerintahan Menyusun prioritas penganggaran pendukung urusan pemerintahan sehingga dapat lebih efektif

Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur

Tabel II.45
Capaian Sasaran 2.2 “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur”
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
2.2	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur	Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi	Persen	**55,00**	55,00	26,08	25,72	39,00	94,00	94,09	**171**
		Persentase Pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	Persen	**82,50**	82,50	80,35	80,77	80,70	86,64	85,00	**103**
		Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin	Persen	**98,00**	98,00	92,72	96,94	97,72	96,61	96,95	**98,93**
		Persentase Kepatuhan Pegawai untuk Memenuhi Penyampaian LHKPN	Persen	**100**	100	97,37	100	97,72	100,00	100	**100,00**

Sasaran “Meningkatnya Kapasitas dan SDM Aparatur” dengan 4 indikator yaitu “Prosentase ASN yang direkrut sesuai Kompetensi”, “Prosentase Pegawai yang capain kinerja sesuai target”, “Prosentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin” dan “Presentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi penyampaian LHKPN” menjadi salah satu tolok ukur dalam mewujudkan Misi ke 2 yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif”.**

Pencapaian Indikator ke-1 “Prosentase ASN yang direkrut sesuai Kompetensi”

Berdasarkan data pada tahun 2023, jumlah formasi yang diusulkan sebanyak 779 formasi terdiri dari usulan formasi PPPK Guru 332, formasi PPPK Kesehatan 160 dan formasi PPPK Teknis 287, Sedangkan formasi diterima sebanyak 733. Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa realisasi kinerja pada indikator sasaran ini untuk tahun 2023 adalah 94,09%, lebih tinggi dari target yang

ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu 55,00%, sehingga capaian kinerja = $\frac{R}{T}x100\%$= $\frac{94,09}{55,00}x100\%$=171% atau **Melebihi Target.**

Pencapaian Indikator ke-2 "Prosentase Pegawai yang capain kinerja sesuai target"

Persentase pegawai dengan capaian kinerja sesuai target pada tahun 2023 mencapai 85,00% dari target yang ditetapkan yaitu 82,50% sehingga capaian kinerja untuk indikator ke dua ini mencapai 103,00%. Pencapaian target tersebut berdasarkan data pada tahun 2022 yaitu dari 31 perangkat daerah terdapat 3.314 SKP pegawai yang melaporkan. Dari data tersebut dapat diidentifikasi sebanyak 1901 pegawai dengan penilaian sangat baik (rata-rata 91), 1.124 pegawai dengan penilaian baik (rata-rata 82) dan 270 pegawai dengan penilaian cukup (rata-rata 74), sehingga nilai SKP seluruh pegawai yang mengirimkan SKP adalah untuk kategori sangat baik sebesar 172.991, kategori baik sebesar 92.168, dan kategori cukup sebesar 19.980. Dengan target capaian kinerja pegawai pada kategori minimal baik maka total nilai SKP pegawai yang mencapai target adalah sebesar 283.139. Dari total nilai SKP yang mencapai target jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang mengirimkan SKP sebanyak 3.314 pegawai, maka diperoleh capaian kinerja sesuai target adalah 85,00%, jika disandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu 82,00% dengan pencapaian kinerja indikator ini = $\frac{R}{T}x100\%$= $\frac{85,00}{82,50}x100\%$= 103,00% atau **Melebihi Target**

Pencapaian Indikator ke-3 "Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin"

Indikator Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin dengan target kinerja sebesar 98,00% untuk tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 96,95%, berdasarkan hasil perbandingan antara perhitungan jumlah kehadiran ASN tahun 2023 dibagi jumlah total kehadiran seluruh ASN dikali serratus persen yaitu ketidak hadiran ASN pada tahun 2023 sebesar 33.707 ASN/hari (cuti sakit 8.499, cuti 17.527, cuti alasan penting 753, cuti bersalin 6.467, cuti besar 361, tanpa keterangan 15 dan isoman 85) dibagi total hari kerja selama satu tahun (4.627 ASN x 239 hari kerja = 1.105.853 ASN/hari kerja). Jika disandingkan

dengan target pada tahun 2022 yaitu 97,00% maka pencapaian indikator kinerja ini adalah = $\frac{R}{T} x100\%= \frac{96,612}{9097,00} x100\%$= 99,60% atau **Sangat Tinggi**.

Pencapaian Indikator ke-4 yaitu "Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi penyampaian LHKPN"

Berdasarkan data pada tahun 2023 terdapati 76 orang pegawai yang wajib menyusun LHKPN, seluruhnya menyampaikan laporan LHKPN. Sehingga berdasarkan data tersebut maka capaian kinerja pada tahun 2023 mencapai 100%, dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Maka capaian kinerja sebesar $\frac{Realisasi}{Target} X\ 100\% = \frac{100\%}{100\%} X\ 100\% =\ 100\%$ atau **Sesuai Target**.

Evaluasi Sasaran 2.2 "Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur"

Berdasarkan data capaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran, maka dapat diidentifikasi capaian kinerja untuk sasaran "Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur" pada tahun 2023 adalah 118,23% atau **Melebihi Target.** Pencapaian tersebut didukung program-program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Kepegawaian Daerah	1.952.302.334,00	1.636.873.595,00	83,843%
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.917.542.529,00	1.906.530.154,00	99,426%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**91,634%**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi program anggaran yang mendukung kinerja sasaran lebih kecil disbanding persentase capaian kinerja sasara. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya

Tabel 3. 1
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

Sasaran 2.2. “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dijadikan sebagai salah satu indikator diberikan atau tidaknya Tambahan Penghasilan Pegawai, mendorong ASN di lingkungan Pemda Kota Cirebon untuk menyusunnya • Adanya surat edaran penyusunan SKP dan juga LHKPN • Kedisiplinan pegawai menjadi indikator besar kecilnya Tambahan Penghasilan Pegawai mendorong ASN meingkatkan kehadiran atau disiplin nya	Terdapat Sebagian kecil ASN yang belum memahami sepenuhnya penyusunan SKP. Terdapat sebagian kecil ketidaksesuaian format dalam penyusunan SKP, hal ini dikarenakan dinamisnya pengaturan perundang-undangan sementara masih terdapat sebagian kecil yang tidak segera melakukan penyesuaian	Lebih intensif melakukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian tiap-tiap perangkat daerah terkait penyampaian laporan SKP Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyusunan SKP bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Memberikan sosialisasi terkait kewajiban menyampaikan LHKPN bagi pegawai yang memiliki kewajiban menyusun LHKPN Memberikan sosialisasi terkait peningkatan dan penegakkan disiplin bagi seluruh aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Sasaran 2.3 “Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah”

Tabel II.47
Capaian Sasaran 2.3 “Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah”
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
2.3	Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggara an Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterapkan	Persen	100,00	45,00	0,54	100	100	99,44	**81,25**	**81,25**
		Persentase peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	Persen	100,00	n/a	n/a	32,26	50	75	**68,75**	**68,75**

Sasaran “Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi” dengan dua Indikator yaitu “Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan” dan “persentase peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan” merupakan sasaran yang mendukung tercapainya tujuan dan mewujudkan Misi ke-2.

Pencapaian Indikator ke-1 “Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterapkan”

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan sebesar 100%, hal ini target yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi awal pada tahun 2018 yang hanya 45%. Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi serta pendataan yang dilakukan Bagian Organisasi, pada tahun 2023 persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan mencapai 81,25% dengan rincian 26 perangkat daerah yang telah menetapkan dan 6 perangkat daerah yang belum menetapkan dari total 32 perangkat daerah, maka pencapaian kinerja indikator dimaksud adalah = $\frac{R}{T} x100\%= \frac{81,25\%}{100\%} x100\%=$ 81,25%, dengan predikat **Tinggi.** Jumlah SOP yang diterapkan merupakan hasil upaya dari sosialisasi SOP yang dilakukan secara

efektif juga monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan setiap semester pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon kendati tidak mencapai target 100%.

Pencapaian Indikator ke-2 Persentase peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan

Berdasarkan data pada tahun 2023, diketahui bahwa peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan ada sebanyak 22 perangkat daerah dan 10 perangkat daerah yang belum menetapkan dari total 32 perangkat daerah, maka perangkat daerah yang memiliki peta proses bisnis yaitu 68,75% jika disandingkan dengan target tahun 2022 75%, maka pencapaian kinerja pada indikator dimaksud adalah = $\frac{R}{T} x100\%= \frac{68,75}{100} x100\%=$ 68,75%, atau berpredikat **Sedang**.

Evaluasi Sasaran 2.3 "Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi"

Sasaran 2.3 "Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi" yang di ukur dengan dua indikator memiliki rata-rata pencapaian 75% dengan predikat Sedang. Dalam rangka mendukung sasaran, Program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.543.046.844,00	4.165.155.131,00	91,682 %
Program Perekonomian dan Pembangunan	1.070.987.978,00	646.448.805,00	60,360 %
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**76,021 %**

Beberapa program secara eksplisit dinilai tidak mempengaruhi sasaran dengan dua indikatornya secara langsung, walaupun sesungguhnya program tersebut ditetapkan sesuai arah kebijakan. Untuk hal ini review atas program dapat

dilakukan dan menjadi catatan dalam evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, guna memastikan efektifitas dan efesiensi program yang ditetapkan. Berikut adalah faktor yang mendukung, kendala serta strategi pemecahan masalah :

Tabel II.48
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.2 “Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah” Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Terlaksananya Sosialisasi pelaksanaan penyusunan SOP, penyusunan Peta Proses Bisnis serta Implementasinya • Telaksananya Monitoring dan Evaluasi lingkup SOP dan proses bisnis sehingga perkembangan capaian sasaran dapat terpantau • Meningkatnya komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Pada tahun 2023 masih terdapat perangkat daerah yang belum memahami penyusunan SOP dan Peta Proses Bisnis sesuai ketentuan yang berlaku Masih terdapat perangkat daerah yang terlambat dalam mengirimkan dokumen SOP dan dokumen peta proses bisnis	Inovasi dalam menyelenggarakan pertemuan salah satunya menyelenggarakan FGD dengan desk langsung kepada perangkat daerah yang perlu pendampingan dalam hal penyusunan sampai ke implementasi pasca ditetapkannya dokumen SOP dan Peta Proses Bisnis Memberikan surat teguran bagi Perangkat Daerah yang terlambat dalam menyusun dan menyampaikan dokumen SOP dan Peta Proses Bisnis

Sasaran 2.4 : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Tabel II.48
Capaian Sasaran 2.4 "Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
2.4	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai Aspek Pelaporan kinerja dalam Evaluasi atas AKIP	Nilai	10,00	8,71	9,89	10,20	10,2	10,2	**10,27**	**102,7%**

Sasaran "Meningkatnya Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan memiliki Indikator yaitu **"**Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan". Sasaran dan indikator ini merupakan suatu upaya untuk memastikan perbaikan dalam hal pengelolaan kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan dan mewujudkan Misi 2.

Pencapaian Indikator "Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan"

Pada Tahun 2023 sesuai Perubahan pada RPJMD 2018-2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam Evaluasi atas AKIP. Sebagai perwujudan atas akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, telah di rilis pada pertengahan tahun 2023 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2023. Hasil evaluasi tersebut secara umum adalah sebagai berikut :

Tabel II.49
Nilai Laporan Hasil Evaluasi Atas Implemantasi Sistam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2023

Komponen	Bobot	Nilai
. Perencanaan Kinerja	30	22,50
. Pengukuran Kinerja	30	18,90
. Pelaporan Kinerja	15	10,80
. Evaluasi Internal	25	15,00
Jumlah	100	67,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : LHE Atas Implementasi SAKIP pada Pemda Kota Cirebon 2023

Berdasarkan data diatas maka pada tahun 2023 nilai tingkat akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah sebesar 67,20 atau dengan predikat B (Baik) berarti akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu beberapa perbaikan, lebih spesifik nilai Aspek Pelaporan Kinerja adalah 10,80, jika disandingkan dengan target 10,00 maka pencapaian indikator ini adalah $\frac{R}{T}x100\%$= $\frac{10,27}{10,00}x100\%$= 102,7%, atau **Melebihi Target**

Evaluasi Sasaran 2.4 "Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja"

Sasaran 2.4 "Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja" yang di ukur dengan1 (satu) indikator memiliki pencapaian 102,7% atau dengan predikat **Melebihi Target**. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II.50
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.4 “Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan”
Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Implementasi sistem pendukung SAKIP yaitu esakip.cirebonkota.go.id yang meningkatkan efektifitas dan efesiensi monitoring dan evaluasi SAKIP, khususnya pada tingkat Perangkat Daerah • Peran pimpinan dalam mengarahkan kebijakan yang mendukung implementasi SAKIP • Kesadaran pada implementasi SAKIP sebagai hal vital dalam perbaikan kinerja yang berkelanjutan serta pencapaian Visi-Misi Wali Kota d lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Target belum seluruhnya tercapai. Capaian Kinerja belum seluruhnya meningkat dari tahun sebelumnya. Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan	Mengkaji dan memperbaiki sistem aplikasi e-lakip Kota Cirebon untuk menyesuaikan perkembangan yang ada. Meningkatkan kembali efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja. Menyusun Peraturan Wali Kota tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Meningkatkan kembali efektifitas dan efesiensi terkait reviu atau evaluasi pada sasaran strategis jangka menengah daerah atapun Perangkat Daerah. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi untuk perbaikan atas permasalahan akuntabilitas kinerja pada seluruh komponen, sesuai rekomendasi yang dirilis dalam Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2023.

SASARAN 2.5 : MENINGKATNYA MATURITAS SPIP

Tabel II.51
Capaian Sasaran 2.5 "Meningkatnya Maturitas SPIP" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.5	Meningkatnya Maturitas SPIP	Tingkatan Maturitas SPIP	Level	4,00	-	-	3	**3**	**3**	**3**	**75%**

Sasaran "Meningkatnya Maturitas SPIP" memiliki Indikator yaitu **"**Tingkat Maturitas SPIP" dengan target level 3 pada tahun 2023. Sasaran dan indikator ini merupakan suatu upaya untuk memastikan perbaikan dalam hal kematangan SPIP yang diukur dengan tingkat maturitas SPIP, sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan dan mewujudkan Misi 1.

Target indikator Meningkatnya Maturitas SPIP pada tahun 2023 adalah level terdefinisi atau tingkat tiga (3) dan realisasi indikator tahun 2023 dapat tercapai sesuai target. Hal tersebut merupakan *impact* dari terpenuhinya data-data yang tertuang dalam unsur-unsur SPIP, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Pemantauan.

SASARAN 2.5 : MENINGKATNYA MATURITAS SPIP

Sasaran 2.5 "Meningkatnya Maturitas SPIP "yang di ukur dengan 1 (satu) indikator memiliki pencapaian 75%. Pencapaian ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, mulai dari Tim SPIP dari Inspektorat, para Perangkat Daerah Kota Cirebon yang menjadi *sample* penilaian, dan Tim Penilai dari BPKP yang membantu

proses pengumpulan data hingga akhir. Berikut adalah program yang mendukung sasaran :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Penyelenggaraan Pengawasan	433.408.756,00	336.684.786,00	77,68%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	761.124.000,00	716.115.110,00	94,09%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**85,89%**

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II.52
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.5 "Meningkatnya Maturitas SPIP." Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Terjaganya Komitmen Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan data-data SPIP meningkat. • Adanya keberlanjutan program dari tahun lalu yaitu Pendampingan BPKP dalam mengawal pengumpulan data-data evidence	Dalam pemenuhan dokumen untuk Penilaian Maturitas SPIP, Perangkat Daerah yang menjadi sampling diharuskan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung, namun tidak semua perangkat daerah tersebut memberikan dokumen yang lengkap	Dalam pemenuhan dokumen Inspektorat berusaha memberikan pendampingan dengan menunjuk Asessor untuk mendampingi perangkat daerah yang menjadi sampel dalam pemenuhan dokumen Penilaian Maturitas SPIP. Perlunya diklat, bimbingan teknis dan pendampingan intensif untuk peningkatan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
pelaksanaan SPIP yang dibutuhkan, meningkatkan ketepatan waktu dan ketelitian.	atas kebutuhan dokumen yang dibutuhkan dalam memenuhi semua unsur dalam SPIP. Masih rendahnya pemahaman pegawai pada perangkat daerah tentang SPIP. Kurangnya komitmen dan pemahaman Kepala Perangkat Daerah terhadap penilaian maturitas SPIP.	kapasitas dan kompetensi *counterpart*. Mendorong komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam pemenuhan dokumen penilaian maturitas SPIP.

Sasaran 2.6 : Meningkatnya Pelayanan Publik

Tabel II.53
Capaian Sasaran 2.6 “Meningkatnya Pelayanan Publik” Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
2.6	Meningkatnya Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perizinan	Persen	84,00	71,00	82,65	82,57	83,54	83,25	**91,25**	**108,63%**
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kependudukan	Persen	85,00	78,00	76,25	77,75	79,00	85,50	**91,50**	**107,65%**

Sasaran “Meningkatnya Pelayaan Publik” merupakan upaya dalam rangka terwujudnya Misi ke-2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif. Tata kelola Pemerintahan yang dimaksud memiliki korelasi dengan tingkat pelayanan publik, dimana sasaran ini diukur dengan 2 indikator sebagai berikut :

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perizinan.
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kependudukan

Pencapaian Indikator ke-1 Tingkat Kepuasan Atas Layanan Perizinan

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan persentase tingkat kepuasan pada pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan nilai indeks kepuasan masyarakat 84,00 sementara itu berdasarkan survey yang dilakukan pada tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan tersebut mencapai 91,25 adalah maka pencapaian indikator ini = $\frac{R}{T} x100\%= \frac{91,25}{84,00} x100\%=$ 108,63%, atau **Melebihi Target.**

Gambar 3.10.
IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA – RATA
U1	Persyaratan	3.53
U2	**Prosedur**	**3.46**
U3	Waktu Pelayanan	3.69
U4	**Biaya / Tarif**	**3.94**
U5	Produk Pelayanan	3.65
U6	Kompetensi Pelaksana	3.66
U7	Perilaku Pelaksana	3.82
U8	Sarana Prasarana	3.54
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.59
JUMLAH NILAI UNSUR		2.236
NRR/UNSUR		32.88
NRR TERTIMBANG/ UNSUR		3.65
IKM UNIT PELAYANAN		**91.25**

Dari hasil survei kepuasan masyarakat semua unsur pelayanan nilai rata – rata unsur pelayanannya baik. Tentu saja hal tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik, hal penting yang harus dilaksanakan adalah perbaikan terhadap unsur yang mempunyai nilai rendah yaitu unsur kompetensi pelaksana. Seperti misalnya memberikan pembinaan terhadap pegawai yang bertugas di bagian pelayanan (Front Office) dan meningkatkan informasi tentang prosedur pelayanan di bagian pelayanan sehingga masyarakat mendapatkan informasi dalam segi konsultasi.

Pencapaian Indikator ke-2 "Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kependudukan"

Indikator Tujuan/Sasaran Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kependudukan merupakan salah satu target yang tertuang dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023. Untuk target di Tahun 2023 Tingkat Kepuasan masyarakat atas Layanan Kependudukan adalah 85,00. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon menghasilkan satu dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 91,50. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\frac{R}{T} x100\% = \frac{91,50}{85,00} x100\% =$ 107,65% atau **Melebihi Target.**

Gambar 3.11.
IKM Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Indeks per Unsur Pelayanan	Nilai IKM setelah dikonversi	Mutu pelayanan	Kinerja pelayanan
1	Persyaratan	3,56	89,00	A	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,57	89,25	A	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	3,50	87,50	B	Baik
4	Biaya / Tarif	3,98	99,50	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,54	88,50	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,64	91,00	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,69	92,25	A	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,62	90,50	A	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,86	96,50	A	Sangat Baik

Sumber : Data diolah (2023)

Secara garis besar pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Kota Cirebon kepada masyarakat sudah sangat optimal, dengan nilai 91,50 maka mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 85,50. Beberapa faktor yang mendorong pencapaian kenaikan nilai adalah melengkapi fasilitas sarana dan prasarana pada gedung bangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menindaklanjuti segala bentuk pengaduan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan serta meningkatkan kompetensi petugas pelayanan.

a. Analisis program dan kegiatan yeng mendukung pencapaian target kinerja

Dalam melakukan analisi Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon sebagai berikut :

Evaluasi Tujuan 1.1. "Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon"

Tingkat pencapaian terhadap sasaran yang ditunjukan dengan tingkat capaian indikator pada tahun 2023 cukup signifikan dengan pencapaian predikat Melebihi Target (101,81%) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dalam rangka mendukung kinerja pada sasaran ini terdapat beberapa program yang mendukung langsung terhadap sasaran sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengembangan Kebudayaan	707.291.998,00	701.409.825,00	99,168 %
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	547.421.410,00	542.826.824,00	99.161 %
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	757.236.000,00	752.056.000,00	99.316 %
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**99,215 %**

Sebagai upaya melakukan perbaikan kinerja, maka berikut adalah analisa faktor yang mendorong, permasalahan, serta upaya atau strategi pemecahan masalah tersebut.

Tabel II.54

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.13. "Meningkatnya Pelestarian Pengembangan Budaya Lokal"

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Implementasi Perwalkot No. 77 Tahun 2022 tentang Kamis Nyerbon Peningkatan efektifitas pelaksanaan program	• Sangat banyak dan kompleksnya data objek pemajuan kebudayaan disatu sisi keterbatasan sumber daya dalam melakukan	Meningkatkan pelestarian dan legalitas seni dan budaya lokal Perlindungan, pengembangan dan penataan cagar budaya

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
dibandingkan tahun sebelumnya. • Kolaborasi dan Sinergitas terhadap budaya dan pariwisata di Kota Cirebon bersama perangkat daerah, Masyarakat dan *stakeholder* yang dimulai dari tahun 2021 sampai dengan sekarang • Peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan dibandingkan tahun sebelumnya	stimulus pelestarian terhadap objek kebudayaan lokal tersebut.	Terus memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan lokal

SASARAN 2.7 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel II.55

Capaian Sasaran 1.14 “Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan” Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
1.14	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat perkembangan kelurahan di Kota Cirebon (kelurahan):	Jumlah	13	13	13	15	19			
		Persentase kelurahan cepat berkembang	Persen	59,09						**86,00**	**145,54**
		Meningkatnya Kualifikasi Status Kelurahan :									

		Kecamatan Kesambi	Persen	100,00					80	**100,00**	**100,00**
		Kecamatan Pekalipan	Persen	50,00					25	**25,00**	**50,00**
		Kecamatan Kejaksan	Persen	25,00					50	**50,00**	**200,00**
		Kecamatan Harjamukti	Persen	60,00					25	**20,00**	**33,33**
		Kecamatan Lemahwungkuk	Persen	50,00					50	**50,00**	**100,00**

"Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan" menjadi salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Misi 1 Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul salah satu gambaran kondisi yang ada adalah dengan tingkat kualitas pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan. Sasaran ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan sejumlah indikator yang beberapa diantaranya merupakan sub indikator yang membangun indikator utama lainya,sub indikator tersebut berada pada tingkat kelurahan, sehingga dalam uraian Laporan Kinerja ini akan diuraikan indikator pada tingkat Kota sebagai bentuk rekapitulasi dari indikator yang tercantum di 22 kelurahan, berikut adalah indikator tersebut :

1. Kualitas Pemberdayaan kelurahan Sangat Berkembang
2. Meningkatnya kualifikasi Status Kelurahan

Pencapaian Indikator ke 1 Persentase Kelurahan "Cepat Berkembang"

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Kualitas Pemberdayaan Kelurahan Sangat Berkembang yang ditunjukan dengan kondisi perkembangan kelurahan sangat berkembang adalah 59,09% dari seluruh jumlah kelurahan. Berdasarkan Berdasarkan hasil pada Sistem Aplikasi Prodeskel (Profil Desa/Kelurahan) dan Evdeskel (Evaluasi Desa/Keluarhan), bahwasanya jumlah

kualitas pemberdayaan kelurahan dengan tingkat cepat berkembang adalah 13 kelurahan atau berjumlah 86,00%, jika disandingkan dengan target sebesar 59.09%, maka pencapaian kinerja indikator tersebut $=\frac{R}{T}x100\%=\frac{86{,}00\%}{59{,}09\%}x100\%=$ 145,54%, atau **Melebihi Target**.

Evaluasi Sasaran 1.14 "Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan"

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan tiga (3) indikator memiliki rata-rata pencapaian sebesar 104,81% pencapaian ini berada dalam predikat **Sangat Tinggi**. Pencapaian yang sangat baik ini didukung Program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program administrasi Pemerintahan Desa	29.788.350,00		0,000%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	833.128.650,00	598.693.425,00	71,861%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (Kecamatan)	17.920.474.024,00	16.400.655.255,00	91,519%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**87,99%**

Kendati pencapaian Sasaran ini sudah **Melabihi Target** diperlukan upaya untuk mempertahankan kinerja ataupun meningkatkanya di tahun yang akan datang. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II.56
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.14 “Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Keberhasilan Program pemberdayaan kelurahan secara efektif dan efesien • Koordinasi antar Perangkat Daerah pemangku kepentingan dalam pemberdayaan masyarakat berjalan cukup baik. • Kerjasama dengan pihak eksternal diantaranya dengan TNI,dan swasta dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat	• Struktur kelembagaan dengan berorientasi pada penyederhanaan birokrasi, menempatkan urusan pemberdayaan masyarakat di ampu pada Sekretariat Daerah (tanpa membentuk Dinas) namun pada praktiknya terjadi beban kerja berlebih pada satu unit di Sekretariat Daerah khususnya di Bagian yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat. • Urbanisasi yang cukup tinggi meningkatkan jumlah penduduk tidak tetap di kelurahan yang berada pada wilayah perkotaan. Kepadatan tinggi yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan lingkungan kumuh dan kontra produktif dengan keberdayaan. • Program pemberdayaan yang terbatas masih belum bisa menjangkau seluruh masyarakat di tingkat kelurahan. • Masih terdapat kelompok masyarakat yang enggan untuk memanfaatkan	Melaksanakan evaluasi kelembagaan untuk mendapatkan formulasi yang tepat dan ideal dalam penanggungjawab atau pengampu urusan pemberdayaan masyarakat. Menjaga koordinasi antar pemangku kepentingan terjalin dengan baik sehingga program yang diselenggarakan dapat selaras dengan praktik di lapangan, Menjaga koordinasi dan sinergitas dengan objek dari pemberdayaan yaitu masyarakat kelurahan itu sendiri, sehingga selain menjadi obyek, masyarakat pun terlibat sebagai subjek atau pelaku pemberdayaan. Melakukan Inovasi di bidang pemberdayaan Masyarakat, serta fokus pada pemberdayaan masyarakat yang dapat menjadi solusi

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
	program terkait pemberdayaan masyarakat.	dalam isu sosial-ekonomi yang ada di masyarakat, khususnya permasalahan ekonomi. Menyikapi perencanaan di lingkup pemberdayaan masyarakat sesuai dengan demografi kependudukan, khususnya dalam menyikapi bonud demografi di Kota Cirebon.

Misi 2 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif"

Sesuai dengan arahan Misi 2, RPJMD, yaitu **"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Sarana Prasarana Umum Diikuti Dengan Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa",** yang ditandai dengan :

a. Terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa, efektif dan efisien.
b. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang taat pada hukum dan mampu mengayomi masyarakat dengan optimal.
c. Organisasi pemerintahan yang tertata dengan baik dan berfungsi dengan optimal.
d. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki produktifitas yang tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui instansi masing-masing.

Misi ini merupakan arahan untuk meningkatkan daya saing pembangunan daerah melalui terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel,

berwibawa, dan inovatif. Sebagai tolak ukur dalam mewujudkan Misi 2, ditetapkan 1 tujuan dan 11 sasaran yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan

Tabel II.57
Capaian Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi *(Indikator Kinerja Utama)*	Poin	80,00	57,29	60,86	62,84	63,53	66,57	**73,91**	**92,39**

Tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan” diukur dengan sebuah Indikator : “Indeks Reformasi Birokrasi (RB)”. Pada tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menerbitkan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Road Map* RB, yang mengamanatkan upaya pelaksanaan RB harus sepenuhnya memberikan manfaat yang nyata dan berdampak secara langsung kepada Masyarakat. Hal ini merupakan hasil dari evaluasi pengukuran Indeks RB sebelumnya yang memuat 8 dimensi proses yang dianggap belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan Masyarakat.

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) terbagi menjadi 2 (dua) yakni pelaksanaan RB General yang merupakan strategi pelaksanaan RB dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di Tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan RB Tematik yang merupakan strategi pelaksanaan RB yang menjadi isu strategis hilir

dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda Program Pembangunan Nasional dan Daerah.

Pencapaian Indikator Tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi"

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan indeks reformasi birokrasi pada poin 80, merupakan target yang cukup tinggi. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Kota Cirebon mendapatkan poin sebesar 73,91 Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.58
Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon 2023

Komponen Penilaian	Bobot	2023
RB General	**100,00**	**62,96**
RB Tematik	**20,00**	**10,95**
Indeks Reformasi Birokrasi (RB General+RB Tematik)	**120,00**	**73,91**

Dengan poin Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 73,91 maka pencapaian indkator kinerja pada tahun 2023 tersebut adalah 92,39%, dengan predikat pencapaian **Tinggi**.

Evaluasi Tujuan "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan"

Pencapaian Indikator dari tujuan "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi dalam Manajemen Pemerintahan" dengan predikat pencapaian Tinggi, merupakan hasil dari semangat melakukan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kota Cirebon, dapat dilihat dari pencapaian Indeks RB tahun 2023 sebesar 73,91 dengan predikat BB dari target 80 poin. Dibandingkan pencapaian Indeks RB tahun sebelumnya sebesar 66,57 dengan predikat B, hal ini menunjukan bahwa terdapat kenaikan poin yang cukup signifikan yakni sebesar 7,34 poin pada tahun 2023.

Untuk menunjang tujuan pada Misi 2, telah ditetapkan 11 sasaran yang sinergis, dimana setiap sasaran pengukuran, analisa dan evaluasinya akan diuraikan satu persatu secara rinci sebagai berikut :

Sasaran 2.1 : Meningkatnya dukungan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan

Tabel II.59
Capaian Sasaran 2.1 "Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur"
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan	Persentase penyelenggaraan layanan administrasi Pemerintahan	Persen	**100**					99,0	**93,96**	**93,96**

Pencapaian Indikator "Persentase penyelenggaraan layanan administrasi Pemerintahan"

Berdasarkan data pada akhir tahun 2023, diketahui bahwa capaian output realisasi program pendukung urusan pemerintahan sebagai program yang dipersepsikan mendukung layanan administrasi pemerintahan mencapai 93,96% dari target 100%, maka pencapaian kinerja pada indikator dimaksud adalah = $\frac{R}{T} x100\%$ = $\frac{96,16}{100} x100\%$ = 93,96% atau **Sangat Tinggi.**

Program yang mendukung pencapaian sasaran Persentase penyelenggaraan layanan administrasi Pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut:

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	788.594.200.062	740.939.345.710	**93,96%**
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**93,96%**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi program anggaran yang mendukung kinerja sasaran lebih kecil disbanding persentase capaian kinerja sasaran. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya

Tabel II.60
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.1 “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Perencanaan program pendukung urusan pemerintahan yang cukup baik. • Kinerja kesekretariatan di lingkungan Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang cukup optimal sehingga mempengaruhi jalannya pelaksanaan kegiatan dan program yang mendukung capaian sasaran	Dinamika peraturan yang berubah secara cepat khususnya dalam pengeluaran keuangan dan kesekretariatan Sistem Layanan Perencanaan SIPD masih belum optimal	Lebih intensif melakukan evaluasi pada program pendukung urusan pemerintahan Menyusun prioritas penganggaran pendukung urusan pemerintahan sehingga dapat lebih efektif

Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur

Tabel II.61
Capaian Sasaran 2.2 "Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur"
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur	Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi	Persen	**55,00**	55,00	26,08	25,72	39,00	94,00	94,09	**171**
		Persentase Pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	Persen	**82,50**	82,50	80,35	80,77	80,70	86,64	85,00	**103**
		Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin	Persen	**98,00**	98,00	92,72	96,94	97,72	96,61	96,95	**98,93**
		Persentase Kepatuhan Pegawai untuk Memenuhi Penyampaian LHKPN	Persen	**100,00**	100,00	97,37	100	97,72	100,00	100,00	**100,00**

Sasaran "Meningkatnya Kapasitas dan SDM Aparatur" dengan 4 indikator yaitu "Prosentase ASN yang direkrut sesuai Kompetensi", "Prosentase Pegawai yang capain kinerja sesuai target", "Prosentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin" dan "Presentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi penyampaian LHKPN" menjadi salah satu tolok ukur dalam mewujudkan Misi ke 2 yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif".**

Pencapaian Indikator ke-1 "Prosentase ASN yang direkrut sesuai Kompetensi"

Berdasarkan data pada tahun 2023, jumlah formasi yang diusulkan sebanyak 779 formasi terdiri dari usulan formasi PPPK Guru 332, formasi PPPK Kesehatan 160 dan formasi PPPK Teknis 287, Sedangkan formasi diterima sebanyak 733. Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa realisasi kinerja pada

indikator sasaran ini untuk tahun 2023 adalah 94,09%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu 55,00%, sehingga capaian kinerja = $\frac{R}{T}x100\%$= $\frac{94,09}{55,00}x100\%$=171% atau **Melebihi Target.**

Pencapaian Indikator ke-2 "Prosentase Pegawai yang capain kinerja sesuai target"

Persentase pegawai dengan capaian kinerja sesuai target pada tahun 2023 mencapai 85,00% dari target yang ditetapkan yaitu 82,50% sehingga capaian kinerja untuk indikator ke dua ini mencapai 103,00%. Pencapaian target tersebut berdasarkan data pada tahun 2022 yaitu dari 31 perangkat daerah terdapat 3.314 SKP pegawai yang melaporkan. Dari data tersebut dapat diidentifikasi sebanyak 1901 pegawai dengan penilaian sangat baik (rata-rata 91), 1.124 pegawai dengan penilaian baik (rata-rata 82) dan 270 pegawai dengan penilaian cukup (rata-rata 74), sehingga nilai SKP seluruh pegawai yang mengirimkan SKP adalah untuk kategori sangat baik sebesar 172.991, kategori baik sebesar 92.168, dan kategori cukup sebesar 19.980. Dengan target capaian kinerja pegawai pada kategori minimal baik maka total nilai SKP pegawai yang mencapai target adalah sebesar 283.139. Dari total nilai SKP yang mencapai target jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang mengirimkan SKP sebanyak 3.314 pegawai, maka diperoleh capaian kinerja sesuai target adalah 85,00%, jika disandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu 82,00% dengan pencapaian kinerja indikator ini = $\frac{R}{T}x100\%$= $\frac{85,00}{82,50}x100\%$= 103,00% atau **Melebihi Target**

Pencapaian Indikator ke-3 "Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin"

Indikator Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin dengan target kinerja sebesar 98,00% untuk tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 96,95%, berdasarkan hasil perbandingan antara perhitungan jumlah kehadiran ASN tahun 2023 dibagi jumlah total kehadiran seluruh ASN dikali serratus persen yaitu ketidak hadiran ASN pada tahun 2023 sebesar 33.707 ASN/hari (cuti sakit 8.499, cuti 17.527, cuti alasan penting 753, cuti bersalin 6.467, cuti besar 361, tanpa keterangan 15 dan isoman 85) dibagi total hari kerja selama satu tahun (4.627 ASN

x 239 hari kerja = 1.105.853 ASN/hari kerja). Jika disandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu 97,00% maka pencapaian indikator kinerja ini adalah = $\frac{R}{T}x100\%$= $\frac{96,612}{9097,00}x100\%$= 99,60% atau **Sangat Tinggi**.

Pencapaian Indikator ke-4 yaitu "Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi penyampaian LHKPN"

Berdasarkan data pada tahun 2023 terdapati 76 orang pegawai yang wajib menyusun LHKPN, seluruhnya menyampaikan laporan LHKPN. Sehingga berdasarkan data tersebut maka capaian kinerja pada tahun 2023 mencapai 100%, dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Maka capaian kinerja sebesar $\frac{Realisasi}{Target} X\ 100\%$ =$\frac{100\%}{100\%} X\ 100\% =$ 100% atau **Sesuai Target**.

Evaluasi Sasaran 2.2 "Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur"

Berdasarkan data capaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran, maka dapat diidentifikasi capaian kinerja untuk sasaran "Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur" pada tahun 2023 adalah 118,23% atau **Melebihi Target.** Pencapaian tersebut didukung program-program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Kepegawaian Daerah	1.952.302.334,00	1.636.873.595,00	83,843%
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.917.542.529,00	1.906.530.154,00	99,426%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**91,634%**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi program anggaran yang mendukung kinerja sasaran lebih kecil disbanding persentase capaian kinerja sasara. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya

Tabel II.62
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.2. “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dijadikan sebagai salah satu indikator diberikan atau tidaknya Tambahan Penghasilan Pegawai, mendorong ASN di lingkungan Pemda Kota Cirebon untuk menyusunnya • Adanya surat edaran penyusunan SKP dan juga LHKPN • Kedisiplinan pegawai menjadi indikator besar kecilnya Tambahan Penghasilan Pegawai mendorong ASN meingkatkan kehadiran atau disiplin nya	Terdapat Sebagian kecil ASN yang belum memahami sepenuhnya penyusunan SKP. Terdapat sebagian kecil ketidaksesuaian format dalam penyusunan SKP, hal ini dikarenakan dinamisnya pengaturan perundang-undangan sementara masih terdapat sebagian kecil yang tidak segera melakukan penyesuaian	Lebih intensif melakukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian tiap-tiap perangkat daerah terkait penyampaian laporan SKP Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyusunan SKP bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Memberikan sosialisasi terkait kewajiban menyampaikan LHKPN bagi pegawai yang memiliki kewajiban menyusun LHKPN Memberikan sosialisasi terkait peningkatan dan penegakkan disiplin bagi seluruh aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Sasaran 2.3 Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi

Tabel II.63
Capaian Sasaran 2.3 "Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah"

Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
2.3	Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterapkan	Persen	100,00	45,00	0,54	100	100	99,44	**81,25**	**81,25**
		Persentase peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	Persen	100,00	n/a	n/a	32,26	50	75	**68,75**	**68,75**

Sasaran "Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi" dengan dua Indikator yaitu "Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan" dan "persentase peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan" merupakan sasaran yang mendukung tercapainya tujuan dan mewujudkan Misi ke-2.

Pencapaian Indikator ke-1 "Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterapkan"

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan sebesar 100%, hal ini target yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi awal pada tahun 2018 yang hanya 45%. Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi serta pendataan yang dilakukan Bagian Organisasi, pada tahun 2023 persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan mencapai 81,25% dengan rincian 26 perangkat daerah yang telah menetapkan dan 6 perangkat daerah yang belum menetapkan dari total 32 perangkat daerah, maka pencapaian kinerja indikator dimaksud adalah = $\frac{R}{T} x100\%= \frac{81,25\%}{100\%} x100\%=$ 81,25%, dengan predikat **Tinggi.** Jumlah SOP yang diterapkan merupakan hasil upaya dari sosialisasi SOP yang dilakukan secara

efektif juga monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan setiap semester pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon kendati tidak mencapai target 100%.

Pencapaian Indikator ke-2 Persentase peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan

Berdasarkan data pada tahun 2023, diketahui bahwa peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan ada sebanyak 22 perangkat daerah dan 10 perangkat daerah yang belum menetapkan dari total 32 perangkat daerah, maka perangkat daerah yang memiliki peta proses bisnis yaitu 68,75% jika disandingkan dengan target tahun 2022 75%, maka pencapaian kinerja pada indikator dimaksud adalah = $\frac{R}{T} x100\%= \frac{68,75}{100} x100\%=$ 68,75%, atau berpredikat **Sedang**.

Evaluasi Sasaran 2.3 "Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi"

Sasaran 2.3 "Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi" yang di ukur dengan dua indikator memiliki rata-rata pencapaian 75% dengan predikat Sedang. Dalam rangka mendukung sasaran, Program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.543.046.844,00	4.165.155.131,00	91,682%
Program Perekonomian dan Pembangunan	1.070.987.978,00	646.448.805,00	60,360%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**76,021%**

Beberapa program secara eksplisit dinilai tidak mempengaruhi sasaran dengan dua indikatornya secara langsung, walaupun sesungguhnya program

tersebut ditetapkan sesuai arah kebijakan. Untuk hal ini review atas program dapat dilakukan dan menjadi catatan dalam evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, guna memastikan efektifitas dan efesiensi program yang ditetapkan. Berikut adalah faktor yang mendukung, kendala serta strategi pemecahan masalah :

Tabel II.64
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.2 “Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah” Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Terlaksananya Sosialisasi pelaksanaan penyusunan SOP, penyusunan Peta Proses Bisnis serta Implementasinya • Telaksananya Monitoring dan Evaluasi lingkup SOP dan proses bisnis sehingga perkembangan capaian sasaran dapat terpantau • Meningkatnya komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Pada tahun 2023 masih terdapat perangkat daerah yang belum memahami penyusunan SOP dan Peta Proses Bisnis sesuai ketentuan yang berlaku Masih terdapat perangkat daerah yang terlambat dalam mengirimkan dokumen SOP dan dokumen peta proses bisnis	Inovasi dalam menyelenggarakan pertemuan salah satunya menyelenggarakan FGD dengan desk langsung kepada perangkat daerah yang perlu pendampingan dalam hal penyusunan sampai ke implementasi pasca ditetapkannya dokumen SOP dan Peta Proses Bisnis Memberikan surat teguran bagi Perangkat Daerah yang terlambat dalam menyusun dan menyampaikan dokumen SOP dan Peta Proses Bisnis

Sasaran 2.4 : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Tabel II.65
Capaian Sasaran 2.4 “Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan” Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
2.4	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai Aspek Pelaporan kinerja dalam Evaluasi atas AKIP	Nilai	10,00	8,71	9,89	10,20	10,2	10,2	**10,27**	**102,7%**

Sasaran “Meningkatnya Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan memiliki Indikator yaitu **“**Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan”. Sasaran dan indikator ini merupakan suatu upaya untuk memastikan perbaikan dalam hal pengelolaan kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan dan mewujudkan Misi 2.

Pencapaian Indikator “Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan”

Pada Tahun 2023 sesuai Perubahan pada RPJMD 2018-2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam Evaluasi atas AKIP. Sebagai perwujudan atas akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, telah di rilis pada pertengahan tahun 2023 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2023. Hasil evaluasi tersebut secara umum adalah sebagai berikut :

Tabel II.66
Nilai Laporan Hasil Evaluasi Atas Implemantasi Sistam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2023

Komponen	Bobot	Nilai
. Perencanaan Kinerja	30	22,50
. Pengukuran Kinerja	30	18,90
. Pelaporan Kinerja	15	10,80
. Evaluasi Internal	25	15,00
Jumlah	100	67,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : LHE Atas Implementasi SAKIP pada Pemda Kota Cirebon 2023

Berdasarkan data diatas maka pada tahun 2023 nilai tingkat akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah sebesar 67,20 atau dengan predikat B (Baik) berarti akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu beberapa perbaikan, lebih spesifik nilai Aspek Pelaporan Kinerja adalah 10,80, jika disandingkan dengan target 10,00 maka pencapaian indikator ini adalah $\frac{R}{T} x100\%$= $\frac{10,27}{10,00} x100\%$= 102,7%, atau **Melebihi Target**

Evaluasi Sasaran 2.4 "Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja"

Sasaran 2.4 "Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja" yang di ukur dengan1 (satu) indikator memiliki pencapaian 102,7% atau dengan predikat **Melebihi Target**. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II.67
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.4 “Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan” Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Implementasi sistem pendukung SAKIP yaitu esakip.cirebonkota.go.id yang meningkatkan efektifitas dan efesiensi monitoring dan evaluasi SAKIP, khususnya pada tingkat Perangkat Daerah • Peran pimpinan dalam mengarahkan kebijakan yang mendukung implementasi SAKIP • Kesadaran pada implementasi SAKIP sebagai hal vital dalam perbaikan kinerja yang berkelanjutan serta pencapaian Visi-Misi Wali Kota d lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Target belum seluruhnya tercapai. Capaian Kinerja belum seluruhnya meningkat dari tahun sebelumnya. Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan	Mengkaji dan memperbaiki sistem aplikasi e-lakip Kota Cirebon untuk menyesuaikan perkembangan yang ada. Meningkatkan kembali efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja. Menyusun Peraturan Wali Kota tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerj, Meningkatkan kembali efektifitas dan efesiensi terkait reviu atau evaluasi pada sasaran strategis jangka menengah daerah atapun Perangkat Daerah. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi untuk perbaikan atas permasalahan akuntabilitas kinerja pada seluruh komponen, sesuai rekomendasi yang dirilis dalam Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2023.

Sasaran 2.5 : Meningkatnya Maturitas SPIP

Tabel II.68
Capaian Sasaran 2.5 "Meningkatnya Maturitas SPIP" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
2.5	Meningkatnya Maturitas SPIP	Tingkatan Maturitas SPIP	Level	4,00	-	-	3	**3**	**3**	**3**	**75%**

Sasaran "Meningkatnya Maturitas SPIP" memiliki Indikator yaitu **"**Tingkat Maturitas SPIP" dengan target level 3 pada tahun 2023. Sasaran dan indikator ini merupakan suatu upaya untuk memastikan perbaikan dalam hal kematangan SPIP yang diukur dengan tingkat maturitas SPIP, sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan dan mewujudkan Misi 1.

Target indikator Meningkatnya Maturitas SPIP pada tahun 2023 adalah level terdefinisi atau tingkat tiga (3) dan realisasi indikator tahun 2023 dapat tercapai sesuai target. Hal tersebut merupakan *impact* dari terpenuhinya data-data yang tertuang dalam unsur-unsur SPIP, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Pemantauan.

Evaluasi Sasaran 2.5 "Meningkatnya Maturitas SPIP"

Sasaran 2.5 "Meningkatnya Maturitas SPIP "yang di ukur dengan 1 (satu) indikator memiliki pencapaian 75%. Pencapaian ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, mulai dari Tim SPIP dari Inspektorat, para Perangkat Daerah Kota Cirebon yang menjadi *sample* penilaian, dan Tim Penilai dari BPKP yang membantu proses pengumpulan data hingga akhir. Berikut adalah program yang mendukung sasaran :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Penyelenggaraan Pengawasan	433.408.756,00	336.684.786,00	77,68%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	761.124.000,00	716.115.110,00	94,09%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**85,89%**

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II. 692
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.5 "Meningkatnya Maturitas SPIP." Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Terjaganya Komitmen Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan data-data SPIP meningkat. • Adanya keberlanjutan program dari tahun lalu yaitu Pendampingan BPKP dalam mengawal pengumpulan data-data evidence pelaksanaan SPIP yang dibutuhkan, meningkatkan ketepatan waktu dan ketelitian.	• Dalam pemenuhan dokumen untuk Penilaian Maturitas SPIP, Perangkat Daerah yang menjadi sampling diharuskan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung, namun tidak semua perangkat daerah tersebut memberikan dokumen yang lengkap atas kebutuhan dokumen yang dibutuhkan dalam memenuhi semua unsur dalam SPIP. • Masih rendahnya pemahaman pegawai pada perangkat daerah tentang SPIP.	• Dalam pemenuhan dokumen Inspektorat berusaha memberikan pendampingan dengan menunjuk Asessor untuk mendampingi perangkat daerah yang menjadi sampel dalam pemenuhan dokumen Penilaian Maturitas SPIP. • Perlunya diklat, bimbingan teknis dan pendampingan intensif untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi *counterpart*. • Mendorong komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam pemenuhan dokumen penilaian maturitas SPIP.

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
	• Kurangnya komitmen dan pemahaman Kepala Perangkat Daerah terhadap penilaian maturitas SPIP.	

Sasaran 2.6 : Meningkatnya Pelayanan Publik

Tabel II.70
Capaian Sasaran 2.6 “Meningkatnya Pelayanan Publik” Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
2.6	Meningkatnya Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perizinan	Persen	84,00	71,00	82,65	82,57	83,54	83,25	**91,25**	**108,63%**
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kependudukan	Persen	85,00	78,00	76,25	77,75	79,00	85,50	**91,50**	**107,65%**

Sasaran “Meningkatnya Pelayaan Publik” merupakan upaya dalam rangka terwujudnya Misi ke-2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif. Tata kelola Pemerintahan yang dimaksud memiliki korelasi dengan tingkat pelayanan publik, dimana sasaran ini diukur dengan 2 indikator sebagai berikut :

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perizinan.
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kependudukan

Pencapaian Indikator ke-1 Tingkat Kepuasan Atas Layanan Perizinan

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan persentase tingkat kepuasan pada pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan nilai indeks kepuasan masyarakat 84,00 sementara itu berdasarkan survey yang dilakukan pada tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan tersebut mencapai 91,25 adalah maka pencapaian indikator ini = $\frac{R}{T}x100\%= \frac{91,25}{84,00}x100\%=$ 108,63%, atau **Melebihi Target.**

Gambar II.14.
IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA – RATA
U1	Persyaratan	3.53
U2	**Prosedur**	**3.46**
U3	Waktu Pelayanan	3.69
U4	**Biaya / Tarif**	**3.94**
U5	Produk Pelayanan	3.65
U6	Kompetensi Pelaksana	3.66
U7	Perilaku Pelaksana	3.82
U8	Sarana Prasarana	3.54
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.59
JUMLAH NILAI UNSUR		2.236
NRR/UNSUR		32.88
NRR TERTIMBANG/ UNSUR		3.65
IKM UNIT PELAYANAN		**91.25**

Dari hasil survei kepuasan masyarakat semua unsur pelayanan nilai rata – rata unsur pelayanannya baik. Tentu saja hal tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik, hal penting yang harus dilaksanakan adalah perbaikan terhadap unsur yang mempunyai nilai rendah yaitu unsur kompetensi pelaksana. Seperti misalnya memberikan pembinaan terhadap pegawai yang bertugas di bagian pelayanan (Front Office) dan meningkatkan informasi tentang prosedur pelayanan di bagian pelayanan sehingga masyarakat mendapatkan informasi dalam segi konsultasi.

Pencapaian Indikator ke-2 "Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kependudukan"

Indikator Tujuan/Sasaran Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kependudukan merupakan salah satu target yang tertuang dalam

RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023. Untuk target di Tahun 2023 Tingkat Kepuasan masyarakat atas Layanan Kependudukan adalah 85,00. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon menghasilkan satu dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 91,50. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\frac{R}{T} x100\%$= $\frac{91,50}{85,00} x100\%$= 107,65% atau **Melebihi Target.**

Gambar II.15
IKM Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Indeks per Unsur Pelayanan	Nilai IKM setelah dikonversi	Mutu pelayanan	Kinerja pelayanan
1	Persyaratan	3,56	89,00	A	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,57	89,25	A	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	3,50	87,50	B	Baik
4	Biaya / Tarif	3,98	99,50	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,54	88,50	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,64	91,00	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,69	92,25	A	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,62	90,50	A	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,86	96,50	A	Sangat Baik

Sumber : Data diolah (2023)

Secara garis besar pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Kota Cirebon kepada masyarakat sudah sangat optimal, dengan nilai 91,50 maka mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 85,50. Beberapa faktor yang mendorong pencapaian kenaikan nilai adalah melengkapi fasilitas sarana dan prasarana pada gedung bangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menindaklanjuti segala bentuk pengaduan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan serta meningkatkan kompetensi petugas pelayanan.

Evaluasi Sasaran 2.6 “Meningkatnya Pelayanan Publik”

Sasaran 2.6 “Meningkatnya Pelayanan Publik” yang di ukur dengan dua indikator memiliki rata-rata pencapaian 108,14% dengan predikat Melebihi Target. Dalam rangka mendukung sasaran telah dilaksanakan strategsi “Peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan perizinan” dan “Peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan kependudukan” dengan arah kebijakan meningkatkan pertumbuhan investasi dan meningkatkan layanan kependudukan. Strategi dan arah kebijakan tersebut didukung program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	80.326.712,00	74.665.072,00	92,952%
Program Promosi Penanaman Modal	63.995.150,00	63.160.150,00	98,695%
Program Pelayanan Penanaman Modal	366.819.099,00	267.796.208,00	73,005%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	486.933.783,00	448.097.596,00	92,024%
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	169.727.072,00	167.379.322,00	98,617%
Program Pendaftaran Penduduk	131.363.704,00	129.185.959,00	98,342%
Program Pencatatan Sipil	61.999.000,00	53.979.000,00	87,064%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	502.041.886,00	461.456.956,00	91,916%
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	10.240.000,00	10.240.000,00	100,00%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	324.341.596,00	307.284.492,00	94,741%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**92,736%**

Pencapaian yang sudah sangat baik di tahun 2023 perlu dipertahankan dengan memastikan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program-program diatas, serta menganalisis faktor yang mendukung, kendala, serta strategi pemecahan masalahnya. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya:

Tabel II.71
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.6 " Meningkatnya Pelayanan Publik" Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana pada gedung bangunan kantor pelayanan kependudukan. • Pelayanan masyarakat yang sebagian besar tidak dipungut biaya menjadikan kepuasan masyarakat pada faktor layanan Biaya menjadi tinggi. • Kepuasan terhadap perilaku pelayanan yang tinggi, hal ini merupakan keberhasilan dari pembinaan terhadap Pelaksana Pelayanan melalui berbagai media, khususnya Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan.	• Sistematika Pengaduan masih menjadi faktor layanan yang mendapat nilai rendah khususnya dalam pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan. • Sarana Prasarana menjadi faktor penunjang dalam pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, masyarakat mengkritisi dengan kondisi tempat, sarana dan prasarana yang kurang memadai,	• Mempertahankan faktor nilai layanan yang memiliki poin tinggi • Memperbaiki sistem pelayanan pengaduan karena masih menjadi nilai rendah dalam faktor layanan, atau masyarakat belum puas dengan faktor layanan tersebut. • Melanjutkan renovasi / pembangunan tempat layanan yang memadai sehingga dapat memperbaiki faktor layanan sarana dan prasarana.

Sasaran 2.7 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel II.72
Capaian Sasaran 2.7 "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah"
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
2.7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	**WTP**	**100%**
		Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah	Persen	33,67			26,27	24,90	35,20	**33,81**	**100,42**

Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah" menjadi tolak ukur yang dapat menggambarkan terwujiudnya Misi 2 "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif**",** dimana Pemerintahan yang bersih dan akuntabel tidak terlepas dari kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sasaran ini memiliki dua indikator yaitu :

1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah
2. Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah

Pencapaian Indikator ke-1 "Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah"

Pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan opini BPK dengan nilai WTP atau wajar tanpa pengecualian, penilaian pencapaian WTP digunakan data Tahun N-1 karena penilaian BPK yang mengoreksi tahun N-1, maka data pencapaian pada tahun 2023 adalah data pemeriksaan pada tahun 2022. Berdasarkan data tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon dapat mempertahankan raihan Wajar Tanpa Pengecualiannya. Merujuk pada target yang ditetapkan maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon berhasil merealisasikan targetnya mencapai 100%. Perolehan WTP ini utamanya dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kota Cirebon dalam Transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan
2. Pelaporan keuangan telah akrual yaitu akuntasi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang piutang
3. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Pencapaian Indikator ke 2 "Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah"

Pencapaian indikator "Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah" pada tahun 2023 sebesar 33,81% dari target pencapaian sebesar 33,67%, maka tingkat pencapaian atas indikator sebesar 100,42% atau dengan predikat **Sangat Baik**, terdapat pencapaian yang melebihi target yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi beberapa hal diantaranya :

1. Pendapatan dari sektor Pajak Daerah untuk Pajak Hotel, Restoran, Penerangan jalan, Air Tanah dan BPHTB melebihi capaian dari target yang diharapkan,
2. Sedangkan Pajak Daerah Lainya tidak mencapai 100% diantaranya Pajak Hiburan, Reklame, Parkir dan PBBP2, serta beberapa Retribusi yang di kelola di Perangkat Daerah ada yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan target penerimaan pendapatan asli daerah yang selalu meningkat setiap tahun serta kurangnya pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak untuk menunaikan pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan.

Berikut realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon :

Tabel II.73
Realisasi Pajak Daerah Kota Cirebon Tahun 2023

NO	JENIS PUNGUTAN PAJAK DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1.	Pajak Hotel	18.260.250.000,00	19.375.024.062,00	106.10
2.	Pajak Restoran	61.609.648.050,00	64.995.600.322,00	105.50
3.	Pajak Hiburan	9.552.192.776,00	8.067.424.308,00	84.46
4.	Pajak Reklame	6.321.000.000,00	5.540.049.311,00	87.65
5.	Pajak Penerangan Jalan Umum	26.250.000.000,00	27.474.574.354,00	104.67
6.	Pajak Parkir	7.509.000.000,00	4.867.181.826,00	64.82
7.	Pajak Air Tanah	55.350.000,00	59.327.648,00	107.19
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	35.763.920.174,00	35.435.642.763,00	99.08
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	46.016.500.000,00	52.047.071.294,00	113.11
Jumlah		**211.337.861.000,00**	**217.861.895.888,00**	**103.09**

NO	JENIS PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.694.837.650,00	551.729.960,00	32,55
Jumlah		**1.694.837.650,00**	**551.729.960,00**	**32,55**

Evaluasi Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah"

Pencapaian Sasaran meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diukur dari rata-rata pencapaian kedua indikator yang mencapai 100,21%,

pencapaian ini berada pada predikat Sangat Memuaskan. Pencapaian ini didukung beberapa Program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	50.790.963.267,00	14.555.675.370,00	28,66%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.722.570.254,00	1.563.835.265,00	90,78%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.334.298.255,00	2.553.164.213,00	76,57%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**65,34%**

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, kami melakukan analisa terhadap faktor yang mendukung pencapaian sasaran, kendala, serta streategi pemecahana masalah tersebut.

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II.74
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.7 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Komitmen Bersama • Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang memadai • Sumber Daya Manusia • Dasar Hukum • Pemanfaatan Nilai Bidang Tanah (NBT), data terintegrasi digital dengan KPP Pratama, penyempurnaan BPHTB online, wasdal	• Keterlambatan data dari OPD dan BUMD • Temuan BPK yang materiil • Kekurangan SDM yang *qualified* • Kepatuhan terhadap dasar hukum • Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan	• Koordinasi dengan OPD dan BUMD • Tindak lanjut temuan BPK • Memaksimalkan SDM yang ada • Penyajian laporan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku • Melibatkan pihak Aparat Penegak Perda dalam pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
terintegrasi pajak daerah • Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pajak daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 • Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah • Pendayagunaan aset daerah	• Keterbatasan SDM Pengelola	• Mengoptimalkan pemanfaatan Tapping Box serta menyusun aplikasi pengawasan dan pengendalian objek pajak yang lebih aplikatif • Optimalisasi dan implementasi rencana aksi ETPD sesuai dengan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 900/Kep.145-BPKPD/2022 tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah • Pemberian Reward berupa piagam penghargaan untuk Wajib Pajak Daerah yang patuh dan taat pajak

Sasaran 2.8 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah

Tabel II.75
Capaian Sasaran 2.8 "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah"
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
2.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah	Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota	Nilai	85,00	74,09	83,18	83,18	66,40	75	**71,80**	**84,47%**

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah” ditetapkan untuk menunjang tujuan pada Misi ke-2, diukur melalui sebuah indikator Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota dengan target pada tahun 2023 adalah 85,00. Nilai audit kearsipan tingkat kota lazim digunakan sebagai indikator yang mengukur sejauhmana kualitas pengelolaan arsip daerah.

Pencapaian Indikator “Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota.”

NIlai Audit Kearsipan Tingkat Kota pada tahun 2023 terealisasi sebesar 71,80, jika ditinjau dari target dengan nilai 85,00 maka pencapaian indikator ini adalah $\frac{71,80}{85} x100\%= \frac{71,80}{85,00} x100\%$= 84,47%, dengan predikat **Tinggi.** Audit kearsipan dilaksanakan oleh tim dari Pengawas Kearsipan dari Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia Hasil nilai 71,80 berada pada kategori **“BB”** atau sangat baik dalam tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, nilai realisasi atas audit kearsipan yang meningkat dari tahun sebelumnya, namun masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan,faktor pendukung ataupun permasalahan dijelaskan pada Evaluasi Sasaran 2.8 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah”.

Evaluasi Sasaran 2.8 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah”

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah” dengan sebuah indikator tersebut memiliki pencapaian berhasil. Pencapaian ini menggambarkan pencapaian yang Sangat Baik. Pencapaian sasaran 2.8 ini didukung oleh beberapa Program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengelolaan Arsip	400.975.670,00	278.668.670,00	69,498%
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	65.907.740,00	61.539.710,00	93,373%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**81,435%**

Pada tahun 2023 capaian kinerja atas sasaran ini belum mencapai target, seyogyanya Pemerintah Daerah Kota Cirebon tetap melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja terkait sasaran ini terlebih dengan mekanisme dan inovasi baru dalam bidang kearsipan yaitu akan mulai diterapkanya mekanisme pengelolaan surat atau arsip elektronik.

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II.763
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.8 "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah"

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Sarana Prasarana berupa gedung kearsipan yang telah cukup memadai • Monev kearsipan yang terselenggara rutin pada Perangkat Daerah • Keaktifan Perangkat Daerah dalam melaporkan kondisi arsipnya • Surat pemberitahuan perihal Kearsipan • Tersusunya SOP dalam lingkup kearsipan	• Belum tersedianya Gedung depo arsip yang memadai, volume arsip yang terus bertambah setiap tahunnya • Kurangnya tenaga fungsional kearsipan jika dihitung dari jumlah Analisa Beban Kerja pada jabatan, tersebut	• Mengusulkan rencana jangka panjang dengan mengajukan peningkatan prasarana melalui pembuatan DED Depo Arsip • Mengusulkan tambahan tenaga fungsional di bidang kearsipan sesuai dengan analis beban kerja yang telah disusun

Sasaran 2.9 : Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD

Tabel II.77
Capaian Sasaran 2.9 "Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.9	Meningkatnya kapasitas kinerja DPRD	Rasio Jumlah Perda yang Ditetapkan terhadap Raperda	Persen	80,00	55,00	70,00	72,20	73,70	56,25	**82,35**	**102,93%**
		Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran	Persen	80,00	100,0	75,00	100	100	100	**55**	**55**
		Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan	Persen	78,33	59,70	42,01	65,00	70,0	75	**100**	**127,66**

Sasaran "Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD" ditetapkan untuk menunjang tujuan pada Misi ke-2. Meningkatnya kapasitas kinerja DPRD sangat relevan dijadikan sasaran karena DPRD merupakan bagian dari sebuah manajemen pemerintahan di Kota Cirebon hal ini seiring dengan tujuan dari misi ke-2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, Serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan. Sasaran ini memiliki indikator sebagai berikut :

1. Rasio Jumlah Perda yang Ditetapkan terhadap Raperda
2. Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran
3. Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan

Pencapaian Indikator ke-1 Rasio Jumlah Perda yang Ditetapkan terhadap Raperda

Pada Tahun 2023 DPRD Kota Cirebon menargetkan 17 Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan, sedangkan berdasarkan perhitungan Tahun 2023 yang selesai disahkan sebanyak 14 Perda, maka jika dihitung secara rasio dari

jumlah realisasi dengan target sebanyak 82,35% jika disandingkan dengan target pada tahun 2023 yaitu 80% rasio Perda yang disahkan maka pencapaian indikator ini adalah $\frac{R}{T}x100\%= \frac{82,35}{80}x100\%=$ 102,93%, atau dengan predikat pencapaian **Melebihi Target**

Pencapaian Indikator ke-2 "Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran

Rasio jumlah keputusan/berita acara pelaksanaan fungsi anggaran, berdasarkan data dari Sektretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon adalah 100% dari jumlah total keputusan atau berita acara yang dihasilkan pada tahun 2023. Dengan target pada tahun 2023 100% maka pencapaian indikator ini adalah $\frac{R}{T}x100\%= \frac{55}{100}x100\%=$ 55%, atau **Belum Memenuhi Target**

Pencapaian Indikator ke-3 Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan

Pada tahun 2023 rasio jumlah, berdasarkan data dari Sektretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon adalah 100% dari jumlah total fasilitasi fungsi pengawasan. Dengan target pada tahun 2023 yaitu 100% maka pencapaian indikator ini adalah $\frac{R}{T}x100\%= \frac{100}{78,33}x100\%=$ 127,66%, atau **Melebihi Target**

Evaluasi Sasaran 2.9 "Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD"

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Kapasitas KInerja DPRD" dengan tiga indikator tersebut diatas, memiliki rata-rata pencapaian 95,2%. Kendati salah satu dari 3 (tiga) indikator tidak mencapai target, rata-rata pencapaian berada pada predikat pencapaian Sangat Tinggi. Hal ini menjadi gambaran bahwa strategi "Meningkatkan peran, fungsi dan kewenangan DPRD dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan" dengan arah kebijakan "Optimalisasi peran DPRD dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan" cukup berjalan optimal.

Tabel II. 78
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.9 “Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD” Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Pimpinan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja di lingkup DPRD • Fungsi Kesekretariatan yang telah berjalan cukup optimal dalam memberikan pelayanan di DPRD	• Jumlah Sumber Daya Aparatur yang masih kurang sesuai hasil analisa beban kerja, dibandingkan dengan jumlah anggota DPRD dan frekuensi fasilitasi yang harus diberikan. • Terkait penetapan Peraturan Daerah masih terdapat Raperda yang kemudian tidak selesai ditetapkan karena beberapa faktor diantaranya dinamika peraturan dari pusat yang berubah sehingga raperda perlu ditinjau kembali	• Mengisi kekosongan sumber daya aparatur di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah • Meningkatkan koordinasi antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam pengusulan Raperda dan penetapan Perda. • Memastikan Strategi dan arah kebijakan berjalan efektif dan efesien dengan optimalisasi program yang mendukung hal tersebut yaitu Program Peningkatan Kapasaitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Posedur Pengawasan.

Sasaran 2.10 : Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan terintegrasi dalam menunjang Cirebon Smart City

Tabel II.79
Capaian Sasaran 2.10 “ Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Profresional, Handal dan Terintegrasi dalam Menunjang *Smart City*” Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
2.10	Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik	Perangkat Daerah yang mengelola Teknologi Informasi dan	Perangkat Daerah	3,2	+1	+4	+5	**+7**			

	yang professional, handal dan terintegrasi dalam menunjang *Cirebon Smart City*	Komunikasi dalam Pengelolaan Pemerintahan									
		Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	Komunitas	100	1	22	23	**25**			
		Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE (Poin)	Poin	3,2						**3,55**	**110,9**

Sasaran "Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Profesional, Handal, dan terintegrasi dalam Menunjang Cirebon Smart City" ditetapkan untuk menunjang tujuan dari Misi ke-2. Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik sangat relevan dijadikan sasaran karena pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan istilah e-government merupakan bagian dari sebuah manajemen pemerintahan di Kota Cirebon hal ini seiring dengan tujuan dari misi ke-2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, Serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi pada RPJMD indikator pada sasaran **dirubah menjadi Nilai SPBE Kota Cirebon,** yang diukur pencapaianya pada tahun 2023.

Pencapaian Indikator "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik".

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan nilai SPBE sebesar 3,2. Upaya penguatan nilai SPBE pada tahun 2023 berdampak positif bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon, berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2023 mendapat nilai 3,55. Dengan menyandingkan realisasi pada tahun 2022 dengan target maka pencapaian indikator ini adalah : $\frac{3,55}{3,2} x100\%$= 110,9% atau **Melebihi Target.**

Evaluasi sasaran 2.10 "Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Profesional, Handal, dan terintegrasi dalam Menunjang Cirebon Smart City"

Pencapaian sasaran "Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Profesional, Handal, dan terintegrasi dalam Menunjang Cirebon Smart City**"** dengan dua indikator tersebut diatas, memiliki rata-rata pencapaian 110,9% berada pada predikat **Melebihi Target** Kendati tingkat pencapaian telah melebihi target namun hal ini menjadi tantangan pada tahun berikutnya agar tetap dapat dipertahankan bahkan meningkat, berikut adalah program-program yang mendukung capaian Sasaran 2.10 sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.630.380.924,00	3.398.158.484,00	93,60%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.306.642.945,00	2.035.769.633,00	88,26%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	278.947.607,00	196.038.248,00	70.28%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	253.989.680,00	139.446.036,00	54,90%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**76,76%**

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II. 804
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.10 “Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Profesional, Handal, dan terintegrasi dalam Menunjang Cirebon Smart City” Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Tersedianya Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebagai bentuk komitmen Pimpinan dalam penyelenggaraan SPBE di Kota Cirebon • Telah disusun Proses Bisnis Kota Cirebon dan Seluruh Perangkat Daerah	• Belum tersedianya dokumen arsitektur SPBE Kota Cirebon • Identifikasi Proses Bisnis yang melibatkan mekanisme elektronik masih belum optimal. • Rapat tim koordinasi SPBE yang belum rutin diagendakan	• Menyusun Dokumen Arsitektur SPBE Kota Cirebon • Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Cirebon untuk identifikasi proses bisnis yang menggunakan mekanisme elektronik sebagai bentuk percepatan atau efesiensi. • Perlu mengagendakan rapat tim koordinasi SPBE untuk membahas rencana aksi tahunan berdasarkan rekomendasi hasil Evaluasi SPBE oleh KemenPAN RB

Sasaran 2.11: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel II.81
Capaian Sasaran 2.11 “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
2.11	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD	Persen	**100**	87,39	97,49	98,71	93,64	99,35	**97,44**	**97,44%**
		Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD	Persen	**100**	98,30	95,17	92,50	90,54	100	**94,84**	**94,84%**

"Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah" dengan indikator: konsistensi program RKPD terhadap RPJMD dan Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD menjadi bagian tolak ukur dalam mewujudkan kinerja Misi ke-2 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah relevan dikaitkan dengan Misi ke-2 karena kualitas perencanaan merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan.

Pencapaian Indikator ke-1 "Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD".

Sasaran 2.11 "Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah" dengan indikator: konsistensi program RKPD terhadap RPJMD d bagian tolak ukur dalam mewujudkan kinerja MISI ke-2 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif. Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Cirebon telah mentargetkan indikator konsistensi program RKPD terhadap RPJMD sebesar 100%. Berdasarkan perhitungan BAPPELITBANGDA pada tahun 2023 realisasi untuk indikator konsistensi program RKPD terhadap RPJMD adalah sebesar 97,44%. Nilai realisasi ini bila dibandingan dengan target tahun 2023 maka pencapaian kinerja atas indikator adalah $\frac{R}{T}x100\%= \frac{97,44}{100}x100\%=$ 97,44%, atau dengan belum mencapai target.

Pencapaian Indikator ke-2 "Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD"

Nilai realisasi untuk indikator Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD sebesar 94,84% nilai realisasi ini belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 yang sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi indikator Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD tahun 2022 sebesar 100% maka data ini menunjukkan penurunan angka capaian kinerja sebesar 5,16 poin.

Evaluasi Sasaran 2.11 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah" dengan dua indikator tersebut diatas, memiliki rata-rata 96,14% dengan

predikat **Sangat Baik.** Fokus pada tahun berikutnya adalah membenahi kekurangan minor yang menyebabkan target tidak tercapai 100% atau lebih.

Dalam upaya pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari Program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut, sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	359.877.276,00	250.543.096,00	69,62%
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	483.606.726,00	458.353.576,00	94,78%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**82,2%**

Upaya peningkatan kinerja di tahun berikutnya dilakukan melalui analisa faktor pendorong, penghambat, serta strategi pemecahan masalah kemudian menindaklanjuti hasil analisa tersebut. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II. 82
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.11 “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”
Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Memberikan surat antaran atau peringatan untuk ketepatan waktu koordinasi. • Melakukan sistem jemput bola untuk mempercepat proses koordinasi. • Jika diperlukan, dilakukan penjadwalan ulang dalam menyelesaikan dokumen perencanaan. • Adanya Monitoring dan evaluasi melalui pengendalian perencanaan secara rutin.	• Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang belum optimal. • Jadwal perencanaan yang cukup padat.	• Perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antara Bappelitbangda terutama di bidang perencanaan dengan mitra perencanaan (Perangkat Daerah). • Pengumpulan data mengenai survei kepuasan masyarakat di Bappelitbangda diberi batas waktu agar pengolahan data menjadi lebih mudah. • koordinasi antar bidang di Bappelitbangda untuk memudahkan dalam permintaan data.

Sasaran 2.12 : Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tabel II.83
Capaian Sasaran 2.12 “Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah” Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
2.12	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjut	Persen	80,00	-	31,0	41,02	55,62	69,23	**92,11**	**115,14%**

		i untuk menjadi bahan kebijakan daerah (Jumlah dokumen yang menjadi rekomendasi dibagi jumlah total dokumen yang dihasilkan dalam RIK)									

"Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah" dengan indikator: Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk menjadi bahan kebijakan daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan kinerja Misi ke-2 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif.**"**

Pencapaian Indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang Dijadikan Dasar Kebijakan Daerah

Pada tahun 2023 Pemerintah kota Cirebon telah mentargetkan indikator Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk menjadi bahan kebijakan daerah sebesar 80%. Berdasarkan perhitungan BAPPELITBANGDA pada tahun 2023 realisasi untuk indikator Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk menjadi bahan kebijakan daerah adalah 92,11%. Nilai realisasi ini telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 yang sebesar 80%. Jika berdasarkan target kinerja pada tahun 2023 maka pencapaian kinerja indikator ini adalah adalah $\frac{R}{T} x100\%= \frac{92,11}{80} x100\%$= 115,14%, atau **Sangat Tinggi**

Evaluasi Sasaran 2.12 "Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah"

Sasaran "Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah" merujuk pada indikator yang ditetapkan memperoleh pencapaian 98,90%, dalam kategori tingkat pencapaian poin ini berada pada kategori **Sangat Tinggi.** Program yang mendukung sasaran 2.12 ini adalah sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	893.851.310,00	797.307.169,00	89,20%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**89,20%**

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalah pada pencapaian kinerja sasaran 2.12 :

Tabel II. 84
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalah
"Sasaran Sasaran 2.12 "Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah" Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Telah tersusunnya Perencanaan Penelitian dalam jangka waktu 5 Tahun • Tersedianya pejabat fungsional peneliti di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon • Keberlanjutan Kerjasama dengan lembaga penelitian sebagai upaya peningkatan kualitas hasil penelitian.	• Belum optimalnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh bidang penelitian dan pengembangan kepada para pemangku kepentingan • Tingkat kesadaran riset yang masih rendah dikalangan pemangku kepentingan, sehingga belum menjadikan riset atau penelitian sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan.	• Sosialisasi terkait peran penelitian bagi pembangunan sehingga ada peningkatan jumlah objek penelitian yang diusulkan oleh pemangku kepentingan. • Sosialisasi kepada perangkat daerah secara bertahap atas hasil kajian kelitbangan. • Melakukan mekanisme kesepakatan bersama antar pemangku kepentingan untuk menjadikan hasil kajian atau penelitian sebagai pertimbangan dalam memutuskan kebijakan. • Bidang Litbang dan Perangkat Daerah melakukan koordinasi terkait kajian apa saja yang dibutuhkan, sehingga bidang litbang bisa membuat kajian yang tepat. • Perlunya kolaborasi antar Perangkat Daerah di Kota

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
		Cirebon dalam rangka menaikkan indeks skor inovasi daerah serta menumbuhkan semangat inovatif.

Tujuan : Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Tabel II. 865
Capaian Tujuan Misi 3 “Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan” Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	**2022**	**2023**	
3.	Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup *(Indikator Kinerja Utama)*	Poin	**56,82**	44,05	51,96	56,25	55,70	**53,11**	50,04	**88,07%**
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (*Indikator Kinerja UTama*	Persen		n.a.	3,85	3,87	5,9			

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim menjadi sasaran strategis Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana tertuang di RPJMD Kota Cirebon 2019-2023, hal ini merupakan upaya mendukung Visi Misi Kota Cirebon yang sejalan pada Misi 3 Pemerintah

Daerah Kota Cirebon Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Tujuan "Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan" dengan **Indikator**: **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan kinerja "**Misi 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan"**

Pencapaian Indikator "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup"

Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) lazim digunakan untuk mengukur kualitas daya dukung lingkungan pada suatu wialayah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang merupakan satu wilayah perkotaan menjadikan upaya mempertahankan indeks kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan suatu tantangan, sehingga pada Visi Misi Wali Kota Cirebon 2018-2023 Hijau menjadi salah satu tagar yang disebut dalam SEHATI (Sehat, HIjau, Aman, Tertib dan Indah). metode perhitungan IKLH adalah:

Keterangan:

IKLH Kota/Kabupaten= Indeks Kualitas Lingkungan tingkat Kota/Kabupaten
IKA = Indeks Kualitas Air
IKU = Indeks Kualitas Udara
IKL = Indeks Kualitas Lahan

Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan di Kota Cirebon dengan pemulihan kualitas lingkungan terus dilakukan tidak saja oleh pemerintah namun dilakukan pula oleh semua elemen masyarakat. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini mengakibatkan kerugian bagi peri kehidupan masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga hingga merenggut jiwa manusia. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur sederhana yang disebut dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut dengan IKLH.

Indeks Kualitas Ligkungan Hidup (IKLH) bertujuan dapat memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup yang sebenarnya di Kota Cirebon. Kondisi lingkungan hidup ini menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara dan tutupan lahan sebagai indikator. Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dihitung melalui **Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)**, **33,08 % Indeks Kualitas Udara (IKU) 78,81% Indeks Kualitas Lahan (IKL) 25,97%**.

Dari masing-masing indeks yang dihasilkan dengan perhitungan seperti diurain diatas, sehingga IKLH Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

IKLH = (0,376 x 33,08) + (0,405 x 78,81) + (0,219 x 25,97) = 12,43 + 31,91 + 5,68 = 50,04

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Kota Cirebon pada tahun 2023 adalah sebesar 50,04. Nilai IKLH tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai/bobot dari masing-masing indikator yang juga dipengaruhi oleh metode perhitungan masing-masing indeks serta variabel yang masuk dalam perhitungan, sehingga bobot dari perhitungan pun berbeda. Perubahan bobot dari masing-masing indeks dimaksud yaitu : - Nilai IKA sebesar

33,08 dari yang tahun sebelumnya (2022) sebesar 47,69 atau terjadi penurunan nilai yg signifikan, yakni sebesar 14,61 - Nilai IKU sebesar 78,81 yang tahun sebelumnya (tahun 2022) adalah sebesar 74,27. Atau terjadi peningkatan nilai sebesar 4,54. - Nilai IKL, sebesar 25,97 yang periode tahun sebelumnya (tahun 2022) adalah sebesar 23,28 atau terjadi kenaikan sebesar 2,69. Perubahan ini dipengaruhi oleh perubahan data luasan tutupan lahan serta perubahan jumlah luas wilayah Administrasi Kota Cirebon hasil identifikasi terbaru. maka pencapaian atas inidikator ini adalah $\frac{Realisasi}{Target} X\ 100\% = \frac{50,04}{56,82} X\ 100\% =$ **88,07%.**

Tabel II. 6
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2018-2023

TAHUN	IKA	IKU	IKL	IKLH
2018	25,38	78,03	32,63	**44,07**
2019	56,92	68,58	35,77	**51,96**
2020	50	73,13	35,78	**56,25**
2021	55,38	71	27,96	**55,70**
2022	47,69	74,27	23,28	**54,14**
2023	33,08	78,81	25,97	**50,04**

Tabel II.88
Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2023

Kab/Kota	Penduduk	Luas Wilayah (Ha)	IKA	IKU	IKL (21,9 %)	IKLH
Kota Cirebon	348.912	3736	33,08	78,81	25,97	**50,04**

Evaluasi Tujuan Misi ke-3 "Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan"

Mengacu pada pencapaian indikator, Tujuan pada Misi ke-3 ini rata-rata pencapaianya adalah 93,57%, pencapaian dengan predikat Melebihi Target Pencapaian ini bukan hanya dipengaruhi Perangkat Daerah yang mengampu urusan lingkungan hidup karena seyogyanya pelayanan utilitas umum yang sejalan dengan kuallitas lingkungan hidup merupakan dimensi yang luas, kondisi ini dipengaruhi diantaranya oleh faktor yang berada pada cakupan pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan, kawasan pemukiman. Berdasarkan hal itu maka ditetapkan empat (4) sasaran yang mengacu pada tujuan dan misi ke-3 ini, yang masing masing akan dijelaskan secara terperinci, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan
2. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Drainase.
3. Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Tabel II. 897
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan" Tahun 2023

Upaya Yang telah dilaksanakan /Faktor Pendukung	Permasalahan/Faktor Penghambat	Solusi/ Strategi Pemecahan Masalah
Membuat perencanaan yang matang seperti terkait jadwal pemantauan IKLH (musim penghujan dan kemarau)	Kondisi cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim,	pengambilan sampel disesuaikan dengan kondisi cuaca

menambah jumlah titik pemantauan udara dan sungai	tidak semua lokasi bisa dipasang alat atau dilakukan pemantauan karena faktor keamanan, sosial, dll	melibatkan masyarakat sekitar untuk menjaga alat pemantau kualitas lingkungan
Koordinasi dengan stakeholder yang terkait	Program kerja stakheholder terkait masih sedikit yang melakukan upaya peningkatan IKLH	Berkoordinasi dengan Stakehold terkait agar dilakukan upaya dalam peningkatan IKLH
Melakukan kolaborasi dengan Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan PPGLHK dan DLH Provinsi Jawa Barat saat melaksanakan Program Kampung Iklim	1. Permasalahan dalam menentukan Calon Lokasi Kampung Iklim karena terjadi pergantian pengurus pada lokasi Calon Kampung Iklim yang sudah dilakukan pembinaan. 2. Terhambatnya dalam pengusulan Lokasi Kampung Iklim Tahun 2023 karena sulitnya mencari data pendukung dalam pengisian Excell Proklim dan terjadinya eror pada Aplikasi Spectrum dalam pengisian Aksi Mitigasi pada lokasi Calon Kampung Iklim. 3. Kesulitan dalam peningkatan Aksi Adaptasi dan Mitigasi di Lokasi Calon Kampung Iklim.	1. Melakukan kolaborasi dengan Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan PPGLHK dalam menentukan lokasi dan melakukan pembinaan pada lokasi Calon Kampung Iklim. 2. Melakukan kordinasi dan konsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dalam melakukan isian pada Aplikasi Spectrum Mitigasi.
Membangun/ memotivasi kesadaran masyarakat betapa pentingnya memelihara lingkungan dan melengkapi sarana dan prasarana pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan	1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan lingkungan 2. Kurangnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kerusakan lingkungan	Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat, bekerjasama dengan DLH Provinsi dan KLHK dalam melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan

Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	Dokumen Lingkungan yang dimiliki biasanya hanya sebagai alat untuk menempuh perijinan sehingga pelaku kegiatan tidak menjalankan kewajiban yang tercantum dalam dokumen lingkungan	Menyediakan format pelaporan yang mudah diimplementasikan oleh pelaku kegiatan/usaha & aplikasi

Sasaran 3.1 : Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan

Tabel II.89
Capaian Sasaran 3.1 "Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan" Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3.1	Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Nilai		C	C	C	B		**B**	
		Persentase peningkatan *level of service* ruas jalan (persen)	Persen	**3,00**					**3,00**	**3,00**	**100%**

Sasaran Strategis 3.1 "Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan" merupakan upaya mendukung Visi Misi Kota Cirebon dari Bidang Perhubungan. Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran di tetapkan indikator sasaran "Tingkat Pelayanan Ruas Jalan", berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perencanaan Strategis yang ditetapkanya RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, pada tahun 2022 indikator kinerja untuk sasaran ini mengalami perubahan menjadi "Persentase Peningkatan *Level Of Service* Ruas Jalan", hal ini karena terjadinya metode perubahan penghitungan dalam layanan kapasitas jalan. Persentase Peningkatan *Level Of Service* Ruas Jalan memiliki target 3 (tiga) persen per tahun, sehingga keseluruhan perkembangan peningkatan *level of service* ruas jalan adalah 6 (enam) persen sampai dengan target akhir RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023.

Pencapaian Indikator ke- 1 "Tingkat Pelayanan Ruas Jalan"

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon masih mempertahankan nilai yang sebelumnya diperoleh pada tahun 2022 yaitu memperoleh nilai B. Data

ini diperoleh dari survei pencacahan lalu lintas dengan menghitung jumlah kendaraan yang melalui suatu ruas jalan tertentu, kemudian hasil pencacahan lalu lintas yang masih terklasifikasi per jenis kendaraan memiliki satuan yang sama sehingga bisa dihitung volume total kendaraan SMP tersebut. Setelah itu data volume tadi dirasiokan dengan kapasitas jalan yang dikaji dan akan menemukan nilai untuk V/C ratio, nilai V/C ratio inilah menjadi dasar penentuan LOS tingkat pelayanan ruas jalan menutu Manual Kapasitas Jalan Indonesia dengan penentuannya sebagai berikut :

Tabel II. 90
Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat Pelayanan	Karakteristik Operasi Terkait
A	a) Arus bebas b) Kecepatan lalu lintas > 100 km/jam c) Jarak pandang bebas untuk mendahului harus selalu ada d) Volume lalu lintas mencapai 20% dari kapasitas (yaitu 400 smp perjam, 2 arah) e) Sekitar 75% dari gerakan mendahului dapat dilakukan f) Tundaan
B	a) Awal dari kondisi arus stabil b) Kecepatan lalu lintas > 80 km/jam c) Volume lalu lintas mencapai 45% dari kapasitas (yaitu 900 smp perjam, 2 arah)
C	a) Arus masih stabil b) Kecepatan lalu lintas > 65 km/jam c) Volume lalu lintas mencapai 70% dari kapasitas (yaitu 1400 smp perjam, 2 arah)
D	d) Mendekati arus tidak stabil e) Kecepatan lalu lintas > 60 km/jam Volume lalu lintas mencapai 85% dari kapasitas (yaitu 2000 smp perjam, 2 arah)

E	a) Kondisi mencapai kapasitas dengan volume mencapai 2000 smp perjam 2 arah b) Kecepatan lalu lintas pada umumnya berkisar 50 km/jam
F	a) Kondisi arus tertahan b) Kecepatan lalu lintas < 50 km/jam c) Volume dibawah 2000 smp per jam

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 Tahun 2006

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perencanaan Strategis yang ditetapkanya RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, pada tahun 2022 indikator kinerja untuk sasaran Tingkat Pelayanan Ruas Jalan mengalami perubahan yakni dengan tidak lagi memunculkan target sampai dengan target akhir RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023.

Pencapaian Indikator ke- 2 "Persentase peningkatan *level of service* ruas jalan"

Persentase peningkatan *level of service* ruas jalan menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur Pelayanan ruas jalan pada suatu wialayah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon merupakan satu wilayah perkotaan yang telah berupaya dalam peningkatan *level of service* ruas jalan, sehingga Visi Misi Wali Kota Cirebon 2018-2023 Hijau menjadi salah satu tagar yang disebut dalam SEHATI (Sehat, HIjau, Aman, Tertib dan Indah).

Berdasarkan perhitungan dan pendataan yang dilakukan Dinas Perhubungan Persentase peningkatan *level of service* ruas jalan pada tahun 2023 dengan hasil pencapaian 3%, maka kinerja peningkatan *level of service* ruas adalah $\frac{Realisasi}{Target} X\ 100\% = \frac{3,0}{3,0} X\ 100\% =$ **100% atau Sesuai Target.**

Kemudian, Dinas Perhubungan melakukan pengukuran tingkat kinerja segmen jalan adalah dengan derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan atau *degree of saturation* (DS) didefinisikan sebagai rasio arus lalu lintas (smp/jam) terhadap kapasitas (smp/jam) yang digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja segmen jalan. Nilai DS menunjukan apakah segmen jalan tersebut memiliki

masalah kapasitas atau tidak. Derajat kejenuhan dirumuskan seperti persamaan sebagai berikut:

DS = $\frac{Q}{C}$

Keterangan:
DS = Derajat Kejenuhan (smp/jam)
Q = Volume arus total (smp/jam)
C = Kapasitas ruas jalan (smp/jam)

Tabel 8. 918
Tingkat Pelayanan Ruas Jalan atau *Level of Service (LOS)*

Tingkat Pelayanan Jalan	Karakteristik Lalu Lintas	
A	Kondisi arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalu lintas rendah.	0,00-0,20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas.	0,20-0,44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan.	0,45-0,74
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dapat dikendalikan, V.C Ratio masih dapat ditolerir.	0,75-0,84
E	Arus tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti, permintaan sudah mendekati kapasitas	0,85-1
F	Arus dipaksakan, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, antrian panjang (macet)	≥ 1,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2023, diolah

Tabel II. 92
Tingkat Pelayanan Ruas Jalan yang ditargetkan

No.	**Nama Ruas Jalan**	**Volume (V)**	**Kapasitas (C)**	**V/C Ratio**	***Level of Service (LOS)***
1	Siliwangi	1207,65	2695,68	0,45	B
2	Dr. Cipto Mangunkusumo	2228	2854,17	0,78	D
3	Pemuda	1698,2	2484	0,68	C
4	Pekiringan	1824	2648	0,68	C

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2023, diolah

Pada tahun 2023 upaya yang telah dilakukan yakni dengan mengadakan berbagai macam kegiatan yang menjadi katalis positif di dalam pencapaian target indikator sasaran kinerja, seperti:

1. Penertiban kawasan parkir di beberapa ruas jalan di Kota Cirebon;
2. Perbaikan lampu penerangan jalan umum oleh TIM PJU;
3. Pengaturan Lalu Lintas pada ruas jalan dan simpang bersinyal di Kota Cirebon;
4. Pengendalian Lalu Lintas terpusat melalui *Area Traffic Control System* (ATCS) di simpang bersinyal Kota Cirebon;
5. Perbaikan rambu-rambu dan Lampu APILL pada ruas jalan dan simpang-simpang di Kota Cirebon;
6. Pengamanan Angkutan Lebaran dan Natal Tahun Baru;
7. Pelaksanaan Sosialisasi keselamatan pengguna jalan guna menekan terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor;
8. Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait pembahasan permasalahan teknis maupun non teknis bidang perhubungan di Kota Cirebon dengan instansi lainnya;
9. Peresmian seragam baru petugas parkir yang ada di Kota Cirebon yang diresmikan langsung oleh WaliKota Cirebon Pada Triwulan I Tahun 2023;
10. Pelaksanaan peresmian BRT dan Launching BRT Koridor II yang diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat;
11. Sosialisasi pertolongan pertama pada saat kecelakaan yang dihadiri oleh petugas parkir dan pemateri dari PCS 119 Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
12. Pemasangan rambu Bus Stop sebagai prasarana pendukung atas beroperasinya BRT;
13. Melaksanakan Sosialisasi keselamatan saat berkendara di tingkat pelajar Kota Cirebon;
14. Sosialisasi Uji Coba E-Parkir untuk melihat potensi harian perparkiran di wilayah Karanggetas dan Pasuketan Kota Cirebon;
15. Menempatkan Petugas DISHUB pada setiap persimpangan yang rawan kemacetan di Kota Cirebon;

16. Pengaturan rekayasa Lalu Lintas
17. Pelaksanaan Sadar Lalu Lintas Pada Usia Dini yang berkolaborasi dengan Kementrian Perhubungan dan PT.KAI DAOP 3

Evaluasi sasaran 3.1 "Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan"

Pencapaian target dengan perhitungan nilai LOS pada dasarnya adalah untuk mengukur tingkat pelayanan jalan bukan pengukuran satu nilai untuk seluruh kota, oleh karena itu, Dinas Perhungan Kota Cirebon telah mengusulkan adanya perubahan target indikator menjadi "Persentase Peningkatan *Level Of Service* Ruas Jalan" dimana apabila ada ruas jalan yang mengalami peningkatan LOS maka persentase untuk satu kota akan naik, dan dapat mewakili meningkatnya pelayanan kapasitas jalan untuk ukuran kota secara keseluruhan.

Penerapan strategi dan arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.309.510.463,00	3.775.184.046,00	87,601%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**87,601%**

Pencapaian sasaran yang memenuhi target menjadi tantangan ditahun-tahun mendatang sebagai upaya perbaikan tersebut kami telah melakukan analisa terhadap faktor yang mendukung, hambatan atau kendala, serta strategi pemecahan masalah sebagai solusinya :

Tabel II. 93
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalah
"Sasaran 3.1 "Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan" Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Terpenuhinya target kegiatan dan kinerja Dinas Perhubungan.	• Masyarakat yang masih belum disiplin menggunakan jalan sebagaimana peruntukanya. • Sulitnya penertiban Pedagang Kaki Lima yang memakai bahu jalan.	• Responsif terhadap kerusakan atau kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan. • Menertibkan pedagang kaki lima yang memakai bahu jalan dengan berkoordinasi dengan Satuan Pamong Praja

Sasaran 3.2 Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat

Tabel II. 949
Capaian Sasaran 3.2 "Meningkatnya Layanan Sarana Angkutan Umum"
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
3.2	Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat	Rasio Kendaraan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penduduk	Persen		n.a.	0,31	0,30	2			
		Indikator proksi : Tingkat Penggunaan Angkutan Umum	Persen	12	n.a.	n.a.	9	12	**12**		

Pencapaian Indikator "Tingkat Penggunaan Angkutan Umum"

Pada Tahun 2021 RPJMD Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengalami perubahan terhadap Sasaran Strategis 3.2 "Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat" yakni indikator sebelum perubahan yaitu **Rasio Kendaraan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penduduk,** setelah perubahan indikator ini dihapus karena dianggap kurang relevan dalamproses transisi perubahan tersebut, pada tahun 2022 kami menggunakan indikator proksi/.pengganti yaitu **Tingkat Penggunaan Angkutan Umum dengan target 12 %.** Dalam hal ini, pencapaian indikator Rasio Kendaraan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penduduk pada dasarnya tidak mungkin dicapai. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan umum yang ada tidak akan pernah bisa mengimbangi jumlah penduduk yang ada di Kota Cirebon, dimana jumlah penduduk Kota Cirebon = 333.330 jiwa, jumlah angkutan umum yang diizinkan = 615 kendaraan, maka :

Rasio kend AU terhadap penddk = 615/333.330 = 0,02 = 2 %

Capaian realisasi = 2 % / 60 % = 3 %

Untuk menginisiasi tercapainya sasaran Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat maka digunakanlah indikator proksi yakni "Tingkat Penggunaan Angkutan Umum". Perhitungan indikator ini disesuaikan dengan *coverage* area angkutan umum atau muda *share* angkutan umum. Perhitungan ini dengan membandingkan trayek terpanjang dengan Panjang jalan di Kota Cirebon. Berdasarkan data Cirebon Satu Data tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Panjang jalan di Kota Cirebon adalah 195,25 km, sedangkan Panjang trayek paling Panjang adalah trayek D1 dengan Panjang trayek 22,8 km. maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tingkat Penggunaan AU = 22,8 / 195,25 = 0,12 = 12 %

Capaian realisasi = 12 / 12 = 100 %

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator proksi diatas dapat tercapai 100% atau **Sesuai Target** akan tetapi melihat kondisi dan situasi eksisting terkait dengan perkembangan angkutan umum konvensional ini mengalami perkembangan yang menurun drastis apalagi dengan adanya angkutan *online* yang semakin mendominasi melalui pelayanan *door to door* akan tetapi pada

tahun 2022 diusulkan untuk ditiadakan dan berfokus pada indikator tingkat pelayanan ruas jalan. Dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan memiliki peningkatan dalam meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat, salah satunya dengan beroperasi BRT (Bus Rapid Transit) TransCirebon pada April 2021. Ada 10 unit BRT yang disiapkan dimana 6 unit sebagai SGO dan 4 unit sebagai SO yang dioperasikan setiap harinya di wilayah Kota Cirebon. Adapun untuk mendukung terlaksananya pelayanan angkutan umum kepada masyarakat, berikut adalah data angkutan umum di wilayah Kota Cirebon.

Tabel II. 95
Data Rasio izin trayek Angkutan umum Kota Cirebon

No	Jenis Data	Data		
1	Rasio ijin trayek angkutan umum dan rasio Panjang per jumlah kendaraan	D1	80 kendaraan	22,80 km
		D2	90 kendaraan	20,20 km
		D3	60 kendaraan	15,60 km
		D4	85 kendaraan	15,68 km
		D5	90 kendaraan	15, 08 km
		D6	100 kendaraan	20,70 km
		D7	40 kendaraan	20,20 km
		D8	70 kendaraan	16,30 km
2	Jumlah moda angkuran barang	Jumlah truk barang umum		1721
		Jumlah mobil box		2087
		Jumlah mobil tangka		266
3	Jumlah penumpang melalui terminal	70525		
4	Jumlah perusahaan angkutan umum	Perusahaan milik Pemerintah		Tidak ada
		Perusahaan milik Swasta		3
5	Jumlah terminal	1 (Terminal Tipe A Harjamukti)		
6	Trayek angkutan kota	8 Trayek		

7	Jumlah kendaraan angkutan penumpang umum	615 kendaraan
8	Bus Rapid Transit (TransCirebon)	Jumlah 10 (SGO 6, SO 4)

Evaluasi Sasaran 3.2 "Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat"

Sasaran 3.2 memiliki satu indikator dengan tingkat pencapaian 100% setelah menggunakan indikator proksi dalam pencapaian kinerja dengan indikator Tingkat Penggunaan Angkutan Umum, dalam hal ini maka capaian sasaran 3.2 termasuk kategori predikat **Sesuai Target.** Pencapaian sasaran ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Daerah Kota Cirebon khususnya melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan memaksimalkan pelaksanaan strategi "Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur jalan secara merata di seluruh wilayah" dengan arah kebijakan "Kemantapan kondisi jalan interkonektivitas pertumbuhan ekonomi". Penerapan strategi dan arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program (kerangka Pendanaan yang mendukung sasaran ini adalah Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dan telah disebutkan di sasaran 3.1. Berdasarkan RPJMD Perubahan 2018-2023, pada tahun 2022 indikator dan target pada sasaran ini dihapus (dilakukan simplifikasi struktur sasaran dengan Sasaran 3.1 Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan			
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**73,462%**

Pencapaian sasaran yang memenuhi target menjadi tantangan ditahun-tahun mendatang karena salah satu kendala dalam pemenuhan meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat adalah terus meningkatnya pengguna moda transportasi umum dari tingginya pendatang atau wisatawan yang datang sesuai dengan salah satu program prioritas di bidang pariwisata. Untuk menjawab tantangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu meningkatkan kembali upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023, sebagai upaya perbaikan tersebut

kami telah melakukan analisa terhadap faktor yang mendukung, hambatan atau kendala, serta strategi pemecahan masalah sebagai solusinya :

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II. 96
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 3.2 "Meningkatnya Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat"
Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Adanya kepedulian pemerintah dalam mengembangkan transportasi massal • Trayek angkutan umum telah mencacah seluruh wilayah Kota Cirebon	• Inovasi Transportasi Massal di Kota Cirebon belum terimplementasi • Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi publik • Belum Prima nya layanan angkutan umum di Kota Cirebon khususnya angkot • Adanya angkutan *online* yang semakin mendominasi melalui pelayanan *door to door*	• Dilaksanakannya kajian dengan inovasi terbarukan berkaitan dengan Transportasi Massal • Dilaksanakannya peningkatan daya tarik penggunaan angkutan umum • Peningkatan pelayanan angkutan umum lewat implementasi SPM Angkutan Kota (angkot)

Sasaran 3.3 Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Drainase

Tabel II. 9710
Capaian Sasaran 3.3 "Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Drainase"
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi							Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	**2024**		
3.3	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Drainase	Persentase Drainase Kondisi Baik	Persen	**83**	70	75	70,56	75,50	85,63	85.42			

Sasaran "Meningkatnya Kapasitas pelayanan drainase" dengan **indikator: Persentase Drainase Kondisi Baik** menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan kinerja "misi 3 : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan". Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon menargetkan indikator Persentase Drainase Kondisi Baik dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\% = \frac{Justifikasi\ Drainase\ Kondisi\ Baik}{Total\ Drainase}\ x\ 100\ \%$$

Pencapaian Indikator "Persentase Kondisi Drainase Baik"

Sebagaimana dimaksud dalam Misi Walikota Cirebon Nomor 3, meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan dilaksanakan melalui Program Prioritas salah satunya yaitu Penataan Saluran Drainase.

Pada Tahun 2023, sesuai dengan arahan dalam RPJMD, Melalui Seksi Drainase Perkotaan didapat capaian penataan saluran drainase dalam Kondisi baik direpresentasikan dengan kegiatan perbaikan saluran drainase, normalisasi saluran drainase, serta pembangunan saluran pembuang dan pembuatan plat deker dan pembangunan saluran sekunder di kota Cirebon. Semua kegiatan ini dipangku oleh Kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan pada Tahun 2023. Sebanyak 67 Pekerjaan telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2023. Berikut data Judul Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Drainase Perkotaan

Rehabilitasi Drainase :

No.	Kegiatan Rehabilitasi Jalan TA 2023
1	Normalisasi dan Rehabilitasi Drainase Jalan Terusan Pemuda
2	Normalisasi dan Rehabilitasi Drainase Jl. Cipto Dari Lampu Merah Jl. Sudarsono s/d Sunyaragi
3	Normalisasi Saluran Air RW. 04 Darmamukti Kel. Kecapi Kec. Harjamukti,.,
4	PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT. 05 RW. 02 PAGUYUBAN KEL. LEMAHWUNGKUK KEC. PEGAMBIRAN
5	PERBAIKAN DRAINASE KAMPUNG KEDUNGWUNGU RT 01 RW 02 KEL. KALIJAGA,.,

No.	Kegiatan Rehabilitasi Jalan TA 2023
6	PEMBUATAN SALURAN AIR DAN DECKER KARANG BARU RT. 05 RW. 03 KEL. SUNYARAGI,.,
7	PEMBUATAN SALURAN AIR DAN DECKER RT. 04 RW. 06 GRENJENG,.,
8	PEMBUATAN SALURAN AIR DAN DECKER RW. 06 GRENJENG RT. 03 KEL. HARJAMUKTI KOTA CIREBON,.,
9	Pembuatan Saluran Air dan Plat Deuker RT.02 RW.03 Kel. Kecapi,.,
10	PEMBUATAN SALURAN AIR RT 02 RT 03 RW. 10 SUKET DUWUR KEL. KALIJAGA KOTA CIREBON,.,
11	PEMBUATAN SALURAN AIR RT. 03 RW. 07 PELANDAKAN KEL. HARJAMUKTI.
12	PEMBUATAN SALURAN AIR RT. 08 DAN RT. 09 RW. 03 KARANGDAWA KEC. LEMAHWUNGKUK,.,
13	PEMBUATAN SALURAN BELAKANG VILLA KRISTAL RT. 03 RW. 03 KARYAMULYA,.,
14	PEMBUATAN SALURAN DI RW. 17 CIREMAI GIRI KEL. KECAPI KEC. HARJAMUKTI,.,
15	PENGURASAN DAN PERGANTIAN DECKER DRAINASE GANG MULYA 1 RT. 01 KEL. DRAJAT KOTA CIREBON,.,
16	PENGURASAN DAN PERGANTIAN DECKER GANG MULYA 3 RT. 01 RW. 05 KEL. DRAJAT KOTA CIREBON,.,
17	PERBAIKAN DAN PENGURASAN SALURAN RT. 03 RW. 01 KEL. KEBONBARU KEC. KEJAKSAN,.,
18	PERBAIKAN DRAINASE DAN PEMBUATAN SALURAN RW. 03 ARGASUNYA.
19	PERBAIKAN DRAINASE DEPAN PRIMKOPAL.
20	PERBAIKAN DRAINASE RW. 02 KEL. KECAPI KEC. HARJAMUKTI,.,
21	PERBAIKAN SALURAN AIR DAN DECKER RT. 04, 06 DAN 07 RW. 03 KEBON BARU KEC. KEJAKSAN,.,
22	PERBAIKAN SALURAN AIR DI PERUMAHAN GRIYA INTAN RW. 07 MULYA ASIH KELURAHAN LARANGAN KECAMATAN HARJAMUKTI,.,
23	PERBAIKAN SALURAN AIR DI WILAYAH RW. 04 KARANGDAWA TIMUR KEL. PEGAMBIRAN KEC. LEMAHWUNGKUK,.,
24	PERBAIKAN SALURAN AIR JALAN TERUSAN SEKARKEMUNING RT. 06 RW. 03 KEL. KARYAMULYA KEC. KESAMBI,.,
25	PERBAIKAN SALURAN AIR RT. 01 RW. 03 KEL. KALIJAGA KOTA CIREBON,.,
26	PERBAIKAN SALURAN AIR RT. 03 RT. 04 RT 06 RW. 06 KEDUNG KRISIK SELATAN,.,
27	PERBAIKAN SALURAN AIR RT. 03 RW. 12 PERUMAHAN GSP KEL. KARYAMULYA,.,
28	PERBAIKAN SALURAN AIR RT. 04 RW. 06 KARANGJALAK KESAMBI KEL. SUNYARAGI,.,

No.	Kegiatan Rehabilitasi Jalan TA 2023
29	PERBAIKAN SALURAN AIR RT. 05 RW. 10 SUKETDUWUR KELURAHAN KALIJAGA KECAMATAN HARJAMUKTI,.,
30	PERBAIKAN SALURAN AIR RW. 05 KEL. PULASAREN KEC. PEKALIPAN KOTA CIREBON,.,
31	PERBAIKAN SALURAN AIR RW. 06 KEL. JAGASATRU KEC. PEKALIPAN,.,
32	PERBAIKAN SALURAN AIR RW. 07 MULYA ASIH KEL. LARANGAN KEC. HARJAMUKTI,.,
33	Perbaikan Saluran Air RW. 11 Kalijaga,.,
34	PERBAIKAN SALURAN AIR WILAYAH 16 BAYU ASIH KEL. KECAPI KEC. HARJAMUKTI,.,
35	PERBAIKAN SALURAN DI RW. 19 PERMATA ASIH KEL. KECAPI KEC. HARJAMUKTI,.,
36	Perbaikan Saluran di Wilayah RW.10 Penggung Utara Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti,.,
37	PERBAIKAN SALURAN DRAINASE KANDANG PERAHU RT. 03 RW. 13 KEL. KARYAMULYA KESAMBI,.,
38	Perbaikan Saluran Drainase RT 01 RW 01 Kanggraksan Utara.
39	Perbaikan Saluran Drainase RT 06 RW 08 Karang Anom Kel. Pegambiran.
40	PERBAIKAN SALURAN DRAINASE RW. 03 KEL. PULASAREN KEC. PEKALIPAN,.,
41	PERBAIKAN SALURAN DRAINASE RW. 08 MARGASARI KEL. SUNYARAGI KEC. KESAMBI KOTA CIREBON,.,
42	PERBAIKAN SALURAN DRAINASE RW 06 HARJAMUKTI,.,
43	PERBAIKAN SALURAN DRAINASE SITUGANGGA RT. 02 RW. 09 KEL. KARYAMULYA KEC. KESAMBI KOTA CIREBON,.,
44	Perbaikan Saluran Gang Mangga RW 08 Kel. Kesunean.
45	PERBAIKAN SALURAN LINGKUNGAN RW. 16 KEL. LARANGAN KEC. HARJAMUKTI,.,
46	PERBAIKAN SALURAN RT. 05 - RT. 06 - RT. 07 RW. 04 KEL. DRAJAT,.,
47	PERBAIKAN SALURAN RW. 08 SUMUR HOWE KEL. ARGASUNYA,.,
48	PERBAIKAN SALURAN RW. 09 KEL. PEKALIPAN,.,
49	PERBAIKAN SALURAN RW. 10 MALABAR KEL. KECAPI,.,
50	PERBAIKAN SALURAN RW. 13 KERTASEMBOJA KEL. PEGAMBIRAN KEC. LEMAHWUNGKUK,.,
51	PERBAIKAN SALURAN RW. 15 GALUNGGUNG ASIH KEL. KECAPI KEC. HARJAMUKTI,.,
52	PERBAIKAN SALURAN UJUNG HARAPAN (LANJUTAN) RW. 07 KEL. DRAJAT,.,
53	PERBAIKAN SALURA RT. 01 RW. 09 API - API KEL. PEGAMBIRAN,.,
54	Renovasi Saluran Air Dan Plat Deuker RW.07 Pelandakan,.,
55	SALURAN RT. 03 DAN RT. 04 RW. 12 KEL. LARANGAN,.,

Operasi dan Pemeliharaan Drainase :

No.	Kegiatan/Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Drainase
1	Perbaikan saluran drainase Jl. Terusan pemuda
2	Perbaikan saluran belakang Arhanud Rw. 01 dan 10
3	Perbaikan Plat Duicker Jalan Kebon Belimbing
4	Pekerjaan Pembuat Plat Duicker di Penggung Selatan
5	Perbaikan Duicker Jalan Siliwangi
6	Perbaikan Saluran dan Plat Duicker Jalan Kebon Cai
7	Perbaikan Saluran dan Duicker Jalan Sukalila Selatan
8	Perbaikan Pemeliharaan Saluran Gorong-Gorong Jalan Pekiringan
9	Perbaikan Saluran Jalan Merbabu Raya
10	Pemasangan Inlet 4 Titik dan Normaliasi Saluran Jalan Rajawali
11	Pemasangan P lat Duicker Jalan Kesambi Dalam
12	Normalisasi Sal uran Jalan Stadiun Bima

Secara sederhana pemeriksaan bangunan air secara fungsi dapat dikelompokkan dalam 4 kategori (reff. pekerjaan inventarisasi jaringan irigasi Bank Dunia oleh Konsultan JICA, 2002), yaitu sebagai berikut:

1. Bangunan berfungsi dengan baik
2. Bangunan masih dapat berfungsi dengan kendala
3. Bangunan tidak dapat berfungsi dengan baik
4. Bangunan sama sekali tidak dapat berfungsi

Kondisi fisik bangunan air dapat berubah oleh karena berbagai sebab antara lain faktor internal misalkan karena keterbatasan kemampuan bangunan itu sendiri dan sebab dari luar misalkan erosi, cuaca, beban berlebihan, gaya external yang tak direncanakan. Kondisi diartikan sebagai gambaran utuh mengenai kondisi bangunan baik dilaksanakan secara visual maupun dideteksi di laboratorium bangunan. Sampai saat ini tidak ada pedoman yang baku mengenai tatacara penentuan kondisi fisik yang mengarah kepada kualitas bangunan, namun demikian secara umum hasilstudi Monenco (1984) memberikan acuan penilaian kondisi fisik bangunan sebagai berikut:

No	Kondisi Fisik	Penilaian Kondisi Fisik
1.	Baik	86%-100%
2.	Cukup	66%-85,9%
3.	Rusak Ringan	45%-65,9%
4.	Rusak Sedang	25%-45,9%
5.	Rusak Berat	0-25,9%

Berdasarkan monitoring kondisi drainase serta upaya perbaikan drainase yang dilakukan pada tahun 2023, diketahui kondisi drainase pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$Drainase\ Kondisi\ Baik = Kec.Kejaksan + Kec.Kesambi + Kec.Lemahwungkuk + Kec.Pekalipan + kec.Harjamukti$$

$$Drainase\ Kondisi\ Baik = 106\ titik + 520\ titik + 70\ titik + 48\ titik + 697\ titik$$

$$= 1.441\ titik$$

$$Persentase\ Drainase\ Kondisi\ Baik = \frac{Drainase\ Kondisi\ Baik}{Total\ Drainase} x\ 100\%$$

$$= \frac{1.441\ titik}{1.687\ titik} x\ 100\% = 85.417\ \%$$

Dalam hal Drainase Kondisi Baik didapat yaitu 1.441 titik dari total 1.687 titik drainase (106 titik Kec. Kejaksan + 520 titik Kec. Kesambi + 70 titik Kec. Lemahwungkuk + Kec. Pekalipan + Kec. Harjamukti) dari Perhitungan tersebut didapat Nilai Capaian pada Sasaran "***Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Drainase***" realisasi pada indikator Persentase Drainase dalam kondisi baik ini adalah 85.417% pada Tahun 2023, sementara target Tahun 2023 indikator Persentase Drainase adalah 72.0%, maka pencapaian indikator kinerja adalah $\frac{R}{T} x100\%= \frac{85.417}{72} x100\%=$ 118.634%.

Sasaran 3.4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Dampak Pengendalian Iklim

Tabel II.11
Capaian Sasaran 3.4 "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Dampak Pengendalian Iklim" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
3.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubaha Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup *(Indikator Kinerja Utama)*	Poin	**56,82**	44,05	51,96	56,25	**55,70**		**50,04**	
		Penurunan Emisi Gas Rum ah Kaca (*Indikator Kinerja Utama)*	Persen	7,72	2,38	3,85	5,9	5,9	**5,73**	**7,25**	**93,91%**

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim menjadi sasaran strategis Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana tertuang di RPJMD Kota Cirebon 2018-2023, hal ini merupakan upaya mendukung Visi Misi Kota Cirebon yang sejalan pada Misi 3 Pemerintah Daerah Kota Cirebon Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Tujuan "Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan" dengan **Indikator** : **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan kinerja

"**Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan"**

Pencapaian Indikator "Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca"

Dalam Perhitungan Penurunan Gas Emisi Gas Rumah Kaca masih menggunakan perhitungan dari Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon Hanya melakukan Inventarisasi

Gas Emisi Rumah Kaca (GRK). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD- GRK, merupakan instrumen untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan mitigasi dan mengukur besarnya penurunan emisi setiap tahun. Tahun 2019 merupakan tahun ketujuh pelaksanaan PEP RAD GRK di Jawa Barat pasca diterapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 56 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Jawa Barat.

Tabel II. 99
Kontribusi Capaian Penurunan Emisi GRK Kota Cirebon Tahun 2016-2022

No.	Sektor	ton CO2 eq						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Energi	468.194	500.537,19	1.062,02	539,57	-	28.880,15	632.394
2	Transportasi	70.360	3.841,8	15.058	48.461,8	1.954	3.956,2	-
3	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-
4	Limbah	2.629,87	75.840,11	3.280,45	11.887,99	10,68	4.231,42	469.769,36
5	Pertani An	69.330	33.374	4.723	56.815	63,81	7.347,84	11.912,79
TOTAL		610.513,87	613.593,1	24.123,47	117.704,36	2.028,49	44.415,61	1.114.076 ,15

Sumber : Provinsi Jawa Barat PEP RAD GRK, 2016-2022

Diketahui bahwa Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Cirebon pada tahun 2022 mengalami penurunan yakni sebesar 0,53% dengan capaian sebesar 5,37% dibandingkan tahun 2021 dengan capaian sebesar 5,9%. Maka pencapaian indikator Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca adalah $\frac{R}{T} x100\%= \frac{5,37}{7,11} x100\%=$ 75,52%, atau **Baik dalam pencapaian Target.**

Pada tahun 2023, dalam Perhitungan Penurunan Gas Emisi Gas Rumah Kaca masih menggunakan perhitungan dari Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon Hanya melakukan Inventarisasi Gas Emisi Rumah Kaca (GRK). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca,

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD- GRK, merupakan instrumen untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan mitigasi dan mengukur besarnya penurunan emisi setiap LKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON TAHUN 2023 65 tahun. Tahun 2019 merupakan tahun ketujuh pelaksanaan PEP RAD GRK di Jawa Barat pasca diterapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 56 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Jawa Barat. Capaian penurunan emisi tahun 2023 sebesar 2.410.076 ton CO2 eq dengan penurunan akumulatif sebesar 9.802.395 ton CO2 eq, dengan capaian penurunan emisi dari seluruh bidang hingga Tahun 2023 mencapai 7,25% terhadap BaU 2030. Hasil penurunan emisi tersebut belum memenuhi target penurunan emisi tahun 2023 terhadap BaU 2030 sebesar 7,72%.

Capaian Penurunan Emisi GRK tahun 2023

Bidang	% Target Penurunan Tahun 2023 Terhadap BaU 2030	Capaian Penurunan Tahun 2023 (ton CO2 eq)	%Capaian Penurunan Tahun 2023 Terhadap BaU 2030
Kehutanan	17,54%	982.821,84	30,49%
Pertanian	10,96%	72,205,44	15,24%
Energi	7,68%	394.408,43	3,70%
Transportasi	0,61%	4.103,49	0,59%
Limbah	15,80%	956.536,88	10,26%
TOTAL	7,72%	2.410.076,08	7,25%

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Evaluasi Tujuan pada misi ke-3 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan”

Mengacu pada pencapaian indikator, Tujuan pada Misi ke-3 ini rata-rata pencapaianya adalah 75,52%, pencapaian dengan Kategori **Baik dalam pencapaian Target**. Sasaran ini didukung oleh Program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengelolaan Persampahan	14.202.795.806,00	13.988.231.815,00	98,450%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	615.512.347,00	602.091.000,00	97,819%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.675.039.914,00	1.441.639.737,00	86,066%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	45.423.850,00	45.309.945,00	99.749%
Program Pengembangan Permukiman	18.074.531.783,00	17.111.527.602,00	94,672%
Program Penataan Bangunan Gedung	15.491.710.334,00	4.953.743.000,00	31,977%
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	23.507.517.900,00	19.812.526.400,00	84,282%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	80.999.415,00	-	0,000%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	737.066.316,00	701.562.568,00	95,183%
Program Pengembangan Perumahan	187.591.940,00	88.527.240,00	47,191%
Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	938.054.290,00	917.092.684,00	97,765%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	992.105.066,00	936.533.000,00	94,399%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	119.567.200,00	117.347.000,00	98,143%
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	150.940.907,00	141.099.990,00	93,480%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	67.796.350,00	67.576.122,00	99,675%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	13.926.000,00	13.926.000,00	100,000%
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	65.521.150,00	55.027.471,00	83,984%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	5.238.175,00	5.237.149,00	99,980%
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi,	81.172.400,00	2.100.000,00	2,587%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	274.854.541,00	261.021.027,00	94,967%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Penatagunaan Tanah	106.896.445,00	104.954.125,00	98,183%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**80.836%**

Berbagai hal yang telah mendukung pencapaian sasaran, kendala yang dihadapai, serta strategi pemecahan masalah, kamituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 9112
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 3.4 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan” Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Berkoordinasi dengan stakeholder pengampu sumber data emisi gas rumah kaca. • Terlaksananya program pendukung yang relevan untuk mendukung pencapaian sasaran. • Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan danmasyarakat terhadap emisi Gas Rumah Kaca	• Data sumber emisi gas rumah kaca sulit di dapatkan sehingga perhitungan penurunan emisi gas rumah kaca tidak akurat. • Telah diupayakan peningkatan transportasi umum dengan adanya BRT Kota Cirebon, namun kesadaran penggunaan transportasi umum masih rendah. • Terbatasnya lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	• Berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk pihak non SKPPD pengampu data sumber emisi gas rumah kaca untuk menginput data sumber emisi gas rumah kaca melalui platform Cirebon Satu Data maupun Jabar Satu Data. • Mengalokasikan lahan untuk difungsikan kawasan lindung atau area hijau diantaranya dengan memanfaatkan jalur pada jaringan jalan dan utilitas sebagai sarana penyediaan jalur hijau, melakukan pengaturan kepadatan bangunan dan memulihkan lahan yang telah beralih fungsi menjadi fungsi RTH.

MISI KE 4 : MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG KONDUSIF

Misi 4, yaitu: **"Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif**", selaras dengan Misi 4 RPJPD, yaitu : **"Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif, Stabil, Merata dan Berkelanjutan",** yang ditandai dengan :

a. Menciptakan situasi politik yang kondusif melalui terselenggaranya iklim politik yang sehat.
b. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum dan dapat berpartisipasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sekitarnya.
c. Teswujudnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Cirebon yang mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.
d. Meningkatnya investasi untuk mendukung peningkatan pemerataan pembangunan.

Dalam rangka mendorong pencapaian atau mewujudkan Misi 4 ini, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah menetapkan 1 tujuan dan 3 sasaran, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Tujuan "Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan"

Tabel II.92
Tujuan 4 "Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan Kota Cirebon"

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
4	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Persen	83,00	n/a	76,70	76,61	76,61	**78,19**	**78,19**	**98,00%**

Pencapaian Indikator "Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum"

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat akan ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan indeks kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum hampir serupa dengan indeks rasa aman, dimana indeks ini belum lazim di gunakan khususnya di Negara kita, pembahasan indeks rasa aman pernah muncul pada diskusi yang dilakukan oleh Bappenas, diskusi tersebut merupakan usulan pengembangan metode pengukuran indeks keamanan Indonesia, dalam konteks internasional lazim dikenal human security. Pada umumnya teori yang dibangun pada isitilah rasa aman / *human security* adalah keamanan terhadap gangguan dari kekerasan dan kejahatan, gangguan dari bencana serta aman dalam aspek social ekonomi. Jika disandingkan dengan amanah urusan pemerintahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bidang ketentraman dan ketertiban umum maka memiliki korelasi yang jelas khususnya dalam lingkup keamanan dari gangguan ketertiban umum serta gangguan dari bencana. Serta menjadikan faktor di luar urusan ketentraman dan ketertiban umum (yang digariskan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014) yaitu sosial ekonomi sebagai penentu dalam merumuskan nilai indeks kemanan tersebut. Dilatar belakangi hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Perangkat daerah yang mengampu urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan survey dengan metode skala likert yang diadopsi dari Permenpan RB 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat. Namun dalam implementasinya kami lakukan pengembangan dengan memodifikasi butir-butir pertanyaan agar dapat menggali lebih jauh informasi dari objek terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum, hal ini guna menjamin gambaran tingkat kepuasan terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban umum.

Hasil survei terhadap pelayanan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2023 mencapai angka 75,00 dari target 83,00 dengan capaian presentase 90,36% sehingga dapat mencapai predikat tinggi, berikut adalah rekapitulasi hasil survei tersebut.

Tabel II. 93
Nilai IKM Terhadap pelayanan Trantibum di Kota Cirebon Tahun 2023

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	Bobot Rata-Rata Tertimbang	Nilai Indeks
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,100	0.11	0,34100
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,087	0.11	0,33953
3	Kecepatan waktu Pelayanan	3,147	0.11	0,34613
4	Kewajaran biaya	3,147	0.11	0,34613
5	Kesesuaian Produk Layanan	3,147	0.11	0,34613
6	Kompetensi Petugas	3,227	0.11	0,35493
7	Perilaku Petugas	3,347	0.11	0,36813
8	Sarana dan Prasarana	3,033	0.11	0,33367
9	Penanganan Pengaduan	3,200	0.11	0,35200
			Nilai Indeks Unit Pelayanan	3,12767
			Nilai IKM setelah dikonversi (Total Nilai Indeks x 25)	**78,192**
			Mutu Pelayanan	**B**
			Kinerja Unit Pelayanan	**Baik**

Dalam Mendukung tujuan sebagai bagian dari gambaran kondisi pada pencapaian Misi Ke-4, ditetapkan 3 sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat.
2. Meningkatnya rasa nasionalisme dan kawaspadaan nasional.
3. Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Sasaran 4.1. : Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat

Tabel II. 94
Sasaran 4.1 “Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat” tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
4.1	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	Jumlah Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan	Lokasi/ Titik	**15**	60	52	43	**35**	**25**	**15**	**100%**

		Ketertiban Umum									
		Indeks Trantibum masyarakat kecamatan (Nilai indeks rata-rata keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan)									
		Kecamatan Kejaksan	Poin	86,50	n/a	n/a	85,67	77,0	**86,35**	**82,05**	**95,38%**
		Kecamatan Lemahwungkuk	Poin	71,00	n/a	n/a	69,83	80,44	**79,45**	**81,16**	**111,41%**
		Kecamatan Harjamukti	Poin	84,50	n/a	n/a	83,83	82,50	**82,50**	**84,50**	**98,21%**
		Kecamatan Pekalipan	Poin	82,50	n/a	n/a	81,50	86.25	**82,50**	**84,68**	**99,62%**
		Kecamatan Kesambi	Poin	85,00	n/a	n/a	84,17	78,25	**78,25**	**85,00**	**92,00%**

Sasaran “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan” dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Daerah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Lokasi/Titik) menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan Misi 4. Ketentraman dan ketertiban serta kondisi yang kondusif ditandai salah satunya adalah dengan berkurangnya Lokasi daerah rawan gangguan keamanan dan ketertiban umum, serta indeks kemanan dan ketertiban umum pada tingkat kecamatan, Pada tahun 2023 sebagai upaya peningkatan kinerja khususnya di bidang ketentraman dan ketertiban umum, indikator yang berada di wilayah kecamatan tersebut diukur dan disajikan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cirebon ini.

Pencapaian Indikator ke-1 “Jumlah Daerah rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum”

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan berkurangnya jumlah daerah rawan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban umum dimana pada awal memiliki target yaitu 15 titik. Atas upaya

penertiban di berbagai lokasi, pada tahun 2023 target tersebut melebihi target dan capaian sasaran menjadi 15 titik. Pengukuran rawan gangguan kemanan dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan meneliti kawasan yang memiliki frekuensi gangguan kemanan tinggi dan menyandingkan perkembangan kondisi kemanan tersebut melalui survey dan catatan gangguan kemananpada titik tersebut.

Dengan jumlah titik rawan 15 titik pada tahun 2023, hal ini menunjukan adanya pengurangan sekitar 10 titik rawan gangguan kemanan dan ketertiban umum jika disandingkan dengan target pada tahun 2022 yakni 25 titik maka Pengukuran pada indikator ini adalah jenis pengukuran pencapaian dimana semakin rendah realisasi maka tingkat pencapaian semakin baik, digunakan rumus : $\frac{Target+(Target-Realisasi)}{Target} X\ 100\% = \frac{15+(15-15)}{15} X\ 100\%$ yaitu 100% atau **Sesuai Target**

Pencapaian Indikator ke-2 "Indeks keamanan dan ketertiban umum masyarakat"

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Indeks ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat dalam 5 wilayah kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Kejaksan (82,05)
2. Kecamatan Lemahwungkuk (81,16)
3. Kecamatan Harjamukti (84,50)
4. Kecamatan Pekalipan (84,68)
5. Kecamatan Kesambi (85,00)

Melalui metode survey dalam rangka merumuskan indeks keamanan dan ketertiban umum masyakat di wilayah kecamatan terdapat data sebagai berikut :

Tabel II. 95
Nilai Indeks Trantibum di Wilayah Kecamatan Kota Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	Target 2023	Nilai Indeks Keamanan dan Trantibum	Keterangan
1	Kecamatan Kejaksan	86,50	82,05	*95,38%*
2	Kecamatan Lemahwungkuk	70,00	81,16	*111,41%*

3	Kecamatan Harjamukti	84,50	84,50	*98,21%*
4	Kecamatan Pekalipan	82,00	84,68	*99,62%*
5	Kecamatan Kesamibi	84,50	85,00	*92,00%*

Serta pada tahun 2023 meningkatnya jumlah RW yang melaksanakan SISKAMLING berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 35 RW.

Evaluasi Sasaran 4.1 "Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat"

Pencapaian Sasaran "Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat" ditunjukan dengan rata-rata pencapaian indikator tersebut diatas **Melebihi Target**. Berada dalam kategori atau predikat sangat tinggi. Pencapaian sasaran dengan menurun nya jumlah daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta indeks keamanan dan trantibum masyarakat diwilayah kecamatan merupakan hasil kerja keras atas petugas, khususnya dilapangan yang terus melakukan pemantauan dan penertiban secara berkala. Beberapa Program yang mendukung sasaran adalah:

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.215.939.400	2.867.730.441	76,26%

Tabel II. 13
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 4.1 "Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di Masyarakat" Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga	• Daerah rawan ketentraman dan ketertiban umum, disebabkan maraknya	• Kerjasama antar daerah dalam memetakan strategi penanganan masalah atau

kemanan dan ketertiban umum. • Adanya Linmas di tingkat kelurahan yang membantu SATPOL PP dalam menjaga Kemanan dan Ketertiban Umum. • Meningkatnya Koordinasi antara SATPOL PP-Kecamatan Kepolisian dan TNI dalam menjaga kondusifitas kemanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat.	anak jalanan yang nota bene bukan berasal dari Kota Cirebon. • Dalam beberapa kasus (tidak berlaku umum) ditemukan adanya hubungan antara masalah kesejahteraan sosial dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. • Jumlah personil khususnya Aparatur Sipil Negara yang bertugas dilapangan masih belum ideal jika diukur dengan kondisi jumlah daerah yang harus dilakukan patrol secara berkala. • Dukungan Anggaran yang belum Optimal	isu ketentraman dan ketertiban umum. • Kerja sama lintas sektor, yaitu antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP), Dinas Pekerjaan Umun dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Lingkungan Hidup, TNI, POLRI serta Kejaksaan. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP), saat ini masing-masing telah memiliki program yang sinergis dalam mengarah perbaikan kondisi sosial dan kualitas masyarakat yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Sasaran 4.2 : Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional

Tabel II. 14
Sasaran 4.2 “Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional”
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
4.2	Meningkatnya rasa nasionalisme dan kawaspadaan nasional	Konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme (Kasus) *(Indikator Kinerja Utama)*	Kasus	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**100%**

Sasaran Strategis 4.2 “Meningkatnya rasa nasionalisme dan kawaspadaan nasional” merupakan upaya mendukung Visi Misi Kota Cirebon dari tujuan Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon, dengan indikator kinerja yaitu jumlah Konflik Kasus Kebangsaan Dan Nasionalisme menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan Misi 4. Indikator dimaksud juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon.

Pencapaian Indikator “Konflik Kasus kebangsaan dan Nasionalisme”

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan jumlah konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme pada target maksimal yaitu 0 / nol kejadian. Target ini terbilang cukup tinggi karena potensi terjadinya konflik di Kota Cirebon tidaklah rendah mengingat heterogen nya komposisi demografi masyarakat di Kota Ini. Namun patut disyukuri berdasarkan data yang disampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 tidak tercatat satupun kejadian terkait konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme, maka pencapaian atas indikator ini adalah 100% atau **Sesuai Target.**

Evaluasi Sasaran 4.2 "Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional"

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional tercapai 100%, atau **Sesuai Target** dimana satu-satunya indikator sebagai tolak ukur pencapaian sasaran dapat dilaksanakan sepenuhnya. Keberhasilan ini sekaligus menjadi tantangan kedepan nya untuk tetap dipertahankan, kondisi demografi Kota Cirebon yang heterogen dan atmosfer konflik khususnya SARA maupun ideologi di tingkat nasional yang sangat fluktuatif menjadi celah kemungkinan yang cukup tinggi terjadinya konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme. Program yang mendukung sasaran adalah sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	650.010.804,00	503.210,200,00	77,416%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	13.952.297.386,00	13.926.501.932,00	99.815%
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	988.446.300,00	916.708.00,00	92,742%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.049.673.942,00	2.879.317.456,00	94,414%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**91,097%**

Dalam rangka upaya mempertahankan kinerja kami melakukan analisa terhadap faktor pendukung kinerja serta permasalahan dan solusinya, berikut

adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II. 15
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 4.2. “Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional”
Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Masyarakat Kota Cirebon adalah masyarakat yang terbuka dan heterogen dan telah terjalin hubungan baik antar Suku atau ras di Kota Cirebon. • Pemerintah Daerah Kota Cirebon tidak memberikan pelayanan yang diskriminatif.	• Isu Nasional yang berpotensi mempengaruhi kondisi di daerah Kota Cirebon. • Pemberitaan *Hoax* dari pihak –pihak yang tidak bertanggung-jawab. • Pemahaman ideologi di luar Pancasila yang mudah di akses oleh masyarakat sehingga menurunkan rasa Nasionalisme. • Belum optimalnya upaya fasilitasi kewaspadaan dini daerah dan koordinasi penanganan konflik.	• Strategi “Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan wawasan kebangsaan” Dengan Arah Kebijakan “Meningkatkan ideologi wawasan kebangsaan” • Koordinasi dan kolaborasi dengan tim Cirebon Saber Hoax pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk meminimalisir berita-berita hoax yang tersebar di kalangan masyarakat. • Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sasaran 4.3: Meningkatnya Pencegahan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana

Tabel II. 16
Sasaran 4.3 "Meningkatnya Pencegahan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana" Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi						Capaian Kinerja 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	**2023**	
4.3	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK	Persen	85,00	70,00	75,00	80,00	85,00	**100**	**85,71**	**100,8%**
		Jumlah Kelurahan yang Memiliki Forum Siaga Bencana	Kelurahan		0	22	22	22		**22**	
		Persentase Forum Siaga Bencana Kelurahan Aktif (Persen)	Persen	27,00					**23,00**	**45,00**	**166,7%**

Sasaran "Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana relevan dijadikan sasaran karena kejadian konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme merupakan bagian penting dalam kondusifitas suatu wilayah.

Pencapaian Indikator Ke 1 "Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK"

Pada Tahun 2023 Jumlah Penyelamatan dan Kebakaran yang tertangani yaitu sebanyak 83 kasus di Kota Cirebon. Tertangani disini artinya kejadian penyelamatan atau kebakaran yang dilakukan sesuai dengan Tingkat waktu tanggap (*respon time*) yaitu kurang dari 10 menit sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.

Hal ini jika dihitung jumlah penyelamatan kebakaran di Kota Cirebon dengan Penanganan sesuai Respons Time yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut :

$$\frac{83 \text{ Kejadian}}{83 \text{ Kejadian}} \times 100\% =$$

Data diatas menunjukan realisasi penanganan kebakaran sesuai dengan Tingkat waktu tanggap (respon time) yaitu kurang dari 10 menit adalah 100% dari total seluruh kejadian pada tahun 2023, berdasarkan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 84,69% maka pencapaian kinerja Indikator ini adalah $\frac{R}{T} x100\%= \frac{100}{84} x100\%$= 119,47% atau predikat pencapaian **Melebihi Target.**

Pencapaian Indikator ke-2 "Jumlah Kelurahan yang Memiliki Forum Siaga Bencana"

Indikator ini seyogyanya tidak lagi digunakan pada tahun 2023 karena dinilai tidak relevan serta merujuk pada output sebagai gantinya ditetapkan indikator baru yaitu persentase Forum siaga Bencana yang aktif, namun Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah mengupayakan penanganan bencana dengan melibatkan masyarakat sebagai penerapan prinsip G to S *(Government to Society)*, bekerjasama dengan masyarakat dinilai efektif untuk melakukan respon cepat terhadap kejadian bencana serta melakukan upaya mitigasi didalamnya, dilatarbelakangi hal tersebut ditargetkan ada 22 kelurahan yang memiliki Forum Siaga Bencana. Upaya unit pengampu urusan penanggulangan bencana seyogyanya telah memonitoring seluruh forum kelurahan yang eksisting atau sudah terbentuk di Kota Cirebon sehingga berjumlah 22 Kelurahan. Dengan sudah terbentuknya forum di 22 kelurahan tersebut maka pencapian kinerja atas indikator ini adalah $\frac{R}{T} x100\%= \frac{22}{22} x100\%$= 100%, atau **Sesuai target.**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perencanaan Strategis yang ditetapkanya RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, pada tahun 2023 indikator

kinerja untuk sasaran “Jumlah Kelurahan yang Memiliki Forum Siaga Bencana” mengalami perubahan yaitu menjadi “Persentase Forum Siaga Bencana Kelurahan Aktif” sampai dengan target akhir RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023.

Pencapaian Indikator ke-3 “Persentase Forum Siaga Bencana Kelurahan Aktif”

Dalam mencapai target sasaran Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah berupaya Penguatan Kapasiatas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan tujuan membentuk forum siaga bencana serta bekerjasama dengan masyarakat dinilai efektif untuk melakukan respon cepat terhadap kejadian bencana serta melakukan upaya mitigasi didalamnya, dilatarbelakangi hal tersebut ditargetkan 23 % Forum Siaga Bencana yang aktif.

Dari 5 kelurahan terdapat 4 kelurahan yaitu Kelurahan Kalijaga, Kelurahan Kesepuhan, Sukapura dan Kelurahan Pekiringan yang memiliki potensi bencana banjir/genangan air. Sedangkan Kelurahan Argasunya memiliki potensi bencana longsor. Persentase Forum Siaga Bencana Aktif atau yang sudah disahkan ini diharapkan menjadi inisiator terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana, berikut perhitungan pencapaian target Persentase Forum Siaga Bencana Kelurahan Aktif yaitu, jumlah forum siaga bencana aktif berjumlah 45 forum yang tersebar di seluruh wilayah Kota Cirebon , sementara target pada tahun 2023 adalah 27 Forum aktif sehingga pencapaian nya adalah 166.7%

Evaluasi Sasaran 4.3 "Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana"

Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon melakukan berbagai upaya penguatan pada sektor pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, baik bencana alam maupun non-alam seperti bencana kebakaran, upaya tersebut menunjukan hasil positif dimana capaian kinerja atas sasaran 4.3 "Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana" memilki rata-rata capaian **Melebihi target**. Program yang mendudukung secara langsung sasaran ini adalah sebagai berikut:

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	6.332.527.885,00	6.290.530.500,00	99,337%
Program Penanggulangan Bencana	1.242.481.268,00	1.208.924.808,00	96,92%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			98,44%

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel II. 100
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalah
Sasaran 4.3 “Meningkatnya Pencegahan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana” Tahun 2023

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Soliditas Tim Pemadam Kebakaran Pemda Kota Cirebon, dibuktikanya dengan prestasi dalam berbagai kompetisi. • Tumbuhnya beberapa komunitas peduli lingkungan dan bencana yang menjadi salah satu alternative tanga bantuan dalam penanganan bencana.	• Belum terpenuhinya tenaga fungsional pemadam kebakara sesuai dengan jumlah Analisa Beban Kerja. • Di lingkup kebencanaan alam, Tenaga ASN dalam penanganan bencana masih belum memadai/kurang dari kebutuhan pada Analisa Beban Kerja • Forum Siaga Bencana masih belum sepenuhnya di isi oleh orang yang memilikikompetensi memadai tentang kebencanaan. • Belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk Forum Siaga Bencana di setiap Kelurahan.	• Merekrut Tenaga Fungsional Pemadam Kebakaran sesuai jumlah Analisa Beban Kerja yang telah disusun. • Merekrut Teanaga Fungsional lingkup kebencanaan sesuai jumlah Analisa Beban Kerja yang telah disusun. • Melakukan diklat baik bagi ASN serta bagi warga masyarakat, khususnya yang menjadi bagian dari Forum Siaga Bencana. • Melakukan renovasi ataupun peningkatan sarana dan prasaran bagi Forum Siaga Bencana di tiap kelurahan, seperti menyediakan alat-alat kedaruratan bencana seperti Perahu Karet di daerah rawan banjir.

2.3.4 Akuntabilitas keuangan

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pembiayaan program kegiatan tersebut didukung dengan Anggaran dan Pendapat Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II. 101
Data Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023		%
		ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	
1	Belanja Operasi	1.423.166.807.635,00	1.345.400.892.731,00	**94,54%**
3	Belanja Modal	118.096.420.638,00	92.790.771.193,00	**78,57%**
4	Belanja Tidak terduga	41.851.459.291,00	6.596.622.097,00	**15,76%**
	Jumlah	1.583.114.687.564,00	1.444.788.286.021,00	**91,26%**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, di olah

Data diatas menunjukan realisasi anggaran Belanja Pemerintah daerah Kota Cirebon pada tahun 2023 cukup tinggi yaitu 91,21%. Jika disandingkan dengan rata-rata pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang memiliki rata-rata capaian kinerja 101,5% maka kinerja dapat disimpulkan cukup efektif dan efesien.

Dalam rangka mengukur efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran pun, kami analisa hal tersebut dengan menyandingkan data pecapaian kinerja pada setiap sasaran dalam RPJMD dengan realisasi anggaran dari seluruh program yang menopang pencapaian sasaran tersebut dimana efesien jika capaian kinerja lebih besar diabanding realisasi anggaran , sebagai berikut :

Tabel II. 102
Data Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2023

NO	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Rata-Rata Realisasi Program Anggaran (%)	Selisih Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
VISI: SEHATI KITA WUJUDKAN CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN SEJARAH						
MISI 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Unggul Dalam Segala Bidang						
Tujuan :						
1	tujuan :Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	4	97,5%	97,04%		
1.1	Meningkatan akses dan mutu pendidikan	2	96,72%	95,91%	99,13%	-3,22%
1.2	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	1	110,98%	81,05%	95,74%	-14,69%
1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	2	99,21%	103,23%	98,6%	4,63%
1.4	Terkendalinya jumlah penduduk	1	106,00%	48,94%	76,34%	-27,40%
1.5	Menurunnya Tingkat Pengangguran	3	102,13%	104,73%	75,51%	29,22%
1.6	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda	2	145,71%	181,35%	99,73%	81,62%
1.7	Meningkatnya pengarusutama an gender dan perlindungan anak	2	99,97%	99,98%	78,62%	21,36%

NO	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Rata-Rata Realisasi Program Anggaran (%)	Selisih Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
1.8	Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon	2	90,79%	85,51%	75,32%	10,19%
1.9	Berkurangnya Penduduk Miskin	1	85,15%	90,29%	91,25%	-0,96%
1.10	Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	2	100,24%	101,785%	79,63%	22,16%
1.11	Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	1	100%	100%	99,39%	-0,61%
1.12	Meningkatnya kerukunan umat Beragama	1	100%	100%	52,005%	48,00%
1.13	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	1	100,34%	100,34%	99,22%	1,12%
1.14	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan	3	110,42%	82,5%	81,63%	0,87%
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif						
	Tujuan:					
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan	1	82,50%	92,39%		
	Sasaran :					

NO	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Rata-Rata Realisasi Program Anggaran (%)	Selisih Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
2.1	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan					
2.2	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur	4	123,40%	118,23%	91,63%	26,60%
2.3	Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah	2	99,70%	75%	76,02%	-1,02%
2.4	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	1	103,03%	102,70%	55,14%	47,56%
2.5	Meningkatnya Maturitas SPIP	1	100%	75%	94,09%	-19,09%
2.6	Meningkatnya Pelayanan Publik	2	101,04%	108,14%	92,74%	15,40%
2.7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2	103,06%	100,21%	65,34%	34,87%
2.8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	1	89,29%	84,47%	81,44%	3,03%
2.9	Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD	3	91,67%	95,20%	85,12%	10,08%
2.10	Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan terintegrasi dalam menunjang *Cirebon Smart City*	2	102,26%	110,90%	76,76%	34,14%
2.11	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	2	99,68%	96,14%	82,17%	13,97%
2.12	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	98,90%	115,14%	89,20%	25,94%

NO	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Rata-Rata Realisasi Program Anggaran (%)	Selisih Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan						
Tujuan :						
3	Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1	93,57%	88,07%		
Sasaran :						
3.1	Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan	1	100%	100%	87,60%	12,40%
3.2	Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat	2	100%			
3..3	Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase.	1	115,88%	115,88%	83,24%	32,64%
3.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	2	75,52%	75,52%	80,84%	-5,32%
Misi 4 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif						
Tujuan :						
4	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan	1	97,74%	98%		

NO	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Rata-Rata Realisasi Program Anggaran (%)	Selisih Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
	Peraturan PerundangUndangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan					
Sasaran :						
4.1	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	2	101,31%	100%	76,26%	23,74%
4.2	Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional	1	100%	100%	91,10%	8,90%
4.3	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam	2	108,82%	133,75%	98,32%	35,43%

Dari Tabel diatas terdapat beberapa kriteria dari perbandingan antara pencapaian kienerja pada setiap sasaran dengan persentase realisasi anggaran atau realisasi yang di belanjakan dari Anggaran yang disediakan, disebut efesien dalam penggunaan anggaran jika capaian kinerja melebihi penyerapan anggaran, tidak efesien jika pencapaian kinerja di bawah realisasipenyerapan anggaran program, berikut adalah kriteria tersebut :

1. Terdapat sasaran yang masuk pada kriteria efektif dan paling efisien yaitu Sasaran 1.6 “Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda” dengan efesiensi hingga 81,62% dimana rata-rata pencapaian kinerja sasaran hingga 181,35% sementara realisasi program anggaran yang mendukung sasaran tersebut adalah 99,73%.
2. Terdapat sasaran dengan rata-rata capaian indikator kinerja paling rendah yaitu pada sasaran 1.4 yaitu “Terkendalinya jumlah penduduk“ dengan capaian 48,94s%, sementara realisasi anggaran pada program yang mendukung sasaran

mencapai 76,34%, selisih -27,40% (-) tidak efesien. Berdasarkan analisa, bahwa realisasi pencapaian indikator dalam sasaran ini yaitu laju pertumbuhan penduduk sesungguhnya telah cukup baik karena memiliki capaian yang sejalan dengan perencanaan strategis nasional dalam pengedalian pertumbuhan penduduk saat ini , namun penentuan target yang terlalu ambisius dengan menekan angka kelahiran begitu rendah ternyata tidak tepat dikarenakan perubahan trend pertumbuhan penduduk di Indonesia yang cukup signifikan sehingga mengubah arah sasaran strategis nasional. Pada tahun 2024 menyesuaikan arah kebijakan nasional dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, Pemerintah Daerah Kota Cirebontelah memperbaiki target tersebut.

Metode analisa efesiensi penggunaan sumberdaya ini merupakan metode sederhana dalam menggambarkan secara umum tingkat efesiensi capaian kinerja terhadap penggunaan sumber daya (anggaran), sebagai upaya penelitian lebih lanjut terhadap efektifitas dan efesiensi kinerja agar melakukan analisa lebih dalam terhadap capaian kinerja disetiap indikator, berikut faktor-faktor yang mendukung serta permasalahanya yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.

2.3.5 Inovasi dan Prestasi

Pada tahun 20223 Pemerintah Daerah Kota Cirebon memiliki fokus pada optimalisasi implementasi Inovasi dan Prestasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, upaya optimasilasasi dan pengembangan inovasi yang ada juga diapresiasi dengan diterimanya penghargaan tingkat Nasional dari Kementerian Dalam Negeri, atas Capaian Indeks Inovasi Daerah Kategori Inovatif. Inovasi dan Prestasi yang diraih diurai sesuai dengan Area Misi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Sebagai Berikut :

No	Inovasi
1.	**MISI 1 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam segala Bidang**
	1. **Kontes Curhat**

No	Inovasi
	(Konseling tentang segala hal media offline/online, dalam rangka memfasilitasi konseling masyarakat Kota Cirebon yang bertujuan untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat). 2. **Wadul Bae** (Warga Peduli Bocah Lan Emboke penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak secara terpadu baik dari sisi proses hukum pelaku maupun kesehatan korban). 3. **Panjer Pahala** (Pengantaran dan Penjemputan Anak Hebat tercinta dan difabel) 4. **Kula Eksis** (Kelompok warga peduli ekonomi disabilitas) 5. **Dipandu Sobat** (Digital Pemantauan dan Pengaduan Masalah Sosial secara Akurat) **6. Cirebon Ngaber** (Ngalap Berkah, Penanganan masalah sosial secara Lomprehensif dan Terintegrasi). **7. Cirebon Lengko** (Sistem Layanan Elektronik Kesehatan Online mempermudah pengelolaan data Kesehatan bagi Masyarakat). **8. Pentas Purnama** (Pementasan Budaya dan Seni pada setiap Bulan Purnama Untuk Meningkatkan MInat Wisata)
2.	**MISI 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif**
	1. SAMPEAN (Sistem digitalisasi Pengelolaan dan Pengawasan Kehadiran PNS di Lingkungan Pemda Kota Cirebon) **2. Cirebon 112** (Command Center dan Layanan Kedaruratan yang mengintegrasikan berbagai layanan kedaruratan, kesehatan,trantibum, kebakakaran dalam satu jalur layanan cepat) **3. Cirebon Satu Data** (*Portal Open* Data di Kota Cirebon, menyediakan data secara komprehensif untuk berbagai keperluan, baik untuk perencanaan pembangunan daerah maupun penelitian dan lain-lain) **4. e-Library**

No	Inovasi
	(Perpustakaan Digital sebagai penunjang perpustakaan konvensional) **5. e-SAKIP** (Digitalisasi sistem pelaporan akuntabilitas kinerja) **6. Kelakon Pitulas** (Percetakan KTP-el bagi penduduk yang baru berusia 17 tahun, dengan syarat penduduk tersebut sudah merekam biometric sebelum berumur 17 tahun) 7. **Kelakon Ning RW** Pelayanan jemput bola perekaman biometric ke RW **8. Kelakon Buntel** Pelayanan terintegritas surat pindah atau pindah datang dengan Kartu keluarga dan KTP-el **9. Kelakon Ditunggoni** Pelayanan pencetakan KTP-el yang diselesaikan dalam waktu 3 – 5 menit **10. Kelakon NIng Kampus** pelayanan perekaman biometric dan pencetakan KTP-el silakukan di lingkungan kampus **11. Kelakon Ning Bocah** Pelayanan Kartu Identitas Anak melalui lembaga pendidikan formal dan informal untuk anak usia 0 – 17 tahun **12. Brojol Aja Klalen** Pendaftaran akta kelahiran secara online **13. UIS Tamat** (uang Insentive Akta Kematian) Insentive atau uang transport sebesar Rp. 50.000,00 yang diberikan kepada pengurus RT/RW yang melaporkan kematian warganya **14. Kemat Kakek** (Akta Kematian Kartu keluarga dan KTP-el) pelayanan terintegrasi bagi setiap warga yang kematian **15. Simadu Kakeku** Sistem Terpadu Akta Perkawinan, KTP-el , dan kartu keluarga) pelayanan terintegrasi bagi setiap warga yang mendaftarkan Akta Perkawinan **16. Padu Enake** (Pelayanan Terpadu e-KTP, Kartu keluarga dan Akta Perceraian) pelayanan terintegrasi bagi setiap warga yang mendaftarkan Akta Perceraian

No	Inovasi
3.	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan**
	1. Cirebon Kudu Eling (Kolaborasi Penduduk dalam Pengelolaan Lingkungan dalam meningkatkan kualitas lingkungan bertujuan agar Kota Cirebon menjadi *liveable city*) **2. Smart Pju** (Sistem digitalisasi penerangan lampu jalan, dimana setiap ON atau Lampu Off dapat terdata secara digital by real time)
4.	**Misi 4 Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban yang Kondusif**
	1. Cirebon 112 (Command Center dan Layanan Kedaruratan yang mengintegrasikan berbagai layanan kedaruratan, kesehatan,trantibum, kebakakaran dalam satu jalur layanan cepat) **2. Sedulur** Sistem Pelayanan Terpadu Kelurahan, melalui digitalisasi pelayanan di lingkup kelurahan **3. Cirebon Matahatiku** Memantau Kota Penuh Bahagia dengan CCTV-Ku, Sistem Pelayanan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat, mempermudah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di ruang publik dengan mengintegrasikan sistem keamanan CCTV **4. ATCS (Area Trafic Control System)** (Sistem Kendali Lalu Lintas Kendaraan dengan menyelaraskan waktu Lampu Merah)

PRESTASI KINERJA TAHUN 2023

NO	PENGHARGAAN / PRESTASI	PERANGKAT DAERAH
1	Juara 1 Lomba Pencak Silat pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tingkat Nasional Tahun 2023	Dinas Pendidikan

NO	PENGHARGAAN / PRESTASI	PERANGKAT DAERAH
2	Juara 3 Lomba Pencak Silat pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tingkat Nasional Tahun 2023	Dinas Pendidikan
3	Juara 3 Lomba Biantara Jenjang SD dalam festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Banten Tahun 2023	Dinas Pendidikan
4	Penghargaan kepada Dinas Pendidikan Kota Cirebon sebagai Kabupaten /Kota Tertinggi dalam pemanfaatan google workspace for education dama pembelajaran Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Balai besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat.	Dinas Pendidikan
5	Penghargaan kepada Pemerintah Kota Cirebon sebagai Agensi Terresponsif ke -2 Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat.	Dinas Pendidikan
6	Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat Lomba Pantomim, FLS2N Tahun 2023	Dinas Pendidikan
7	Kriya Terbaik Berbahan Baku Logam, Dekranasda Jabar Award 2023, Tingkat Provinsi Jawa Barat	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian
8	Piala Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kepada Pemerintah Kota Cirebon, atas prestasi Anugerah Parahita Ekapraya Kategori **Pratama** Tahun 2023.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
9	Piagam Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kepada Pemerintah Kota Cirebon, atas prestasi sebagai Kota Layak Anak Kategori **Pratama** Tahun 2023.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

NO	PENGHARGAAN / PRESTASI	PERANGKAT DAERAH
10	Piala Penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon, atas Sinergitas, Kepedulian dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak "Menuju Indonesia Emas, Bebas Kekerasan terhadap Anak" Tahun 2023.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
11	Piagam Penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon Kepada Pemerintah Kota Cirebon, atas Sinergitas, Kepedulian dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak "Menuju Indonesia Emas, Bebas Kekerasan terhadap Anak" Tahun 2023.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
12	Piagam Penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon Kepada DP3APPKB Kota Cirebon Tahun 2023.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
13	Piagam Penghargaan dari Pemerintah Kota Cirebon Kepada DP3APPKB, atas prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dengan Nilai 77,45 Predikat BB (**Sangat Baik**) Peringkat Ke-7 dari 32 OPD.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
14	Piagam Penghargaan Public Services of The Year 2023 dari Markplus Institute Kepada DP3APPKB Kota Cirebon.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
15	Piagam Penghargaan dari BKKBN Jawa Barat Kepada DP3APPKB Kota Cirebon, atas Partisipasinya Dalam Pelaksanaan Pekan Pelayanan KB GEMPUR MKJP yang dilaksanakan pada tanggal 02 – 11 Mei 2023 Dengan Capaian diatas 100%.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
16	Piagam Penghargaan Program Kampung Iklim Tahun 2023 Kepada RW 06 Simaja Utara, Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi, Kategori Madya.	Dinas Lingkungan Hidup
17	Penghargaan Program Sekolah Adiwiyata Tahun 2023 Kepada SMP Negeri 7 Kota Cirebon, Tingkat Nasional.	Dinas Lingkungan Hidup
18	Penghargaan Program Sekolah Adiwiyata Tahun 2023 Kepada SMP Negeri 9 Kota Cirebon, Tingkat Provinsi Jawa Barat.	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PENGHARGAAN / PRESTASI	PERANGKAT DAERAH
19	Penghargaan Program Sekolah Adiwiyata Tahun 2023 Kepada SMP Negeri 4 Kota Cirebon, Tingkat Provinsi Jawa Barat.	Dinas Lingkungan Hidup
20	Penghargaan Swasti Saba Wiwerda Dara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Kota Cirebon atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023.	Dinas Kesehatan
21	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 kepada SMP Negeri 4 Kota Cirebon dan SMP Negeri 9 Kota Cirebon.	Dinas Pendidikan
22	Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atas keberhasilan dalam mencapai Predikat "Baik" Sistem Merit dan Predikat "Baik" Kualitas Pengisian JPT.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23	Piagam Penghargaan Apresiasi Mitra Kerja Terbaik Kantor Regional III BKN Kepada Pemerintah Kota Cirebon dengan Peringkat II Kategori Pelayanan Pengangkatan ASN.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24	Piagam Penghargaan BKN Award 2023 Special Mention - Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian Kepada Pemerintah Kota Cirebon.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	Perolehan Perak Cabang Olahraga Sepeda Nomor Pertandingan Balap Sepeda Penny Farthing pada Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional (FORNAS) VII Jawa Barat 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
26	Perolehan Perak Cabang Olahraga Sepeda Nomor Pertandingan Atraksi Sepeda Onthel Putra pada Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional (FORNAS) VII Jawa Barat 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
27	Perolehan Perak Cabang Olahraga Sepeda Nomor Pertandingan Atraksi Sepeda Onthel Putri pada Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional (FORNAS) VII Jawa Barat 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
28	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Sepeda Nomor Pertandingan Atraksi Sepeda Onthel Putri pada Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional (FORNAS) VII Jawa Barat 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PENGHARGAAN / PRESTASI	PERANGKAT DAERAH
29	Perolehan Emas Cabang Olahraga Aerobik & Fitness Nomor Pertandingan Under 40th pada Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional (FORNAS) VII Jawa Barat 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
30	Perolehan Emas Cabang Olahraga Aerobik & Fitness Nomor Pertandingan ACGroup pada Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional (FORNAS) VII Jawa Barat 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
31	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Push Bike Nomor Pertandingan Novice PI. U-6 Puteri pada Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional (FORNAS) VII Jawa Barat 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
32	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Push Bike Nomor Pertandingan Novice PI. U-3 Putera pada Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional (FORNAS) VII Jawa Barat 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
33	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Push Bike Nomor Pertandingan Novice PI. U-6 Putera pada Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional (FORNAS) VII Jawa Barat 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
34	Perolehan Perak dan Perunggu Cabang Olahraga Reang Nomor Pertandingan Perorangan Puteri pada POPNAS XVI Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
35	Perolehan Emas Cabang Olahraga Bola Basket Beregu Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023	Dinas Pemuda dan Olahraga
36	Perolehan Emas Cabang Olahraga Atletik Kelas 5000 M Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
37	Perolehan Emas Cabang Olahraga Atletik Kelas 2000 M Steeplechase Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
38	Perolehan Emas Cabang Olahraga Gulat Kelas Gaya Grego Kelas 71 Kg Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PENGHARGAAN / PRESTASI	PERANGKAT DAERAH
39	Perolehan Emas Cabang Olahraga Taekwondo Kelas Under 55 Kg 51,1-55,0 Kg Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
40	Perolehan Perak Cabang Olahraga Atletik Kelas 1500 M Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
41	Perolehan Perak Cabang Olahraga Panjat Tebing Kelas Boulder Perorangan Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
42	Perolehan Perak Cabang Olahraga Bola Basket Beregu Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023	Dinas Pemuda dan Olahraga
43	Perolehan Perak Cabang Olahraga Atletik Kelas 5000 M Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023	Dinas Pemuda dan Olahraga
44	Perolehan Perak Cabang Olahraga Senam Kelas Gelang-gelang (Artistik) Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
45	Perolehan Perak Cabang Olahraga Senam Kelas Kuda Pelana (Artistik) Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
46	Perolehan Perak Cabang Olahraga Gulat Kelas Gaya Bebas Kelas 53 Kg Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
47	Perolehan Perak Cabang Olahraga Gulat Kelas Gaya Bebas Kelas 65 Kg Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
48	Perolehan Perak Cabang Olahraga Renang Kelas 50 M Gaya Punggung Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023	Dinas Pemuda dan Olahraga
49	Perolehan Perak Cabang Olahraga Gulat Kelas Gaya Bebas Kelas 71 Kg Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
50	Perolehan Perak Cabang Olahraga Renang Kelas 100 M Gaya Punggung Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
51	Perolehan Perak Cabang Olahraga Renang Kelas 200 M Gaya Punggung Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PENGHARGAAN / PRESTASI	PERANGKAT DAERAH
52	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Tinju Kelas 52 Kg - 54 Kg pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
53	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Atletik Kelas 4x400 M Estafet Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
54	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Pencak Silat Kelas H, 67 - 71 Kg Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
55	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Pencak Silat Kelas E, 55 - 59 Kg Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
56	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Pencak Silat Kelas C, 47 - 51 Kg Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
57	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Atletik Kelas 1500 M Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
58	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Atletik Kelas 800 M Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
59	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Senam Kelas Beregu (Artistik) Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
60	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Senam Kelas Palang Tunggal (Artistik) Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
61	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Senam Kelas Palang Sejajar (Artistik) Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
62	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Senam Kelas Bola (Ritmik) Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
63	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Panahan Kelas Divisi Recurve Beregu Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PENGHARGAAN / PRESTASI	PERANGKAT DAERAH
64	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Gulat Kelas Gaya Grego Kelas 55 Kg Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
65	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Gulat Kelas Gaya Grego Kelas 51 Kg Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
66	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Karate Kelas Kumite - 53 Kg Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
67	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Karate Kelas Kumite - 61 Kg Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
68	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Taekwondo Kelas Under 49 Kg 46,1 - 49,0 Kg Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
69	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Gulat Kelas Gaya Bebas Kelas 46 Kg Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
70	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Gulat Kelas Gaya Bebas Kelas 48 Kg Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
71	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Taekwondo Kelas Under 59 Kg 55,1 - 59,0 Kg Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
72	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Taekwondo Kelas Under 42 Kg Max 42,0 Kg Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
73	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Karate Kelas Kumite - 48 Kg Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
74	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Renang Kelas 800 M Gaya Bebas Putri pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PENGHARGAAN / PRESTASI	PERANGKAT DAERAH
75	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Gulat Kelas Gaya Bebas Kelas 90 Kg Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
76	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Taekwondo Kelas Under 51 Kg 48,1-51,0 Kg Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
77	Perolehan Perunggu Cabang Olahraga Taekwondo Kelas Recoqnize Poomsae Individual Putra pada Event Kejuaran POPDA XIII Tahun 2023.	Dinas Pemuda dan Olahraga
78	Penghargan dari Ombudsman Terkait Kepatuhan Pelayanan Publik dengan Nilai “Tertinggi”	Sekretariat Daerah dan Seluruh Perangkat Daerah
79	Penghargaan dari KEMENPAN RB terhadap implementasi Reformasi Birokrasi dengan predikat “Sangat Baik”	Sekretariat Daerah dan Seluruh Perangkat Daerah
80	Penghargaan dari KEMENPAN RB terhadap implementasi AKuntabilotas Jinerja dengan predikat “Baik”	Sekretariat Daerah dan Seluruh Perangkat Daerah

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Selain itu, dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah terhadap daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pelaksanaan tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN serta program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi misinya. Adapun informasi capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Negara sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Cirebon

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, terdapat perubahan paradigma mengenai penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pertama, penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak lagi berdasarkan kegiatan fisik atau non fisik melainkan didasarkan pada jenis dan karakterisktik substansi Urusan Pemerintahan serta kewenangan Pemerintah Pusat. Kedua, prinsip penugasan kepada daerah dalam penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan Urusan Pemerintahan selain pembinaan dan pengawasan.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Cirebon tidak melaksanakan tugas pembantuan, karena tidak ada penugasan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ataupun sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, sehingga pada Tahun 2023 tidak ada capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon

3.1.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar penugasan.

Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, maka untuk Tahun 2023 tidak ada target pelaksanaan dalam kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

3.1.2. Realisasi

Tabel III.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kota Cirebon

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas	Program/Kegiatan/ Output/Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	-	Nihil	-	

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon

3.2.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar penugasan.

Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi, maka untuk Tahun 2023 tidak ada target pelaksanaan dalam kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

3.2.2. Realisasi

Tabel III.2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat
yang dilaksanakan oleh Daerah Kota Cirebon

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas	Program/Kegiatan/ Output/Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	-	Nihil	-	

3.3. Permasalahan dan Kendala

Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat maka untuk Tahun 2023 tidak ada permasalahan/kendala dalam kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat maka untuk Tahun 2023 tidak ada tindak lanjut dalam kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

BAB IV
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelyanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan serta Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Pelayanan Minimal. Jenis pelayanan dasar pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon meliputi sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar;
2. Pendidikan Kesetaraan; dan
3. Pendidikan Anak Usia Dini.Target Pencapaian SPM oleh Daerah

4.1.2 Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar tingkat Kota Cirebon pada Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan Kota Cirebon ini disesuaikan dengan ketentuan dasar hukum diatasnya, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Penyederhanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon hasil pelaksanaan Pembangunan Pendidikan Kota Cirebon, yang diukur dari aspek pelayanan minimal melalui tiga jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (Paud);
2. Pendidikan Dasar, yaitu jumlah warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SDMI, SMP/MTs);
3. Pendidikan Kesetaraan, yaitu jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Atas dasar tersebut Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2023 mencapai ***99.91%*** atau ***Tuntas Utama*** dengan capaian indikator sebagai berikut ::

Tabel IV.1

Capaian Indikator Urusan Pendidikan

No.	Urusan	Program	Target	Ket
1.	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	
2.		Pendidikan Dasar	100%	
3.		Pendidikan Kesetaraan	100%	

4.1.3 Realisasi

Tabel IV.2

Target dan Realisasi Capaian Urusan Pendidikan

No.	Urusan	Program	Target	Realisasi	Ket
1.	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	99.74%	
2.		Pendidikan Dasar	100%	100%	
3.		Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	

4.1.4 Alokasi Anggaran

Anggaran yang bersumber dari dana APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2023 dalam rangka terkait penerapan dan pencapaian SPM oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini akan dijelaskan tingkat capaian penyerapan anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel IV.3

Anggaran SPM Urusan Pendidikan

No.	Anggaran	PAGU	Anggaran Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Perengkat Daerah(%)
1.	APBD Kota Cirebon	1,576,560,109,095,-		
2.	Anggaran Perangkat Daerah	381,001,932,755,-	24.17%	2,32%
3.	Anggaran Penerapan SPM	36,543,103,721,-		9.59%

Dari atbel diatas dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk perangkat daerah penunjang urusan pendidikan sebesar **Rp.381.001.932.755** *(Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lina Rupiah),* sedangkan untuk anggaran penerapan Standar Pelayanan Minimal pada urusan pendidikan berjumlah **Rp.36.543.103.721,-** *(Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)* atau 9.59% dari total anggaran perangkat daerah.

Anggaran penerapan SPM tersebut dialokasikan pada Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel IV.3

Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Pendidikan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA CIREBON				**47,208,353,721**	**47,093,388,963**	**99.76%**
1	**PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**				**2,288,987,513**	**2,224,295,475**	**97.17%**
	1	**Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD**			**2,155,506,500**	**2,091,816,500**	**97.05%**

		1	**Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun**	**Peserta didik**	0	0	**0%**
		2	**Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun**	**Kegiatan**	0	0	**0%**
		3	**Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan**	**Peserta didik**	9,712,500	9,712,500	**100.00%**
		4	**Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa**	**Peserta didik**	2,145,794,000	2,082,104,000	**97.03%**
		5	**Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung**	**Peserta didik**	0	0	**0%**
		6	**Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai**	**Peserta didik**	0	0	**0%**

			daerah terdepan, terluar, dan tertinggal				
	JUMLAH INDIKATOR				**2,155,506,500**	**2,091,816,500**	**97.05%**
	2	**Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan**			**133,481,013**	**132,478,975**	**99.25%**
		1	**Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan**	**Kegiatan**	0	0	**0%**
		2	**Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan**	**Kegiatan**	0	0	**0%**
		3	**Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran**	**Kegiatan**	50,478,975	50,478,975	**100.00%**
		4	**Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun**	**Kegiatan**	0	0	**0%**

		5	**Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak**	**Kegiatan**	83,002,038	82,000,000	**98.79%**
	JUMLAH INDIKATOR				**133,481,013**	**132,478,975**	**99.25%**
	3	**Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)**			**0**	**0**	**0.00%**
		1	**Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun**	**Pendidik dan tenaga kependidikan**	0	0	**0%**
		2	**Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan**	**Pendidik dan tenaga kependidikan**	0	0	**0%**
		3	**Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**	**Guru**	0	0	**0%**
		4	**Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif**	**Kegiatan**	0	0	**0%**

		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K20220131031456			0	0	0.00%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%

			tenaga kependidikan				
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM				2,288,987,513	2,224,295,475	97.17%
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR				44,730,116,208	44,679,843,488	99.89%
	5	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			10,476,000,000	10,476,000,000	100.00%
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	0%
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	10,476,000,000	10,476,000,000	100.00%
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai	Peserta didik	0	0	0%

			daerah terdepan, terluar, dan tertinggal				
	JUMLAH INDIKATOR				10,476,000,000	10,476,000,000	100.00%
	6	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			0	0	0.00%
		1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	0%
		2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	7	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K20220131032010			34,254,116,208	34,203,843,488	99.85%
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali	Kegiatan	0	0	0%

			dalam 1 (satu) tahun				
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	34,254,116,208	34,203,843,488	99.85%
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				34,254,116,208	34,203,843,488	99.85%
	8	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			0	0	0.00%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%

			dalam 1 (satu) tahun				
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru	0	0	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai	Kegiatan	0	0	0%

			pengawas sekolah				
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	9	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			0	0	0.00%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM				44,730,116,208	44,679,843,488	99.89%

3	**PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN**				**189,250,000**	**189,250,000**	**100.00%**
	10	**Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)**			**189,250,000**	**189,250,000**	**100.00%**
		1	**Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah**	**Peserta didik**	0	0	**0%**
		2	**Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus**	**Peserta didik**	189,250,000	189,250,000	**100.00%**
		3	**Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung**	**Peserta didik**	0	0	**0%**
		4	**Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal**	**Peserta didik**	0	0	**0%**
	JUMLAH INDIKATOR				**189,250,000**	**189,250,000**	**100.00%**
	11	**Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)**			**0**	**0**	**0.00%**
		1	**Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut**	**Unit komunitas**	0	0	**0%**

		2	Pelatihan/seminar/l okakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	12	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)			0	0	0.00%
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	0	0	0%
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi	Kegiatan	0	0	0%

			terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran				
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	13	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)			0	0	0.00%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggar	Kegiatan	0	0	0%

			akan pendidikan inklusif				
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	14	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)			0	0	0.00%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%

		3	kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM				189,250,000	189,250,000	100.00%

4.1.5 Dukungan Personil

Jumlah personil dalam rangka pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan berjumlah 1735 personil dengan jumlah laki-laki 605 personil dan 1130 Perempuan. Sedangkan kalau dilihat dari tingkat pendidikan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pendidikan SMP 8 orang
   L : 8 orang
   P : 0 orang
2. Pendidikan SLTA 57 orang
   L : 41 orang
   P : 16 orang
3. Pendidikan D-I 1 orang
   L : 0 orang
   P : 1 orang
4. Pendidikan D-II 25 orang
   L : 11 orang
   P : 14 orang
5. Pendidikan D-III 14 orang
   L : 7 orang
   P : 7 orang
6. Pendidikan D-IV 3 orang
   L : 3 orang
   P : 0 orang
7. Pendidikan S-1 1546 orang

L : 501 orang
P : 1045 orang

8. Pendidikan S-2 81 orang
L : 34 orang
P : 47 orang

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan ditemukan beberapa kendala atau permasalahan diantaranya :

1. Adanya perubahan data dikarenakan adanya peubahan jumlah siswa serta jumlah tenaga kependidikan di tahun berjalan;
2. Adanya siswa yang bukan domisili kota sehingga terjadinya tumpang tindih terhadap penganggaran
3. Belum adnaya anggaran yang cukup untuk pelaksanaan penerpan SPM
4. Adanya refocusng anggaran
5. Data Dapodik masih belum maksimal dalam sisi penginputan
6. Masih kurangnya pemahaman terhadap SPM sehingga kesulitan dalam penyampaian program/kegiatan di bidang-bidang.

4.2 Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelyanan Minimal, Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tantang Pedoman Penerapan Pelayanan Minimal**.** Pemerintah Kota Cirebon menyelenggarakan Jenis Pelayanan SPM Bidang Urusan Kesehatan antara lain :

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4) Pelayanan Kesehatan Balita
5) Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7) Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
8) Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
9) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
10) Pelayanan Kesehatan otang dengan gangguan jiwa berat
11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosism dan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

4.2.2 Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Penentuan program prioritas bidang kesehatan dengan mempertimbangkan keterbatasan alokasi dana dan urgensi yang diformulasikan ke dalam arah dan kebijakan, dimana di dalamnya terdiri dari tujuan pelaksanaan program, sasaran yang hendak dicapai, dan indikator pencapaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan program. Berikut ini adalah target pencapaian SPM Pemerintah Kota Cirebon dibandingkan dengan target Nasional (Kemenkes) Tahun 2023.

Tabel IV.4

Target Capaian SPM Urusan Kesehatan

.No.	Program/Kegiatan	Target	Ket
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	100%	
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	100%	
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	
10.	Pelayanan Kesehatan otang denganganggu an jiwa berat	100%	
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosism dan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	100%	

4.2.3 Realisasi

Tabel IV.5

Target Cdan Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan

.No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Ket
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	95.50%	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	95.20%	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	98.56%	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	99.01%	

5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	88.82%	
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	97.08%	
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	100%	93.67%	
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	100%	99.72%	
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	99.91%	
10.	Pelayanan Kesehatan otang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosism dan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	100%	100%	

4.2.4. Alokasi Anggaran

Program dan kegiatan bidang kesehatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam Komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Untuk merealisasikan program tersebut melalui Pemerintah Kota Cirebon urusan kesehatan mendapatkan anggaran sebagai berikut :

Tabel IV.6

Pagu Anggaran SPM Urusan Kesehatan

No.	Anggaran	PAGU	Anggaran Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Perengkat Daerah(%)
1.	APBD Kota Cirebon	1,576,560,109,095,-		
2.	Anggaran Perangkat Daerah	129.232.670.646,-	8.20%	0.78%
3.	Anggaran Penerapan SPM	12.360.625.081,-		9.56%

Dari tabel diatas dapat terlihat dengan anggaran urusan kesehatan mendapatkan 0.78% anggaran untuk penerapan SPM Urusan kesehatan dari total anggaran perangkat daerah sebesar Rp. 129.232.670.646,- *(Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).* Berikut rincian atas program/kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD :

Tabel IV.7

Kegiatan dan Anggaran SPM Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA CIREBON				**12,360,625,081**	**7,117,235,061**	**57.58%**
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**12,360,625,081**	**7,117,235,061**	**57.58%**
	1	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**12,360,625,081**	**7,117,235,061**	**57.58%**
		1	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil**	**Orang**	2,172,506,989	927,532,625	**42.69%**
		2	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin**	**Orang**	622,215,300	382,195,000	**61.42%**
		3	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir**	**Orang**	499,373,450	251,173,433	**50.30%**
		4	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita**	**Orang**	921,420,550	369,829,800	**40.14%**
		5	**Pengelolaan pelayanan kesehatan pada**	**Orang**	531,749,900	189,615,910	**35.66%**

			Usia Pendidikan Dasar				
		6	**Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif**	**Orang**	497,528,708	251,612,583	**50.57%**
		7	**Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut**	**Orang**	728,711,450	275,173,750	**37.76%**
		8	**Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi**	**Orang**	95,164,982	51,942,266	**54.58%**
		9	**Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus**	**Orang**	76,133,732	20,492,500	**26.92%**
		10	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**	**Orang**	110,779,490	61,258,865	**55.30%**
		11	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	**Orang**	672,051,350	601,681,030	**89.53%**
		12	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV**	**Orang**	908,147,750	596,655,250	**65.70%**
		13	**Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)**	**Dokumen**	2,755,203,455	1,772,538,000	**64.33%**
		14	**Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana**	**Dokumen**	1,769,637,975	1,365,534,049	**77.16%**
	JUMLAH INDIKATOR				**12,360,625,081**	**7,117,235,061**	**57.58%**

	JUMLAH PROGRAM	**12,360,625,081**	**7,117,235,061**	**57.58%**
KEGIATAN LAINNYA				
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA**			

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan penerapan SPM urusan kesehatan selain dukungan anggaran, pada Tahun 2023 juga ditunjang dengan dukungan personil dengan jumlah 1270 orang dengan jumlah laki-laki 365 orang dan 905 orang perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan dapat di rinci sebagai berikut :

1. Pendidikan SMP berjumlah 2 orang;
   a. laki-laki 2 orang
   b. perempuan 0 orang
2. Pendidikan SLTA berjumlah 102 orang;
   a. laki-laki 60 orang
   b. perempuan 42 orang
3. Pendidikan D-I berjumlah 9 orang;
   a. laki-laki 2 orang
   b. perempuan 7 orang
4. Pendidikan D-III berjumlah 387 orang;
   a. laki-laki 89 orang
   b. perempuan 298 orang
5. Pendidikan D-IV berjumlah 65 orang;
   a. laki-laki 9 orang
   b. perempuan 56 orang
6. Pendidikan S-1 berjumlah 591 orang;
   a. laki-laki 161 orang
   b. perempuan 430 orang
7. Pendidikan S-2 berjumlah 114 orang;
   a. laki-laki 42 orang
   b. perempuan 72 orang

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

4.2.1 Perhitungan Kebutuhan sesuai SPM banyak yang sulit untuk dipenuhi
4.2.2 Terbatasnya anggaran
4.2.3 Sering terkena refocusing
4.2.4 Data warga negara yang berhak menerima layanan kadang berbeda sasaran antara lain harus sesuai dengan kementrian kesehatan atau sesuai dengan Dinas Kependudukan Catatan sipil.

4.2.5 Masih terbatasnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap indikator Standar Pelayanan Minimal
4.2.6 Terbatasnya penyediaan barang dan jasa
4.2.7 Kurangnya koordinasi puskesmas dengan rumah sakit.

4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelyanan Minimal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tantang Pedoman Penerapan Pelayanan Minimal**.** Pemerintah Kota Cirebon

Jenis Pelayanan Dasar dalam bagi Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

4.3.2 Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kota cirebon dalam mencapai SPM sebagai berikut :

Tabel IV.8

Target SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Indikator	Target	Ket
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	100%	
2.	penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.	100%	

4.3.3 Realisasi

Tabel IV.9

Target dan Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Indikator	Target	Realisasi	Ket
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	100%	98.15%	
2.	penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.	100%	87.46%	

4.3.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Anggaran untuk pelaksanaan penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum dengan APBD Kota Cirebon mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 22.801.338.920,-** *(Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah)* atau 1.45% dari anggaran Perangkat Daerah dengan perbandingan sebagai berikut :

Tabel IV.10

PAGU Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

No.	Anggaran	PAGU (Rp)	Anggaran Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Perengkat Daerah(%)
1.	APBD Kota Cirebon	1,576,560,109,095,-		
2.	Anggaran Perangkat Daerah	103.229.954.449,-	6.55%	1.45%
3.	Anggaran Penerapan SPM	22.801.338.920,-		22.09%

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum berjumlah 74 orang dengan 61 laki-laki dan 13 perempuan. Kalau dilihat dari pendidikan akan dgambarkan sebagai berikut :

A. Pendidikan SMP berjumlah 4 orang dengan rincian berikut :
   Laki=laki 4 orang
   Perempuan 0 orang
B. Pendidikan SMA berjumlah 12 orang dengan rincian berikut :
   Laki=laki 11 orang
   Perempuan 1 orang
C. Pendidikan D-I berjumlah 2 orang dengan rincian berikut :
   Laki=laki 2 orang
   Perempuan 0 orang
D. Pendidikan D-III berjumlah 11 orang dengan rincian berikut :
   Laki=laki 9 orang
   Perempuan 2 orang
E. Pendidikan S-1 berjumlah 36 orang dengan rincian berikut :
   Laki=laki 30 orang
1. Perempuan 6 orang
F. Pendidikan S-2 berjumlah 8 orang dengan rincian berikut :
   Laki=laki 4 orang
   Perempuan 4 orang
G. Pendidikan S-3 berjumlah 1 orang dengan rincian berikut :
   Laki=laki 1 orang
   Perempuan 0 orang

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum di Tahun 2023 antara lain :

1. Basis Data belum terintegrasi
2. Pemenuhan Air Bersih oleh PDAM kepada warga masih terbatas
3. Perumahan atau pemukiman masih belum memiliki penampungan air limbah secara benar
4. Kesadaran masyarakat terhadap limbah air maupun kesehatan lainnya masih kurang
5. Anggaran yang terbatas
6. Masih tumpang tindih dengan urusan perumhan rakyat

4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelyanan Minimal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Peraturan Wali Kota Cirebon

Nomor 63 Tahun 2019 tantang Pedoman Penerapan Pelayanan Minimal**.** Pemerintah Kota Cirebon.

Jenis Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

A. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana
B. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.

4.4.2 Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM urusan Perumhan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel IV.11

Target SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Indikator SPM	Target	Ket
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	100%	
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100%	

4.4.3 Realisasi

Target pencapaian SPM urusan Perumhan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel IV.12

Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	**Indikator SPM**	**Target**	**Realisasi**	**Ket**
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	100%	100%	
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100%	100%	

4.4.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat dari PAGU Perangkat Daerah sebesar **Rp. 16.330.314.723,-** *(Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tujuh ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)* sekitar 1.39% atau senilai dengan **Rp. 226.853.725,-** *(Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)* yang bersumber dari Naggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel IV.12

PAGU SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Anggaran	PAGU (Rp)	Anggaran Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Perengkat Daerah(%)
1.	APBD Kota Cirebon	1,576,560,109,095,-		
2.	Anggaran Perangkat Daerah	Rp. 16.330.314.723,-	1.04%	0.01%
3.	Anggaran Penerapan SPM	Rp. 226.853.725,-		1.39%

4.4.5 Dukungan Personil

Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukman dalam penerapan SPM urusan perumahan rakyat didukung **46 personil** yang terdiri dari 33 laki-laki dan 13 perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Pendidikan SD berjumlah 2 orang dengan :
   - Laki-laki 2 orang
   - Perempuan 0 orang
b. Pendidikan SLTP berjumlah 2 orang dengan :
   - Laki-laki 1 orang
   - Perempuan 1 orang
c. Pendidikan SLTA berjumlah 16 orang dengan :
   - Laki-laki 14 orang
   - Perempuan 2 orang
d. Pendidikan S-1 berjumlah 17 orang dengan :
   - Laki-laki 10 orang
   - Perempuan 7 orang
e. Pendidikan S-2 berjumlah 5 orang dengan :
   - Laki-laki 2 orang
   - Perempuan 3 orang

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan SPM urusan perumahan rakyat di kota cirebon pada Tahun 2023 tidak berjalan dengan lancar dan ada beberapa kendala atau masalah yang muncul diantaranya sebagai berikut :

4.4 Adanya peraturan tentang penentuan bencana yang bisa menghambat penanganan terhadap korban bencana

4.5 Sasaran dalam penerima bantuan selama ini berdasarkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

4.6 Pengumpulan data, penghitungan kebutuhan dan perencanaan baru dilaksanakan setelah adanya penetapan bencana.

4.5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

A. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelyanan Minimal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum serta Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tantang Pedoman Penerapan Pelayanan Minimal**.** Pemerintah Kota Cirebon.

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal nya oleh pemerintah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), diantaranya adalah :

1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.
2) Pelayanan informasi rawan bencana.
3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dari lima pelayanan dasar tersebut diatas yang merupakan Standar Pelayanan Minimal yang harus dikerjakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah **“ Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum “**.

B. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal nya oleh pemerintah, sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), diantaranya adalah :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan informasi rawan bencana
4. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Dari lima pelayanan dasar tersebut diatas yang merupakan Standar Pelayanan Minimal yang harus dikerjakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah **" Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana "**.

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal nya oleh pemerintah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), diantaranya adalah :

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

4.5.2 Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal

A. Satuan Polisi Pamong Praja

Target pencapaian SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum khususnya Satuan Polisi Pamong Praja sesuai denganPermendagri 59 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.13

Target SPM Urusan Trantibum

No.	Indikator	Target	Ket
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100%	

B. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Target pencapaian SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum khususnya Dinas Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri 59 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.14

Target SPM Urusan Trantibum Sub Urusan Kebakaran

No.	Indikator	Target	Ket
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100%	

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Target pencapaian SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum khususnya Dinas Kebakaran dan Penyelamatan sesuai denganPermendagri 59 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.15

Target SPM Urusan Trantibum Sub Urusan Kebencanaan

No.	Indikator	Target	Ket
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	

4.5.3 Realisasi

Tabel IV.15

Realisasi SPM Urusan Trantibum

No.	Indikator	Target	Realisasi	Ket
Satuan Polisi Pamong Praja				
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100%	93.33%	
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100%	100%	

Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	

4.5.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel IV.15

Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibum

No	PROGRAM	Kegiatan dan SUB KEGIATAN		SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA CIREBON				**10,683,042,538**	**9,987,537,734**	**93.49%**
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**				**3,795,098,620**	**3,141,224,550**	**82.77%**
	1	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**2,772,756,400**	**2,415,198,275**	**87.10%**
		1	**Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan**	**Kasus**	252,740,800	183,568,000	**72.63%**
		2	**Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui**	**Kasus**	48,727,325	33,747,000	**69.26%**

			penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa				
		3	**Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	54,832,875	54,832,875	**100.00%**
		4	**Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum**	**Dokumen**	2,266,140,000	1,992,735,000	**87.94%**
		5	**Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia**	**Orang**	150,315,400	150,315,400	**100.00%**
		6	**Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum**	**Dokumen**	0	0	**0%**
		7	**Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum**	**Unit**	0	0	**0%**
		8	**Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**	**Dokumen**	0	0	**0%**
		9	**Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan**	**Laporan**	0	0	**0%**

			Peraturan Daerah dan Perkada				
	2	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			**959,687,020**	**675,732,325**	**70.41%**
		1	**Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Laporan**	490,704,820	293,690,125	**59.85%**
		2	**Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Laporan**	165,402,200	144,082,200	**87.11%**
		3	**Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Laporan**	303,580,000	237,960,000	**78.38%**
	3	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**			**62,655,200**	**50,293,950**	**80.27%**
		1	**Pengembangan kapasitas dan karier PPNS**	**Laporan**	62,655,200	50,293,950	**80.27%**

b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel IV.16

Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibum sub Urusan Kebakaran

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)**				**1,265,404,143**	**1,226,482,834**	**96.92%**
	1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			**14,926,630**	**14,926,630**	**100.00%**
		1	**Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0%**
		2	**Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	14,926,630	14,926,630	**100.00%**

			(per jenis bencana)				
	2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			**1,202,977,513**	**1,167,876,204**	**97.08%**
		1	**Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	113,657,001	108,965,000	**95.87%**
		2	**Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	28,000,000	28,000,000	**100.00%**
		3	**Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	873,855,217	851,381,954	**97.43%**
		4	**Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Unit**	0	0	**0%**
		5	**Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan**	**Dokumen**	0	0	**0%**
		6	**Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**	**Kawasan**	38,691,435	38,029,000	**98.29%**
		7	**Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota**		0	0	**0%**
		8	**Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	148,773,860	141,500,250	**95.11%**
		9 **10**	**Penyusunan rencana kontijensi** **Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Dokumen** **Orang**	0 0	0 0	**0%** **0%**

		11	**Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana**	**Dok**	0	0	**0%**
		12	**Pelatihan keluarga tanggap bencana alam**		0	0	**0%**
	3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			**47,500,000**	**43,680,000**	**91.96%**
		1	**Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas**	**Lap**	0	0	**0%**
		2	**Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota**	**Dok**	0	0	**0%**
		3	**Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota**	**Org**	47,500,000	43,680,000	**91.96%**
		4	**Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota**	**Org**	0	0	**0%**
		5	**Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana**	**Laporan**	0	0	**0%**
		6	**Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit**	**Dokumen**	0	0	**0%**
	3	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**			**0**	**0**	**0.00%**
		1	**Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0%**
		2	**Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0%**
		3	**Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0%**

		4	**Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan**	**Dok**	0	0	**0%**
		5	**Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana**	**Lap**	0	0	**0%**
		6	**Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota**	**Dok**	0	0	**0%**
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)**				**5,622,539,775**	**5,619,830,350**	**99.95%**
	4	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**5,622,539,775**	**5,619,830,350**	**99.95%**
		1	**Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Dok**	0	0	**0%**
		2	**Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Dok**	5,503,342,600	5,501,692,600	**99.97%**
		3	**Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran**	**Lap**	0	0	**0%**
		4	**Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Dok**	0	0	**0%**
		5	**Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri**	**Unit**	0	0	**0%**
		6	**Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan**	**Dok**	119,197,175	118,137,750	**99.11%**

			Alat Pelindung Diri				
		7	**Pembinaan aparatur pemadam kebakaran**	**Dokumen**	0	0	**0%**
		8	**Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)**	**Unit**	0	0	**0%**
		9	**Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran**	**Orang**	0	0	**0%**
		10	**Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga**	**Dokumen**	0	0	**0%**
	5	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**			**0**	**0**	**0.00%**
		1	**Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran**	**Laporan**	0	0	**0%**
		2	**Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran**	**Laporan**	0	0	**0%**
	6	**Investigasi Kejadian Kebakaran**			**0**	**0**	**0.00%**
		1	**Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran**	**Dokumen**	0	0	**0%**
	7	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**			**0**	**0**	**0.00%**

		1	**Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat**	**Orang**	0	0	**0%**
		2	**Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran**		0	0	**0%**
		3	**Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana**	**Dokumen**	0	0	**0%**
	8	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**			**0**	**0**	**0.00%**
		1	**Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia**	**Laporan**	0	0	**0%**
		2	**Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi**	**Dokumen**	0	0	**0%**
		3	**Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyela**	**Unit**	0	0	**0%**

			matan dan evakuasi				
		4	**Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi**	**Laporan**	0	0	**0%**

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel IV.17

Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibum sub Urusan Kebakaran

No	PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN		SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)**				**1,265,404,143**	**1,226,482,834**	**96.92%**
	1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			**14,926,630**	**14,926,630**	**100.00%**
		1	**Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0%**
		2	**Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)**	**Orang**	14,926,630	14,926,630	**100.00%**
	2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			**1,202,977,513**	**1,167,876,204**	**97.08%**
		1	**Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	113,657,001	108,965,000	**95.87%**
		2	**Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	28,000,000	28,000,000	**100.00%**
		3	**Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	873,855,217	851,381,954	**97.43%**

		4	**Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Unit**	0	0	**0%**
		5	**Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan**	**Dokumen**	0	0	**0%**
		6	**Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**	**Kawasan**	38,691,435	38,029,000	**98.29%**
		7	**Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota**		0	0	**0%**
		8	**Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	148,773,860	141,500,250	**95.11%**
		9	**Penyusunan rencana kontijensi**	**Dokumen**	0	0	**0%**
		10	**Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Orang**	0	0	**0%**
		11	**Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana**	**Dokumen**	0	0	**0%**
		12	**Pelatihan keluarga tanggap bencana alam**		0	0	**0%**
	3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			**47,500,000**	**43,680,000**	**91.96%**
		1	**Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas**	**Laporan**	0	0	**0%**
		2	**Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0%**
		3	**Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	47,500,000	43,680,000	**91.96%**

		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			0	0	0.00%
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

4.5.5 Dukungan Personil

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pelayanan dan Ketertiban Umum di dukung dengan **61 personil** yang terdiri dari 56 laki-laki dan 5 perempuan. Jika dilihat dari tingkat pendidikan bisa dirinci sebagai berikut :

a. Pendidikan SD berjumlah 1 orang dengan rincian sebagai berikut :
   Laki-laki 1 orang

Perempuan 0 orang

b. Pendidikan SLTA berjumlah 24 orang dengan rincian sebagai berikut :
Laki-laki 24 orang
Perempuan 0 orang

c. Pendidikan D-III berjumlah 8 orang dengan rincian sebagai berikut :
Laki-laki 4 orang
Perempuan 4 orang

d. Pendidikan S-1 berjumlah 25 orang dengan rincian sebagai berikut :
Laki-laki 24 orang
Perempuan 1 orang

e. Pendidikan S-2 berjumlah 3 orang dengan rincian sebagai berikut :
Laki-laki 3 orang
Perempuan 0 orang

b. Dinas Pemdam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Kebakaran dan Penyelamatan dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pelayanan dan Ketertiban Umum di dukung dengan **15 personil** yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 perempuan. Jika dilihat dari tingkat pendidikan bisa dirinci sebagai berikut :

a. Pendidikan SLTA berjumlah 1 orang dengan rincian sebagai berikut :
Laki-laki 1 orang
Perempuan 0 orang

b. Pendidikan D-III berjumlah 3 orang dengan rincian sebagai berikut :
Laki-laki 2 orang
Perempuan 1 orang

c. Pendidikan S-1 berjumlah 10 orang dengan rincian sebagai berikut :
Laki-laki 7 orang
Perempuan 3 orang

d. Pendidikan S-2 berjumlah 1 orang dengan rincian sebagai berikut :
Laki-laki 1 orang
Perempuan 0 orang

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pelayanan dan Ketertiban Umum di dukung dengan **12 personil** yang terdiri dari 8 laki-laki dan 4 perempuan. Jika dilihat dari tingkat pendidikan bisa dirinci sebagai berikut :

a. Pendidikan SLTA berjumlah 1 orang dengan rincian sebagai berikut :
Laki-laki 1 orang
Perempuan 0 orang

b. Pendidikan S-1 berjumlah 10 orang dengan rincian sebagai berikut :
Laki-laki 6 orang
Perempuan 4 orang

c. Pendidikan S-12berjumlah 10 orang dengan rincian sebagai berikut :
Laki-laki 1 orang
Perempuan 0 orang

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penerapan SPM mendapati beberapa kendala sebagai berikut :

a. Kurang sinkronnya data dari dinas-dinas terkait mempersulit dalam proses pengumpulan data
b. Kurangnya sumberdaya aparatur
c. Kurangnya sarana prasarana
d. Kurangnya anggaran untuk operasional

4.6 Bidang Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelyanan Minimal serta Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tantang Pedoman Penerapan Pelayanan Minimal**.** Pemerintah Kota Cirebon.

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM urusan sosial untuk Tahun 2023 menetapkan target sebagai berikut :

Tabel IV.18

Target Capaian SPM Urusan Sosial

No	Indikator	Target	Ket
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	100%	
2.	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;	100%	
3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;	100%	
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;	100%	
5.	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	

	bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		

4.6.3 Realisasi

Tabel IV.19

Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial

No	Indikator	Target	Realisasi	Ket
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	100%	97.33%	
2.	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;	100%	94.67%	
3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;	100%	97.33%	
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;	100%	90.67%	
5.	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%	96.00%	

4.6.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, untuk urusan sosial dalam penerapannya yang bersumber dari:

Pelaksanaan penerpan SPM urusan sosial di Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun 2023 dengan besaran anggaran **Rp. 1.046.229.531,-** *(Satu Milyar Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)* atau 0.07% dari besar PAGU perangkat daerah yakni **Rp. 10.381.245.772,-** *(Sepuluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).* Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel IV.18

Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA CIREBON				408,621,579	398,278,814	97.47%
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				408,621,579	398,278,814	97.47%
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K20220131040736			213,622,094	205,406,034	96.15%
		1	Penyediaan permakanan	Orang	74,999,675	72,608,075	96.81%
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	89,503,448	85,651,488	95.70%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	0	0	0%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	0	0	0%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%

		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	49,118,971	47,146,471	95.98%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				213,622,094	205,406,034	96.15%
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			194,999,485	192,872,780	98.91%
		1	Penyediaan makanan	Orang	194,999,485	192,872,780	98.91%
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				194,999,485	192,872,780	98.91%
	JUMLAH PROGRAM				408,621,579	398,278,814	97.47%
KEGIATAN LAINNYA							

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil pada Dinas Sosial selaku pemangku urusan sosial untuk penerapan SPM berjumlah 32 Personil atau 15 laki-laki dan 17 perempuan. Jika dilihat dari strata pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendidikan SLTA berjumlah 2 orang ;
   Laki-laki 2 orang
   Perempuan 0 orang
b. Pendidikan D-IV berjumlah 1 orang ;
   Laki-laki 1 orang
   Perempuan 0 orang
c. Pendidikan S-1 berjumlah 24 orang ;
   Laki-laki 10 orang
   Perempuan 14 orang
d. Pendidikan S-2 berjumlah 5 orang ;
   Laki-laki 2 orang
   Perempuan 3 orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) Urusan Sosial dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala sebagai berikut :

a. Kekurangan Tenaga Ahli Dalam Bidangnya
b. Minimnya Anggaran yang disediakan untuk Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
c. Belum terencana dengan baik, disebabkan oleh pengumpulan data dari desa belum maksimal
d. Target Sasaran sering berubah dikarenakan ada penambahan atau pengurangan

4.7 Program dan Kegiatan

A. Urusan Pendidikan

Dinas Pendidikan selaku pemangku urusan pendidikan pada penerapan SPM pada Tahun 2023 melaksanakan 3 (tiga) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan dalam rangka mencapai hasil yang optimal telah melaksanakan beberapa program yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

4. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Pendidikan Dasar, yaitu jumlah warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SDMI, SMP/MTs);

6. Pendidikan Kesetaraan, yaitu jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Uraian dari program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel IV.19

Program dan Kegiatan SPM Urusan Pendidikan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	100%
			Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	97.02%
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	100%
			Pemeliharaan dan perbaikan	98.79%

			terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	
2.	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	100%
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	99.85%
3.	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	100%

B. Urusan Kesehatan

Dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, untuk skala Pemerintah Kabupaten/ Kota antara lain :

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4) Pelayanan Kesehatan Balita
5) Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7) Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut

8) Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
9) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
10) Pelayanan Kesehatan otang dengan gangguan jiwa berat
11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosism dan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Tabel IV.20

Program dan Kegiatan SPM Urusan Kesehatan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	42.69%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	61.42%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	50.30%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	40.14%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.66%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	50.57%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	37.76%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	54.58%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	26.92%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang	55.30%

			Dengan Gangguan Jiwa Berat	
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	89.53%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	65.70%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	64.33%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	77.16%

C. Urusan Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan penerapan SPM membagi menjadi 2 (dua) program sebagai berikut :

Tabel IV.21

Program dan Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	-	-	98.15%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	-	-	87.46%

D. Urusan Perumahan Rakyat

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan urusan Perumahan Rakyat melaksanakan Program sebagai berikut :

Tabel IV.21

Program dan Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100%

E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Sub UrusanPelayanan Ketentraman Umum dan Ketertiban Umum melaksanakan program sebagai berikut :

Tabel IV.22

Program dan Kegiatan SPM Urusan Trantibum

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	72.63%
			Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	69.26%

			Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	100.00%
			Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	87.94%
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	100.00%
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	59.85%
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	87.11%
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	78.38%
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	80.27%

b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Sub UrusanPelayanan Ketentraman Umum dan Ketertiban Umum melaksanakan program sebagai berikut :

Tabel IV.23

Program dan Kegiatan SPM Urusan Trantibum SubUurusan Kebakaran

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	100%
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	95.87%
			Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	100.00%
			Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	97.43%
			Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	95.11%
			Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	98.29%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	91.96%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	99.97%

			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	99.11%

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel IV.23

Program dan Kegiatan SPM Urusan Trantibum Sub urusan Kebencanaan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
1.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	100%
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	95.87%
			Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	100.00%
			Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	97.43%
			Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	98.29%
			Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	95.11%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	91.96%

F. Urusan Sosial

Tabel IV.25

Program dan Kegiatan SPM Urusan Sosial

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan permakanan	96.81%
			Penyediaan alat bantu	95.70%
			Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	95.98%
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan makanan	98.91%

BAB V
P E N U T U P

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan ringkasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LPPD iini memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri :

1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.1 Capaian kinerja Makro

Capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan daerah, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Laju Kinerja 2023 (%)	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	76.89	77.45	0.728
2	Angka Kemiskinan	9.82	9.16	-6.72
3	Angka Pengangguran	8.42	7.86	-1.76
4	Pertumbuhan Ekonomi	5.1	5.01	-1.765
5	Pendapatan Per Kapita	78532	84135	7135
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.48	0.48	0

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Output) dan Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) per urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Namun pada dasarnya pelaksanaan capaian IKK output dan IKK ourtcome pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik. Selain hal tersebut seluruh indikator kinerja pada sasarn strategis sebagai gambaran pelaksanaan akuntabilitas kinerja secara umum terlaksana dengan baik, pencapaian rata-rata indikator kinerja tersebut adalah 101,5%.

2. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah menerapkan SPM pada urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar. Indeks Penerapan SPM Kota Cirebon pada Tahun 2023 mencapai 96.22%, Tabel berikut menjelaskan Indeks Penerapan SPM per Urusan:

No	Urusan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Pendidikan	85	100	89.00
2	Kesehatan	90	80	98.52
3	Pekerjaan Umum	68	93	94.01
4	Perumahan Rakyat	5	50	100
5	Trantibumlinmas	71	96	98.01
6	Sosial	69	29	97.74

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sehubungan hal dimaksud, untuk tahun anggaran 2023 tidak terdapat tugas pembantuan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 ini disusun sebagai gambaran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2023. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, masyarakat, serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu atas terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Cirebon, 21 Maret 2024
Pj. WALI KOTA CIREBON

Drs. AGUS MULYADI, MSi

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA CIREBON

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

Tahun Anggaran 2023

periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.497.346.698.859,00	1.457.191.138.810,00	(40.155.560.049,00)	97,32
4.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	267.421.562.211,00	292.600.101.816,00	25.178.539.605,00	109,42
4.1.02	**KESEHATAN**	265.401.562.211,00	291.314.731.035,00	25.913.168.824,00	109,76
4.1.02.00	Non Program	265.401.562.211,00	291.314.731.035,00	25.913.168.824,00	109,76
4.1.02.00.0.00	Non Kegiatan	265.401.562.211,00	291.314.731.035,00	25.913.168.824,00	109,76
4.1.02.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	265.401.562.211,00	291.314.731.035,00	25.913.168.824,00	109,76
4.1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	1.850.000.000,00	1.111.185.781,00	(738.814.219,00)	60,06
4.1.03.00	Non Program	1.850.000.000,00	1.111.185.781,00	(738.814.219,00)	60,06
4.1.03.00.0.00	Non Kegiatan	1.850.000.000,00	1.111.185.781,00	(738.814.219,00)	60,06
4.1.03.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	1.850.000.000,00	1.111.185.781,00	(738.814.219,00)	60,06
4.1.04	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	70.000.000,00	82.935.000,00	12.935.000,00	118,48
4.1.04.00	Non Program	70.000.000,00	82.935.000,00	12.935.000,00	118,48
4.1.04.00.0.00	Non Kegiatan	70.000.000,00	82.935.000,00	12.935.000,00	118,48
4.1.04.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	70.000.000,00	82.935.000,00	12.935.000,00	118,48
4.1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	100.000.000,00	91.250.000,00	(8.750.000,00)	91,25
4.1.05.00	Non Program	100.000.000,00	91.250.000,00	(8.750.000,00)	91,25
4.1.05.00.0.00	Non Kegiatan	100.000.000,00	91.250.000,00	(8.750.000,00)	91,25
4.1.05.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	100.000.000,00	91.250.000,00	(8.750.000,00)	91,25
4.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	12.289.897.350,00	9.671.663.573,00	(2.618.233.777,00)	78,70
4.2.09	**PANGAN**	1.478.824.000,00	1.513.294.075,00	34.470.075,00	102,33
4.2.09.00	Non Program	1.478.824.000,00	1.513.294.075,00	34.470.075,00	102,33
4.2.09.00.0.00	Non Kegiatan	1.478.824.000,00	1.513.294.075,00	34.470.075,00	102,33
4.2.09.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	1.478.824.000,00	1.513.294.075,00	34.470.075,00	102,33
4.2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**	4.000.000.000,00	3.618.374.002,00	(381.625.998,00)	90,46
4.2.11.00	Non Program	4.000.000.000,00	3.618.374.002,00	(381.625.998,00)	90,46
4.2.11.00.0.00	Non Kegiatan	4.000.000.000,00	3.618.374.002,00	(381.625.998,00)	90,46
4.2.11.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	4.000.000.000,00	3.618.374.002,00	(381.625.998,00)	90,46
4.2.15	**PERHUBUNGAN**	6.661.073.350,00	4.437.753.896,00	(2.223.319.454,00)	66,62
4.2.15.00	Non Program	6.661.073.350,00	4.437.753.896,00	(2.223.319.454,00)	66,62
4.2.15.00.0.00	Non Kegiatan	6.661.073.350,00	4.437.753.896,00	(2.223.319.454,00)	66,62
4.2.15.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	6.661.073.350,00	4.437.753.896,00	(2.223.319.454,00)	66,62
4.2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	150.000.000,00	102.241.600,00	(47.758.400,00)	68,16
4.2.17.00	Non Program	150.000.000,00	102.241.600,00	(47.758.400,00)	68,16
4.2.17.00.0.00	Non Kegiatan	150.000.000,00	102.241.600,00	(47.758.400,00)	68,16

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.2.17.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	150.000.000,00	102.241.600,00	(47.758.400,00)	68,16
4.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	1.217.635.239.298,00	1.154.919.373.421,00	(62.715.865.877,00)	94,85
4.5.02	**KEUANGAN**	1.217.635.239.298,00	1.154.919.373.421,00	(62.715.865.877,00)	94,85
4.5.02.00	Non Program	1.217.635.239.298,00	1.154.919.373.421,00	(62.715.865.877,00)	94,85
4.5.02.00.0.00	Non Kegiatan	1.217.635.239.298,00	1.154.919.373.421,00	(62.715.865.877,00)	94,85
4.5.02.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	1.217.635.239.298,00	1.154.919.373.421,00	(62.715.865.877,00)	94,85
5	**BELANJA DAERAH**	1.583.114.687.564,00	1.444.788.286.021,00	(138.326.401.543,00)	91,26
5.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	1.054.171.653.266,00	991.341.176.994,00	(62.830.476.272,00)	94,04
5.1.01	**PENDIDIKAN**	343.074.614.871,00	329.089.391.867,00	(13.985.223.004,00)	95,92
5.1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	236.769.850.767,00	224.571.139.279,00	(12.198.711.488,00)	94,85
5.1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	886.325.877,00	778.019.566,00	(108.306.311,00)	87,78
5.1.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.409.482,00	113.891.170,00	(1.518.312,00)	98,68
5.1.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	85.344.388,00	76.142.010,00	(9.202.378,00)	89,22
5.1.01.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	80.819.370,00	53.367.830,00	(27.451.540,00)	66,03
5.1.01.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	57.472.144,00	47.182.144,00	(10.290.000,00)	82,10
5.1.01.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	67.168.644,00	56.873.644,00	(10.295.000,00)	84,67
5.1.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	346.147.659,00	317.562.384,00	(28.585.275,00)	91,74
5.1.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.964.190,00	113.000.384,00	(20.963.806,00)	84,35
5.1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	230.432.097.349,00	218.889.260.170,00	(11.542.837.179,00)	94,99
5.1.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	230.242.957.669,00	218.708.768.370,00	(11.534.189.299,00)	94,99
5.1.01.01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	175.117.080,00	166.951.800,00	(8.165.280,00)	95,34
5.1.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.022.600,00	13.540.000,00	(482.600,00)	96,56
5.1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.488.800,00	52.488.800,00	0,00	100,00
5.1.01.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.488.800,00	52.488.800,00	0,00	100,00
5.1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	455.448.591,00	348.010.691,00	(107.437.900,00)	76,41
5.1.01.01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	49.612.475,00	49.612.475,00	0,00	100,00
5.1.01.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	405.836.116,00	298.398.216,00	(107.437.900,00)	73,53
5.1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.064.118.003,00	1.997.100.683,00	(67.017.320,00)	96,75
5.1.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.192.790,00	214.222.670,00	(21.970.120,00)	90,70
5.1.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.890.200,00	20.890.200,00	0,00	100,00
5.1.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	154.001.000,00	132.579.000,00	(21.422.000,00)	86,09
5.1.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.182.351.091,00	1.182.351.091,00	0,00	100,00
5.1.01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	130.334.800,00	106.709.600,00	(23.625.200,00)	81,87
5.1.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.108.370,00	180.108.370,00	0,00	100,00
5.1.01.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	99.594.752,00	99.594.752,00	0,00	100,00
5.1.01.01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.645.000,00	60.645.000,00	0,00	100,00
5.1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	395.782.520,00	328.387.200,00	(67.395.320,00)	82,97
5.1.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	201.706.660,00	199.005.000,00	(2.701.660,00)	98,66
5.1.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.075.860,00	129.382.200,00	(64.693.660,00)	66,67
5.1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.252.418.784,00	1.071.065.130,00	(181.353.654,00)	85,52

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.553.200,00	45.553.200,00	0,00	100,00
5.1.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	613.256.400,00	431.902.746,00	(181.353.654,00)	70,43
5.1.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	593.609.184,00	593.609.184,00	0,00	100,00
5.1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.231.170.843,00	1.106.807.039,00	(124.363.804,00)	89,90
5.1.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.461.950,00	49.870.800,00	(14.591.150,00)	77,36
5.1.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	335.288.925,00	276.561.953,00	(58.726.972,00)	82,48
5.1.01.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	37.024.000,00	36.400.000,00	(624.000,00)	98,31
5.1.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.884.000,00	168.324.000,00	(1.560.000,00)	99,08
5.1.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	462.549.684,00	413.688.002,00	(48.861.682,00)	89,44
5.1.01.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161.962.284,00	161.962.284,00	0,00	100,00
5.1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	103.913.411.319,00	102.127.648.058,00	(1.785.763.261,00)	98,28
5.1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	50.901.928.355,00	50.414.764.428,00	(487.163.927,00)	99,04
5.1.01.02.2.01.006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.286.371.456,00	1.273.834.348,00	(12.537.108,00)	99,03
5.1.01.02.2.01.008	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.633.298.102,00	4.584.093.637,00	(49.204.465,00)	98,94
5.1.01.02.2.01.009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	237.276.548,00	236.148.000,00	(1.128.548,00)	99,52
5.1.01.02.2.01.011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	124.271.352,00	124.224.000,00	(47.352,00)	99,96
5.1.01.02.2.01.012	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	308.777.224,00	307.472.000,00	(1.305.224,00)	99,58
5.1.01.02.2.01.017	Pengadaan Perlengkapan Siswa	400.000.000,00	395.504.418,00	(4.495.582,00)	98,88
5.1.01.02.2.01.022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	125.000.000,00	83.990.000,00	(41.010.000,00)	67,19
5.1.01.02.2.01.025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	821.065.590,00	814.991.190,00	(6.074.400,00)	99,26
5.1.01.02.2.01.028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3.517.646.132,00	3.354.695.239,00	(162.950.893,00)	95,37
5.1.01.02.2.01.029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	39.448.221.951,00	39.239.811.596,00	(208.410.355,00)	99,47
5.1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	32.915.808.599,00	32.388.591.882,00	(527.216.717,00)	98,40
5.1.01.02.2.02.012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.110.708.960,00	2.110.404.000,00	(304.960,00)	99,99
5.1.01.02.2.02.014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.045.855.327,00	1.031.086.213,00	(14.769.114,00)	98,59
5.1.01.02.2.02.015	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	243.401.756,00	243.336.000,00	(65.756,00)	99,97
5.1.01.02.2.02.018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	320.751.744,00	320.736.000,00	(15.744,00)	100,00
5.1.01.02.2.02.024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	197.550.288,00	197.524.000,00	(26.288,00)	99,99
5.1.01.02.2.02.034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	400.000.000,00	398.959.668,00	(1.040.332,00)	99,74
5.1.01.02.2.02.038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.315.164.784,00	1.298.367.148,00	(16.797.636,00)	98,72
5.1.01.02.2.02.041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.991.773.726,00	1.855.081.741,00	(136.691.985,00)	93,14
5.1.01.02.2.02.042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	25.290.602.014,00	24.933.097.112,00	(357.504.902,00)	98,59
5.1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.301.059.902,00	10.820.155.792,00	(480.904.110,00)	95,74
5.1.01.02.2.03.002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.778.159.575,00	1.730.147.665,00	(48.011.910,00)	97,30
5.1.01.02.2.03.009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	841.120.274,00	756.233.474,00	(84.886.800,00)	89,91
5.1.01.02.2.03.010	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	99.976.800,00	95.577.500,00	(4.399.300,00)	95,60
5.1.01.02.2.03.013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	778.708.892,00	778.558.892,00	(150.000,00)	99,98
5.1.01.02.2.03.017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	3.583.894.361,00	3.322.203.261,00	(261.691.100,00)	92,70

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.02.2.03.018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.219.200.000,00	4.137.435.000,00	(81.765.000,00)	98,06
5.1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	8.794.614.463,00	8.504.135.956,00	(290.478.507,00)	96,70
5.1.01.02.2.04.009	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	322.148.765,00	276.240.759,00	(45.908.006,00)	85,75
5.1.01.02.2.04.011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	99.948.700,00	95.570.800,00	(4.377.900,00)	95,62
5.1.01.02.2.04.012	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	215.095.180,00	211.421.156,00	(3.674.024,00)	98,29
5.1.01.02.2.04.016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	2.363.721.818,00	2.352.103.241,00	(11.618.577,00)	99,51
5.1.01.02.2.04.017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	5.793.700.000,00	5.568.800.000,00	(224.900.000,00)	96,12
5.1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	2.391.352.785,00	2.390.604.530,00	(748.255,00)	99,97
5.1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.391.352.785,00	2.390.604.530,00	(748.255,00)	99,97
5.1.01.04.2.01.002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.391.352.785,00	2.390.604.530,00	(748.255,00)	99,97
5.1.02	**KESEHATAN**	558.190.177.446,00	535.512.525.386,00	(22.677.652.060,00)	95,94
5.1.02.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0
5.1.02.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0
5.1.02.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0
5.1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	152.103.249.555,00	148.674.535.073,00	(3.428.714.482,00)	97,75
5.1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	348.627.125,00	348.627.125,00	0,00	100,00
5.1.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.040.400,00	25.040.400,00	0,00	100,00
5.1.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	33.147.425,00	33.147.425,00	0,00	100,00
5.1.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.797.750,00	9.797.750,00	0,00	100,00
5.1.02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.552.000,00	8.552.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.730.650,00	6.730.650,00	0,00	100,00
5.1.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.625.500,00	24.625.500,00	0,00	100,00
5.1.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.733.400,00	240.733.400,00	0,00	100,00
5.1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	147.572.989.054,00	144.466.685.352,00	(3.106.303.702,00)	97,90
5.1.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	147.488.257.479,00	144.381.953.777,00	(3.106.303.702,00)	97,89
5.1.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.618.325,00	11.618.325,00	0,00	100,00
5.1.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	73.113.250,00	73.113.250,00	0,00	100,00
5.1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.686.825,00	70.686.825,00	0,00	100,00
5.1.02.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.686.825,00	70.686.825,00	0,00	100,00
5.1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	652.608.880,00	622.546.542,00	(30.062.338,00)	95,39
5.1.02.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.736.520,00	96.294.000,00	(1.442.520,00)	98,52
5.1.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.492.900,00	23.700.000,00	(6.792.900,00)	77,72
5.1.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.484.000,00	32.679.000,00	(4.805.000,00)	87,18
5.1.02.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	476.895.460,00	459.873.542,00	(17.021.918,00)	96,43
5.1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	801.871.702,00	800.914.000,00	(957.702,00)	99,88
5.1.02.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	151.871.702,00	150.914.000,00	(957.702,00)	99,37

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.691.396.251,00	1.500.866.413,00	(190.529.838,00)	88,74
5.1.02.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.764.800,00	8.760.000,00	(4.800,00)	99,95
5.1.02.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	741.510.000,00	557.751.613,00	(183.758.387,00)	75,22
5.1.02.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	941.121.451,00	934.354.800,00	(6.766.651,00)	99,28
5.1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965.069.718,00	864.208.816,00	(100.860.902,00)	89,55
5.1.02.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.437.250,00	35.975.147,00	(42.462.103,00)	45,86
5.1.02.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233.792.225,00	198.582.464,00	(35.209.761,00)	84,94
5.1.02.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	571.796.184,00	566.927.205,00	(4.868.979,00)	99,15
5.1.02.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.044.059,00	62.724.000,00	(18.320.059,00)	77,39
5.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	404.163.544.596,00	384.917.504.268,00	(19.246.040.328,00)	95,24
5.1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.497.227.627,00	14.647.108.957,00	(1.850.118.670,00)	88,79
5.1.02.02.2.01.005	Pengembangan Rumah Sakit	3.510.509.158,00	3.247.852.958,00	(262.656.200,00)	92,52
5.1.02.02.2.01.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.086.066.904,00	8.744.464.394,00	(1.341.602.510,00)	86,70
5.1.02.02.2.01.016	Pengadaan Obat, Vaksin	2.900.651.565,00	2.654.791.605,00	(245.859.960,00)	91,52
5.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	387.432.301.786,00	370.037.549.721,00	(17.394.752.065,00)	95,51
5.1.02.02.2.02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.959.799.279,00	6.859.655.309,00	(100.143.970,00)	98,56
5.1.02.02.2.02.002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	550.101.251,00	548.163.792,00	(1.937.459,00)	99,65
5.1.02.02.2.02.003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	309.585.725,00	304.465.725,00	(5.120.000,00)	98,35
5.1.02.02.2.02.004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.091.822.751,00	1.066.235.092,00	(25.587.659,00)	97,66
5.1.02.02.2.02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	540.756.350,00	538.967.325,00	(1.789.025,00)	99,67
5.1.02.02.2.02.006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	507.616.725,00	506.685.724,00	(931.001,00)	99,82
5.1.02.02.2.02.007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	600.653.250,00	554.730.250,00	(45.923.000,00)	92,35
5.1.02.02.2.02.008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	99.229.875,00	98.989.875,00	(240.000,00)	99,76
5.1.02.02.2.02.009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	73.002.325,00	72.857.325,00	(145.000,00)	99,80
5.1.02.02.2.02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	84.158.375,00	83.718.375,00	(440.000,00)	99,48
5.1.02.02.2.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.110.538.910,00	911.488.712,00	(199.050.198,00)	82,08
5.1.02.02.2.02.012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	732.049.300,00	731.300.350,00	(748.950,00)	99,90
5.1.02.02.2.02.013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	71.415.000,00	71.250.000,00	(165.000,00)	99,77
5.1.02.02.2.02.014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	34.847.882,00	10.297.000,00	(24.550.882,00)	29,55
5.1.02.02.2.02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9.309.735.196,00	9.228.988.910,00	(80.746.286,00)	99,13
5.1.02.02.2.02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	306.289.811,00	302.647.811,00	(3.642.000,00)	98,81
5.1.02.02.2.02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.301.684.525,00	1.181.002.850,00	(120.681.675,00)	90,73
5.1.02.02.2.02.018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.000.608.500,00	991.838.900,00	(8.769.600,00)	99,12
5.1.02.02.2.02.019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	15.647.900,00	15.005.825,00	(642.075,00)	95,90
5.1.02.02.2.02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	359.185.050,00	318.710.000,00	(40.475.050,00)	88,73
5.1.02.02.2.02.022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	250.663.500,00	250.024.350,00	(639.150,00)	99,75
5.1.02.02.2.02.023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	22.315.225,00	8.005.825,00	(14.309.400,00)	35,88

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.02.2.02.024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	557.079.155,00	541.951.430,00	(15.127.725,00)	97,28
5.1.02.02.2.02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8.020.864.310,00	5.054.681.290,00	(2.966.183.020,00)	63,02
5.1.02.02.2.02.026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.899.595.058,00	29.304.321.046,00	(1.595.274.012,00)	94,84
5.1.02.02.2.02.029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	245.647.200,00	237.037.200,00	(8.610.000,00)	96,49
5.1.02.02.2.02.030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.107.300,00	21.107.300,00	0,00	100,00
5.1.02.02.2.02.032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	293.467.742.094,00	282.766.997.030,00	(10.700.745.064,00)	96,35
5.1.02.02.2.02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	26.527.197.525,00	25.411.501.019,00	(1.115.696.506,00)	95,79
5.1.02.02.2.02.034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.644.375.189,00	1.373.603.311,00	(270.771.878,00)	83,53
5.1.02.02.2.02.035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	652.966.000,00	608.099.520,00	(44.866.480,00)	93,13
5.1.02.02.2.02.036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	64.021.250,00	63.221.250,00	(800.000,00)	98,75
5.1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	125.118.583,00	123.999.190,00	(1.119.393,00)	99,11
5.1.02.02.2.03.001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	125.118.583,00	123.999.190,00	(1.119.393,00)	99,11
5.1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.896.600,00	108.846.400,00	(50.200,00)	99,95
5.1.02.02.2.04.002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.674.800,00	13.674.800,00	0,00	100,00
5.1.02.02.2.04.003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	44.718.600,00	44.668.400,00	(50.200,00)	99,89
5.1.02.02.2.04.004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	50.503.200,00	50.503.200,00	0,00	100,00
5.1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	235.592.370,00	233.992.370,00	(1.600.000,00)	99,32
5.1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	138.306.670,00	138.306.670,00	0,00	100,00
5.1.02.03.2.02.001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	77.109.710,00	77.109.710,00	0,00	100,00
5.1.02.03.2.02.002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	61.196.960,00	61.196.960,00	0,00	100,00
5.1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97.285.700,00	95.685.700,00	(1.600.000,00)	98,36
5.1.02.03.2.03.001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97.285.700,00	95.685.700,00	(1.600.000,00)	98,36
5.1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	442.237.150,00	441.800.950,00	(436.200,00)	99,90
5.1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	87.573.500,00	87.573.500,00	0,00	100,00
5.1.02.04.2.01.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	87.573.500,00	87.573.500,00	0,00	100,00
5.1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	354.663.650,00	354.227.450,00	(436.200,00)	99,88
5.1.02.04.2.06.001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	354.663.650,00	354.227.450,00	(436.200,00)	99,88
5.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.245.553.775,00	1.244.692.725,00	(861.050,00)	99,93
5.1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	852.791.900,00	852.791.600,00	(300,00)	100,00
5.1.02.05.2.01.001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	852.791.900,00	852.791.600,00	(300,00)	100,00
5.1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.693.125,00	51.286.125,00	(407.000,00)	99,21
5.1.02.05.2.02.001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	51.693.125,00	51.286.125,00	(407.000,00)	99,21
5.1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	341.068.750,00	340.615.000,00	(453.750,00)	99,87

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.05.2.03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	341.068.750,00	340.615.000,00	(453.750,00)	99,87
5.1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	98.638.947.354,00	78.253.323.269,00	(20.385.624.085,00)	79,33
5.1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.005.433.639,00	12.388.044.708,00	(1.617.388.931,00)	88,45
5.1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	744.854.437,00	654.107.674,00	(90.746.763,00)	87,82
5.1.03.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.579.700,00	20.185.000,00	(11.394.700,00)	63,92
5.1.03.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.999.925,00	5.499.925,00	(3.500.000,00)	61,11
5.1.03.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.999.925,00	5.499.925,00	(3.500.000,00)	61,11
5.1.03.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.999.825,00	8.783.825,00	(216.000,00)	97,60
5.1.03.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	13.283.875,00	6.466.000,00	(6.817.875,00)	48,68
5.1.03.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	642.132.987,00	600.939.999,00	(41.192.988,00)	93,58
5.1.03.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.858.200,00	6.733.000,00	(24.125.200,00)	21,82
5.1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.795.376.905,00	9.100.351.542,00	(695.025.363,00)	92,90
5.1.03.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.724.643.005,00	9.079.321.617,00	(645.321.388,00)	93,36
5.1.03.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.999.925,00	15.033.925,00	(2.966.000,00)	83,52
5.1.03.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52.733.975,00	5.996.000,00	(46.737.975,00)	11,37
5.1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	894.856.282,00	695.859.482,00	(198.996.800,00)	77,76
5.1.03.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.573.600,00	42.573.600,00	0,00	100,00
5.1.03.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.585.182,00	30.069.582,00	(1.515.600,00)	95,20
5.1.03.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.301.900,00	28.121.900,00	(180.000,00)	99,36
5.1.03.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	554.822.800,00	404.840.000,00	(149.982.800,00)	72,97
5.1.03.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.691.000,00	0,00	(11.691.000,00)	0
5.1.03.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.881.800,00	190.254.400,00	(35.627.400,00)	84,23
5.1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.982.140,00	49.068.000,00	(197.914.140,00)	19,87
5.1.03.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	141.406.000,00	49.068.000,00	(92.338.000,00)	34,70
5.1.03.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.875.240,00	0,00	(69.875.240,00)	0
5.1.03.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.700.900,00	0,00	(35.700.900,00)	0
5.1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.084.740.400,00	1.047.496.248,00	(37.244.152,00)	96,57
5.1.03.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	474.395.400,00	438.136.248,00	(36.259.152,00)	92,36
5.1.03.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	610.345.000,00	609.360.000,00	(985.000,00)	99,84
5.1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.238.623.475,00	841.161.762,00	(397.461.713,00)	67,91
5.1.03.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	288.340.230,00	251.910.000,00	(36.430.230,00)	87,37
5.1.03.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.386.100,00	54.838.900,00	(77.547.200,00)	41,42
5.1.03.01.2.09.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	686.771.530,00	457.617.862,00	(229.153.668,00)	66,63
5.1.03.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.775.615,00	0,00	(51.775.615,00)	0
5.1.03.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.050.000,00	49.940.000,00	(110.000,00)	99,78
5.1.03.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.300.000,00	26.855.000,00	(2.445.000,00)	91,66
5.1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.223.310.688,00	5.921.794.954,00	(2.301.515.734,00)	72,01

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.223.310.688,00	5.921.794.954,00	(2.301.515.734,00)	72,01
5.1.03.02.2.01.004	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	286.869.000,00	279.780.000,00	(7.089.000,00)	97,53
5.1.03.02.2.01.010	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	4.000.492.492,00	2.981.134.498,00	(1.019.357.994,00)	74,52
5.1.03.02.2.01.025	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	3.570.860.380,00	2.323.474.000,00	(1.247.386.380,00)	65,07
5.1.03.02.2.01.046	Normalisasi/Restorasi Sungai	273.215.456,00	255.945.456,00	(17.270.000,00)	93,68
5.1.03.02.2.01.053	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	91.873.360,00	81.461.000,00	(10.412.360,00)	88,67
5.1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	615.512.347,00	602.091.000,00	(13.421.347,00)	97,82
5.1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	615.512.347,00	602.091.000,00	(13.421.347,00)	97,82
5.1.03.03.2.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	181.405.725,00	173.092.000,00	(8.313.725,00)	95,42
5.1.03.03.2.01.003	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	331.785.622,00	326.678.000,00	(5.107.622,00)	98,46
5.1.03.03.2.01.005	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	102.321.000,00	102.321.000,00	0,00	100,00
5.1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.675.039.914,00	1.441.639.737,00	(233.400.177,00)	86,07
5.1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.675.039.914,00	1.441.639.737,00	(233.400.177,00)	86,07
5.1.03.05.2.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	211.015.738,00	207.898.548,00	(3.117.190,00)	98,52
5.1.03.05.2.01.004	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	77.257.152,00	74.221.752,00	(3.035.400,00)	96,07
5.1.03.05.2.01.010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.386.767.024,00	1.159.519.437,00	(227.247.587,00)	83,61
5.1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	9.151.054.877,00	8.645.501.304,00	(505.553.573,00)	94,48
5.1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.151.054.877,00	8.645.501.304,00	(505.553.573,00)	94,48
5.1.03.06.2.01.007	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	8.349.475.655,00	8.129.350.000,00	(220.125.655,00)	97,36
5.1.03.06.2.01.009	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	801.579.222,00	516.151.304,00	(285.427.918,00)	64,39
5.1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	18.074.531.783,00	17.111.527.602,00	(963.004.181,00)	94,67
5.1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	18.074.531.783,00	17.111.527.602,00	(963.004.181,00)	94,67
5.1.03.07.2.01.002	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	18.074.531.783,00	17.111.527.602,00	(963.004.181,00)	94,67
5.1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	15.491.710.334,00	4.953.743.000,00	(10.537.967.334,00)	31,98
5.1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	15.491.710.334,00	4.953.743.000,00	(10.537.967.334,00)	31,98
5.1.03.08.2.01.001	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	202.000.000,00	39.000.000,00	(163.000.000,00)	19,31
5.1.03.08.2.01.002	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10.480.827.400,00	320.500.000,00	(10.160.327.400,00)	3,06
5.1.03.08.2.01.013	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4.808.882.934,00	4.594.243.000,00	(214.639.934,00)	95,54
5.1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	23.507.517.900,00	19.812.526.400,00	(3.694.991.500,00)	84,28
5.1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	23.507.517.900,00	19.812.526.400,00	(3.694.991.500,00)	84,28
5.1.03.09.2.01.003	Penataan Bangunan dan Lingkungan	23.507.517.900,00	19.812.526.400,00	(3.694.991.500,00)	84,28
5.1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	7.076.770.141,00	6.674.891.996,00	(401.878.145,00)	94,32
5.1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	7.076.770.141,00	6.674.891.996,00	(401.878.145,00)	94,32
5.1.03.10.2.01.004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	300.492.600,00	250.060.500,00	(50.432.100,00)	83,22
5.1.03.10.2.01.009	Rehabilitasi Jalan	5.277.165.659,00	5.126.296.588,00	(150.869.071,00)	97,14
5.1.03.10.2.01.011	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.090.156.265,00	991.634.076,00	(98.522.189,00)	90,96

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.03.10.2.01.019	Pemeliharaan Rutin Jembatan	408.955.617,00	306.900.832,00	(102.054.785,00)	75,05
5.1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	80.999.415,00	0,00	(80.999.415,00)	0
5.1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	80.999.415,00	0,00	(80.999.415,00)	0
5.1.03.11.2.03.003	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	80.999.415,00	0,00	(80.999.415,00)	0
5.1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	737.066.316,00	701.562.568,00	(35.503.748,00)	95,18
5.1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	487.808.090,00	484.519.690,00	(3.288.400,00)	99,33
5.1.03.12.2.01.001	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	487.808.090,00	484.519.690,00	(3.288.400,00)	99,33
5.1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	249.258.226,00	217.042.878,00	(32.215.348,00)	87,08
5.1.03.12.2.03.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	43.759.060,00	32.789.060,00	(10.970.000,00)	74,93
5.1.03.12.2.03.002	Sistem Informasi Penataan Ruang	205.499.166,00	184.253.818,00	(21.245.348,00)	89,66
5.1.04	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	12.283.313.620,00	11.538.407.013,00	(744.906.607,00)	93,94
5.1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.084.389.924,00	9.594.154.089,00	(490.235.835,00)	95,14
5.1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.965.014.554,00	1.950.165.868,00	(14.848.686,00)	99,24
5.1.04.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.604.900,00	2.154.900,00	(450.000,00)	82,72
5.1.04.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.051.250,00	2.025.000,00	(26.250,00)	98,72
5.1.04.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.675.250,00	2.051.250,00	(624.000,00)	76,68
5.1.04.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.675.250,00	0,00	(2.675.250,00)	0
5.1.04.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.932.541.154,00	1.921.467.968,00	(11.073.186,00)	99,43
5.1.04.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.466.750,00	22.466.750,00	0,00	100,00
5.1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.143.901.351,00	5.809.917.258,00	(333.984.093,00)	94,56
5.1.04.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.143.901.351,00	5.809.917.258,00	(333.984.093,00)	94,56
5.1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.145.241,00	50.145.241,00	0,00	100,00
5.1.04.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.145.241,00	50.145.241,00	0,00	100,00
5.1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.762.778,00	463.710.185,00	(66.052.593,00)	87,53
5.1.04.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.818.898,00	57.443.400,00	(2.375.498,00)	96,03
5.1.04.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.888.800,00	13.658.000,00	(230.800,00)	98,34
5.1.04.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.164.400,00	10.969.000,00	(7.195.400,00)	60,39
5.1.04.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200.628.000,00	199.600.000,00	(1.028.000,00)	99,49
5.1.04.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.500.000,00	25.328.764,00	(3.171.236,00)	88,87
5.1.04.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.762.680,00	156.711.021,00	(52.051.659,00)	75,07
5.1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.160.000,00	37.230.000,00	(1.930.000,00)	95,07
5.1.04.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.160.000,00	37.230.000,00	(1.930.000,00)	95,07
5.1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.595.000,00	540.983.249,00	(22.611.751,00)	95,99
5.1.04.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.878.500,00	91.841.249,00	(22.037.251,00)	80,65
5.1.04.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	449.716.500,00	449.142.000,00	(574.500,00)	99,87
5.1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	792.811.000,00	742.002.288,00	(50.808.712,00)	93,59
5.1.04.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.818.950,00	38.719.100,00	(7.099.850,00)	84,50
5.1.04.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	581.855.040,00	546.717.788,00	(35.137.252,00)	93,96
5.1.04.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.962.010,00	112.817.400,00	(7.144.610,00)	94,04

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.04.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.175.000,00	43.748.000,00	(1.427.000,00)	96,84
5.1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	187.591.940,00	88.527.240,00	(99.064.700,00)	47,19
5.1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.346.800,00	46.453.500,00	(3.893.300,00)	92,27
5.1.04.02.2.01.006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	50.346.800,00	46.453.500,00	(3.893.300,00)	92,27
5.1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	137.245.140,00	42.073.740,00	(95.171.400,00)	30,66
5.1.04.02.2.03.001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	35.129.340,00	0,00	(35.129.340,00)	0
5.1.04.02.2.03.002	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	42.073.740,00	42.073.740,00	0,00	100,00
5.1.04.02.2.03.004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	30.016.560,00	0,00	(30.016.560,00)	0
5.1.04.02.2.03.005	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.025.500,00	0,00	(30.025.500,00)	0
5.1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	938.054.290,00	917.092.684,00	(20.961.606,00)	97,77
5.1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	69.850.720,00	69.850.720,00	0,00	100,00
5.1.04.03.2.02.001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	55.668.720,00	55.668.720,00	0,00	100,00
5.1.04.03.2.02.004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	14.182.000,00	14.182.000,00	0,00	100,00
5.1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	868.203.570,00	847.241.964,00	(20.961.606,00)	97,59
5.1.04.03.2.03.001	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	198.904.320,00	193.463.014,00	(5.441.306,00)	97,26
5.1.04.03.2.03.002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	496.972.950,00	482.722.950,00	(14.250.000,00)	97,13
5.1.04.03.2.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	12.832.000,00	12.416.000,00	(416.000,00)	96,76
5.1.04.03.2.03.006	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	159.494.300,00	158.640.000,00	(854.300,00)	99,46
5.1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	992.105.066,00	936.533.000,00	(55.572.066,00)	94,40
5.1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	992.105.066,00	936.533.000,00	(55.572.066,00)	94,40
5.1.04.05.2.01.002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	992.105.066,00	936.533.000,00	(55.572.066,00)	94,40
5.1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	81.172.400,00	2.100.000,00	(79.072.400,00)	2,59
5.1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	81.172.400,00	2.100.000,00	(79.072.400,00)	2,59
5.1.04.06.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	81.172.400,00	2.100.000,00	(79.072.400,00)	2,59
5.1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	31.341.715.307,00	27.672.038.287,00	(3.669.677.020,00)	88,29
5.1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.586.422.029,00	16.984.749.738,00	(2.601.672.291,00)	86,72
5.1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.592.622,00	117.592.472,00	(22.000.150,00)	84,24
5.1.05.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.595.842,00	32.584.692,00	(20.011.150,00)	61,95
5.1.05.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.981.000,00	1.979.100,00	(1.900,00)	99,90
5.1.05.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.413.950,00	2.413.400,00	(550,00)	99,98
5.1.05.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.175.500,00	4.175.500,00	0,00	100,00
5.1.05.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.006.300,00	3.006.300,00	0,00	100,00
5.1.05.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.917.688,00	27.817.688,00	(1.100.000,00)	96,20
5.1.05.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.502.342,00	45.615.792,00	(886.550,00)	98,09
5.1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.957.180.921,00	13.434.516.902,00	(1.522.664.019,00)	89,82
5.1.05.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.941.118.461,00	13.420.005.202,00	(1.521.113.259,00)	89,82

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.05.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.528.000,00	3.527.450,00	(550,00)	99,98
5.1.05.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.534.460,00	10.984.250,00	(1.550.210,00)	87,63
5.1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.061.200,00	18.689.967,00	(16.371.233,00)	53,31
5.1.05.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35.061.200,00	18.689.967,00	(16.371.233,00)	53,31
5.1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	145.606.180,00	118.630.580,00	(26.975.600,00)	81,47
5.1.05.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	145.606.180,00	118.630.580,00	(26.975.600,00)	81,47
5.1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.064.330.171,00	677.365.608,00	(386.964.563,00)	63,64
5.1.05.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.808.489,00	13.513.800,00	(12.294.689,00)	52,36
5.1.05.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.489.734,00	127.576.300,00	(12.913.434,00)	90,81
5.1.05.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.304.800,00	9.767.900,00	(14.536.900,00)	40,19
5.1.05.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99.197.300,00	47.208.438,00	(51.988.862,00)	47,59
5.1.05.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	229.118.788,00	142.920.800,00	(86.197.988,00)	62,38
5.1.05.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.280.000,00	28.310.000,00	(5.970.000,00)	82,58
5.1.05.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	511.131.060,00	308.068.370,00	(203.062.690,00)	60,27
5.1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	169.234.334,00	61.489.580,00	(107.744.754,00)	36,33
5.1.05.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.870.100,00	36.828.500,00	(63.041.600,00)	36,88
5.1.05.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.364.234,00	24.661.080,00	(44.703.154,00)	35,55
5.1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.330.589.951,00	1.229.332.221,00	(101.257.730,00)	92,39
5.1.05.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.478.000,00	5.450.000,00	(28.000,00)	99,49
5.1.05.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	403.920.500,00	304.281.507,00	(99.638.993,00)	75,33
5.1.05.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	921.191.451,00	919.600.714,00	(1.590.737,00)	99,83
5.1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.744.826.650,00	1.327.132.408,00	(417.694.242,00)	76,06
5.1.05.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	436.325.550,00	366.775.825,00	(69.549.725,00)	84,06
5.1.05.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	949.322.570,00	702.412.583,00	(246.909.987,00)	73,99
5.1.05.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	258.069.105,00	195.389.000,00	(62.680.105,00)	75,71
5.1.05.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.768.000,00	32.970.000,00	(10.798.000,00)	75,33
5.1.05.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.341.425,00	29.585.000,00	(27.756.425,00)	51,59
5.1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.180.284.125,00	3.187.833.241,00	(992.450.884,00)	76,26
5.1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.215.939.400,00	2.867.830.441,00	(348.108.959,00)	89,18
5.1.05.02.2.01.001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	244.907.425,00	196.171.000,00	(48.736.425,00)	80,10
5.1.05.02.2.01.002	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	82.418.475,00	42.050.000,00	(40.368.475,00)	51,02
5.1.05.02.2.01.003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	83.160.925,00	57.509.000,00	(25.651.925,00)	69,15
5.1.05.02.2.01.004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.805.452.575,00	2.572.100.441,00	(233.352.134,00)	91,68
5.1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	888.923.125,00	263.210.000,00	(625.713.125,00)	29,61
5.1.05.02.2.02.001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	630.568.125,00	153.495.000,00	(477.073.125,00)	24,34

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.05.02.2.02.002	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	67.675.000,00	67.675.000,00	0,00	100,00
5.1.05.02.2.02.003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	190.680.000,00	42.040.000,00	(148.640.000,00)	22,05
5.1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	75.421.600,00	56.792.800,00	(18.628.800,00)	75,30
5.1.05.02.2.03.001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	75.421.600,00	56.792.800,00	(18.628.800,00)	75,30
5.1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.242.481.268,00	1.208.924.808,00	(33.556.460,00)	97,30
5.1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	131.224.324,00	121.758.500,00	(9.465.824,00)	92,79
5.1.05.03.2.01.001	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	115.507.324,00	107.653.500,00	(7.853.824,00)	93,20
5.1.05.03.2.01.002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	15.717.000,00	14.105.000,00	(1.612.000,00)	89,74
5.1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.052.721.944,00	1.042.506.308,00	(10.215.636,00)	99,03
5.1.05.03.2.02.002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	41.500.000,00	40.475.000,00	(1.025.000,00)	97,53
5.1.05.03.2.02.003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	967.302.044,00	961.177.308,00	(6.124.736,00)	99,37
5.1.05.03.2.02.006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	35.041.600,00	32.254.500,00	(2.787.100,00)	92,05
5.1.05.03.2.02.008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	8.878.300,00	8.599.500,00	(278.800,00)	96,86
5.1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	58.535.000,00	44.660.000,00	(13.875.000,00)	76,30
5.1.05.03.2.03.004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	58.535.000,00	44.660.000,00	(13.875.000,00)	76,30
5.1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	6.332.527.885,00	6.290.530.500,00	(41.997.385,00)	99,34
5.1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.325.935.885,00	6.283.938.500,00	(41.997.385,00)	99,34
5.1.05.04.2.01.002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.879.962.720,00	5.877.682.000,00	(2.280.720,00)	99,96
5.1.05.04.2.01.006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	222.689.510,00	196.650.000,00	(26.039.510,00)	88,31
5.1.05.04.2.01.008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1.267.840,00	0,00	(1.267.840,00)	0
5.1.05.04.2.01.009	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	222.015.815,00	209.606.500,00	(12.409.315,00)	94,41
5.1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	6.592.000,00	6.592.000,00	0,00	100,00
5.1.05.04.2.03.001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	6.592.000,00	6.592.000,00	0,00	100,00
5.1.06	**SOSIAL**	10.642.884.668,00	9.275.491.172,00	(1.367.393.496,00)	87,15
5.1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.945.061.664,00	6.966.336.535,00	(978.725.129,00)	87,68
5.1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	191.711.096,00	137.030.871,00	(54.680.225,00)	71,48
5.1.06.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.166.653,00	33.998.903,00	(3.167.750,00)	91,48
5.1.06.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.025.500,00	7.519.400,00	(2.506.100,00)	75,00
5.1.06.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.192.250,00	9.694.400,00	(2.497.850,00)	79,51
5.1.06.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.025.500,00	0,00	(10.025.500,00)	0
5.1.06.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12.200.500,00	9.694.400,00	(2.506.100,00)	79,46
5.1.06.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.352.800,00	6.551.800,00	(7.801.000,00)	45,65
5.1.06.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.747.893,00	69.571.968,00	(26.175.925,00)	72,66
5.1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.171.908.043,00	5.028.109.543,00	(143.798.500,00)	97,22
5.1.06.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.129.397.293,00	5.003.138.743,00	(126.258.550,00)	97,54
5.1.06.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.618.975,00	10.398.600,00	(220.375,00)	97,92
5.1.06.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.678.100,00	9.265.000,00	(413.100,00)	95,73

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.06.01.2.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.737.500,00	0,00	(6.737.500,00)	0
5.1.06.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.476.175,00	5.307.200,00	(10.168.975,00)	34,29
5.1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.110.775,00	29.180.000,00	(10.930.775,00)	72,75
5.1.06.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40.110.775,00	29.180.000,00	(10.930.775,00)	72,75
5.1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00
5.1.06.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00
5.1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	829.363.890,00	512.853.820,00	(316.510.070,00)	61,84
5.1.06.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.681.296,00	114.859.600,00	(12.821.696,00)	89,96
5.1.06.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.634.041,00	0,00	(55.634.041,00)	0
5.1.06.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.410.000,00	4.080.000,00	(330.000,00)	92,52
5.1.06.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.322.573,00	37.754.520,00	(8.568.053,00)	81,50
5.1.06.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96.706.000,00	84.372.000,00	(12.334.000,00)	87,25
5.1.06.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	498.609.980,00	271.787.700,00	(226.822.280,00)	54,51
5.1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.168.000,00	0,00	(124.168.000,00)	0
5.1.06.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.168.000,00	0,00	(124.168.000,00)	0
5.1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	636.856.320,00	580.825.633,00	(56.030.687,00)	91,20
5.1.06.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.270.000,00	3.340.000,00	(2.930.000,00)	53,27
5.1.06.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207.900.000,00	187.161.691,00	(20.738.309,00)	90,02
5.1.06.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.686.320,00	390.323.942,00	(32.362.378,00)	92,34
5.1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	931.743.540,00	659.136.668,00	(272.606.872,00)	70,74
5.1.06.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	408.732.756,00	254.538.868,00	(154.193.888,00)	62,28
5.1.06.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	369.345.994,00	354.479.800,00	(14.866.194,00)	95,97
5.1.06.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.697.600,00	33.065.000,00	(25.632.600,00)	56,33
5.1.06.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.967.190,00	17.053.000,00	(77.914.190,00)	17,96
5.1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	492.102.700,00	465.802.400,00	(26.300.300,00)	94,66
5.1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	492.102.700,00	465.802.400,00	(26.300.300,00)	94,66
5.1.06.02.2.03.001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	492.102.700,00	465.802.400,00	(26.300.300,00)	94,66
5.1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.256.925.507,00	918.861.577,00	(338.063.930,00)	73,10
5.1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	799.953.432,00	521.532.527,00	(278.420.905,00)	65,20
5.1.06.04.2.01.001	Penyediaan Permakanan	159.999.655,00	158.896.175,00	(1.103.480,00)	99,31
5.1.06.04.2.01.003	Penyediaan Alat Bantu	447.944.441,00	220.710.966,00	(227.233.475,00)	49,27
5.1.06.04.2.01.005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	133.359.254,00	85.025.304,00	(48.333.950,00)	63,76
5.1.06.04.2.01.011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	58.650.082,00	56.900.082,00	(1.750.000,00)	97,02
5.1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	456.972.075,00	397.329.050,00	(59.643.025,00)	86,95
5.1.06.04.2.02.002	Pemberian Layanan Kedaruratan	37.734.000,00	37.734.000,00	0,00	100,00
5.1.06.04.2.02.003	Penyediaan Permakanan	309.758.825,00	301.710.800,00	(8.048.025,00)	97,40
5.1.06.04.2.02.007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	109.479.250,00	57.884.250,00	(51.595.000,00)	52,87

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	503.309.733,00	492.275.058,00	(11.034.675,00)	97,81
5.1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	179.808.059,00	170.108.059,00	(9.700.000,00)	94,61
5.1.06.05.2.01.001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	179.808.059,00	170.108.059,00	(9.700.000,00)	94,61
5.1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	323.501.674,00	322.166.999,00	(1.334.675,00)	99,59
5.1.06.05.2.02.002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	56.923.384,00	56.553.384,00	(370.000,00)	99,35
5.1.06.05.2.02.003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	266.578.290,00	265.613.615,00	(964.675,00)	99,64
5.1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	354.592.049,00	352.607.649,00	(1.984.400,00)	99,44
5.1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	354.592.049,00	352.607.649,00	(1.984.400,00)	99,44
5.1.06.06.2.01.001	Penyediaan Makanan	354.592.049,00	352.607.649,00	(1.984.400,00)	99,44
5.1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	90.893.015,00	79.607.953,00	(11.285.062,00)	87,58
5.1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	90.893.015,00	79.607.953,00	(11.285.062,00)	87,58
5.1.06.07.2.01.001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	44.999.299,00	44.999.299,00	0,00	100,00
5.1.06.07.2.01.002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24.999.065,00	15.369.510,00	(9.629.555,00)	61,48
5.1.06.07.2.01.003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	20.894.651,00	19.239.144,00	(1.655.507,00)	92,08
5.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	192.754.879.235,00	179.049.435.950,00	(13.705.443.285,00)	92,89
5.2.07	**TENAGA KERJA**	7.651.994.692,00	5.758.894.309,00	(1.893.100.383,00)	75,26
5.2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.107.047.270,00	4.965.812.231,00	(141.235.039,00)	97,23
5.2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.986.872,00	86.366.996,00	(1.619.876,00)	98,16
5.2.07.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.732.500,00	16.250.000,00	(482.500,00)	97,12
5.2.07.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.941.000,00	1.941.000,00	0,00	100,00
5.2.07.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.941.000,00	1.941.000,00	0,00	100,00
5.2.07.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.941.000,00	1.912.500,00	(28.500,00)	98,53
5.2.07.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.691.000,00	2.691.000,00	0,00	100,00
5.2.07.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.502.500,00	3.500.000,00	(2.500,00)	99,93
5.2.07.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.237.872,00	58.131.496,00	(1.106.376,00)	98,13
5.2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.973.553.814,00	3.890.043.327,00	(83.510.487,00)	97,90
5.2.07.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.932.604.172,00	3.849.296.391,00	(83.307.781,00)	97,88
5.2.07.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.199.900,00	4.198.000,00	(1.900,00)	99,95
5.2.07.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	36.749.742,00	36.548.936,00	(200.806,00)	99,45
5.2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.450.650,00	19.893.917,00	(556.733,00)	97,28
5.2.07.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.450.650,00	19.893.917,00	(556.733,00)	97,28
5.2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.641.112,00	288.458.372,00	(28.182.740,00)	91,10
5.2.07.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.292.880,00	16.224.000,00	(68.880,00)	99,58
5.2.07.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.472.248,00	48.786.000,00	(3.686.248,00)	92,97
5.2.07.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.213.472,00	8.155.000,00	(58.472,00)	99,29
5.2.07.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.038.800,00	4.243.800,00	(795.000,00)	84,22
5.2.07.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.338.000,00	6.409.200,00	(2.928.800,00)	68,64
5.2.07.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.630.000,00	44.540.000,00	(90.000,00)	99,80
5.2.07.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.983.000,00	34.413.000,00	(7.570.000,00)	81,97
5.2.07.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.460.440,00	89.485.300,00	(12.975.140,00)	87,34

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.07.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36.212.272,00	36.202.072,00	(10.200,00)	99,97
5.2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.065.645,00	483.622.099,00	(7.443.546,00)	98,48
5.2.07.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.207.600,00	3.200.000,00	(7.600,00)	99,76
5.2.07.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.750.000,00	93.317.099,00	(7.432.901,00)	92,62
5.2.07.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387.108.045,00	387.105.000,00	(3.045,00)	100,00
5.2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.349.177,00	197.427.520,00	(19.921.657,00)	90,83
5.2.07.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.937.807,00	40.993.300,00	(2.944.507,00)	93,30
5.2.07.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.061.370,00	147.084.220,00	(16.977.150,00)	89,65
5.2.07.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	100,00
5.2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	49.999.700,00	48.500.000,00	(1.499.700,00)	97,00
5.2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	49.999.700,00	48.500.000,00	(1.499.700,00)	97,00
5.2.07.02.2.01.001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	49.999.700,00	48.500.000,00	(1.499.700,00)	97,00
5.2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.988.008.623,00	256.018.841,00	(1.731.989.782,00)	12,88
5.2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.935.508.886,00	206.811.104,00	(1.728.697.782,00)	10,69
5.2.07.03.2.01.001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.935.508.886,00	206.811.104,00	(1.728.697.782,00)	10,69
5.2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	52.499.737,00	49.207.737,00	(3.292.000,00)	93,73
5.2.07.03.2.02.001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	52.499.737,00	49.207.737,00	(3.292.000,00)	93,73
5.2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	303.479.087,00	296.191.693,00	(7.287.394,00)	97,60
5.2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	70.163.142,00	68.601.142,00	(1.562.000,00)	97,77
5.2.07.04.2.01.002	Pelayanan antar Kerja	18.887.675,00	18.317.675,00	(570.000,00)	96,98
5.2.07.04.2.01.003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	51.275.467,00	50.283.467,00	(992.000,00)	98,07
5.2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	112.025.709,00	111.484.825,00	(540.884,00)	99,52
5.2.07.04.2.03.003	Job Fair /Bursa Kerja	112.025.709,00	111.484.825,00	(540.884,00)	99,52
5.2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	121.290.236,00	116.105.726,00	(5.184.510,00)	95,73
5.2.07.04.2.04.003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	121.290.236,00	116.105.726,00	(5.184.510,00)	95,73
5.2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	203.460.012,00	192.371.544,00	(11.088.468,00)	94,55
5.2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.361.098,00	57.175.394,00	(1.185.704,00)	97,97
5.2.07.05.2.01.003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	58.361.098,00	57.175.394,00	(1.185.704,00)	97,97
5.2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	145.098.914,00	135.196.150,00	(9.902.764,00)	93,18
5.2.07.05.2.02.001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.328.239,00	36.180.100,00	(9.148.139,00)	79,82
5.2.07.05.2.02.004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	99.770.675,00	99.016.050,00	(754.625,00)	99,24
5.2.09	**PANGAN**	17.390.979.820,00	15.236.097.316,00	(2.154.882.504,00)	87,61
5.2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.801.884.409,00	11.367.256.797,00	(1.434.627.612,00)	88,79
5.2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.836.365,00	45.403.390,00	(24.432.975,00)	65,01

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.09.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.390.000,00	8.926.500,00	(4.463.500,00)	66,67
5.2.09.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.087.000,00	0,00	(5.087.000,00)	0
5.2.09.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.262.950,00	0,00	(3.262.950,00)	0
5.2.09.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.549.925,00	3.725.000,00	(824.925,00)	81,87
5.2.09.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.262.925,00	0,00	(3.262.925,00)	0
5.2.09.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.361.690,00	25.921.640,00	(4.440.050,00)	85,38
5.2.09.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.921.875,00	6.830.250,00	(3.091.625,00)	68,84
5.2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.232.945.066,00	9.106.891.995,00	(1.126.053.071,00)	89,00
5.2.09.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.229.461.166,00	9.104.682.995,00	(1.124.778.171,00)	89,00
5.2.09.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.209.075,00	2.209.000,00	(75,00)	100,00
5.2.09.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.274.825,00	0,00	(1.274.825,00)	0
5.2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.000.840,00	69.270.915,00	(729.925,00)	98,96
5.2.09.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	70.000.840,00	69.270.915,00	(729.925,00)	98,96
5.2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.020.000,00	26.954.000,00	(66.000,00)	99,76
5.2.09.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.020.000,00	26.954.000,00	(66.000,00)	99,76
5.2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	724.456.545,00	658.143.273,00	(66.313.272,00)	90,85
5.2.09.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.363.572,00	89.825.852,00	(1.537.720,00)	98,32
5.2.09.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.314.800,00	877.000,00	(1.437.800,00)	37,89
5.2.09.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.366.718,00	45.266.904,00	(8.099.814,00)	84,82
5.2.09.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	241.653.000,00	224.720.000,00	(16.933.000,00)	92,99
5.2.09.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.890.000,00	16.848.700,00	(41.300,00)	99,76
5.2.09.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	318.868.455,00	280.604.817,00	(38.263.638,00)	88,00
5.2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.531.093,00	104.073.095,00	(14.457.998,00)	87,80
5.2.09.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.732.000,00	33.042.000,00	(1.690.000,00)	95,13
5.2.09.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.919.715,00	68.307.000,00	(2.612.715,00)	96,32
5.2.09.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.879.378,00	2.724.095,00	(10.155.283,00)	21,15
5.2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	785.483.325,00	755.108.264,00	(30.375.061,00)	96,13
5.2.09.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281.771.275,00	252.820.864,00	(28.950.411,00)	89,73
5.2.09.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.712.050,00	502.287.400,00	(1.424.650,00)	99,72
5.2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773.611.175,00	601.411.865,00	(172.199.310,00)	77,74
5.2.09.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.685.950,00	35.907.875,00	(8.778.075,00)	80,36
5.2.09.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	388.776.510,00	269.882.390,00	(118.894.120,00)	69,42
5.2.09.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	289.645.315,00	283.769.600,00	(5.875.715,00)	97,97
5.2.09.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.503.400,00	11.852.000,00	(38.651.400,00)	23,47
5.2.09.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	960.051.568,00	921.446.209,00	(38.605.359,00)	95,98
5.2.09.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	75.996.380,00	75.580.000,00	(416.380,00)	99,45
5.2.09.02.2.01.002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	75.996.380,00	75.580.000,00	(416.380,00)	99,45
5.2.09.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	501.278.108,00	463.594.359,00	(37.683.749,00)	92,48

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.09.02.2.02.001	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	226.211.068,00	211.639.467,00	(14.571.601,00)	93,56
5.2.09.02.2.02.002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	275.067.040,00	251.954.892,00	(23.112.148,00)	91,60
5.2.09.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	1.150.880,00	950.000,00	(200.880,00)	82,55
5.2.09.02.2.04.001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	1.150.880,00	950.000,00	(200.880,00)	82,55
5.2.09.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	381.626.200,00	381.321.850,00	(304.350,00)	99,92
5.2.09.02.2.06.002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	381.626.200,00	381.321.850,00	(304.350,00)	99,92
5.2.09.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	44.424.250,00	33.914.500,00	(10.509.750,00)	76,34
5.2.09.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	467.425.802,00	358.935.392,00	(108.490.410,00)	76,79
5.2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	437.504.579,00	310.044.330,00	(127.460.249,00)	70,87
5.2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	172.717.789,00	150.765.790,00	(21.951.999,00)	87,29
5.2.09.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	16.207.800,00	12.212.200,00	(3.995.600,00)	75,35
5.2.09.03.2.01.001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	16.207.800,00	12.212.200,00	(3.995.600,00)	75,35
5.2.09.03.2.01.001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	36.738.999,00	33.532.000,00	(3.206.999,00)	91,27
5.2.09.03.2.01.002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	64.967.700,00	48.388.400,00	(16.579.300,00)	74,48
5.2.09.03.2.01.003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	5.205.250,00	5.205.250,00	0,00	100,00
5.2.09.03.2.01.004	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	65.805.840,00	63.640.140,00	(2.165.700,00)	96,71
5.2.09.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	415.140.110,00	308.399.700,00	(106.740.410,00)	74,29
5.2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	102.861.300,00	500.000,00	(102.361.300,00)	0,49
5.2.09.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	28.216.450,00	21.702.300,00	(6.514.150,00)	76,91
5.2.09.03.2.02.001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	389.207.535,00	292.819.875,00	(96.387.660,00)	75,23
5.2.09.03.2.02.002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	15.396.175,00	11.358.525,00	(4.037.650,00)	73,77
5.2.09.03.2.02.003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10.536.400,00	4.221.300,00	(6.315.100,00)	40,06
5.2.09.03.2.02.003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	102.861.300,00	500.000,00	(102.361.300,00)	0,49
5.2.09.03.2.02.008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	6.616.450,00	372.300,00	(6.244.150,00)	5,63
5.2.09.03.2.02.009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	21.600.000,00	21.330.000,00	(270.000,00)	98,75
5.2.09.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	52.285.692,00	50.535.692,00	(1.750.000,00)	96,65
5.2.09.03.2.03.001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	27.497.315,00	25.897.315,00	(1.600.000,00)	94,18
5.2.09.03.2.03.002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	24.788.377,00	24.638.377,00	(150.000,00)	99,39
5.2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	161.925.490,00	158.778.540,00	(3.146.950,00)	98,06
5.2.09.03.2.04.002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	161.925.490,00	158.778.540,00	(3.146.950,00)	98,06
5.2.09.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	698.661.678,00	604.201.313,00	(94.460.365,00)	86,48
5.2.09.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.211.901.174,00	1.126.343.550,00	(85.557.624,00)	92,94
5.2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	334.314.135,00	298.141.435,00	(36.172.700,00)	89,18
5.2.09.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	100.308.688,00	87.090.800,00	(13.217.888,00)	86,82
5.2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	28.573.035,00	28.573.035,00	0,00	100,00
5.2.09.04.2.01.001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	28.573.035,00	28.573.035,00	0,00	100,00
5.2.09.04.2.01.001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	51.742.570,00	46.675.800,00	(5.066.770,00)	90,21

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.09.04.2.01.002	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.566.118,00	40.415.000,00	(8.151.118,00)	83,22
5.2.09.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	282.838.765,00	277.661.465,00	(5.177.300,00)	98,17
5.2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	305.741.100,00	269.568.400,00	(36.172.700,00)	88,17
5.2.09.04.2.02.001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	282.838.765,00	277.661.465,00	(5.177.300,00)	98,17
5.2.09.04.2.02.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	40.082.250,00	26.352.000,00	(13.730.250,00)	65,74
5.2.09.04.2.02.002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	265.658.850,00	243.216.400,00	(22.442.450,00)	91,55
5.2.09.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	285.574.355,00	251.568.000,00	(34.006.355,00)	88,09
5.2.09.04.2.03.001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	72.294.525,00	57.335.000,00	(14.959.525,00)	79,31
5.2.09.04.2.03.002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	213.279.830,00	194.233.000,00	(19.046.830,00)	91,07
5.2.09.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	929.062.409,00	848.682.085,00	(80.380.324,00)	91,35
5.2.09.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	312.778.635,00	265.542.513,00	(47.236.122,00)	84,90
5.2.09.04.2.04.001	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	263.998.640,00	226.958.213,00	(37.040.427,00)	85,97
5.2.09.04.2.04.002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	48.779.995,00	38.584.300,00	(10.195.695,00)	79,10
5.2.09.04.2.04.002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	525.575.684,00	450.373.585,00	(75.202.099,00)	85,69
5.2.09.04.2.04.003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	387.369.600,00	384.656.000,00	(2.713.600,00)	99,30
5.2.09.04.2.04.005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
5.2.09.04.2.04.006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	15.367.125,00	12.902.500,00	(2.464.625,00)	83,96
5.2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	16.218.175,00	13.413.500,00	(2.804.675,00)	82,71
5.2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	16.218.175,00	13.413.500,00	(2.804.675,00)	82,71
5.2.09.05.2.01.001	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	12.088.825,00	11.348.825,00	(740.000,00)	93,88
5.2.09.05.2.01.003	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4.129.350,00	2.064.675,00	(2.064.675,00)	50,00
5.2.09.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	336.861.150,00	132.293.290,00	(204.567.860,00)	39,27
5.2.09.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	336.861.150,00	132.293.290,00	(204.567.860,00)	39,27
5.2.09.06.2.02.001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	336.861.150,00	132.293.290,00	(204.567.860,00)	39,27
5.2.09.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	81.732.900,00	70.107.000,00	(11.625.900,00)	85,78
5.2.09.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	81.732.900,00	70.107.000,00	(11.625.900,00)	85,78
5.2.09.07.2.01.001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
5.2.09.07.2.01.002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	70.232.900,00	58.607.000,00	(11.625.900,00)	83,45
5.2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**	37.307.485.091,00	36.203.177.098,00	(1.104.307.993,00)	97,04
5.2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.361.421.112,00	21.508.400.579,00	(853.020.533,00)	96,19
5.2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.029.775,00	76.863.272,00	(1.166.503,00)	98,51
5.2.11.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.909.625,00	6.817.350,00	(92.275,00)	98,66
5.2.11.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.259.950,00	2.165.700,00	(94.250,00)	95,83
5.2.11.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.322.375,00	2.222.450,00	(99.925,00)	95,70
5.2.11.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.037.375,00	1.872.450,00	(164.925,00)	91,91
5.2.11.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.930.950,00	3.686.900,00	(244.050,00)	93,79
5.2.11.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.838.000,00	49.533.798,00	(304.202,00)	99,39
5.2.11.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.731.500,00	10.564.624,00	(166.876,00)	98,44

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.049.682.456,00	18.354.938.550,00	(694.743.906,00)	96,35
5.2.11.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.984.157.531,00	18.289.635.328,00	(694.522.203,00)	96,34
5.2.11.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.976.375,00	7.975.000,00	(1.375,00)	99,98
5.2.11.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	57.548.550,00	57.328.222,00	(220.328,00)	99,62
5.2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	91.170.950,00	90.841.021,00	(329.929,00)	99,64
5.2.11.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	91.170.950,00	90.841.021,00	(329.929,00)	99,64
5.2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.705.850,00	87.376.021,00	(329.829,00)	99,62
5.2.11.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	87.705.850,00	87.376.021,00	(329.829,00)	99,62
5.2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	932.147.200,00	867.821.000,00	(64.326.200,00)	93,10
5.2.11.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.682.540,00	105.813.000,00	(869.540,00)	99,18
5.2.11.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.645.000,00	9.500.000,00	(145.000,00)	98,50
5.2.11.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.152.700,00	68.940.000,00	(212.700,00)	99,69
5.2.11.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	379.172.400,00	353.042.400,00	(26.130.000,00)	93,11
5.2.11.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.000.000,00	17.850.000,00	(9.150.000,00)	66,11
5.2.11.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.494.560,00	312.675.600,00	(27.818.960,00)	91,83
5.2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.553.360,00	55.533.000,00	(20.360,00)	99,96
5.2.11.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.748.560,00	14.739.000,00	(9.560,00)	99,94
5.2.11.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.804.800,00	40.794.000,00	(10.800,00)	99,97
5.2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.110.034.366,00	1.093.006.735,00	(17.027.631,00)	98,47
5.2.11.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.296.000,00	7.100.000,00	(3.196.000,00)	68,96
5.2.11.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.334.400,00	212.922.827,00	(13.411.573,00)	94,07
5.2.11.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	873.403.966,00	872.983.908,00	(420.058,00)	99,95
5.2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	957.097.155,00	882.020.980,00	(75.076.175,00)	92,16
5.2.11.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.355.450,00	41.557.140,00	(3.798.310,00)	91,63
5.2.11.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	511.207.030,00	441.618.400,00	(69.588.630,00)	86,39
5.2.11.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	342.582.675,00	341.695.440,00	(887.235,00)	99,74
5.2.11.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.952.000,00	57.150.000,00	(802.000,00)	98,62
5.2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	119.567.200,00	117.347.000,00	(2.220.200,00)	98,14
5.2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	119.567.200,00	117.347.000,00	(2.220.200,00)	98,14
5.2.11.02.2.02.001	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00
5.2.11.02.2.02.002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	102.167.200,00	99.947.000,00	(2.220.200,00)	97,83
5.2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	150.940.907,00	141.099.990,00	(9.840.917,00)	93,48
5.2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	110.047.855,00	100.316.923,00	(9.730.932,00)	91,16
5.2.11.03.2.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	70.149.515,00	61.730.500,00	(8.419.015,00)	88,00
5.2.11.03.2.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	39.898.340,00	38.586.423,00	(1.311.917,00)	96,71
5.2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	40.893.052,00	40.783.067,00	(109.985,00)	99,73

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.11.03.2.03.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	13.733.100,00	13.731.048,00	(2.052,00)	99,99
5.2.11.03.2.03.003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1.480.700,00	1.480.700,00	0,00	100,00
5.2.11.03.2.03.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	25.679.252,00	25.571.319,00	(107.933,00)	99,58
5.2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	274.854.541,00	261.021.027,00	(13.833.514,00)	94,97
5.2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	274.854.541,00	261.021.027,00	(13.833.514,00)	94,97
5.2.11.04.2.01.005	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	274.854.541,00	261.021.027,00	(13.833.514,00)	94,97
5.2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	45.423.850,00	45.309.945,00	(113.905,00)	99,75
5.2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	34.047.850,00	33.936.047,00	(111.803,00)	99,67
5.2.11.05.2.01.002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	34.047.850,00	33.936.047,00	(111.803,00)	99,67
5.2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.376.000,00	11.373.898,00	(2.102,00)	99,98
5.2.11.05.2.02.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	11.376.000,00	11.373.898,00	(2.102,00)	99,98
5.2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	67.796.350,00	67.576.122,00	(220.228,00)	99,68
5.2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67.796.350,00	67.576.122,00	(220.228,00)	99,68
5.2.11.06.2.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	39.382.300,00	39.272.699,00	(109.601,00)	99,72
5.2.11.06.2.01.003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.414.050,00	28.303.423,00	(110.627,00)	99,61
5.2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	13.926.000,00	13.926.000,00	0,00	100,00
5.2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.926.000,00	13.926.000,00	0,00	100,00
5.2.11.08.2.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	3.311.000,00	3.311.000,00	0,00	100,00
5.2.11.08.2.01.002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	10.615.000,00	10.615.000,00	0,00	100,00
5.2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	65.521.150,00	55.027.471,00	(10.493.679,00)	83,98
5.2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.521.150,00	55.027.471,00	(10.493.679,00)	83,98
5.2.11.09.2.01.001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65.521.150,00	55.027.471,00	(10.493.679,00)	83,98
5.2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	5.238.175,00	5.237.149,00	(1.026,00)	99,98
5.2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	5.238.175,00	5.237.149,00	(1.026,00)	99,98
5.2.11.10.2.01.001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	4.037.150,00	4.036.124,00	(1.026,00)	99,97
5.2.11.10.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1.201.025,00	1.201.025,00	0,00	100,00
5.2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.202.795.806,00	13.988.231.815,00	(214.563.991,00)	98,49
5.2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	14.202.795.806,00	13.988.231.815,00	(214.563.991,00)	98,49

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.11.11.2.01.002	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	200.809.800,00	190.373.983,00	(10.435.817,00)	94,80
5.2.11.11.2.01.003	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	8.436.385.048,00	8.323.497.278,00	(112.887.770,00)	98,66
5.2.11.11.2.01.004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	33.356.500,00	33.244.847,00	(111.653,00)	99,67
5.2.11.11.2.01.006	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	24.194.550,00	22.773.120,00	(1.421.430,00)	94,12
5.2.11.11.2.01.007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.508.049.908,00	5.418.342.587,00	(89.707.321,00)	98,37
5.2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	10.521.075.305,00	9.832.616.825,00	(688.458.480,00)	93,46
5.2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.815.430.715,00	9.177.754.910,00	(637.675.805,00)	93,50
5.2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.336.446,00	211.308.586,00	(3.027.860,00)	98,59
5.2.12.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.299.970,00	14.499.970,00	(1.800.000,00)	88,96
5.2.12.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.596.450,00	1.596.450,00	0,00	100,00
5.2.12.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.596.450,00	1.596.450,00	0,00	100,00
5.2.12.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.596.450,00	1.596.450,00	0,00	100,00
5.2.12.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.596.450,00	1.596.450,00	0,00	100,00
5.2.12.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	177.063.976,00	175.836.116,00	(1.227.860,00)	99,31
5.2.12.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.586.700,00	14.586.700,00	0,00	100,00
5.2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.056.834.449,00	3.955.750.127,00	(101.084.322,00)	97,51
5.2.12.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.054.629.749,00	3.953.545.427,00	(101.084.322,00)	97,51
5.2.12.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.204.700,00	2.204.700,00	0,00	100,00
5.2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.640.800,00	23.040.000,00	(85.600.800,00)	21,21
5.2.12.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.175.000,00	23.040.000,00	(135.000,00)	99,42
5.2.12.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85.465.800,00	0,00	(85.465.800,00)	0
5.2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.835.151.106,00	1.771.150.365,00	(64.000.741,00)	96,51
5.2.12.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.177.407.626,00	1.151.964.700,00	(25.442.926,00)	97,84
5.2.12.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.310.800,00	2.571.600,00	(739.200,00)	77,67
5.2.12.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	419.099.500,00	390.963.412,00	(28.136.088,00)	93,29
5.2.12.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.688.000,00	29.997.000,00	(1.691.000,00)	94,66
5.2.12.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.645.180,00	195.653.653,00	(7.991.527,00)	96,08
5.2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.568.038.190,00	2.260.389.000,00	(307.649.190,00)	88,02
5.2.12.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.568.038.190,00	2.260.389.000,00	(307.649.190,00)	88,02
5.2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.468.516,00	621.177.457,00	(36.291.059,00)	94,48
5.2.12.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.953.600,00	7.950.000,00	(3.600,00)	99,95
5.2.12.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267.586.200,00	233.424.841,00	(34.161.359,00)	87,23
5.2.12.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	381.928.716,00	379.802.616,00	(2.126.100,00)	99,44
5.2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.961.208,00	334.939.375,00	(40.021.833,00)	89,33
5.2.12.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.168.950,00	39.467.900,00	(701.050,00)	98,25
5.2.12.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.349.750,00	207.823.175,00	(13.526.575,00)	93,89
5.2.12.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.019.900,00	23.232.400,00	(25.787.500,00)	47,39

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.12.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.420.900,00	53.415.900,00	(5.000,00)	99,99
5.2.12.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.001.708,00	11.000.000,00	(1.708,00)	99,98
5.2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	131.363.704,00	129.185.959,00	(2.177.745,00)	98,34
5.2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	131.363.704,00	129.185.959,00	(2.177.745,00)	98,34
5.2.12.02.2.01.004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	108.733.704,00	106.555.959,00	(2.177.745,00)	98,00
5.2.12.02.2.01.005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	22.630.000,00	22.630.000,00	0,00	100,00
5.2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	61.999.000,00	53.979.000,00	(8.020.000,00)	87,06
5.2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	61.999.000,00	53.979.000,00	(8.020.000,00)	87,06
5.2.12.03.2.01.002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	61.999.000,00	53.979.000,00	(8.020.000,00)	87,06
5.2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	502.041.886,00	461.456.956,00	(40.584.930,00)	91,92
5.2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	502.041.886,00	461.456.956,00	(40.584.930,00)	91,92
5.2.12.04.2.03.003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	502.041.886,00	461.456.956,00	(40.584.930,00)	91,92
5.2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	100,00
5.2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	100,00
5.2.12.05.2.01.002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	100,00
5.2.14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	13.267.575.622,00	11.617.520.183,00	(1.650.055.439,00)	87,56
5.2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.878.407.336,00	7.548.929.627,00	(329.477.709,00)	95,82
5.2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.269.344,00	106.286.619,00	(5.982.725,00)	94,67
5.2.14.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.428.084,00	41.545.584,00	(1.882.500,00)	95,67
5.2.14.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.240.000,00	3.470.000,00	(770.000,00)	81,84
5.2.14.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.855.000,00	3.585.000,00	(270.000,00)	93,00
5.2.14.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.470.000,00	3.292.625,00	(177.375,00)	94,89
5.2.14.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.470.000,00	3.425.750,00	(44.250,00)	98,72
5.2.14.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.658.000,00	5.451.200,00	(206.800,00)	96,34
5.2.14.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.148.260,00	45.516.460,00	(2.631.800,00)	94,53
5.2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.133.289.857,00	6.030.321.124,00	(102.968.733,00)	98,32
5.2.14.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.129.289.857,00	6.026.589.024,00	(102.700.833,00)	98,32
5.2.14.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	1.816.500,00	(183.500,00)	90,83
5.2.14.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000,00	1.915.600,00	(84.400,00)	95,78
5.2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.298.100,00	26.988.911,00	(8.309.189,00)	76,46
5.2.14.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35.298.100,00	26.988.911,00	(8.309.189,00)	76,46
5.2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.719.892,00	306.599.370,00	(19.120.522,00)	94,13
5.2.14.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.944.851,00	9.614.750,00	(330.101,00)	96,68
5.2.14.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.937.280,00	19.519.800,00	(417.480,00)	97,91
5.2.14.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.562.536,00	6.546.800,00	(15.736,00)	99,76
5.2.14.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.929.000,00	1.800.000,00	(129.000,00)	93,31
5.2.14.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.052.925,00	10.446.200,00	(2.606.725,00)	80,03
5.2.14.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.392.000,00	27.900.000,00	(492.000,00)	98,27
5.2.14.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.666.000,00	19.422.220,00	(1.243.780,00)	93,98
5.2.14.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.235.300,00	211.349.600,00	(13.885.700,00)	93,84

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.155.133,00	65.256.850,00	(53.898.283,00)	54,77
5.2.14.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	17.082.000,00	16.646.850,00	(435.150,00)	97,45
5.2.14.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.173.760,00	12.800.000,00	(44.373.760,00)	22,39
5.2.14.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.899.373,00	35.810.000,00	(9.089.373,00)	79,76
5.2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.105.073,00	515.693.464,00	(52.411.609,00)	90,77
5.2.14.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71.364.692,00	61.228.098,00	(10.136.594,00)	85,80
5.2.14.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.528.000,00	108.489.616,00	(36.038.384,00)	75,06
5.2.14.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	352.212.381,00	345.975.750,00	(6.236.631,00)	98,23
5.2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.569.937,00	497.783.289,00	(86.786.648,00)	85,15
5.2.14.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	227.903.400,00	190.041.912,00	(37.861.488,00)	83,39
5.2.14.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	326.831.537,00	286.891.300,00	(39.940.237,00)	87,78
5.2.14.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.975.000,00	6.700.077,00	(7.274.923,00)	47,94
5.2.14.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.860.000,00	14.150.000,00	(1.710.000,00)	89,22
5.2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	237.095.531,00	187.889.881,00	(49.205.650,00)	79,25
5.2.14.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	74.952.398,00	66.284.750,00	(8.667.648,00)	88,44
5.2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	96.086.275,00	60.769.375,00	(35.316.900,00)	63,24
5.2.14.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	13.656.500,00	8.488.750,00	(5.167.750,00)	62,16
5.2.14.02.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	13.656.500,00	8.488.750,00	(5.167.750,00)	62,16
5.2.14.02.2.01.005	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	46.086.525,00	36.077.500,00	(10.009.025,00)	78,28
5.2.14.02.2.01.009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	49.999.750,00	24.691.875,00	(25.307.875,00)	49,38
5.2.14.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	61.295.898,00	57.796.000,00	(3.499.898,00)	94,29
5.2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	141.009.256,00	127.120.506,00	(13.888.750,00)	90,15
5.2.14.02.2.02.002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	61.295.898,00	57.796.000,00	(3.499.898,00)	94,29
5.2.14.02.2.02.011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	99.999.256,00	90.943.506,00	(9.055.750,00)	90,94
5.2.14.02.2.02.013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	41.010.000,00	36.177.000,00	(4.833.000,00)	88,22
5.2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.343.667.122,00	1.721.216.036,00	(622.451.086,00)	73,44
5.2.14.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	29.672.200,00	28.520.000,00	(1.152.200,00)	96,12
5.2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	836.979.615,00	674.633.675,00	(162.345.940,00)	80,60
5.2.14.03.2.01.001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	48.522.140,00	41.021.350,00	(7.500.790,00)	84,54
5.2.14.03.2.01.003	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	150.793.645,00	131.428.875,00	(19.364.770,00)	87,16
5.2.14.03.2.01.004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	149.983.880,00	83.750.000,00	(66.233.880,00)	55,84
5.2.14.03.2.01.005	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	26.215.000,00	23.775.000,00	(2.440.000,00)	90,69
5.2.14.03.2.01.006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	185.000.000,00	141.464.000,00	(43.536.000,00)	76,47
5.2.14.03.2.01.007	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	132.265.000,00	123.408.500,00	(8.856.500,00)	93,30

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.14.03.2.01.008	Pengendalian Program KKBPK	144.199.950,00	129.785.950,00	(14.414.000,00)	90,00
5.2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	223.649.650,00	214.849.650,00	(8.800.000,00)	96,07
5.2.14.03.2.02.004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	223.649.650,00	214.849.650,00	(8.800.000,00)	96,07
5.2.14.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.672.200,00	28.520.000,00	(1.152.200,00)	96,12
5.2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.088.039.832,00	710.532.711,00	(377.507.121,00)	65,30
5.2.14.03.2.03.001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	100,00
5.2.14.03.2.03.003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	829.928.551,00	465.495.920,00	(364.432.631,00)	56,09
5.2.14.03.2.03.004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.672.200,00	28.520.000,00	(1.152.200,00)	96,12
5.2.14.03.2.03.008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	66.300.000,00	66.300.000,00	0,00	100,00
5.2.14.03.2.03.010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	41.757.825,00	41.757.825,00	0,00	100,00
5.2.14.03.2.03.011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	113.153.456,00	100.078.966,00	(13.074.490,00)	88,45
5.2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	194.998.025,00	121.200.000,00	(73.798.025,00)	62,15
5.2.14.03.2.04.003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	194.998.025,00	121.200.000,00	(73.798.025,00)	62,15
5.2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.207.892.898,00	1.728.919.042,00	(478.973.856,00)	78,31
5.2.14.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	256.515.940,00	168.807.500,00	(87.708.440,00)	65,81
5.2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.162.642.148,00	1.690.869.042,00	(471.773.106,00)	78,19
5.2.14.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	256.515.940,00	168.807.500,00	(87.708.440,00)	65,81
5.2.14.04.2.01.002	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	234.800.000,00	(125.200.000,00)	65,22
5.2.14.04.2.01.003	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	167.488.648,00	123.952.542,00	(43.536.106,00)	74,01
5.2.14.04.2.01.003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	256.515.940,00	168.807.500,00	(87.708.440,00)	65,81
5.2.14.04.2.01.004	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.453.500,00	4.226.500,00	(2.227.000,00)	65,49
5.2.14.04.2.01.005	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.628.700.000,00	1.327.890.000,00	(300.810.000,00)	81,53
5.2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	45.250.750,00	38.050.000,00	(7.200.750,00)	84,09
5.2.14.04.2.02.004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	45.250.750,00	38.050.000,00	(7.200.750,00)	84,09
5.2.14.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	50.697.597,00	50.647.197,00	(50.400,00)	99,90
5.2.14.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.697.597,00	50.647.197,00	(50.400,00)	99,90
5.2.14.05.2.01.001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	50.697.597,00	50.647.197,00	(50.400,00)	99,90
5.2.14.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	88.127.425,00	41.243.750,00	(46.883.675,00)	46,80

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.14.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	88.127.425,00	41.243.750,00	(46.883.675,00)	46,80
5.2.14.06.2.02.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.403.450,00	19.930.000,00	(38.473.450,00)	34,12
5.2.14.06.2.02.004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.723.975,00	21.313.750,00	(8.410.225,00)	71,71
5.2.14.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100.547.175,00	75.062.400,00	(25.484.775,00)	74,65
5.2.14.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.547.175,00	75.062.400,00	(25.484.775,00)	74,65
5.2.14.07.2.02.001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.533.200,00	63.854.900,00	(21.678.300,00)	74,66
5.2.14.07.2.02.004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	15.013.975,00	11.207.500,00	(3.806.475,00)	74,65
5.2.15	**PERHUBUNGAN**	27.152.591.117,00	26.425.875.816,00	(726.715.301,00)	97,32
5.2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.843.080.654,00	22.650.691.770,00	(192.388.884,00)	99,16
5.2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	284.479.584,00	279.882.093,00	(4.597.491,00)	98,38
5.2.15.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.748.000,00	1.747.000,00	(1.000,00)	99,94
5.2.15.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.132.000,00	1.131.700,00	(300,00)	99,97
5.2.15.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.132.000,00	1.131.400,00	(600,00)	99,95
5.2.15.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.132.000,00	1.131.400,00	(600,00)	99,95
5.2.15.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.132.000,00	1.131.700,00	(300,00)	99,97
5.2.15.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	273.297.584,00	268.703.993,00	(4.593.591,00)	98,32
5.2.15.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.906.000,00	4.904.900,00	(1.100,00)	99,98
5.2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.245.286.510,00	12.111.917.156,00	(133.369.354,00)	98,91
5.2.15.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.240.286.510,00	12.106.922.956,00	(133.363.554,00)	98,91
5.2.15.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	4.994.200,00	(5.800,00)	99,88
5.2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.507.920,00	353.458.740,00	(25.049.180,00)	93,38
5.2.15.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.035.220,00	54.293.000,00	(3.742.220,00)	93,55
5.2.15.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.929.000,00	1.610.000,00	(319.000,00)	83,46
5.2.15.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.782.100,00	23.313.800,00	(3.468.300,00)	87,05
5.2.15.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120.688.000,00	117.764.000,00	(2.924.000,00)	97,58
5.2.15.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.400.000,00	15.972.000,00	(1.428.000,00)	91,79
5.2.15.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.673.600,00	140.505.940,00	(13.167.660,00)	91,43
5.2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.947.600,00	1.247.760,00	(16.699.840,00)	6,95
5.2.15.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.947.600,00	1.247.760,00	(16.699.840,00)	6,95
5.2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.550.235.700,00	9.547.462.311,00	(2.773.389,00)	99,97
5.2.15.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.715.976.000,00	8.714.402.611,00	(1.573.389,00)	99,98
5.2.15.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	834.259.700,00	833.059.700,00	(1.200.000,00)	99,86
5.2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.623.340,00	356.723.710,00	(9.899.630,00)	97,30

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.15.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.211.500,00	38.674.041,00	(537.459,00)	98,63
5.2.15.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	304.723.700,00	295.449.879,00	(9.273.821,00)	96,96
5.2.15.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.388.140,00	8.364.790,00	(23.350,00)	99,72
5.2.15.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.300.000,00	14.235.000,00	(65.000,00)	99,55
5.2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.309.510.463,00	3.775.184.046,00	(534.326.417,00)	87,60
5.2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.003.745.418,00	972.769.200,00	(30.976.218,00)	96,91
5.2.15.02.2.02.002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	520.132.242,00	489.837.200,00	(30.295.042,00)	94,18
5.2.15.02.2.02.004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	483.613.176,00	482.932.000,00	(681.176,00)	99,86
5.2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	284.000.000,00	283.559.150,00	(440.850,00)	99,84
5.2.15.02.2.04.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	284.000.000,00	283.559.150,00	(440.850,00)	99,84
5.2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	507.593.206,00	479.877.716,00	(27.715.490,00)	94,54
5.2.15.02.2.05.001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	78.942.840,00	69.355.820,00	(9.587.020,00)	87,86
5.2.15.02.2.05.004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	194.437.470,00	191.689.000,00	(2.748.470,00)	98,59
5.2.15.02.2.05.007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	54.652.000,00	43.652.000,00	(11.000.000,00)	79,87
5.2.15.02.2.05.010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	179.560.896,00	175.180.896,00	(4.380.000,00)	97,56
5.2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	649.690.000,00	629.226.000,00	(20.464.000,00)	96,85
5.2.15.02.2.06.002	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	130.000.000,00	123.571.000,00	(6.429.000,00)	95,05
5.2.15.02.2.06.004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	501.690.000,00	489.340.000,00	(12.350.000,00)	97,54
5.2.15.02.2.06.005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	18.000.000,00	16.315.000,00	(1.685.000,00)	90,64
5.2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	27.814.000,00	25.884.000,00	(1.930.000,00)	93,06
5.2.15.02.2.08.004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	27.814.000,00	25.884.000,00	(1.930.000,00)	93,06
5.2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.802.799.859,00	1.350.000.000,00	(452.799.859,00)	74,88
5.2.15.02.2.09.001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.802.799.859,00	1.350.000.000,00	(452.799.859,00)	74,88
5.2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.867.980,00	33.867.980,00	0,00	100,00
5.2.15.02.2.14.001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	33.867.980,00	33.867.980,00	0,00	100,00
5.2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	19.704.237.657,00	18.181.356.832,00	(1.522.880.825,00)	92,27
5.2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.234.276.501,00	12.411.944.431,00	(822.332.070,00)	93,79
5.2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.275.265,00	111.800.965,00	(36.474.300,00)	75,40
5.2.16.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.991.114,00	19.511.914,00	(15.479.200,00)	55,76
5.2.16.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.105.138,00	5.195.638,00	(2.909.500,00)	64,10
5.2.16.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.751.338,00	5.195.638,00	(1.555.700,00)	76,96

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.16.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.124.238,00	7.124.238,00	0,00	100,00
5.2.16.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.756.288,00	5.195.638,00	(1.560.650,00)	76,90
5.2.16.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.584.671,00	22.883.671,00	(4.701.000,00)	82,96
5.2.16.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.962.478,00	46.694.228,00	(10.268.250,00)	81,97
5.2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.746.422.239,00	7.547.598.045,00	(198.824.194,00)	97,43
5.2.16.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.738.184.739,00	7.547.598.045,00	(190.586.694,00)	97,54
5.2.16.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.998.900,00	0,00	(2.998.900,00)	0
5.2.16.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.238.600,00	0,00	(5.238.600,00)	0
5.2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.893.604,00	0,00	(22.893.604,00)	0
5.2.16.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	22.893.604,00	0,00	(22.893.604,00)	0
5.2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.896.000,00	21.012.000,00	(2.884.000,00)	87,93
5.2.16.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.896.000,00	21.012.000,00	(2.884.000,00)	87,93
5.2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	744.414.416,00	595.469.745,00	(148.944.671,00)	79,99
5.2.16.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.268.110,00	56.697.200,00	(2.570.910,00)	95,66
5.2.16.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.243.800,00	4.050.000,00	(193.800,00)	95,43
5.2.16.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	116.987.480,00	101.785.075,00	(15.202.405,00)	87,01
5.2.16.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.552.000,00	21.552.000,00	0,00	100,00
5.2.16.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	56.250.000,00	33.000.000,00	(23.250.000,00)	58,67
5.2.16.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	486.113.026,00	378.385.470,00	(107.727.556,00)	77,84
5.2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.207.204.650,00	2.121.837.000,00	(85.367.650,00)	96,13
5.2.16.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.207.204.650,00	2.121.837.000,00	(85.367.650,00)	96,13
5.2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.002.224.332,00	936.276.226,00	(65.948.106,00)	93,42
5.2.16.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	418.946.600,00	358.122.779,00	(60.823.821,00)	85,48
5.2.16.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	583.277.732,00	578.153.447,00	(5.124.285,00)	99,12
5.2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.338.945.995,00	1.077.950.450,00	(260.995.545,00)	80,51
5.2.16.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.570.200,00	26.905.800,00	(14.664.400,00)	64,72
5.2.16.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	373.118.510,00	185.788.800,00	(187.329.710,00)	49,79
5.2.16.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	793.284.605,00	770.160.000,00	(23.124.605,00)	97,08
5.2.16.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.670.200,00	25.500.000,00	(29.170.200,00)	46,64
5.2.16.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.302.480,00	69.595.850,00	(6.706.630,00)	91,21
5.2.16.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	278.947.607,00	196.038.248,00	(82.909.359,00)	70,28
5.2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.630.380.924,00	3.398.158.484,00	(232.222.440,00)	93,60
5.2.16.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	253.989.680,00	139.446.036,00	(114.543.644,00)	54,90
5.2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.630.380.924,00	3.398.158.484,00	(232.222.440,00)	93,60
5.2.16.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	278.947.607,00	196.038.248,00	(82.909.359,00)	70,28
5.2.16.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	194.310.380,00	111.479.736,00	(82.830.644,00)	57,37
5.2.16.02.2.01.001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.365.584,00	2.170.000,00	(36.195.584,00)	5,66
5.2.16.02.2.01.001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2.700.000,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	50,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.16.02.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	116.659.226,00	94.110.092,00	(22.549.134,00)	80,67
5.2.16.02.2.01.002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	45.698.000,00	15.300.000,00	(30.398.000,00)	33,48
5.2.16.02.2.01.002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	83.131.596,00	70.869.096,00	(12.262.500,00)	85,25
5.2.16.02.2.01.002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31.564.145,00	19.288.000,00	(12.276.145,00)	61,11
5.2.16.02.2.01.003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	18.477.500,00	18.477.500,00	0,00	100,00
5.2.16.02.2.01.003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	31.651.815,00	9.500.000,00	(22.151.815,00)	30,01
5.2.16.02.2.01.004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	11.358.200,00	11.358.200,00	0,00	100,00
5.2.16.02.2.01.004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	92.728.836,00	80.521.736,00	(12.207.100,00)	86,84
5.2.16.02.2.01.004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	233.485.672,00	225.903.872,00	(7.581.800,00)	96,75
5.2.16.02.2.01.005	Pengembangan Infrastruktur	38.457.456,00	26.442.456,00	(12.015.000,00)	68,76
5.2.16.02.2.01.005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.336.999.844,00	1.180.495.644,00	(156.504.200,00)	88,29
5.2.16.02.2.01.006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	48.297.225,00	30.350.000,00	(17.947.225,00)	62,84
5.2.16.02.2.01.006	Pelayanan Informasi Publik	421.718.692,00	414.880.392,00	(6.838.300,00)	98,38
5.2.16.02.2.01.007	Layanan Hubungan Media	311.609.900,00	309.153.400,00	(2.456.500,00)	99,21
5.2.16.02.2.01.008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	361.071.740,00	330.989.800,00	(30.081.940,00)	91,67
5.2.16.02.2.01.010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	9.143.000,00	0,00	(9.143.000,00)	0
5.2.16.02.2.01.011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	870.520.480,00	864.516.280,00	(6.004.200,00)	99,31
5.2.16.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	59.679.300,00	27.966.300,00	(31.713.000,00)	46,86
5.2.16.02.2.02.001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	59.679.300,00	27.966.300,00	(31.713.000,00)	46,86
5.2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.306.642.945,00	2.035.769.633,00	(270.873.312,00)	88,26
5.2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.510.674.357,00	1.414.903.618,00	(95.770.739,00)	93,66
5.2.16.03.2.01.001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	40.685.000,00	38.847.000,00	(1.838.000,00)	95,48
5.2.16.03.2.01.002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.799.500,00	0,00	(31.799.500,00)	0
5.2.16.03.2.01.003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.438.189.857,00	1.376.056.618,00	(62.133.239,00)	95,68
5.2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	795.968.588,00	620.866.015,00	(175.102.573,00)	78,00
5.2.16.03.2.02.001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.619.750,00	3.793.450,00	(45.826.300,00)	7,65
5.2.16.03.2.02.002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	6.717.350,00	0,00	(6.717.350,00)	0
5.2.16.03.2.02.003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	65.633.200,00	63.091.800,00	(2.541.400,00)	96,13
5.2.16.03.2.02.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	4.699.850,00	0,00	(4.699.850,00)	0
5.2.16.03.2.02.007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	164.989.069,00	159.668.344,00	(5.320.725,00)	96,78
5.2.16.03.2.02.009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	353.629.469,00	313.452.521,00	(40.176.948,00)	88,64
5.2.16.03.2.02.010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	150.679.900,00	80.859.900,00	(69.820.000,00)	53,66
5.2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	13.503.357.129,00	12.053.640.893,00	(1.449.716.236,00)	89,26
5.2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.060.360.914,00	10.127.081.639,00	(933.279.275,00)	91,56
5.2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.402.600,00	22.713.250,00	(35.689.350,00)	38,89
5.2.17.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.847.500,00	5.850.000,00	(5.997.500,00)	49,38
5.2.17.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.769.500,00	0,00	(3.769.500,00)	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.17.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.615.000,00	0,00	(2.615.000,00)	0
5.2.17.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.738.250,00	0,00	(2.738.250,00)	0
5.2.17.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.365.000,00	0,00	(1.365.000,00)	0
5.2.17.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.067.350,00	16.863.250,00	(19.204.100,00)	46,75
5.2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.552.512.208,00	7.080.248.819,00	(472.263.389,00)	93,75
5.2.17.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.551.109.708,00	7.078.846.319,00	(472.263.389,00)	93,75
5.2.17.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.402.500,00	1.402.500,00	0,00	100,00
5.2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.463.364,00	46.577.000,00	(1.886.364,00)	96,11
5.2.17.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48.463.364,00	46.577.000,00	(1.886.364,00)	96,11
5.2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	113.938.000,00	109.098.000,00	(4.840.000,00)	95,75
5.2.17.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	113.938.000,00	109.098.000,00	(4.840.000,00)	95,75
5.2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.082.574.482,00	1.001.985.447,00	(80.589.035,00)	92,56
5.2.17.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.931.364,00	82.973.100,00	(958.264,00)	98,86
5.2.17.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.629.600,00	4.157.000,00	(472.600,00)	89,79
5.2.17.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.948.674,00	71.469.100,00	(7.479.574,00)	90,53
5.2.17.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	249.033.584,00	242.885.584,00	(6.148.000,00)	97,53
5.2.17.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	212.856.200,00	209.230.000,00	(3.626.200,00)	98,30
5.2.17.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	453.175.060,00	391.270.663,00	(61.904.397,00)	86,34
5.2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	220.609.399,00	0,00	(220.609.399,00)	0
5.2.17.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.894.000,00	0,00	(9.894.000,00)	0
5.2.17.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	22.427.999,00	0,00	(22.427.999,00)	0
5.2.17.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	164.429.400,00	0,00	(164.429.400,00)	0
5.2.17.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.858.000,00	0,00	(23.858.000,00)	0
5.2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.105.716.696,00	1.075.239.223,00	(30.477.473,00)	97,24
5.2.17.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.775.200,00	2.860.000,00	(915.200,00)	75,76
5.2.17.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.624.000,00	345.409.733,00	(11.214.267,00)	96,86
5.2.17.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	745.317.496,00	726.969.490,00	(18.348.006,00)	97,54
5.2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	878.144.165,00	791.219.900,00	(86.924.265,00)	90,10
5.2.17.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	385.076.495,00	322.443.100,00	(62.633.395,00)	83,73
5.2.17.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	343.545.000,00	337.174.800,00	(6.370.200,00)	98,15
5.2.17.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.969.000,00	22.075.000,00	(11.894.000,00)	64,99
5.2.17.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.553.670,00	109.527.000,00	(6.026.670,00)	94,78
5.2.17.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	220.001.730,00	135.831.862,00	(84.169.868,00)	61,74
5.2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	70.314.750,00	0,00	(70.314.750,00)	0
5.2.17.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	220.001.730,00	135.831.862,00	(84.169.868,00)	61,74
5.2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.078.700,00	0,00	(47.078.700,00)	0
5.2.17.02.2.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.078.700,00	0,00	(47.078.700,00)	0
5.2.17.02.2.01.003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	74.194.642,00	72.830.612,00	(1.364.030,00)	98,16

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.17.02.2.01.005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	55.976.607,00	0,00	(55.976.607,00)	0
5.2.17.02.2.01.006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	89.830.481,00	63.001.250,00	(26.829.231,00)	70,13
5.2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.236.050,00	0,00	(23.236.050,00)	0
5.2.17.02.2.02.001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.236.050,00	0,00	(23.236.050,00)	0
5.2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	33.978.575,00	21.407.000,00	(12.571.575,00)	63,00
5.2.17.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	24.707.645,00	18.680.000,00	(6.027.645,00)	75,60
5.2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	33.978.575,00	21.407.000,00	(12.571.575,00)	63,00
5.2.17.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	24.707.645,00	18.680.000,00	(6.027.645,00)	75,60
5.2.17.03.2.01.001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25.478.800,00	21.407.000,00	(4.071.800,00)	84,02
5.2.17.03.2.01.002	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.499.775,00	0,00	(8.499.775,00)	0
5.2.17.03.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	24.707.645,00	18.680.000,00	(6.027.645,00)	75,60
5.2.17.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	217.901.734,00	194.062.584,00	(23.839.150,00)	89,06
5.2.17.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	40.956.270,00	20.983.000,00	(19.973.270,00)	51,23
5.2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	32.143.585,00	10.000.000,00	(22.143.585,00)	31,11
5.2.17.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	40.956.270,00	20.983.000,00	(19.973.270,00)	51,23
5.2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.143.585,00	10.000.000,00	(22.143.585,00)	31,11
5.2.17.04.2.01.001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	26.819.440,00	19.033.000,00	(7.786.440,00)	70,97
5.2.17.04.2.01.001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.521.935,00	10.000.000,00	(9.521.935,00)	51,22
5.2.17.04.2.01.002	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12.621.650,00	0,00	(12.621.650,00)	0
5.2.17.04.2.01.003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	14.136.830,00	1.950.000,00	(12.186.830,00)	13,79
5.2.17.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	217.901.734,00	194.062.584,00	(23.839.150,00)	89,06
5.2.17.04.2.02.002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	154.979.984,00	146.855.584,00	(8.124.400,00)	94,76
5.2.17.04.2.02.003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	62.921.750,00	47.207.000,00	(15.714.750,00)	75,02
5.2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	420.370.000,00	418.108.200,00	(2.261.800,00)	99,46
5.2.17.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	121.498.750,00	120.989.200,00	(509.550,00)	99,58
5.2.17.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	121.498.750,00	120.989.200,00	(509.550,00)	99,58
5.2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	420.370.000,00	418.108.200,00	(2.261.800,00)	99,46
5.2.17.05.2.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	420.370.000,00	418.108.200,00	(2.261.800,00)	99,46
5.2.17.05.2.01.002	Pameran Dagang Nasional	121.498.750,00	120.989.200,00	(509.550,00)	99,58

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	53.215.250,00	51.390.450,00	(1.824.800,00)	96,57
5.2.17.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	133.562.750,00	96.242.750,00	(37.320.000,00)	72,06
5.2.17.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	133.562.750,00	96.242.750,00	(37.320.000,00)	72,06
5.2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.215.250,00	51.390.450,00	(1.824.800,00)	96,57
5.2.17.06.2.01.001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	98.057.525,00	83.070.950,00	(14.986.575,00)	84,72
5.2.17.06.2.01.001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	53.215.250,00	51.390.450,00	(1.824.800,00)	96,57
5.2.17.06.2.01.002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	35.505.225,00	13.171.800,00	(22.333.425,00)	37,10
5.2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	273.120.475,00	180.284.720,00	(92.835.755,00)	66,01
5.2.17.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	540.222.200,00	531.514.800,00	(8.707.400,00)	98,39
5.2.17.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	540.222.200,00	531.514.800,00	(8.707.400,00)	98,39
5.2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	273.120.475,00	180.284.720,00	(92.835.755,00)	66,01
5.2.17.07.2.01.001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	38.087.550,00	0,00	(38.087.550,00)	0
5.2.17.07.2.01.002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	9.749.875,00	0,00	(9.749.875,00)	0
5.2.17.07.2.01.002	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	540.222.200,00	531.514.800,00	(8.707.400,00)	98,39
5.2.17.07.2.01.003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	15.737.790,00	0,00	(15.737.790,00)	0
5.2.17.07.2.01.004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	209.545.260,00	180.284.720,00	(29.260.540,00)	86,04
5.2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	261.002.501,00	127.064.688,00	(133.937.813,00)	48,68
5.2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	261.002.501,00	127.064.688,00	(133.937.813,00)	48,68
5.2.17.08.2.01.001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	261.002.501,00	127.064.688,00	(133.937.813,00)	48,68
5.2.18	**PENANAMAN MODAL**	7.623.160.527,00	6.918.291.791,00	(704.868.736,00)	90,75
5.2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.455.358.711,00	5.897.193.443,00	(558.165.268,00)	91,35
5.2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	288.860.972,00	144.805.172,00	(144.055.800,00)	50,13
5.2.18.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.734.800,00	7.527.400,00	(14.207.400,00)	34,63
5.2.18.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.981.000,00	490.500,00	(3.490.500,00)	12,32
5.2.18.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.481.000,00	490.500,00	(2.990.500,00)	14,09
5.2.18.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.981.000,00	3.081.000,00	(900.000,00)	77,39
5.2.18.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.486.000,00	486.000,00	(3.000.000,00)	13,94
5.2.18.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.385.000,00	4.568.500,00	(7.816.500,00)	36,89
5.2.18.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239.812.172,00	128.161.272,00	(111.650.900,00)	53,44
5.2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.030.388.669,00	3.937.956.826,00	(92.431.843,00)	97,71
5.2.18.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.007.120.809,00	3.928.951.926,00	(78.168.883,00)	98,05
5.2.18.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.864.400,00	7.614.400,00	(5.250.000,00)	59,19
5.2.18.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.403.460,00	1.390.500,00	(9.012.960,00)	13,37
5.2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.567.050,00	42.867.460,00	(1.699.590,00)	96,19
5.2.18.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	44.567.050,00	42.867.460,00	(1.699.590,00)	96,19
5.2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.160.000,00	97.358.000,00	(28.802.000,00)	77,17
5.2.18.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	126.160.000,00	97.358.000,00	(28.802.000,00)	77,17

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	723.230.004,00	514.060.681,00	(209.169.323,00)	71,08
5.2.18.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.262.220,00	84.532.830,00	(729.390,00)	99,14
5.2.18.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.944.400,00	2.840.000,00	(4.104.400,00)	40,90
5.2.18.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	119.231.534,00	109.861.474,00	(9.370.060,00)	92,14
5.2.18.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.388.000,00	31.990.000,00	(6.398.000,00)	83,33
5.2.18.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.930.880,00	9.180.000,00	(8.750.880,00)	51,20
5.2.18.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	455.472.970,00	275.656.377,00	(179.816.593,00)	60,52
5.2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.624.100,00	6.794.100,00	(7.830.000,00)	46,46
5.2.18.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.624.100,00	6.794.100,00	(7.830.000,00)	46,46
5.2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.111.466,00	675.811.104,00	(24.300.362,00)	96,53
5.2.18.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.987.000,00	1.590.000,00	(3.397.000,00)	31,88
5.2.18.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.965.700,00	145.362.194,00	(20.603.506,00)	87,59
5.2.18.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	529.158.766,00	528.858.910,00	(299.856,00)	99,94
5.2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	527.416.450,00	477.540.100,00	(49.876.350,00)	90,54
5.2.18.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	307.592.600,00	268.918.100,00	(38.674.500,00)	87,43
5.2.18.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	167.781.600,00	165.050.000,00	(2.731.600,00)	98,37
5.2.18.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.042.250,00	41.572.000,00	(470.250,00)	98,88
5.2.18.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	20,00
5.2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	80.326.712,00	74.665.072,00	(5.661.640,00)	92,95
5.2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	80.326.712,00	74.665.072,00	(5.661.640,00)	92,95
5.2.18.02.2.02.002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	80.326.712,00	74.665.072,00	(5.661.640,00)	92,95
5.2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	63.995.150,00	63.160.150,00	(835.000,00)	98,70
5.2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	63.995.150,00	63.160.150,00	(835.000,00)	98,70
5.2.18.03.2.01.002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	63.995.150,00	63.160.150,00	(835.000,00)	98,70
5.2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	366.819.099,00	267.796.208,00	(99.022.891,00)	73,00
5.2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	366.819.099,00	267.796.208,00	(99.022.891,00)	73,00
5.2.18.04.2.01.001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30.630.095,00	27.411.400,00	(3.218.695,00)	89,49
5.2.18.04.2.01.002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	137.229.622,00	127.259.312,00	(9.970.310,00)	92,73
5.2.18.04.2.01.003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	43.857.486,00	5.821.000,00	(38.036.486,00)	13,27
5.2.18.04.2.01.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	155.101.896,00	107.304.496,00	(47.797.400,00)	69,18
5.2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	486.933.783,00	448.097.596,00	(38.836.187,00)	92,02
5.2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	486.933.783,00	448.097.596,00	(38.836.187,00)	92,02
5.2.18.05.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	173.938.623,00	149.777.596,00	(24.161.027,00)	86,11
5.2.18.05.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	312.995.160,00	298.320.000,00	(14.675.160,00)	95,31
5.2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	169.727.072,00	167.379.322,00	(2.347.750,00)	98,62
5.2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169.727.072,00	167.379.322,00	(2.347.750,00)	98,62

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.18.06.2.01.001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	169.727.072,00	167.379.322,00	(2.347.750,00)	98,62
5.2.19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	19.548.717.174,00	19.138.229.050,00	(410.488.124,00)	97,90
5.2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.859.866.093,00	5.501.350.475,00	(358.515.618,00)	93,88
5.2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	194.533.207,00	193.337.857,00	(1.195.350,00)	99,39
5.2.19.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.873.544,00	45.678.194,00	(1.195.350,00)	97,45
5.2.19.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11.121.136,00	11.121.136,00	0,00	100,00
5.2.19.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.047.936,00	11.047.936,00	0,00	100,00
5.2.19.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.619.186,00	16.619.186,00	0,00	100,00
5.2.19.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.005.636,00	11.005.636,00	0,00	100,00
5.2.19.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.060.100,00	13.060.100,00	0,00	100,00
5.2.19.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.805.669,00	84.805.669,00	0,00	100,00
5.2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.085.425.500,00	4.015.626.333,00	(69.799.167,00)	98,29
5.2.19.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.062.236.500,00	4.005.036.983,00	(57.199.517,00)	98,59
5.2.19.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.189.000,00	10.589.350,00	(12.599.650,00)	45,67
5.2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.488.500,00	16.902.300,00	(1.586.200,00)	91,42
5.2.19.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.488.500,00	16.902.300,00	(1.586.200,00)	91,42
5.2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.756.940,00	28.232.000,00	(1.524.940,00)	94,88
5.2.19.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	29.756.940,00	28.232.000,00	(1.524.940,00)	94,88
5.2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	536.301.824,00	438.129.317,00	(98.172.507,00)	81,69
5.2.19.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.515.504,00	39.515.500,00	(4,00)	100,00
5.2.19.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.602.000,00	7.602.000,00	0,00	100,00
5.2.19.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.437.340,00	15.437.250,00	(90,00)	100,00
5.2.19.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	215.464.800,00	190.172.000,00	(25.292.800,00)	88,26
5.2.19.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.992.040,00	48.991.400,00	(640,00)	100,00
5.2.19.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.290.140,00	136.411.167,00	(72.878.973,00)	65,18
5.2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.569.100,00	71.569.100,00	0,00	100,00
5.2.19.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.505.700,00	31.505.700,00	0,00	100,00
5.2.19.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.063.400,00	40.063.400,00	0,00	100,00
5.2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.963.600,00	536.124.867,00	(7.838.733,00)	98,56
5.2.19.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.290.000,00	74.451.267,00	(7.838.733,00)	90,47
5.2.19.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.673.600,00	461.673.600,00	0,00	100,00
5.2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.827.422,00	201.428.701,00	(178.398.721,00)	53,03
5.2.19.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.655.950,00	21.378.850,00	(22.277.100,00)	48,97
5.2.19.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.218.145,00	74.202.900,00	(85.015.245,00)	46,60
5.2.19.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.262.959,00	48.709.771,00	(70.553.188,00)	40,84
5.2.19.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.690.368,00	57.137.180,00	(553.188,00)	99,04
5.2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	561.161.662,00	560.665.662,00	(496.000,00)	99,91

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	131.171.387,00	130.675.387,00	(496.000,00)	99,62
5.2.19.02.2.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	107.566.687,00	107.070.687,00	(496.000,00)	99,54
5.2.19.02.2.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	23.604.700,00	23.604.700,00	0,00	100,00
5.2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	429.990.275,00	429.990.275,00	0,00	100,00
5.2.19.02.2.02.002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	429.990.275,00	429.990.275,00	0,00	100,00
5.2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.784.184.894,00	12.733.818.388,00	(50.366.506,00)	99,61
5.2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.846.789.802,00	9.834.086.696,00	(12.703.106,00)	99,87
5.2.19.03.2.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	8.819.169.000,00	8.819.169.000,00	0,00	100,00
5.2.19.03.2.01.003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.027.620.802,00	1.014.917.696,00	(12.703.106,00)	98,76
5.2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.593.163.000,00	2.563.031.600,00	(30.131.400,00)	98,84
5.2.19.03.2.02.002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1.303.991.000,00	1.289.174.600,00	(14.816.400,00)	98,86
5.2.19.03.2.02.003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.289.172.000,00	1.273.857.000,00	(15.315.000,00)	98,81
5.2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	55.855.092,00	55.855.092,00	0,00	100,00
5.2.19.03.2.03.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	55.855.092,00	55.855.092,00	0,00	100,00
5.2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
5.2.19.03.2.04.002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
5.2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	38.377.000,00	30.845.000,00	(7.532.000,00)	80,37
5.2.19.03.2.05.005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	38.377.000,00	30.845.000,00	(7.532.000,00)	80,37
5.2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	343.504.525,00	342.394.525,00	(1.110.000,00)	99,68
5.2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	343.504.525,00	342.394.525,00	(1.110.000,00)	99,68
5.2.19.04.2.01.002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	343.504.525,00	342.394.525,00	(1.110.000,00)	99,68
5.2.22	**KEBUDAYAAN**	9.631.409.900,00	9.089.958.251,00	(541.451.649,00)	94,38
5.2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.493.315.120,00	5.976.326.330,00	(516.988.790,00)	92,04
5.2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.973.283,00	121.112.104,00	(21.861.179,00)	84,71
5.2.22.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.069.771,00	23.932.846,00	(8.136.925,00)	74,63
5.2.22.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.499.759,00	6.733.984,00	(1.765.775,00)	79,23
5.2.22.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.099.834,00	5.973.984,00	(2.125.850,00)	73,75
5.2.22.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.499.787,00	10.216.012,00	(3.283.775,00)	75,68
5.2.22.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.099.884,00	7.839.884,00	(260.000,00)	96,79
5.2.22.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.998.990,00	11.998.990,00	0,00	100,00
5.2.22.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.705.258,00	54.416.404,00	(6.288.854,00)	89,64
5.2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.479.128.772,00	4.127.146.910,00	(351.981.862,00)	92,14
5.2.22.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.466.128.772,00	4.114.406.910,00	(351.721.862,00)	92,12
5.2.22.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.000.000,00	12.740.000,00	(260.000,00)	98,00
5.2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.434.800,00	9.331.500,00	(103.300,00)	98,91
5.2.22.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.434.800,00	9.331.500,00	(103.300,00)	98,91
5.2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	528.817.691,00	501.228.733,00	(27.588.958,00)	94,78

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.22.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.602.391,00	37.449.892,00	(152.499,00)	99,59
5.2.22.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.863.400,00	6.835.000,00	(28.400,00)	99,59
5.2.22.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.659.000,00	19.292.200,00	(1.366.800,00)	93,38
5.2.22.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	226.981.800,00	214.460.000,00	(12.521.800,00)	94,48
5.2.22.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.841.000,00	12.633.000,00	(208.000,00)	98,38
5.2.22.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.870.100,00	210.558.641,00	(13.311.459,00)	94,05
5.2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	327.139.044,00	327.085.649,00	(53.395,00)	99,98
5.2.22.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327.139.044,00	327.085.649,00	(53.395,00)	99,98
5.2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.022.400,00	505.436.596,00	(41.585.804,00)	92,40
5.2.22.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.508.400,00	112.922.596,00	(41.585.804,00)	73,09
5.2.22.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.514.000,00	392.514.000,00	0,00	100,00
5.2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	458.799.130,00	384.984.838,00	(73.814.292,00)	83,91
5.2.22.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.557.590,00	29.663.200,00	(23.894.390,00)	55,39
5.2.22.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.649.540,00	100.821.638,00	(39.827.902,00)	71,68
5.2.22.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	264.592.000,00	254.500.000,00	(10.092.000,00)	96,19
5.2.22.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	148.367.600,00	148.211.000,00	(156.600,00)	99,89
5.2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	707.291.998,00	701.409.825,00	(5.882.173,00)	99,17
5.2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	352.630.000,00	352.516.000,00	(114.000,00)	99,97
5.2.22.02.2.01.001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	352.630.000,00	352.516.000,00	(114.000,00)	99,97
5.2.22.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.844.000,00	(156.000,00)	99,79
5.2.22.02.2.02.002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.844.000,00	(156.000,00)	99,79
5.2.22.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	73.367.600,00	73.367.000,00	(600,00)	100,00
5.2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	354.661.998,00	348.893.825,00	(5.768.173,00)	98,37
5.2.22.02.2.03.001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	174.193.598,00	172.074.325,00	(2.119.273,00)	98,78
5.2.22.02.2.03.002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	180.468.400,00	176.819.500,00	(3.648.900,00)	97,98
5.2.22.02.2.03.005	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	73.367.600,00	73.367.000,00	(600,00)	100,00
5.2.22.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	578.072.024,00	572.345.624,00	(5.726.400,00)	99,01
5.2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	547.421.410,00	542.826.824,00	(4.594.586,00)	99,16
5.2.22.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	578.072.024,00	572.345.624,00	(5.726.400,00)	99,01
5.2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	547.421.410,00	542.826.824,00	(4.594.586,00)	99,16
5.2.22.03.2.01.001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	191.570.300,00	187.604.800,00	(3.965.500,00)	97,93
5.2.22.03.2.01.001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	193.883.812,00	190.416.612,00	(3.467.200,00)	98,21
5.2.22.03.2.01.002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	384.188.212,00	381.929.012,00	(2.259.200,00)	99,41
5.2.22.03.2.01.003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	355.851.110,00	355.222.024,00	(629.086,00)	99,82
5.2.22.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	399.705.748,00	396.782.648,00	(2.923.100,00)	99,27
5.2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	757.236.000,00	752.056.000,00	(5.180.000,00)	99,32
5.2.22.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	399.705.748,00	396.782.648,00	(2.923.100,00)	99,27
5.2.22.05.2.01.001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	361.947.748,00	359.024.648,00	(2.923.100,00)	99,19

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.22.05.2.01.002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	37.758.000,00	37.758.000,00	0,00	100,00
5.2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	757.236.000,00	752.056.000,00	(5.180.000,00)	99,32
5.2.22.05.2.02.001	Pelindungan Cagar Budaya	380.103.000,00	376.423.000,00	(3.680.000,00)	99,03
5.2.22.05.2.02.002	Pengembangan Cagar Budaya	377.133.000,00	375.633.000,00	(1.500.000,00)	99,60
5.2.23	**PERPUSTAKAAN**	9.452.295.201,00	8.593.777.586,00	(858.517.615,00)	90,92
5.2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.826.976.162,00	7.153.477.588,00	(673.498.574,00)	91,40
5.2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.355.152,00	58.241.194,00	(38.113.958,00)	60,44
5.2.23.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.954.700,00	17.978.800,00	(26.975.900,00)	39,99
5.2.23.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.929.200,00	3.929.200,00	0,00	100,00
5.2.23.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.929.200,00	3.929.200,00	0,00	100,00
5.2.23.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.929.200,00	3.929.200,00	0,00	100,00
5.2.23.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.398.100,00	1.398.100,00	0,00	100,00
5.2.23.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.173.760,00	4.168.000,00	(5.760,00)	99,86
5.2.23.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.040.992,00	22.908.694,00	(11.132.298,00)	67,30
5.2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.064.940.504,00	5.700.802.626,00	(364.137.878,00)	94,00
5.2.23.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.030.940.804,00	5.676.689.426,00	(354.251.378,00)	94,13
5.2.23.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.536.500,00	10.650.000,00	(9.886.500,00)	51,86
5.2.23.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.463.200,00	13.463.200,00	0,00	100,00
5.2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	41.859.125,00	34.246.095,00	(7.613.030,00)	81,81
5.2.23.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	41.859.125,00	34.246.095,00	(7.613.030,00)	81,81
5.2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	460.464.675,00	411.162.291,00	(49.302.384,00)	89,29
5.2.23.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.288.740,00	39.608.500,00	(680.240,00)	98,31
5.2.23.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.530.400,00	4.620.000,00	(4.910.400,00)	48,48
5.2.23.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.258.375,00	51.411.000,00	(3.847.375,00)	93,04
5.2.23.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	141.180.500,00	140.524.000,00	(656.500,00)	99,53
5.2.23.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00
5.2.23.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.456.660,00	165.248.791,00	(39.207.869,00)	80,82
5.2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.766.800,00	0,00	(84.766.800,00)	0
5.2.23.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.841.800,00	0,00	(51.841.800,00)	0
5.2.23.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.925.000,00	0,00	(32.925.000,00)	0
5.2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	736.557.650,00	715.203.917,00	(21.353.733,00)	97,10
5.2.23.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.993.200,00	1.990.000,00	(3.200,00)	99,84
5.2.23.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.164.450,00	218.813.917,00	(21.350.533,00)	91,11
5.2.23.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	494.400.000,00	494.400.000,00	0,00	100,00
5.2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.032.256,00	233.821.465,00	(108.210.791,00)	68,36
5.2.23.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.266.888,00	26.866.150,00	(12.400.738,00)	68,42
5.2.23.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.986.910,00	150.828.875,00	(74.158.035,00)	67,04
5.2.23.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.621.468,00	11.818.440,00	(17.803.028,00)	39,90

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.23.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.545.200,00	32.633.000,00	(912.200,00)	97,28
5.2.23.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.611.790,00	11.675.000,00	(2.936.790,00)	79,90
5.2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	905.455.025,00	854.433.977,00	(51.021.048,00)	94,37
5.2.23.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	400.975.670,00	278.668.670,00	(122.307.000,00)	69,50
5.2.23.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	135.350.875,00	75.559.400,00	(59.791.475,00)	55,82
5.2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	665.019.013,00	629.347.627,00	(35.671.386,00)	94,64
5.2.23.02.2.01.001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	148.085.700,00	144.435.500,00	(3.650.200,00)	97,54
5.2.23.02.2.01.001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	69.056.560,00	21.392.000,00	(47.664.560,00)	30,98
5.2.23.02.2.01.002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	66.294.315,00	54.167.400,00	(12.126.915,00)	81,71
5.2.23.02.2.01.004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	65.798.990,00	64.756.350,00	(1.042.640,00)	98,42
5.2.23.02.2.01.007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	271.039.360,00	248.262.486,00	(22.776.874,00)	91,60
5.2.23.02.2.01.009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	180.094.963,00	171.893.291,00	(8.201.672,00)	95,45
5.2.23.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	167.665.830,00	128.117.270,00	(39.548.560,00)	76,41
5.2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	240.436.012,00	225.086.350,00	(15.349.662,00)	93,62
5.2.23.02.2.02.002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	167.665.830,00	128.117.270,00	(39.548.560,00)	76,41
5.2.23.02.2.02.002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	93.959.912,00	80.225.600,00	(13.734.312,00)	85,38
5.2.23.02.2.02.003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	79.055.125,00	77.444.075,00	(1.611.050,00)	97,96
5.2.23.02.2.02.004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	67.420.975,00	67.416.675,00	(4.300,00)	99,99
5.2.23.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	97.958.965,00	74.992.000,00	(22.966.965,00)	76,55
5.2.23.02.2.03.001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	45.775.165,00	38.688.200,00	(7.086.965,00)	84,52
5.2.23.02.2.03.002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	52.183.800,00	36.303.800,00	(15.880.000,00)	69,57
5.2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	252.980.604,00	245.657.641,00	(7.322.963,00)	97,11
5.2.23.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	65.907.740,00	61.539.710,00	(4.368.030,00)	93,37
5.2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	152.981.375,00	149.942.375,00	(3.039.000,00)	98,01
5.2.23.03.2.01.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	12.781.425,00	12.781.425,00	0,00	100,00
5.2.23.03.2.01.002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	140.199.950,00	137.160.950,00	(3.039.000,00)	97,83
5.2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99.999.229,00	95.715.266,00	(4.283.963,00)	95,72
5.2.23.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	54.410.830,00	50.250.800,00	(4.160.030,00)	92,35
5.2.23.03.2.02.001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	49.999.590,00	47.749.590,00	(2.250.000,00)	95,50
5.2.23.03.2.02.001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	39.999.710,00	39.938.800,00	(60.910,00)	99,85
5.2.23.03.2.02.002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	49.999.639,00	47.965.676,00	(2.033.963,00)	95,93
5.2.23.03.2.02.002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	14.411.120,00	10.312.000,00	(4.099.120,00)	71,56
5.2.23.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	11.496.910,00	11.288.910,00	(208.000,00)	98,19
5.2.23.03.2.04.001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00
5.2.23.03.2.04.002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	7.446.910,00	7.238.910,00	(208.000,00)	97,21
5.4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	124.305.633.561,00	115.170.887.658,00	(9.134.745.903,00)	92,65
5.4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	54.350.144.003,00	51.503.340.268,00	(2.846.803.735,00)	94,76

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.873.192.181,00	46.093.042.907,00	(1.780.149.274,00)	96,28
5.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.078.655,00	103.083.780,00	(17.994.875,00)	85,14
5.4.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.902.330,00	42.902.330,00	0,00	100,00
5.4.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.345.000,00	4.345.000,00	(3.000.000,00)	59,16
5.4.01.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.316.250,00	2.316.250,00	(3.000.000,00)	43,57
5.4.01.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.795.000,00	6.795.000,00	0,00	100,00
5.4.01.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.301.000,00	5.301.000,00	(3.000.000,00)	63,86
5.4.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.278.675,00	30.778.675,00	(500.000,00)	98,40
5.4.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.140.400,00	10.645.525,00	(8.494.875,00)	55,62
5.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.019.736.095,00	18.584.471.215,00	(435.264.880,00)	97,71
5.4.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.886.993.255,00	18.492.353.855,00	(394.639.400,00)	97,91
5.4.01.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	100,00
5.4.01.01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	62.920.100,00	33.659.500,00	(29.260.600,00)	53,50
5.4.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.984.040,00	4.631.160,00	(6.352.880,00)	42,16
5.4.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.138.700,00	25.126.700,00	(5.012.000,00)	83,37
5.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	365.829.200,00	312.242.979,00	(53.586.221,00)	85,35
5.4.01.01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	18.078.101,00	18.068.025,00	(10.076,00)	99,94
5.4.01.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	274.253.349,00	228.199.849,00	(46.053.500,00)	83,21
5.4.01.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	46.923.125,00	40.923.125,00	(6.000.000,00)	87,21
5.4.01.01.2.03.007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	26.574.625,00	25.051.980,00	(1.522.645,00)	94,27
5.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	667.032.950,00	522.544.550,00	(144.488.400,00)	78,34
5.4.01.01.2.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	53.978.925,00	44.356.125,00	(9.622.800,00)	82,17
5.4.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	472.910.800,00	435.603.500,00	(37.307.300,00)	92,11
5.4.01.01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	37.581.600,00	26.295.800,00	(11.285.800,00)	69,97
5.4.01.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	102.561.625,00	16.289.125,00	(86.272.500,00)	15,88
5.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.429.145.274,00	7.229.584.239,00	(199.561.035,00)	97,31
5.4.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	219.782.668,00	217.055.000,00	(2.727.668,00)	98,76
5.4.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	927.195.724,00	910.495.650,00	(16.700.074,00)	98,20
5.4.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.673.581,00	132.848.200,00	(17.825.381,00)	88,17
5.4.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	307.371.149,00	262.708.900,00	(44.662.249,00)	85,47
5.4.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	193.614.140,00	168.984.500,00	(24.629.640,00)	87,28
5.4.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	261.278.825,00	248.196.000,00	(13.082.825,00)	94,99
5.4.01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.033.840.300,00	3.996.670.850,00	(37.169.450,00)	99,08
5.4.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.259.805.318,00	1.247.794.582,00	(12.010.736,00)	99,05
5.4.01.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.583.569,00	44.830.557,00	(30.753.012,00)	59,31
5.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	430.460.371,00	396.417.000,00	(34.043.371,00)	92,09
5.4.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	64.793.950,00	58.068.000,00	(6.725.950,00)	89,62
5.4.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	365.666.421,00	338.349.000,00	(27.317.421,00)	92,53
5.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.602.268.275,00	9.289.058.228,00	(313.210.047,00)	96,74
5.4.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.648.752.475,00	2.358.262.500,00	(290.489.975,00)	89,03

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.953.515.800,00	6.930.795.728,00	(22.720.072,00)	99,67
5.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.849.652.327,00	4.602.337.809,00	(247.314.518,00)	94,90
5.4.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.163.982.880,00	1.000.124.349,00	(163.858.531,00)	85,92
5.4.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	506.578.150,00	476.422.900,00	(30.155.250,00)	94,05
5.4.01.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	10.273.750,00	9.672.000,00	(601.750,00)	94,14
5.4.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	657.825.255,00	638.193.728,00	(19.631.527,00)	97,02
5.4.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.510.992.292,00	2.477.924.832,00	(33.067.460,00)	98,68
5.4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.637.678.175,00	1.591.027.554,00	(46.650.621,00)	97,15
5.4.01.01.2.11.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	173.443.000,00	164.819.036,00	(8.623.964,00)	95,03
5.4.01.01.2.11.002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	652.082.175,00	618.977.175,00	(33.105.000,00)	94,92
5.4.01.01.2.11.004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	812.153.000,00	807.231.343,00	(4.921.657,00)	99,39
5.4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.134.636.001,00	1.124.979.021,00	(9.656.980,00)	99,15
5.4.01.01.2.12.001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	370.701.084,00	366.321.354,00	(4.379.730,00)	98,82
5.4.01.01.2.12.002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	293.206.246,00	290.553.746,00	(2.652.500,00)	99,10
5.4.01.01.2.12.003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	470.728.671,00	468.103.921,00	(2.624.750,00)	99,44
5.4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	212.597.055,00	196.975.075,00	(15.621.980,00)	92,65
5.4.01.01.2.13.001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	78.764.980,00	66.142.000,00	(12.622.980,00)	83,97
5.4.01.01.2.13.002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	58.647.000,00	58.531.000,00	(116.000,00)	99,80
5.4.01.01.2.13.003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	53.805.850,00	52.965.850,00	(840.000,00)	98,44
5.4.01.01.2.13.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	21.379.225,00	19.336.225,00	(2.043.000,00)	90,44
5.4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.403.077.803,00	2.140.321.457,00	(262.756.346,00)	89,07
5.4.01.01.2.14.001	Fasilitasi Keprotokolan	1.530.624.232,00	1.396.820.085,00	(133.804.147,00)	91,26
5.4.01.01.2.14.002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	149.954.915,00	142.592.716,00	(7.362.199,00)	95,09
5.4.01.01.2.14.003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	722.498.656,00	600.908.656,00	(121.590.000,00)	83,17
5.4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.543.046.844,00	4.165.155.131,00	(377.891.713,00)	91,68
5.4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	238.753.225,00	126.084.800,00	(112.668.425,00)	52,81
5.4.01.02.2.01.001	Penataan Administrasi Pemerintahan	43.361.375,00	12.000.000,00	(31.361.375,00)	27,67
5.4.01.02.2.01.002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	42.304.250,00	6.080.000,00	(36.224.250,00)	14,37
5.4.01.02.2.01.003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	153.087.600,00	108.004.800,00	(45.082.800,00)	70,55
5.4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.573.295.355,00	3.438.649.975,00	(134.645.380,00)	96,23
5.4.01.02.2.02.001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.330.181.975,00	3.213.415.475,00	(116.766.500,00)	96,49
5.4.01.02.2.02.002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	26.556.750,00	26.556.750,00	0,00	100,00
5.4.01.02.2.02.003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	216.556.630,00	198.677.750,00	(17.878.880,00)	91,74
5.4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	288.816.909,00	265.080.031,00	(23.736.878,00)	91,78
5.4.01.02.2.03.001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	90.425.634,00	89.095.431,00	(1.330.203,00)	98,53
5.4.01.02.2.03.002	Fasilitasi Bantuan Hukum	143.965.175,00	121.558.500,00	(22.406.675,00)	84,44
5.4.01.02.2.03.003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	54.426.100,00	54.426.100,00	0,00	100,00
5.4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	442.181.355,00	335.340.325,00	(106.841.030,00)	75,84

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.01.02.2.04.001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	425.381.555,00	332.340.325,00	(93.041.230,00)	78,13
5.4.01.02.2.04.003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	16.799.800,00	3.000.000,00	(13.799.800,00)	17,86
5.4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.070.987.978,00	646.448.805,00	(424.539.173,00)	60,36
5.4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	101.106.250,00	81.281.650,00	(19.824.600,00)	80,39
5.4.01.03.2.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	61.895.000,00	60.554.000,00	(1.341.000,00)	97,83
5.4.01.03.2.01.002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	39.211.250,00	20.727.650,00	(18.483.600,00)	52,86
5.4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	257.536.706,00	227.359.956,00	(30.176.750,00)	88,28
5.4.01.03.2.02.001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	72.592.329,00	64.629.829,00	(7.962.500,00)	89,03
5.4.01.03.2.02.002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	82.198.423,00	61.291.373,00	(20.907.050,00)	74,57
5.4.01.03.2.02.003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	102.745.954,00	101.438.754,00	(1.307.200,00)	98,73
5.4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	336.543.013,00	260.299.590,00	(76.243.423,00)	77,35
5.4.01.03.2.03.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	76.131.732,00	64.405.870,00	(11.725.862,00)	84,60
5.4.01.03.2.03.002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	166.759.408,00	107.826.768,00	(58.932.640,00)	64,66
5.4.01.03.2.03.003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	93.651.873,00	88.066.952,00	(5.584.921,00)	94,04
5.4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	375.802.009,00	77.507.609,00	(298.294.400,00)	20,62
5.4.01.03.2.04.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	345.802.009,00	73.057.609,00	(272.744.400,00)	21,13
5.4.01.03.2.04.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	15.000.000,00	2.225.000,00	(12.775.000,00)	14,83
5.4.01.03.2.04.003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	15.000.000,00	2.225.000,00	(12.775.000,00)	14,83
5.4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	29.788.350,00	0,00	(29.788.350,00)	0
5.4.01.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	29.788.350,00	0,00	(29.788.350,00)	0
5.4.01.04.2.01.011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	15.433.350,00	0,00	(15.433.350,00)	0
5.4.01.04.2.01.018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	14.355.000,00	0,00	(14.355.000,00)	0
5.4.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	833.128.650,00	598.693.425,00	(234.435.225,00)	71,86
5.4.01.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	833.128.650,00	598.693.425,00	(234.435.225,00)	71,86
5.4.01.05.2.01.003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	808.921.550,00	598.693.425,00	(210.228.125,00)	74,01
5.4.01.05.2.01.006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	24.207.100,00	0,00	(24.207.100,00)	0
5.4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	69.955.489.558,00	63.667.547.390,00	(6.287.942.168,00)	91,01
5.4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.914.248.847,00	54.269.040.627,00	(4.645.208.220,00)	92,12
5.4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.451.200,00	79.304.600,00	(58.146.600,00)	57,70
5.4.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.261.600,00	14.355.000,00	(51.906.600,00)	21,66
5.4.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11.185.400,00	10.145.400,00	(1.040.000,00)	90,70
5.4.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.185.400,00	10.145.400,00	(1.040.000,00)	90,70
5.4.02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.185.400,00	10.145.400,00	(1.040.000,00)	90,70
5.4.02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.455.400,00	9.895.400,00	(1.560.000,00)	86,38
5.4.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.178.000,00	24.618.000,00	(1.560.000,00)	94,04
5.4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.039.850.592,00	4.594.474.802,00	(445.375.790,00)	91,16
5.4.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.673.377.590,00	4.234.453.430,00	(438.924.160,00)	90,61

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.642.800,00	16.306.800,00	(1.336.000,00)	92,43
5.4.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	348.830.202,00	343.714.572,00	(5.115.630,00)	98,53
5.4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	354.038.895,00	181.766.355,00	(172.272.540,00)	51,34
5.4.02.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	354.038.895,00	181.766.355,00	(172.272.540,00)	51,34
5.4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.598.652.174,00	13.987.069.971,00	(2.611.582.203,00)	84,27
5.4.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	106.114.198,00	105.537.040,00	(577.158,00)	99,46
5.4.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	214.492.376,00	207.491.500,00	(7.000.876,00)	96,74
5.4.02.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.777.600,00	7.381.000,00	(40.396.600,00)	15,45
5.4.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	206.748.330,00	204.470.670,00	(2.277.660,00)	98,90
5.4.02.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	914.268.600,00	847.920.430,00	(66.348.170,00)	92,74
5.4.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.109.251.070,00	12.614.269.331,00	(2.494.981.739,00)	83,49
5.4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	859.583.976,00	476.336.900,00	(383.247.076,00)	55,41
5.4.02.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	400.132.700,00	361.135.700,00	(38.997.000,00)	90,25
5.4.02.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234.269.600,00	0,00	(234.269.600,00)	0
5.4.02.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.181.676,00	115.201.200,00	(109.980.476,00)	51,16
5.4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.419.744.832,00	2.361.445.746,00	(58.299.086,00)	97,59
5.4.02.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	504.585.000,00	449.025.146,00	(55.559.854,00)	88,99
5.4.02.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.915.159.832,00	1.912.420.600,00	(2.739.232,00)	99,86
5.4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.011.234.113,00	1.782.780.273,00	(228.453.840,00)	88,64
5.4.02.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	733.974.806,00	575.901.705,00	(158.073.101,00)	78,46
5.4.02.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	743.995.701,00	717.062.568,00	(26.933.133,00)	96,38
5.4.02.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.277.116,00	42.540.000,00	(8.737.116,00)	82,96
5.4.02.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	481.986.490,00	447.276.000,00	(34.710.490,00)	92,80
5.4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	30.633.174.211,00	30.165.719.576,00	(467.454.635,00)	98,47
5.4.02.01.2.15.001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	29.505.030.711,00	29.096.729.076,00	(408.301.635,00)	98,62
5.4.02.01.2.15.002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.072.116.500,00	1.067.790.500,00	(4.326.000,00)	99,60
5.4.02.01.2.15.003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	56.027.000,00	1.200.000,00	(54.827.000,00)	2,14
5.4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	860.518.854,00	640.142.404,00	(220.376.450,00)	74,39
5.4.02.01.2.16.003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	860.518.854,00	640.142.404,00	(220.376.450,00)	74,39
5.4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.041.240.711,00	9.398.506.763,00	(1.642.733.948,00)	85,12
5.4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	902.353.804,00	646.904.104,00	(255.449.700,00)	71,69
5.4.02.02.2.01.001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	49.228.100,00	23.017.100,00	(26.211.000,00)	46,76
5.4.02.02.2.01.002	Pembahasan Rancangan Perda	628.580.804,00	472.291.004,00	(156.289.800,00)	75,14
5.4.02.02.2.01.003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	52.455.300,00	0,00	(52.455.300,00)	0
5.4.02.02.2.01.004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	172.089.600,00	151.596.000,00	(20.493.600,00)	88,09
5.4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	178.368.000,00	112.801.000,00	(65.567.000,00)	63,24
5.4.02.02.2.02.001	Pembahasan KUA dan PPAS	29.776.000,00	28.596.000,00	(1.180.000,00)	96,04
5.4.02.02.2.02.002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24.900.000,00	5.883.000,00	(19.017.000,00)	23,63
5.4.02.02.2.02.003	Pembahasan APBD	71.938.000,00	41.919.000,00	(30.019.000,00)	58,27

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.02.02.2.02.004	Pembahasan APBD Perubahan	24.930.000,00	9.729.000,00	(15.201.000,00)	39,03
5.4.02.02.2.02.006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	26.824.000,00	26.674.000,00	(150.000,00)	99,44
5.4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	552.400.825,00	495.472.889,00	(56.927.936,00)	89,69
5.4.02.02.2.03.006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	31.872.500,00	9.342.500,00	(22.530.000,00)	29,31
5.4.02.02.2.03.007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	516.290.825,00	486.130.389,00	(30.160.436,00)	94,16
5.4.02.02.2.03.008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4.237.500,00	0,00	(4.237.500,00)	0
5.4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.234.854.818,00	3.722.601.630,00	(512.253.188,00)	87,90
5.4.02.02.2.04.002	Pendalaman Tugas DPRD	1.253.000.000,00	1.020.000.000,00	(233.000.000,00)	81,40
5.4.02.02.2.04.003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2.174.793.518,00	2.045.947.830,00	(128.845.688,00)	94,08
5.4.02.02.2.04.005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	378.000.000,00	340.500.000,00	(37.500.000,00)	90,08
5.4.02.02.2.04.006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	395.541.300,00	292.003.800,00	(103.537.500,00)	73,82
5.4.02.02.2.04.007	Penyusunan Program Kerja DPRD	33.520.000,00	24.150.000,00	(9.370.000,00)	72,05
5.4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.927.447.800,00	4.179.496.300,00	(747.951.500,00)	84,82
5.4.02.02.2.05.002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	91.835.300,00	71.740.300,00	(20.095.000,00)	78,12
5.4.02.02.2.05.003	Pelaksanaan Reses	4.835.612.500,00	4.107.756.000,00	(727.856.500,00)	84,95
5.4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	245.815.464,00	241.230.840,00	(4.584.624,00)	98,13
5.4.02.02.2.08.004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	245.815.464,00	241.230.840,00	(4.584.624,00)	98,13
5.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	110.799.050.597,00	65.541.205.106,00	(45.257.845.491,00)	59,15
5.5.01	**PERENCANAAN**	12.927.457.916,00	11.589.376.400,00	(1.338.081.516,00)	89,65
5.5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.190.122.604,00	10.083.432.559,00	(1.106.690.045,00)	90,11
5.5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.006.700,00	45.763.700,00	(7.243.000,00)	86,34
5.5.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.535.000,00	8.869.000,00	(2.666.000,00)	76,89
5.5.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.936.200,00	1.564.200,00	(1.372.000,00)	53,27
5.5.01.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.293.800,00	922.800,00	(1.371.000,00)	40,23
5.5.01.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.911.200,00	2.799.200,00	(112.000,00)	96,15
5.5.01.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.355.000,00	1.033.500,00	(1.321.500,00)	43,89
5.5.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.468.000,00	9.181.000,00	(287.000,00)	96,97
5.5.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.507.500,00	21.394.000,00	(113.500,00)	99,47
5.5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.503.927.300,00	7.926.757.294,00	(577.170.006,00)	93,21
5.5.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.499.629.800,00	7.923.091.544,00	(576.538.256,00)	93,22
5.5.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.297.500,00	3.665.750,00	(631.750,00)	85,30
5.5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	76.068.812,00	74.637.000,00	(1.431.812,00)	98,12
5.5.01.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	76.068.812,00	74.637.000,00	(1.431.812,00)	98,12
5.5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.050.000,00	53.100.000,00	(1.950.000,00)	96,46
5.5.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55.050.000,00	53.100.000,00	(1.950.000,00)	96,46
5.5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.219.525.929,00	988.967.976,00	(230.557.953,00)	81,09
5.5.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.810.913,00	144.643.168,00	(2.167.745,00)	98,52
5.5.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.629.600,00	1.820.000,00	(2.809.600,00)	39,31
5.5.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.186.144,00	5.538.750,00	(16.647.394,00)	24,96
5.5.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	274.567.572,00	267.822.072,00	(6.745.500,00)	97,54

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.650.000,00	38.175.000,00	(12.475.000,00)	75,37
5.5.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	720.681.700,00	530.968.986,00	(189.712.714,00)	73,68
5.5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.075.050,00	15.000.000,00	(76.075.050,00)	16,47
5.5.01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.671.050,00	0,00	(69.671.050,00)	0
5.5.01.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.404.000,00	15.000.000,00	(6.404.000,00)	70,08
5.5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662.152.533,00	600.497.956,00	(61.654.577,00)	90,69
5.5.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.966.000,00	160.633.206,00	(35.332.794,00)	81,97
5.5.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466.186.533,00	439.864.750,00	(26.321.783,00)	94,35
5.5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	529.316.280,00	378.708.633,00	(150.607.647,00)	71,55
5.5.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.810.950,00	32.063.400,00	(16.747.550,00)	65,69
5.5.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.356.175,00	216.864.558,00	(79.491.617,00)	73,18
5.5.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.188.000,00	77.701.175,00	(486.825,00)	99,38
5.5.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.273.175,00	20.344.500,00	(26.928.675,00)	43,04
5.5.01.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.687.980,00	31.735.000,00	(26.952.980,00)	54,07
5.5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	359.877.276,00	250.543.096,00	(109.334.180,00)	69,62
5.5.01.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	893.851.310,00	797.307.169,00	(96.544.141,00)	89,20
5.5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	288.454.300,00	195.592.200,00	(92.862.100,00)	67,81
5.5.01.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	158.418.559,00	132.828.559,00	(25.590.000,00)	83,85
5.5.01.02.2.01.003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	58.585.584,00	36.085.584,00	(22.500.000,00)	61,59
5.5.01.02.2.01.004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	17.500.000,00	13.000.000,00	(4.500.000,00)	74,29
5.5.01.02.2.01.005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	181.643.100,00	123.281.000,00	(58.362.100,00)	67,87
5.5.01.02.2.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	89.311.200,00	59.311.200,00	(30.000.000,00)	66,41
5.5.01.02.2.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	99.832.975,00	96.742.975,00	(3.090.000,00)	96,90
5.5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	50.120.976,00	40.870.896,00	(9.250.080,00)	81,54
5.5.01.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	251.835.291,00	238.221.930,00	(13.613.361,00)	94,59
5.5.01.02.2.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	13.295.080,00	5.295.000,00	(8.000.080,00)	39,83
5.5.01.02.2.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
5.5.01.02.2.02.003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	36.825.896,00	35.575.896,00	(1.250.000,00)	96,61
5.5.01.02.2.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	64.648.400,00	58.180.000,00	(6.468.400,00)	89,99
5.5.01.02.2.02.005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	117.186.891,00	110.041.930,00	(7.144.961,00)	93,90
5.5.01.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	315.170.614,00	261.079.834,00	(54.090.780,00)	82,84
5.5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	21.302.000,00	14.080.000,00	(7.222.000,00)	66,10
5.5.01.02.2.03.003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	21.302.000,00	14.080.000,00	(7.222.000,00)	66,10
5.5.01.02.2.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	94.980.094,00	92.792.334,00	(2.187.760,00)	97,70
5.5.01.02.2.03.009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	109.470.260,00	60.267.500,00	(49.202.760,00)	55,05
5.5.01.02.2.03.013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	110.720.260,00	108.020.000,00	(2.700.260,00)	97,56
5.5.01.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	168.426.846,00	165.176.846,00	(3.250.000,00)	98,07
5.5.01.02.2.04.001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	124.207.500,00	120.957.500,00	(3.250.000,00)	97,38

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.01.02.2.04.003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	44.219.346,00	44.219.346,00	0,00	100,00
5.5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	483.606.726,00	458.093.576,00	(25.513.150,00)	94,72
5.5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	134.372.144,00	134.372.144,00	0,00	100,00
5.5.01.03.2.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.725.518,00	21.725.518,00	0,00	100,00
5.5.01.03.2.01.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	21.765.518,00	21.765.518,00	0,00	100,00
5.5.01.03.2.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	53.577.060,00	53.577.060,00	0,00	100,00
5.5.01.03.2.01.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	37.304.048,00	37.304.048,00	0,00	100,00
5.5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	138.296.268,00	137.191.168,00	(1.105.100,00)	99,20
5.5.01.03.2.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48.835.292,00	48.382.792,00	(452.500,00)	99,07
5.5.01.03.2.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18.060.100,00	18.060.000,00	(100,00)	100,00
5.5.01.03.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	20.882.792,00	20.882.792,00	0,00	100,00
5.5.01.03.2.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.305.292,00	28.682.792,00	(622.500,00)	97,88
5.5.01.03.2.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	21.212.792,00	21.182.792,00	(30.000,00)	99,86
5.5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	210.938.314,00	186.530.264,00	(24.408.050,00)	88,43
5.5.01.03.2.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77.033.746,00	72.279.096,00	(4.754.650,00)	93,83
5.5.01.03.2.03.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	51.655.796,00	48.209.096,00	(3.446.700,00)	93,33
5.5.01.03.2.03.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	41.688.236,00	38.021.036,00	(3.667.200,00)	91,20
5.5.01.03.2.03.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	40.560.536,00	28.021.036,00	(12.539.500,00)	69,08
5.5.02	**KEUANGAN**	85.649.479.842,00	42.325.268.266,00	(43.324.211.576,00)	49,42
5.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.801.648.066,00	23.652.593.418,00	(6.149.054.648,00)	79,37
5.5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.198.896,00	118.598.664,00	(6.600.232,00)	94,73
5.5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.808.150,00	1.808.150,00	0,00	100,00
5.5.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.104.725,00	1.104.725,00	0,00	100,00
5.5.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	619.725,00	619.725,00	0,00	100,00
5.5.02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.486.175,00	1.486.175,00	0,00	100,00
5.5.02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.411.050,00	1.411.050,00	0,00	100,00
5.5.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	103.653.196,00	101.144.464,00	(2.508.732,00)	97,58
5.5.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.115.875,00	11.024.375,00	(4.091.500,00)	72,93
5.5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.190.014.107,00	20.540.901.696,00	(5.649.112.411,00)	78,43

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.032.456.775,00	20.387.809.455,00	(5.644.647.320,00)	78,32
5.5.02.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.223.192,00	79.863.192,00	(2.360.000,00)	97,13
5.5.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	75.334.140,00	73.229.049,00	(2.105.091,00)	97,21
5.5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.828.096,00	63.854.805,00	(10.973.291,00)	85,34
5.5.02.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	74.828.096,00	63.854.805,00	(10.973.291,00)	85,34
5.5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.064.530.061,00	915.683.089,00	(148.846.972,00)	86,02
5.5.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.323.996,00	143.087.300,00	(6.236.696,00)	95,82
5.5.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.199.088,00	34.188.400,00	(2.010.688,00)	94,45
5.5.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	310.220.000,00	286.920.000,00	(23.300.000,00)	92,49
5.5.02.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.600.000,00	18.267.448,00	(15.332.552,00)	54,37
5.5.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	535.186.977,00	433.219.941,00	(101.967.036,00)	80,95
5.5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.627.600,00	24.018.750,00	(46.608.850,00)	34,01
5.5.02.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.853.600,00	16.143.750,00	(38.709.850,00)	29,43
5.5.02.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.774.000,00	7.875.000,00	(7.899.000,00)	49,92
5.5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.331.740.607,00	1.315.649.670,00	(16.090.937,00)	98,79
5.5.02.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.460.000,00	6.286.500,00	(3.173.500,00)	66,45
5.5.02.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	484.806.000,00	483.479.971,00	(1.326.029,00)	99,73
5.5.02.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	837.474.607,00	825.883.199,00	(11.591.408,00)	98,62
5.5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	944.708.699,00	673.886.744,00	(270.821.955,00)	71,33
5.5.02.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	561.594.050,00	301.457.459,00	(260.136.591,00)	53,68
5.5.02.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	212.764.649,00	208.019.235,00	(4.745.414,00)	97,77
5.5.02.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.950.000,00	51.016.325,00	(2.933.675,00)	94,56
5.5.02.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116.400.000,00	113.393.725,00	(3.006.275,00)	97,42
5.5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	50.790.963.267,00	14.555.675.370,00	(36.235.287.897,00)	28,66
5.5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.291.166.194,00	1.073.805.687,00	(217.360.507,00)	83,17
5.5.02.02.2.01.001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	137.956.650,00	122.930.572,00	(15.026.078,00)	89,11
5.5.02.02.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	170.822.750,00	147.130.621,00	(23.692.129,00)	86,13
5.5.02.02.2.01.003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	84.701.274,00	66.137.274,00	(18.564.000,00)	78,08
5.5.02.02.2.01.004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	81.979.774,00	57.915.984,00	(24.063.790,00)	70,65
5.5.02.02.2.01.005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	69.438.749,00	31.122.824,00	(38.315.925,00)	44,82
5.5.02.02.2.01.006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	85.899.274,00	76.712.566,00	(9.186.708,00)	89,31
5.5.02.02.2.01.007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	243.011.348,00	216.795.548,00	(26.215.800,00)	89,21
5.5.02.02.2.01.008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	312.356.523,00	259.587.448,00	(52.769.075,00)	83,11
5.5.02.02.2.01.009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	104.999.852,00	95.472.850,00	(9.527.002,00)	90,93
5.5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	625.862.580,00	577.009.400,00	(48.853.180,00)	92,19
5.5.02.02.2.02.003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	42.877.125,00	42.877.125,00	0,00	100,00
5.5.02.02.2.02.005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25.714.000,00	25.714.000,00	0,00	100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.02.02.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	115.997.550,00	99.052.300,00	(16.945.250,00)	85,39
5.5.02.02.2.02.009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	328.347.415,00	321.630.860,00	(6.716.555,00)	97,95
5.5.02.02.2.02.011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	112.926.490,00	87.735.115,00	(25.191.375,00)	77,69
5.5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	806.270.246,00	752.536.701,00	(53.733.545,00)	93,34
5.5.02.02.2.03.002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	227.176.556,00	224.700.731,00	(2.475.825,00)	98,91
5.5.02.02.2.03.003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	62.812.600,00	62.159.040,00	(653.560,00)	98,96
5.5.02.02.2.03.004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	142.286.000,00	141.049.840,00	(1.236.160,00)	99,13
5.5.02.02.2.03.005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	69.812.000,00	69.044.000,00	(768.000,00)	98,90
5.5.02.02.2.03.009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	62.479.050,00	62.479.050,00	0,00	100,00
5.5.02.02.2.03.010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	164.743.440,00	116.143.440,00	(48.600.000,00)	70,50
5.5.02.02.2.03.011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	76.960.600,00	76.960.600,00	0,00	100,00
5.5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	48.067.664.247,00	12.152.323.582,00	(35.915.340.665,00)	25,28
5.5.02.02.2.04.009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	48.067.664.247,00	12.152.323.582,00	(35.915.340.665,00)	25,28
5.5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.722.570.254,00	1.563.835.265,00	(158.734.989,00)	90,78
5.5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.722.570.254,00	1.563.835.265,00	(158.734.989,00)	90,78
5.5.02.03.2.01.001	Penyusunan Standar Harga	104.347.752,00	104.347.752,00	0,00	100,00
5.5.02.03.2.01.005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	347.772.269,00	322.177.387,00	(25.594.882,00)	92,64
5.5.02.03.2.01.006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	108.619.850,00	108.619.850,00	0,00	100,00
5.5.02.03.2.01.007	Pengamanan Barang Milik Daerah	450.036.791,00	449.156.446,00	(880.345,00)	99,80
5.5.02.03.2.01.009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	689.790.067,00	557.530.305,00	(132.259.762,00)	80,83
5.5.02.03.2.01.012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	22.003.525,00	22.003.525,00	0,00	100,00
5.5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.334.298.255,00	2.553.164.213,00	(781.134.042,00)	76,57
5.5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.334.298.255,00	2.553.164.213,00	(781.134.042,00)	76,57
5.5.02.04.2.01.002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	331.880.485,00	266.377.360,00	(65.503.125,00)	80,26
5.5.02.04.2.01.003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.117.145.415,00	962.604.508,00	(154.540.907,00)	86,17
5.5.02.04.2.01.005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	296.381.622,00	231.560.688,00	(64.820.934,00)	78,13
5.5.02.04.2.01.006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	282.066.177,00	157.670.894,00	(124.395.283,00)	55,90
5.5.02.04.2.01.007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	588.617.327,00	579.454.587,00	(9.162.740,00)	98,44
5.5.02.04.2.01.013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	328.460.440,00	125.982.640,00	(202.477.800,00)	38,36
5.5.02.04.2.01.014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	389.746.789,00	229.513.536,00	(160.233.253,00)	58,89
5.5.03	**KEPEGAWAIAN**	12.222.112.839,00	11.626.560.440,00	(595.552.399,00)	95,13
5.5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.352.267.976,00	8.083.156.691,00	(269.111.285,00)	96,78
5.5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.173.200,00	52.173.200,00	0,00	100,00
5.5.03.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.682.250,00	14.682.250,00	0,00	100,00
5.5.03.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.592.350,00	1.592.350,00	0,00	100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.03.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.481.800,00	1.481.800,00	0,00	100,00
5.5.03.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.332.350,00	1.332.350,00	0,00	100,00
5.5.03.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.231.975,00	1.231.975,00	0,00	100,00
5.5.03.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	100,00
5.5.03.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.572.475,00	20.572.475,00	0,00	100,00
5.5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.285.144.084,00	6.138.763.125,00	(146.380.959,00)	97,67
5.5.03.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.278.293.584,00	6.131.912.625,00	(146.380.959,00)	97,67
5.5.03.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.850.500,00	6.850.500,00	0,00	100,00
5.5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31.847.600,00	31.306.849,00	(540.751,00)	98,30
5.5.03.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31.847.600,00	31.306.849,00	(540.751,00)	98,30
5.5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.559.395,00	52.582.500,00	(976.895,00)	98,18
5.5.03.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.559.720,00	32.289.000,00	(270.720,00)	99,17
5.5.03.01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.999.675,00	20.293.500,00	(706.175,00)	96,64
5.5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	938.055.515,00	897.465.172,00	(40.590.343,00)	95,67
5.5.03.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.183.143,00	85.387.500,00	(795.643,00)	99,08
5.5.03.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.629.600,00	4.455.000,00	(174.600,00)	96,23
5.5.03.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.217.212,00	79.867.450,00	(349.762,00)	99,56
5.5.03.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	254.097.500,00	251.895.000,00	(2.202.500,00)	99,13
5.5.03.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.120.000,00	15.110.000,00	(10.000,00)	99,93
5.5.03.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	497.808.060,00	460.750.222,00	(37.057.838,00)	92,56
5.5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.519.196,00	73.733.000,00	(1.786.196,00)	97,63
5.5.03.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	9.892.800,00	9.800.000,00	(92.800,00)	99,06
5.5.03.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.575.540,00	48.900.000,00	(1.675.540,00)	96,69
5.5.03.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.050.856,00	15.033.000,00	(17.856,00)	99,88
5.5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.647.716,00	611.336.516,00	(14.311.200,00)	97,71
5.5.03.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.494.000,00	10.490.000,00	(4.000,00)	99,96
5.5.03.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.609.750,00	153.945.116,00	(13.664.634,00)	91,85
5.5.03.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	447.543.966,00	446.901.400,00	(642.566,00)	99,86
5.5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.321.270,00	225.796.329,00	(64.524.941,00)	77,77
5.5.03.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.494.950,00	26.541.810,00	(23.953.140,00)	52,56
5.5.03.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.072.320,00	144.388.519,00	(29.683.801,00)	82,95
5.5.03.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.754.000,00	54.866.000,00	(10.888.000,00)	83,44
5.5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.952.302.334,00	1.636.873.595,00	(315.428.739,00)	83,84
5.5.03.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.917.542.529,00	1.906.530.154,00	(11.012.375,00)	99,43
5.5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	779.998.449,00	549.459.251,00	(230.539.198,00)	70,44
5.5.03.02.2.01.002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	9.999.500,00	9.999.500,00	0,00	100,00
5.5.03.02.2.01.003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	465.094.899,00	258.561.426,00	(206.533.473,00)	55,59
5.5.03.02.2.01.006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	171.624.925,00	169.024.925,00	(2.600.000,00)	98,49

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.03.02.2.01.008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	29.999.950,00	27.799.225,00	(2.200.725,00)	92,66
5.5.03.02.2.01.010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	77.041.100,00	67.791.100,00	(9.250.000,00)	87,99
5.5.03.02.2.01.011	Pengelolaan Data Kepegawaian	26.238.075,00	16.283.075,00	(9.955.000,00)	62,06
5.5.03.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.917.542.529,00	1.906.530.154,00	(11.012.375,00)	99,43
5.5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	550.609.575,00	513.985.604,00	(36.623.971,00)	93,35
5.5.03.02.2.02.001	Pengelolaan Mutasi ASN	9.999.750,00	9.999.750,00	0,00	100,00
5.5.03.02.2.02.002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	99.999.375,00	90.462.900,00	(9.536.475,00)	90,46
5.5.03.02.2.02.003	Pengelolaan Promosi ASN	440.610.450,00	413.522.954,00	(27.087.496,00)	93,85
5.5.03.02.2.02.007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.882.542.529,00	1.873.164.329,00	(9.378.200,00)	99,50
5.5.03.02.2.02.008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	35.000.000,00	33.365.825,00	(1.634.175,00)	95,33
5.5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	402.987.800,00	365.199.800,00	(37.788.000,00)	90,62
5.5.03.02.2.03.002	Pengelolaan Assessment Center	180.068.800,00	178.525.800,00	(1.543.000,00)	99,14
5.5.03.02.2.03.004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	151.701.000,00	126.485.000,00	(25.216.000,00)	83,38
5.5.03.02.2.03.014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	71.218.000,00	60.189.000,00	(11.029.000,00)	84,51
5.5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	218.706.510,00	208.228.940,00	(10.477.570,00)	95,21
5.5.03.02.2.04.001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	20.999.875,00	20.999.875,00	0,00	100,00
5.5.03.02.2.04.003	EvaluasiHasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	14.562.475,00	7.002.475,00	(7.560.000,00)	48,09
5.5.03.02.2.04.005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	111.124.560,00	111.124.560,00	0,00	100,00
5.5.03.02.2.04.007	Pembinaan Disiplin ASN	72.019.600,00	69.102.030,00	(2.917.570,00)	95,95
5.6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	12.939.487.449,00	12.165.619.933,00	(773.867.516,00)	94,02
5.6.01	**INSPEKTORAT**	12.939.487.449,00	12.165.619.933,00	(773.867.516,00)	94,02
5.6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.744.954.693,00	11.112.820.037,00	(632.134.656,00)	94,62
5.6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.360.872,00	132.860.872,00	(14.500.000,00)	90,16
5.6.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.860.872,00	115.360.872,00	(5.500.000,00)	95,45
5.6.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5.6.01.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	70,00
5.6.01.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5.6.01.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0
5.6.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000,00	4.500.000,00	(2.500.000,00)	64,29
5.6.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,00	4.500.000,00	(2.500.000,00)	64,29
5.6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.014.623.476,00	8.839.097.076,00	(175.526.400,00)	98,05
5.6.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.001.823.476,00	8.827.897.076,00	(173.926.400,00)	98,07
5.6.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00
5.6.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000,00	8.400.000,00	(1.600.000,00)	84,00
5.6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.383.024,00	48.335.515,00	(47.509,00)	99,90
5.6.01.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48.383.024,00	48.335.515,00	(47.509,00)	99,90
5.6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	211.777.000,00	167.843.730,00	(43.933.270,00)	79,25

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.6.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38.512.000,00	37.379.000,00	(1.133.000,00)	97,06
5.6.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	107.515.000,00	84.314.000,00	(23.201.000,00)	78,42
5.6.01.01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	51.750.000,00	39.390.000,00	(12.360.000,00)	76,12
5.6.01.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.000.000,00	6.760.730,00	(7.239.270,00)	48,29
5.6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.000.895.502,00	766.546.719,00	(234.348.783,00)	76,59
5.6.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.908.325,00	104.872.200,00	(2.036.125,00)	98,10
5.6.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.082.275,00	2.849.000,00	(233.275,00)	92,43
5.6.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.184.802,00	95.130.875,00	(12.053.927,00)	88,75
5.6.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	210.831.200,00	199.000.000,00	(11.831.200,00)	94,39
5.6.01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.250.000,00	6.203.750,00	(14.046.250,00)	30,64
5.6.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	542.638.900,00	348.490.894,00	(194.148.006,00)	64,22
5.6.01.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
5.6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.112.880,00	66.715.700,00	(7.397.180,00)	90,02
5.6.01.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.112.880,00	66.715.700,00	(7.397.180,00)	90,02
5.6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	693.207.214,00	663.905.194,00	(29.302.020,00)	95,77
5.6.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.832.600,00	5.657.000,00	(1.175.600,00)	82,79
5.6.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.275.000,00	138.478.244,00	(19.796.756,00)	87,49
5.6.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	528.099.614,00	519.769.950,00	(8.329.664,00)	98,42
5.6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.594.725,00	427.515.231,00	(127.079.494,00)	77,09
5.6.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.413.450,00	39.692.471,00	(9.720.979,00)	80,33
5.6.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.479.500,00	147.471.760,00	(63.007.740,00)	70,06
5.6.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.192.900,00	84.805.000,00	(13.387.900,00)	86,37
5.6.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.508.875,00	155.546.000,00	(40.962.875,00)	79,15
5.6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	433.408.756,00	336.684.786,00	(96.723.970,00)	77,68
5.6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	377.788.756,00	289.414.786,00	(88.373.970,00)	76,61
5.6.01.02.2.01.001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	191.238.756,00	168.429.018,00	(22.809.738,00)	88,07
5.6.01.02.2.01.002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41.700.000,00	16.298.172,00	(25.401.828,00)	39,08
5.6.01.02.2.01.003	Reviu Laporan Kinerja	47.750.000,00	35.642.682,00	(12.107.318,00)	74,64
5.6.01.02.2.01.004	Reviu Laporan Keuangan	67.100.000,00	47.668.023,00	(19.431.977,00)	71,04
5.6.01.02.2.01.007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	30.000.000,00	21.376.891,00	(8.623.109,00)	71,26
5.6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	55.620.000,00	47.270.000,00	(8.350.000,00)	84,99
5.6.01.02.2.02.001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	15.000.000,00	11.800.000,00	(3.200.000,00)	78,67
5.6.01.02.2.02.002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	40.620.000,00	35.470.000,00	(5.150.000,00)	87,32
5.6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	761.124.000,00	716.115.110,00	(45.008.890,00)	94,09
5.6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	110.670.000,00	110.670.000,00	0,00	100,00
5.6.01.03.2.01.002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	110.670.000,00	110.670.000,00	0,00	100,00
5.6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	650.454.000,00	605.445.110,00	(45.008.890,00)	93,08
5.6.01.03.2.02.001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	114.640.000,00	70.592.774,00	(44.047.226,00)	61,58

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.6.01.03.2.02.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	4.000.000,00	3.043.300,00	(956.700,00)	76,08
5.6.01.03.2.02.003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	523.750.000,00	523.745.036,00	(4.964,00)	100,00
5.6.01.03.2.02.004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8.064.000,00	8.064.000,00	0,00	100,00
5.7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	63.687.310.688,00	58.371.298.799,00	(5.316.011.889,00)	91,65
5.7.01	**KECAMATAN**	63.687.310.688,00	58.371.298.799,00	(5.316.011.889,00)	91,65
5.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.919.689.393,00	39.387.170.240,00	(3.532.519.153,00)	91,77
5.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	853.946.020,00	692.758.397,00	(161.187.623,00)	81,12
5.7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	157.069.850,00	135.307.850,00	(21.762.000,00)	86,15
5.7.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	22.888.500,00	16.705.000,00	(6.183.500,00)	72,98
5.7.01.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	22.517.400,00	16.710.000,00	(5.807.400,00)	74,21
5.7.01.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.046.500,00	11.760.000,00	(1.286.500,00)	90,14
5.7.01.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	13.046.500,00	12.220.000,00	(826.500,00)	93,66
5.7.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	318.993.014,00	267.446.496,00	(51.546.518,00)	83,84
5.7.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	306.384.256,00	232.609.051,00	(73.775.205,00)	75,92
5.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.367.483.237,00	30.808.962.221,00	(1.558.521.016,00)	95,18
5.7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.285.225.893,00	30.729.751.721,00	(1.555.474.172,00)	95,18
5.7.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.964.400,00	17.844.300,00	(2.120.100,00)	89,38
5.7.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	62.292.944,00	61.366.200,00	(926.744,00)	98,51
5.7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.120.800,00	19.005.066,00	(9.115.734,00)	67,58
5.7.01.01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.412.000,00	0,00	(2.412.000,00)	0
5.7.01.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.708.800,00	19.005.066,00	(6.703.734,00)	73,92
5.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	159.412.200,00	85.803.000,00	(73.609.200,00)	53,82
5.7.01.01.2.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4.350.000,00	0,00	(4.350.000,00)	0
5.7.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	155.062.200,00	85.803.000,00	(69.259.200,00)	55,33
5.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.929.244.894,00	2.381.047.050,00	(548.197.844,00)	81,29
5.7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	537.215.250,00	512.210.900,00	(25.004.350,00)	95,35
5.7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.671.400,00	30.758.500,00	(28.912.900,00)	51,55
5.7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	342.343.354,00	293.938.853,00	(48.404.501,00)	85,86
5.7.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	734.566.000,00	557.481.000,00	(177.085.000,00)	75,89
5.7.01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	210.049.320,00	130.420.500,00	(79.628.820,00)	62,09
5.7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.045.399.570,00	856.237.297,00	(189.162.273,00)	81,91
5.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	434.400.688,00	174.170.400,00	(260.230.288,00)	40,09
5.7.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	112.659.520,00	29.107.000,00	(83.552.520,00)	25,84
5.7.01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.872.200,00	69.060.000,00	(80.812.200,00)	46,08
5.7.01.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	171.868.968,00	76.003.400,00	(95.865.568,00)	44,22
5.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.613.304.666,00	3.400.906.828,00	(212.397.838,00)	94,12
5.7.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	136.056.324,00	128.061.328,00	(7.994.996,00)	94,12
5.7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.258.730.800,00	1.089.598.550,00	(169.132.250,00)	86,56
5.7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.218.517.542,00	2.183.246.950,00	(35.270.592,00)	98,41
5.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.533.776.888,00	1.824.517.278,00	(709.259.610,00)	72,01

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.124.483.992,00	886.576.883,00	(237.907.109,00)	78,84
5.7.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	465.051.770,00	327.987.493,00	(137.064.277,00)	70,53
5.7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	496.138.824,00	268.763.220,00	(227.375.604,00)	54,17
5.7.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	319.218.102,00	251.748.482,00	(67.469.620,00)	78,86
5.7.01.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	128.884.200,00	89.441.200,00	(39.443.000,00)	69,40
5.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	324.341.596,00	307.284.492,00	(17.057.104,00)	94,74
5.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.954.200,00	27.370.500,00	(4.583.700,00)	85,66
5.7.01.02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.954.200,00	27.370.500,00	(4.583.700,00)	85,66
5.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	292.387.396,00	279.913.992,00	(12.473.404,00)	95,73
5.7.01.02.2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	292.387.396,00	279.913.992,00	(12.473.404,00)	95,73
5.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.920.474.024,00	16.400.655.255,00	(1.519.818.769,00)	91,52
5.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	17.653.667.870,00	16.188.681.995,00	(1.464.985.875,00)	91,70
5.7.01.03.2.02.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	790.501.051,00	778.871.106,00	(11.629.945,00)	98,53
5.7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.194.025.966,00	2.872.646.190,00	(321.379.776,00)	89,94
5.7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13.669.140.853,00	12.537.164.699,00	(1.131.976.154,00)	91,72
5.7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	266.806.154,00	211.973.260,00	(54.832.894,00)	79,45
5.7.01.03.2.03.001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	239.305.014,00	204.283.200,00	(35.021.814,00)	85,37
5.7.01.03.2.03.004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8.560.080,00	0,00	(8.560.080,00)	0
5.7.01.03.2.03.005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	18.941.060,00	7.690.060,00	(11.251.000,00)	40,60
5.7.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	40.672.400,00	12.755.000,00	(27.917.400,00)	31,36
5.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	877.854.867,00	829.003.484,00	(48.851.383,00)	94,44
5.7.01.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40.672.400,00	12.755.000,00	(27.917.400,00)	31,36
5.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	827.769.227,00	799.091.004,00	(28.678.223,00)	96,54
5.7.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	821.412.107,00	799.091.004,00	(22.321.103,00)	97,28
5.7.01.04.2.01.002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.357.120,00	0,00	(6.357.120,00)	0
5.7.01.04.2.01.005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	40.672.400,00	12.755.000,00	(27.917.400,00)	31,36
5.7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.085.640,00	29.912.480,00	(20.173.160,00)	59,72
5.7.01.04.2.02.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50.085.640,00	29.912.480,00	(20.173.160,00)	59,72
5.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.545.130,00	41.652.080,00	(33.893.050,00)	55,14
5.7.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.528.733.278,00	1.392.778.248,00	(135.955.030,00)	91,11
5.7.01.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.528.733.278,00	1.392.778.248,00	(135.955.030,00)	91,11
5.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	75.545.130,00	41.652.080,00	(33.893.050,00)	55,14

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.05.2.01.001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	28.609.550,00	13.605.000,00	(15.004.550,00)	47,55
5.7.01.05.2.01.003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.511.174.678,00	1.376.714.248,00	(134.460.430,00)	91,10
5.7.01.05.2.01.006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6.628.600,00	6.292.000,00	(336.600,00)	94,92
5.7.01.05.2.01.007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	10.930.000,00	9.772.000,00	(1.158.000,00)	89,41
5.7.01.05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	46.935.580,00	28.047.080,00	(18.888.500,00)	59,76
5.8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	24.456.672.768,00	23.148.661.581,00	(1.308.011.187,00)	94,65
5.8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	24.456.672.768,00	23.148.661.581,00	(1.308.011.187,00)	94,65
5.8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.566.243.727,00	4.792.909.989,00	(773.333.738,00)	86,11
5.8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.321.400,00	22.494.300,00	(20.827.100,00)	51,92
5.8.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.873.400,00	7.826.300,00	(3.047.100,00)	71,98
5.8.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.302.000,00	586.000,00	(2.716.000,00)	17,75
5.8.01.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.302.000,00	526.000,00	(2.776.000,00)	15,93
5.8.01.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.302.000,00	3.302.000,00	0,00	100,00
5.8.01.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.302.000,00	526.000,00	(2.776.000,00)	15,93
5.8.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000,00	2.484.000,00	(3.516.000,00)	41,40
5.8.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.240.000,00	7.244.000,00	(5.996.000,00)	54,71
5.8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.789.361.519,00	3.677.563.810,00	(111.797.709,00)	97,05
5.8.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.725.667.331,00	3.615.577.522,00	(110.089.809,00)	97,05
5.8.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.345.100,00	845.100,00	(1.500.000,00)	36,04
5.8.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	61.349.088,00	61.141.188,00	(207.900,00)	99,66
5.8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.066.000,00	10.850.000,00	(42.216.000,00)	20,45
5.8.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	53.066.000,00	10.850.000,00	(42.216.000,00)	20,45
5.8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	779.704.760,00	535.245.212,00	(244.459.548,00)	68,65
5.8.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.254.360,00	68.421.700,00	(82.832.660,00)	45,24
5.8.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.472.200,00	660.000,00	(2.812.200,00)	19,01
5.8.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.040.300,00	19.331.400,00	(10.708.900,00)	64,35
5.8.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	257.518.000,00	245.288.000,00	(12.230.000,00)	95,25
5.8.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.419.900,00	201.544.112,00	(135.875.788,00)	59,73
5.8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	161.177.660,00	26.938.200,00	(134.239.460,00)	16,71
5.8.01.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.024.000,00	0,00	(57.024.000,00)	0
5.8.01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.265.900,00	0,00	(40.265.900,00)	0
5.8.01.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.887.760,00	26.938.200,00	(36.949.560,00)	42,16
5.8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.778.686,00	258.628.945,00	(43.149.741,00)	85,70
5.8.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.384.000,00	31.213.945,00	(26.170.055,00)	54,39
5.8.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	244.394.686,00	227.415.000,00	(16.979.686,00)	93,05
5.8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.833.702,00	261.189.522,00	(176.644.180,00)	59,65
5.8.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	258.497.750,00	213.811.492,00	(44.686.258,00)	82,71

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.8.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.571.156,00	0,00	(114.571.156,00)	0
5.8.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.744.000,00	16.165.000,00	(13.579.000,00)	54,35
5.8.01.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.020.796,00	31.213.030,00	(3.807.766,00)	89,13
5.8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	650.010.804,00	503.210.200,00	(146.800.604,00)	77,42
5.8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	650.010.804,00	503.210.200,00	(146.800.604,00)	77,42
5.8.01.02.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	650.010.804,00	503.210.200,00	(146.800.604,00)	77,42
5.8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	13.952.297.386,00	13.926.501.932,00	(25.795.454,00)	99,82
5.8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	13.952.297.386,00	13.926.501.932,00	(25.795.454,00)	99,82
5.8.01.03.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.848.331.286,00	13.842.557.232,00	(5.774.054,00)	99,96
5.8.01.03.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	88.070.300,00	79.361.700,00	(8.708.600,00)	90,11
5.8.01.03.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15.895.800,00	4.583.000,00	(11.312.800,00)	28,83
5.8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	988.446.300,00	916.708.000,00	(71.738.300,00)	92,74
5.8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	988.446.300,00	916.708.000,00	(71.738.300,00)	92,74
5.8.01.04.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	963.960.800,00	907.200.000,00	(56.760.800,00)	94,11
5.8.01.04.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	24.485.500,00	9.508.000,00	(14.977.500,00)	38,83
5.8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	250.000.609,00	130.014.004,00	(119.986.605,00)	52,01
5.8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	250.000.609,00	130.014.004,00	(119.986.605,00)	52,01
5.8.01.05.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150.000.000,00	100.000.000,00	(50.000.000,00)	66,67
5.8.01.05.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.609,00	30.014.004,00	(69.986.605,00)	30,01
5.8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.049.673.942,00	2.879.317.456,00	(170.356.486,00)	94,41
5.8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.049.673.942,00	2.879.317.456,00	(170.356.486,00)	94,41
5.8.01.06.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.8.01.06.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	318.982.006,00	238.934.656,00	(80.047.350,00)	74,91
5.8.01.06.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59.970.936,00	27.408.800,00	(32.562.136,00)	45,70
5.8.01.06.2.01.006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	720.721.000,00	662.974.000,00	(57.747.000,00)	91,99
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	150.297.988.705,00	146.297.998.705,00	(3.999.990.000,00)	97,34
6.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	150.297.988.705,00	146.297.998.705,00	(3.999.990.000,00)	97,34
6.5.02	**KEUANGAN**	150.297.988.705,00	146.297.998.705,00	(3.999.990.000,00)	97,34
6.5.02.00	Non Program	150.297.988.705,00	146.297.998.705,00	(3.999.990.000,00)	97,34
6.5.02.00.0.00	Non Kegiatan	150.297.988.705,00	146.297.998.705,00	(3.999.990.000,00)	97,34
6.5.02.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	150.297.988.705,00	146.297.998.705,00	(3.999.990.000,00)	97,34

Cirebon, 13 Februari 2024

WALI KOTA CIREBON,

NASHRUDIN AZIS

TABEL PERHITUNGAN ANALISA EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (anggaran) Tahun 2023

dihitung dengan menyandingkan realisasi anggaran pada program yang mendukung sasaran secara langsung (program utama) dengan capaian sasaran strategis

				Kinerja			Keuangan				Efesiensi
No	**Tujuan /Sasaran**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian Kinerja**	**Program**	**Anggaran**	**Realisasi**	**Capaian Keuangan**	
1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	Poin	75,93	77,45	100,20%					
		Indeks Gini	Poin	0,42	0,468	88,57%					
		PDRB per Kapita (Rp.000.000)	Juta/rupiah	83,84	84.135	100,35%					
		Indeks Daya Beli	Poin								
		Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	Ribu Rupiah	12.628	12.506	99,03%					
						97,0%					
Sasaran :											
1.1.1	Meningkatan akses dan mutu pendidikan	Rata –rata lama Sekolah	Tahun	10,61	10,37	97,74%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	103.913.411.319,00	102.127.648.058,00	98,281%	-0,54%
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,99	13,16	94,07%					
							PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.391.352.785,00	2.390.604.530,00	99,969%	
Rata - Rata Capaian Sasaran 1..1						**95,91%**	Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**99,125%**	-3,22%

1.2	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Rasio Perpustakaan Per satuan Penduduk	Permil	1,958	1,587	81,05%	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	905.455.025,00	854.433.977,00	94,365%	
							PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	252.980.604,00	245.657.641	97,105%	
Rata - Rata Capaian Sasaran 1.1.2						**81,05%**	Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran Sasaran 1.2			**95,735%**	-14,68%
1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,64	75,17	103,48%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	404.163.544.596,00	384.917.504.268,00	95,238%	
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99	101,94	102,97%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	235.592.370,00	233.992.370,00	99,321%	
							PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	442.237.150,00	441.800.950,00	99,901%	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.245.553.775,00	1.244.692.725,00	99,931%	
Rata - Rata Capaian Sasaran 1.3						**103,23%**	Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran Sasaran 1.3			**98,598%**	**4,63%**
1.4	Terkendalinya jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,47	0,71	48,94%	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	237.095.531,00	187.889.881,00	79,246%	-30,31%
							PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.343.667.122,00	1.721.216.036,00	73,441%	-73,44%
Rata - Rata Capaian Sasaran 1.4						48,94%	Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran Sasaran 1.1.4			**76,344%**	**-27,40%**
1.5		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,15	68,71	103,87%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.988.008.623,00	256.018.841,00	12,878%	90,99%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,5	7,66	109,88%	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	303.479.087,00	296.191.693,00	97,599%	12,28%

	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91,94	92.34	100,43%	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	49.999.700,00	48.500.000,00	97,001%	3,43%
							PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	203.460.012,00	192.371.544,00	94,550%	12,28%
Rata - Rata Capaian Sasaran 1.1.5						**104,73%**	Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran Sasaran 1.1.5			**75,507%**	**29,22%**
1.6	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda.	Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional	Atlet	9	23	255,56%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	561.161.662,00	560.665.662,00	99,912%	
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	70,00	75	107,14%	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.784.184.894,00	12.733.818.388,00	99,606%	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	343.504.525,00	342.394.525,00	99,677%	
Rata - Rata Capaian Sasaran 1.6						**181,35%**	Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**99,731%**	**81,62%**
1.7	Meningkatnya pengarusutama an gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender /IDG	Poin	94,46	94,91	100,476%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	50.697.597,00	50.647.197,00	99,901%	0,58%
		Indeks Pembangunan Gender /IPG	Poin	78,47	78,07	99,49%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	29.672.200,00	28.520.000,00	96,117%	3,37%

							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	256.515.940,00	168.807.500,00	65,808%	-65,81%
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.207.892.898,00	1.728.919.042,00		
							PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	88.127.425,00	41.243.750,00	46,800%	
							PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	74.952.398,00	66.284.750,00	88,436%	
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100.547.175,00	75.062.400,00	74,654%	
Rata - Rata Capaian Sasaran 1.1.7						**99,98%**	Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran Sasaran 1.1.7			**78,619%**	**21,36%**
1..8	Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon	Peningkatan PDRB dari sektor industri	Persen	11,80-11,87	10,37	87,58%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	220.001.730,00	135.831.862,00	61,741%	25,84%
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	24.707.645,00	18.680.000,00	75,604%	
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	40.956.270,00	20.983.000,00	51,233%	
		Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan	Persen	34,37-34,58	28,77	83,44%					83,44%

							PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM	540.222.200,00	531.514.800,00	98,388%	
							PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	217.901.734,00	194.062.584,00	89,060%	-89,06%
							PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	121.498.750,00	120.989.200,00	99,581%	-99,58%
							PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	133.562.750,00	96.242.750,00	72,058%	-72,06%
							PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	33.978.575,00	21.407.000,00	63,001%	-63,00%
							PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	32.143.585,00	10.000.000,00	31,110%	-31,11%
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	420.370.000,00	418.108.200,00	99,462%	-99,46%
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	53.215.250,00	51.390.450,00	96,571%	-96,57%
							PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	273.120.475,00	180.284.720,00	66,009%	
Rata - Rata Capaian Sasaran 1.8						**85,51%**	Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**75,318%**	**10,19%**

1.9	Berkurangnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin	Persen	8,35	**9,16**	90,29%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	492.102.700,00	465.802.400,00	94,656%	-4,37%
							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.256.925.507,00	918.861.577,00	73,104%	-73,10%
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	503.309.733,00	492.275.058,00	97,808%	-97,81%
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	354.592.049,00	352.607.649,00	99,440%	-99,44%
Rata - Rata Capaian Sasaran 1.9						**90,29%**	Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran Sasaran 1.9			**91,252%**	-0,96%
1.10	Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan /PPH	Poin	95,15	88,1	92,6	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	437.504.579,00	310.044.330,00	70,867%	9189,13%
		Peningkatan PDRB dari sektor Pertanian	Persen	0,32	0,34	0,34	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	334.314.135,00	298.141.435,00	89,180%	-55,18%
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN	16.218.175,00	13.413.500,00	82,707%	-82,71%
							PENGELOLAAN PERIKANAN	467.425.802,00	358.935.392,00	76,790%	-76,79%
							PENGELOLAAN PERIKANAN	1.211.901.174,00	1.126.343.550,00	92,940%	-92,94%
							PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	336.861.150,00	132.293.290,00	39,272%	-39,27%
							PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	960.051.568,00	921.446.209,00	95,979%	-95,98%

							PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	698.661.678,00	604.201.313,00	86,480%	-86,48%
							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	81.732.900,00	70.107.000,00	85,776%	-85,78%
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	44.424.250,00	33.914.500,00	76,342%	
Rata - Rata Capaian Sasaran 1.10						**4647,00%**	apaian Realisasi Program Anggaran			**79,633%**	**4567,37%**
1.11	Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	Meningkatnya PDRB dari sector pariwisata	Persen	5,90-5,93	5,59	100,00%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	148.367.600,00	148.211.000,00	99,894%	0,11%
							PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	578.072.024,00	572.345.624,00	99,009%	
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	399.705.748,00	396.782.648,00	99,269%	
Rata - Rata Capaian Sasaran 1.11						**100,00%**	Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**99,391%**	**0,61%**
1.12	Meningkatnya kerukunan umat Beragama	Konflik antar umat beragama	Jumlah	0	0	100%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL	250.000.609,00	130.014.004,00	52,005%	47,99%
Rata - Rata Capaian Sasaran 1.12						**100%**	Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			52,005%	47,99%
1.13	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Persen	78,41	76,47	100,34%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	707.291.998,00	701.409.825,00	99,168%	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	547.421.410,00	542.826.824,00	99,161%	
							PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	757.236.000,00	752.056.000,00	99,316%	

Rata - Rata Capaian Sasaran 1.13						**100,34%**	Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			99,215%	1,13%
1.14							PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	29.788.350,00	-	0,000%	0,00%
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Cepat Berkembang	Persen	59,09	59,09	100,00%	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	833.128.650,00	598.693.425,00	71,861%	28,14%
		Persentase Kelurahan Bersatutus swasembada		100	100	100,00%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KECAMATAN)	17.920.474.024,00	16.400.655.255,00	91,519%	8,48%
		Kecamatan Kesambi	Persen	**80%**	**80%**	100,00%					100,00%
		Kecamatan Pekalipan	Persen	**25%**	**25%**	100,00%					
		Kecamatan Kejaksan	Persen	**25%**	**50%**	200,00%					

		Kecamatan Harjamukti	Persen	**40%**	**25%**	62,50%					
		Kecamatan Lemah Wungkuk	Persen	**25%**	**25%**	100,00%					
Rata - Rata Capaian Sasaran 1..14						**108,93%**	Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			**81,690%**	**27,24%**
Misi 2											0,00%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80	73,91	**92,39%**					92,39%
	Sasaran :										0,00%

2.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur	Persentase penyelenggaraan layanan administrasi Pemerintahan	Persen			Sasaran Baru setelah RPJMD Perubahan, muncul target tahun 2022					
2.2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur	Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi	Persen	55,00	94,09	171%	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.952.302.334,00	1.636.873.595,00	83,843%	
		Persentase Pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	Persen	82,50	85,00	103%	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.917.542.529,00	1.906.530.154,00	99,426%	
		Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin	Persen	98,00	96,95	98,93%					
		Persentase Kepatuhan Pegawai untuk Memenuhi Penyampaian LHKPN	Persen	100	100	100%					
Rata - Rata Capaian Saasaran 2.2						**118,23%**	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.1.1			**91,634%**	**26,60%**
2.3	Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterapkan	Persen	100%	81,25%	81,25%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.543.046.844,00	4.165.155.131,00	91,682%	
		Persentase peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	Persen	100,00	68,75	68,75%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.070.987.978,00	646.448.805,00	60,360%	
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.3						**75,00%**	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.2			**76,021%**	**-1,02%**

2.4	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai Aspek Pelaporan kinerja dalam Evaluasi atas AKIP	Nilai	10,00	10,27	102,7%					
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.545.130,00	41.652.080,00	55,135%	
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.4						102,70%	Rata-rata Capaian Realisas Anggaran Sasaran 2.3			55,135%	47,56%
2.5	Meningkatnya Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	Level	4,00	3	75%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	433.408.756,00	336.684.786,00	77,683%	-2,68%
							PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	761.124.000,00	716.115.110,00	94,087%	-94,09%
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.1.4						75%	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.4			94,087%	-19,09%
2.6	Meningkatnya Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perizinan	Poin	84,00	91,25	108,63%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	80.326.712,00	74.665.072,00	92,952%	15,68%
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kependudukan	Poin	85,00	91,50	107,65%	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	63.995.150,00	63.160.150,00	98,695%	8,95%
							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN	366.819.099,00	267.796.208,00	73,005%	-73,00%
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	486.933.783,00	448.097.596,00	92,024%	-92,02%
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	169.727.072,00	167.379.322,00	98,617%	-98,62%

							PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	131.363.704,00	129.185.959,00	98,342%	
							PROGRAM PENCATATAN SIPIL	61.999.000,00	53.979.000,00	87,064%	
							PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	502.041.886,00	461.456.956,00	91,916%	
							PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	10.240.000,00	10.240.000,00	100,000%	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	324.341.596,00	307.284.492,00	94,741%	-94,74%
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.6						**108,14%**	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.6			**92,736%**	**15,40%**
2.7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	Level	WTP	WTP	100%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	50.790.963.267,00	14.555.675.370,00	28,658%	
		Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah	Rasio	33,67	33,81	100,42%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.722.570.254,00	1.563.835.265,00	90,785%	
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN	3.334.298.255,00	2.553.164.213,00	76,573%	
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.7						**100,21%**	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.6			**65,34%**	**34,87%**
2.8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota	Nilai	85,00	71,80	84,47%	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	400.975.670,00	278.668.670,00	69,498%	
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN	65.907.740,00	61.539.710,00	93,373%	

Rata - Rata Capaian Sasaran 2.7						**84,47%**	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.8			**81,435%**	**3,03%**
2.9	Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD	Rasio Jumlah Perda yang Ditetapkan terhadap Raperda	Persen	80,00	82,35	102,93%	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.041.240.711,00	9.398.506.763,00	85,122%	
		Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran	Persen	100,00	55	55%	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN				
		Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan	Persen	78,33	100	127,66%					
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.9						**95,20%**	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.9			**85,122%**	10,07%
2.10	Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan terintegrasi dalam menunjang *Cirebon Smart City*	Perangkat Daerah yang mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Pemerintahan	Perangkat Daerah				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.630.380.924,00	3.398.158.484,00	93,603%	
		Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	Komunitas				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.306.642.945,00	2.035.769.633,00	88,257%	
		Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE (Poin)	Poin	3,2	3,55	110,9%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	278.947.607,00	196.038.248,00	70,278%	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	253.989.680,00	139.446.036,00	54,902%	
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.10						**110,90%**	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.10			**76,760%**	**34,14%**

2.11	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD	Persen	100,00	97,44	97,44%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	359.877.276,00	250.543.096,00	69,619%	27,82%
							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	483.606.726,00	458.093.576,00	94,724%	
		Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD	Persen	100,00	94,84	94,84%					94,84%
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.11						**96,14%**	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.11			**82,172%**	**13,97%**
2,1	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dijadikan Dasar Kebijakan Daerah	Persen	80,00	92,11	115,14%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	893.851.310,00	797.307.169,00	89,199%	25,94%
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.12						**115,14%**	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.1.11			**89,199%**	**25,94%**
MISI KE-3											0,00%
3.	Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,82	50,04	**88,07%**					88,07%
											0,00%
						88,07%					
	Sasaran :										0,00%
		Persentase peningkatan *level of service* ruas jalan (persen)	Persen	3,00	3,00	100%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4.309.510.463,00	3.775.184.046,00	87,601%	
		Persentase peningkatan *level of service* ruas jalan (persen)	Persen	3,00	3,00	100%					
Rata - Rata Capaian Sasaran 3.1.						**100%**	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 3.1.			**87,601%**	**12,40%**
3.2		Rasio Kendaraan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penduduk	Persen				Program (kerangka Pendanaan yang mendukung sasaran ini adalah Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dan telah				

	Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat	*Indikator Proksi :* Tingkat Penggunaan Angkutan Umum	Persen				Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dan telah disebutkan di sasaran 3.1. Berdasarkan RPJMD Perubahan 2018-2023, pada tahun 2022 indikator dan target pada sasaran ini dihapus (dilakukan simplifikasi struktur sasaran dengan Sasaran 3.1 Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan			73,462%	
Rata - Rata Capaian Sasaran 3.2						**100%**	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 3.2			73,462%	26,54%
3..3	Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase.	Persentase drainase kondisi baik.	Persen	80,00	89,81	115,88%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	9.151.054.877,00	8.645.501.304,00	94,475%	21,40%
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.223.310.688,00	5.921.794.954,00	72,012%	
Rata - Rata Capaian Sasaran 3.2						**115,88%**	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 3.1.2			**83,244%**	**32,64%**
3..4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	14.354.328.221,00	13.988.231.815,00	97,450%	
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	615.512.347,00	602.091.000,00	97,819%	
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	7,72	5,73	75,52%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.675.039.914,00	1.441.639.737,00	86,066%	

							PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA	45.423.850,00	45.309.945,00	99,749%	
							PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	18.074.531.783,00	17.111.527.602,00	94,672%	
							PROGRAM PENATAAN	15.491.710.334,00	4.953.743.000,00	31,977%	
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	23.507.517.900,00	19.812.526.400,00	84,282%	
							PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	80.999.415,00	-	0,000%	
	a						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	737.066.316,00	701.562.568,00	95,183%	
							PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	187.591.940,00	88.527.240,000	47,191%	
							PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	938.054.290,00	917.092.684,00	97,765%	
							PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	992.105.066,00	936.533.000,00	94,399%	
							PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	119.567.200,00	117.347.000,00	98,143%	
							PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	150.940.907,00	141.099.990,00	93,480%	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN	67.796.350,00	67.576.122,00	99,675%	

							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN	13.926.000,00	13.926.000,00	100,000%	
							PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	65.521.150,00	55.027.471,00	83,984%	
							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	5.238.175,00	5.237.149,00	99,980%	
							PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN	81.172.400,00	2.100.000,00	2,587%	
							PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI(KEHATI)	274.854.541,00	261.021.027,00	94,967%	
							PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	106.896.445,00	104.954.125,00	98,183%	
Rata - Rata Capaian Sasaran 3.4						**75,52%**	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 3.4			**80,836%**	**-5,32%**
Misi 4.	**Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang** Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Persen	83,00	78,19	**98,00%**					
	Sasaran :					98,00%					

4.1	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	Jumlah Daerah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Lokasi/titik)	lokasi	15	25	100%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	4.180.284.125,00	3.187.833.241,00	76,259%	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	877.854.867,00	829.003.484,00		
		Indeks keamanan dan ketertiban umum masyarakat kecamatan (Nilai indeks keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan)	:								
		· Kecamatan Kejaksan	Poin	86,50	82,5	95,38%					
		· Kecamatan Lemahwungkuk	Poin	71,00	80,52	111,41%					
		· Kecamatan Harjamukti	Poin	84,50	82,50	98,21%					
		· Kecamatan Pekalipan	Poin	82,50	84,68	99,62%					
		· Kecamatan Kesamibi	Poin	85,00	85,00	92,00%					
Rata - Rata Capaian Sasaran 4.1						**99,44%**	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 4.1			76,259%	23,18%
4.2	Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional	Konflik Kasus Kebangsaan dan	kasus	0	0	100%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	650.010.804,00	503.210.200,00	77,416%	

							PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	13.952.297.386,00	13.926.501.932,00	99,815%	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	988.446.300,00	916.708.000,00	92,742%	
							PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.049.673.942,00	2.879.317.456,00	94,414%	
Rata - Rata Capaian Sasaran 4.2						**100%**	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 4.1.2			**91,097%**	**8,90%**
4.3	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	• Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK Kelurahan yang memiliki forum Siaga Bencana	nilai	85,00	85,71	100,8%	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	6.332.527.885,00	6.290.530.500,00	99,337%	

							PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.242.481.268,00	1.208.924.808,00	97,299%		
		Jumlah Kelurahan yang Memiliki Forum Siaga Bencana	Jumlah									
		Persentase Forum Siaga Bencana Kelurahan Aktif (Persen)	Persen	27,00	45,00	166,7%						166,70%
Rata - Rata Capaian Sasaran 4.3						**133,77%**	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 4.1.3			**98,318%**		**35,45%**